

**BUKU I**



# **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

## **PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

**RAKYAT  
LAMPUNG**

*Berjaya*

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**TAHUN 2020**





## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 41 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2021 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2021 memuat arahan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Lampung serta menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2021;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2021 dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.



2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.



18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
19. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
21. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
23. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

## **BAB II**

### **RENCANA KERJA DAN SISTEMATIKA RKPD**

#### **Pasal 2**

- (1) RKPD Provinsi Lampung Tahun 2021 terdiri dari:
  - a. Buku I : tentang gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi makro, arah kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan, dan pendanaan; dan
  - b. Buku II : tentang program dan rencana kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pembangunan tahunan daerah yang berisikan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Lampung untuk tahun 2021 periode tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

#### **Pasal 3**

- (1) RKPD Provinsi Lampung Tahun 2021 menjadi landasan penyusunan KUA APBD Provinsi Lampung dan PPAS Tahun 2021;
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
  - b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2021; dan
  - c. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Rancangan APBD Provinsi Lampung tahun 2021.



#### Pasal 4

Dalam melakukan pembahasan RKA-PD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Kepala Perangkat Daerah berpedoman kepada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2021.

#### Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Gubernur Lampung melalui Bappeda Provinsi Lampung 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan tahun berjalan; dan
- c. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah pada anggaran tahun berikutnya.


#### Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 14 Juli 2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 14 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

  
**H. FAHRIZAL DARMINTO, MA.**  
Pembina Utama  
NIP. 19641021 199003 1 008



## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1	Latar Belakang.....	I-1
1.2	Dasar Hukum .....	I-3
1.3	Hubungan Antar Dokumen .....	I-5
1.4	Maksud dan Tujuan .....	I-6
1.5	Sistematika Penulisan .....	I-7
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....</b>	<b>II-1</b>
2.1	Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1	Kondisi Geografis Daerah.....	II-1
2.1.2	Kondisi Topografi.....	II-3
2.1.3	Kondisi Geologi.....	II-4
2.1.4	Kondisi Hidrologi.....	II-6
2.1.5	Kondisi Klimatologi.....	II-9
2.1.6	Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-10
2.1.7	Wilayah Rawan Bencana.....	II-18
2.1.8	Kondisi Demografi.....	II-26
2.2	Capaian Indikator Kinerja Daerah.....	II-28
2.2.1	Aspek Kesejahteraan Rakyat.....	II-28
2.2.2	Aspek Daya Saing.....	II-52
2.2.3	Aspek Pelayanan Umum.....	II-55
2.3	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2017 dan Realisasi RPJMD.....	II-99
2.3.1	Kinerja RKPD Provinsi Lampung Tahun 2019.....	II-99
2.3.2	Pelaksanaan RPJMD Sampai Dengan Tahun 2019.....	II-187
2.4	Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah.....	II-190
2.4.1	Permasalahan Pembangunan.....	II-190
2.4.2	Isu Strategis.....	II-197
<b>BAB III</b>	<b>KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....</b>	<b>III-1</b>
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III-1
3.1.1	Kinerja Makro Ekonomi Daerah.....	III-3
3.1.2	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah.....	III-11
3.1.3	Strategi dan Sasaran Pembangunan Ekonomi.....	III-19
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-23
3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	III-24
3.2.2	Rasio Pendapatan Daerah Terhadap PDRB.....	III-27
3.2.3	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap PDRB.....	III-27
3.2.4	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021.....	III-28
3.3	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-30
3.4	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-31
3.5	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-38
<b>BAB IV</b>	<b>SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-1
4.1.1	Tinjauan Kebijakan Pembangunan Dalam RKP 2021.....	IV-1
4.1.2	Tinjauan Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019 -2024.....	IV-4



4.2	Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2021.....	IV-19
4.3	Pembangunan Kewilayahan Provinsi Lampung.....	IV-38
<b>BAB V</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA.....</b>	<b>V-1</b>
5.1	Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota.....	V-1
5.2	Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten/Kota.....	V-8
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH.....</b>	<b>VI-1</b>
6.1	Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan.....	VI-3
6.2	Sinkronisasi Program Prioritas menurut Prioritas Pembangunan Daerah.....	VI-22
6.3	Program Prioritas Berdasarkan Prioritas Daerah dan Nasional.....	VI-30
6.4	Program Prioritas berdasarkan SPM.....	VI-57
6.5	Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021.....	VI-59
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....</b>	<b>VII-1</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>VIII-1</b>



## DAFTAR TABEL, GRAFIK DAN GAMBAR

NO	TABEL	Hal	GRAFIK	Hal	GAMBAR	Hal
1	Tabel II-1 Luas Kab/Kota se-Provinsi Lampung	II-2	Grafik II-1 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Lampung (Persen) tahun 2015-2019	II-26	Gambar I-1 Skema Hubungan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah	I-6
2	Tabel II-2 Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung	II-6	Grafik II-2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Sumatera dan Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019	II-28	Gambar II-1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Lampung	II-1
3	Tabel II-3 Luas Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung	II-7	Grafik II-3 Perkembangan Inflasi Gabungan Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2015 - 2019 (Persen)	II-29	Gambar II-2 Peta Geologi Provinsi Lampung	II-6
4	Tabel II-4 Curah Hujan Rata-Rata Tahun (mm)	II-9	Grafik II-4 Perbandingan PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2015 - 2019 (Rp. Juta)	II-30	Gambar II-3 Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung	II-7
5	Tabel II-5 Sebaran Komoditas Perkebunan	II-13	Grafik II-5 Indeks Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2015 - 2019	II-32	Gambar II-4 Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung	II-8
6	Tabel II-6 Pengelolaan Kawasan Pariwisata	II-17	Grafik II-6 Indeks Williamson Provinsi Lampung	II-34	Gambar II-5 Peta Hidrologi Provinsi Lampung	II-9



<b>NO</b>	<b>TABEL</b>	<b>Hal</b>	<b>GRAFIK</b>	<b>Hal</b>	<b>GAMBAR</b>	<b>Hal</b>
7	Tabel II-7 Potensi Luas Bahaya Banjir di Provinsi Lampung	II-20	Grafik II-7 Persentase Penduduk Miskin Indonesia dan Lampung Tahun 2015 – 2019	II-34	Gambar II-6 Peta Klimatologi Provinsi Lampung	II-10
8	Tabel II-8 Potensi Luas Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Lampung	II-21	Grafik II-8 Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Indonesia dan Lampung tahun 2015 – 2019 (persen)	II-36	Gambar II-7 Peta Kawasan Pertanian dan Perikanan	II-12
9	Tabel II-9 Potensi Luas Bahaya Gempabumi di Provinsi Lampung	II-21	Grafik II-9 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional dan Lampung Tahun 2015-2019 (Persen)	II-37	Gambar II-8 Peta Kawasan Perkebunan	II-13
10	Tabel II-10 Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung	II-22	Grafik II-10 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2015 – 2019	II-38	Gambar II-9 Peta Kawasan Pertambangan	II-15
11	Tabel II-11 Potensi Luas Bahaya Kekeringan di Provinsi Lampung	II-23	Grafik II-11 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2015-2019	II-39	Gambar II-10 Peta Rawan Bencana Provinsi Lampung	II-19
12	Tabel II-12 Luas Bahaya Epidemii dan Wabah Penyakit di Provinsi Lampung	II-23	Grafik II-12 Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2015-2018	II-41	Gambar III - 4 Grafik Perkembangan Pasien Kasus COVID-19 di Provinsi Lampung	III-15



<b>NO</b>	<b>TABEL</b>	<b>Hal</b>	<b>GRAFIK</b>	<b>Hal</b>	<b>GAMBAR</b>	<b>Hal</b>
13	Tabel II-13 Potensi Luas Bahaya Letusan Gunung Api Krakatau di Provinsi Lampung	II-24	Grafik II-13 Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Kerja, Agustus 2019	II-43	Gambar IV-1 Sasaran dan Target Prioritas Pembangunan Tahun 2021	IV-21
14	Tabel II-14 Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Lampung	II-24	Grafik II-14 Persentase Jumlah Penduduk Bekerja menurut Kegiatan Formal-Informal Tahun 2017-2019	II-44	Gambar IV - 2 Kawasan Strategis Provinsi Lampung	IV-52
15	Tabel II-15 Potensi Luas Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Lampung	II-25	Grafik II-15 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2015 - 2019 (Persen)	II-45	Gambar IV -3 Kawasan Metropolitan Bandar Lampung	IV-54
16	Tabel II-16 Potensi Luas Bahaya Tsunami di Provinsi Lampung	II-25	Grafik II-16 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung 2019	II-47	Gambar IV - 4 Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	IV-56
17	Tabel II-17 Jumlah Penduduk Menurut Kab/Kota se-Provinsi Lampung tahun 2015-2019	II-27	Grafik II-17 Rasio PAD terhadap APBD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019	II-48	Gambar V-1 Hubungan Antardokumen Perencanaan	V-2



<b>NO</b>	<b>TABEL</b>	<b>Hal</b>	<b>GRAFIK</b>	<b>Hal</b>	<b>GAMBAR</b>	<b>Hal</b>
18	Tabel II-18 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kab/Kota se-Provinsi Lampung tahun 2015-2019 (persen)	II-29	Grafik II-18 Angka Kriminalitas Kab/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2016-2019	II-50		
19	Tabel II-19 PDRB Per-Kapita Kab/Kota se-Provinsi Lampung tahun 2015-2019 (juta rupiah)	II-31	<i>Grafik II-19 Tren</i> Nilai Tukar Petani antara Provinsi Lampung dan Indonesia	II-53		
20	Tabel II-20 Kontribusi PDRB Kab/Kota se-Provinsi Lampung Terhadap Total PDRB tahun 2015-2019 (persen)	II-33	Perbandingan Angka Melek Huruf antara Lampung dan Nasional Tahun 2015-2019	II-56		
21	Tabel II-21 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung tahun 2015-2019 (ribu jiwa)	II-35	Grafik II-21 Angka Partisipasi Sekolah berdasarkan usia Lampung dan Nasional Tahun 2015-2019	II-57		
22	Tabel II-22 Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota tahun 2015-2019 (persen)	II-35	Grafik II-22 Angka Partisipasi Kasar SD, SMP, SMA Nasional dan Lampung	II-58		
23	Tabel II-23 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Menurut Kab/Kota tahun 2015-2019	II-38	Grafik II-23 Perbandingan Angka Partisipasi Murni antara Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2015 - 2019	II-60		

<b>NO</b>	<b>TABEL</b>	<b>Hal</b>	<b>GRAFIK</b>	<b>Hal</b>	<b>GAMBAR</b>	<b>Hal</b>
24	Tabel II-24 Persentase IPG Menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung tahun 2013-2018	II-40	Grafik II-24 Perbandingan Angka Putus Sekolah (APS) Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2016-2018	II-61		
25	Tabel II-25 Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung tahun 2013-2018	II-41	Grafik II-25 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Lampung dan Nasional	II-62		
26	Tabel II-26 Kondisi Makro Ketenagakerjaan Provinsi Lampung tahun 2015-2019	II-42	Grafik II-26 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Lampung dan Indonesia, Tahun 2015 - 2019	II-64		
27	Tabel II-27 Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia dan Lampung tahun 2015-2019 (persen)	II-45	Grafik II-27 Rasio Sarana dan Prasarana SMA 2018-2019	II-65		
28	Tabel II-28 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Wilayah Kab/Kota Prov. Lampung tahun 2015-2019	II-46	Grafik II-28 Rasio Sarana dan Prasarana SMK Negeri dan SMK Swasta Provinsi Lampung 2018-2019	II-66		
29	Tabel II-29 Rasio PAD Terhadap APBD Provinsi Lampung tahun 2015-2019	II-47	Grafik II-29 Sekolah Luar Biasa Tahun 2015-2019	II-67		
30	Tabel II-30 Angka Kriminalitas di Kab/Kota se-Provinsi Lampung tahun 2016-2019	II-49	Grafik II-30 Jumlah Guru dan Murid SMA/SMK 2015-2019	II-68		



<b>NO</b>	<b>TABEL</b>	<b>Hal</b>	<b>GRAFIK</b>	<b>Hal</b>	<b>GAMBAR</b>	<b>Hal</b>
31	Tabel II-31 Skor PPH Prov. Lampung tahun 2010	II-50	Grafik II-31 Prevalensi Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting) Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2013 dan 2018	II-69		
32	Tabel II-32 Ketersediaan Bahan Pangan Provinsi Lampung Berdasarkan Atap tahun 2016-2019	II-51	Grafik II-32 Prevalensi Status Gizi Balita (Tb/U) Stunting Menurut Kabupaten/Kota di Lampung Tahun 2013 & 2018 (RISKESDAS)	II-70		
33	Tabel II-33 Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung tahun 2019	II-52	Grafik II-33 Tren Angka Kematian Bayi di Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2000 - 2012	II-71		
34	Tabel II-34 Nilai Tukar Petani se Sumatera tahun 2015 - 2019	II-53	Grafik II-34 Kasus kematian Bayi Per-Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2017	II-71		
35	Tabel II-35 Tabel Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Perbankan	II-54	Grafik II-35 Kasus Kematian Balita per Kabupaten Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017	II-72		
36	Tabel II-36 Persentase Penduduk Berumur 15	II-55	Grafik II-36 Penyebab Kematian Balita Provinsi Lampung tahun 2017	II-73		
37	Tabel II-37 Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Usia Provinsi Lampung Tahun 2015-2019	II-56	Grafik II-37 Kasus Kematian Ibu Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019	II-74		

<b>NO</b>	<b>TABEL</b>	<b>Hal</b>	<b>GRAFIK</b>	<b>Hal</b>	<b>GAMBAR</b>	<b>Hal</b>
38	Tabel II-38 APK menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Lampung 2015-2019	II-57	Grafik II-38 Kasus Kematian Ibu di Kab/Kota Provinsi Lampung Tahun 2018 - 2019	II-74		
39	Tabel II-39 Angka Partisipasi Murni Lampung menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015-2019	II-59	Grafik II-39 Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung dan Indonesia	II-75		
40	Tabel II-40 Angka Putus Sekolah (APS) Provinsi Lampung Tahun 2016-2018	II-60	Grafik II-40 Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung Tahun 2019	II-75		
41	Tabel II-41 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2016-2019	II-62	Grafik II-41 Rasio Puskesmas per Kecamatan di Provinsi Lampung Tahun 2016 - 2019	II-77		
42	Tabel II-42 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2015-2019	II-64	Grafik II-42 Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per 1.000 penduduk di Lampung dan Indonesia Tahun 2015 - 2019	II-79		
43	Tabel II-43 Jumlah Sekolah Luar Biasa Tahun 2015-2019	II-66	Grafik II-43 Tren Ratio Dokter Per satuan Penduduk Di Provinsi Lampung Tahun 2015-2019	II-80		
44	Tabel II-44 Jumlah Guru dan Murid SMA/SMK Tahun 2015-2019	II-67	Grafik II-44 Tren Ratio Dokter spesialis Per satuan Penduduk Di Provinsi Lampung Tahun 2015-2019	II-80		



<b>NO</b>	<b>TABEL</b>	<b>Hal</b>	<b>GRAFIK</b>	<b>Hal</b>	<b>GAMBAR</b>	<b>Hal</b>
45	Tabel II-45 Perbandingan Jumlah guru dan Siswa 2015 – 2019	II-68	Grafik II-45 <i>Trend</i> Ratio Bidan Per satuan Penduduk Di Provinsi Lampung Tahun 2014-2017	II-81		
46	Tabel II-46 Angka Kematian Balita di Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2002 – 2012	II-72	Grafik II-46 Produksi Padi dan Persentasenya terhadap Indonesia, 2013 – 2017	II-83		
47	Tabel II-47 Jumlah Puskesmas Provinsi Lampung Tahun 2014-2018	II-76	Grafik II-47 Produksi Kedelai dan Persentasenya terhadap Indonesia, 2011 – 2016	II-83		
48	Tabel II-48 Data Sarana Pelayanan Rumah Sakit Di Provinsi Lampung Tahun 2015-2019	II-78	Grafik II-48 Produksi Jagung dan Persentasenya terhadap Indonesia Tahun 2011 – 2016	II-83		
49	Tabel II-49 Analisis Capaian Kinerja Sasaran, 2017	II-82	Grafik II-49 Jumlah Nilai Ekspor Provinsi Lampung, 2015-2019	II-91		
50	Tabel II-50 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Cakupan Pelayanan dan Kualitas Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung	II-85	Grafik II-50 Nilai Impor Provinsi Lampung, 2015 - 2019 (juta US\$)	II-93		

<b>NO</b>	<b>TABEL</b>	<b>Hal</b>	<b>GRAFIK</b>	<b>Hal</b>	<b>GAMBAR</b>	<b>Hal</b>
51	Tabel II-51 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	II-88	Grafik II-51 Perbandingan Kondisi Jalan Mantap dan Tidak Mantap 2015-2019	II-97		
52	Tabel II-52 Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara, 2012 – 2016	II-89	Grafik II-52 Perbandingan Kondisi Jalan menurut Tingkat Kerusakan, Tahun 2014-2018	II-97		
53	Tabel II-53 Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap, 2015 – 2016	II-89	Grafik II-53 Kondisi Jalan Nasional di Provinsi Lampung, 2016	II-98		
54	Tabel II-54 Perbandingan Ekspor Berdasarkan Komoditas Utama	II-91	Grafik II-54 Jumlah Program Berdasarkan Capaian keuangan dan Kinerja Tahun 2019	II-179		
55	Tabel II-55 Ekspor Berdasarkan Komoditas Utama Provinsi Lampung, 2017	II-92	Grafik II-55 Persentase Program Berdasarkan Capaian Keuangan, Tahun 2019	II-180		
56	Tabel II-56 Ekspor Provinsi Lampung berdasarkan Negara Tujuan, 2017	II-92	Grafik II-56 Prosentase Kegiatan Berdasarkan Capaian Rp. Tahun 2019	II-181		
57	Tabel II-57 Neraca Perdagangan Non-migas Provinsi Lampung Januari – Desember 2017	II-93	Grafik II-57 Persentase Program Berdasarkan Capaian Kinerja Tahun 2019	II-182		



<b>NO</b>	<b>TABEL</b>	<b>Hal</b>	<b>GRAFIK</b>	<b>Hal</b>	<b>GAMBAR</b>	<b>Hal</b>
58	Tabel II-58 Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2019	II-96	Grafik II-58 Persentase Kegiatan Berdasarkan Capaian Kinerja Tahun 2019	II-182		
59	Tabel II-59 Kondisi Jalan Ruas Provinsi, 2015 – 2019	II-96	Grafik III-1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019	III-7		
60	Tabel II-60 Kondisi Jalan Nasional di Provinsi Lampung, 2016	II-98	Grafik III-2 PDRB per Kapita Indonesia dan Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019 (Atas Dasar Harga Berlaku, Juta Rupiah)	III-9		
61	Tabel II-61 Hasil Pelaksanaan Program pada Renja PD/RKPD Provinsi Lampung Tahun 2019	II-99	Grafik III-3 Perkembangan Inflasi Gabungan di Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2015 – 2019 (Persen)	III-11		
62	Tabel II-62 Tingkat Ketercapaian Keuangan (Rp) dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019	II-179	Grafik III - 5 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015 – 2019 (Juta Rupiah)	III-26		
63	Tabel II-63 Realisasi Keuangan dan Kinerja APBD TA. 2019 Menurut OPD	II-184	Grafik III - 6 Realisasi dan Target PAD Tahun 2015 – 2019 (Juta Rupiah)	III-26		
64	Tabel II-64 Tingkat Ketercapaian Rupiah dan Kinerja OPD Tahun 2019	II-186	Grafik III - 7 Rasio Pendapatan terhadap PDRB Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 (persentase)	III-27		

<b>NO</b>	<b>TABEL</b>	<b>Hal</b>	<b>GRAFIK</b>	<b>Hal</b>	<b>GAMBAR</b>	<b>Hal</b>
65	Tabel II-65 Capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Lampung tahun 2018-2019	II-188	Grafik III - 8 Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap PDRB Provinsi Lampung Tahun 2015 -2019	III-27		
66	Tabel III-1 PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2015 - 2019 (Miliar Rupiah)	III-4	Grafik III - 12 Komposisi Belanja Tak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) APBD Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2021 (Persen)	III-37		
67	Tabel III-3 Distribusi PDRB Provinsi Lampung Berdasarkan Pengeluaran tahun 2015 - 2019	III-5				
68	Tabel III-4 Rasio PMTB terhadap PDRB dan ICOR Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019	III-6				
69	Tabel III-5 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung menurut Lapangan Usaha (persen, ADHK 2010) Tahun 2015 - 2019	III-7				
70	Tabel III-6 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran (Persen, ADHK 2010) Tahun 2015 -2019	III-9				



<b>NO</b>	<b>TABEL</b>	<b>Hal</b>	<b>GRAFIK</b>	<b>Hal</b>	<b>GAMBAR</b>	<b>Hal</b>
71	Tabel III-7 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2018 (Juta Rupiah)	III-10				
72	Tabel III - 8 Sasaran Kinerja Ekonomi dan Sosial Provinsi Lampung Tahun 2021	III-23				
73	Tabel III - 9 Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2015 – 2019	III-25				
74	Tabel III - 10 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 – 2021 (Juta Rupiah)	III-29				
75	Tabel III - 11 Realisasi Tahun 2015 – 2019, Target 2020 dan Proyeksi Tahun 2021 Belanja Daerah Provinsi Lampung (Juta Rupiah)	III-36				
76	Tabel III - 13 Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019, Target Tahun 2020 serta Proyeksi Tahun 2021	III-40				
77	Tabel IV-1 Sasaran Makro RKP 2021	IV-4				
78	Tabel IV-2 Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2021	IV-20				
79	Tabel IV – 3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 terhadap RKP 2021	IV-24				

<b>NO</b>	<b>TABEL</b>	<b>Hal</b>	<b>GRAFIK</b>	<b>Hal</b>	<b>GAMBAR</b>	<b>Hal</b>
80	Tabel IV-4 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 terhadap Misi RPJMD tahun 2019-2024	IV-27				
81	Tabel IV – 5 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Pendidikan	IV-29				
82	Tabel IV – 6 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Kesehatan	IV-30				
83	Tabel IV – 7 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	IV-31				
84	Tabel IV – 8 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	IV-33				
85	Tabel IV – 9 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Sosial	IV-36				
86	Tabel IV – 10 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	IV-37				
87	Tabel V-1 Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2021	V-3				
88	Tabel V-2 Target dan Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung Tahun 2021	V-9				

<b>NO</b>	<b>TABEL</b>	<b>Hal</b>	<b>GRAFIK</b>	<b>Hal</b>	<b>GAMBAR</b>	<b>Hal</b>
89	Tabel VI-1 Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	VI-4				
90	Tabel VI-2 Program Prioritas Berdasarkan Prioritas Daerah	VI-22				
91	Tabel VI-3 Program Prioritas berdasarkan Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional	VI-30				
92	Tabel VI-4 Program dan Kegiatan yang Mendukung SPM	VI-57				
93	Tabel VI-5 Program dan Kegiatan berdasarkan OPD Tahun 2021	VI-59				
94	Tabel VII- 1. Indikator Kinerja Utama (IKU)	VII-1				



## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2021 mencakup pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bawah-atas (*bottom-up*), dan atas-bawah (*top-down*); dengan deskripsi sebagai berikut:

- Proses perencanaan dengan *pendekatan politik* dilakukan dengan mempertimbangkan masukan yang tertuang pada Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Lampung dalam penyusunan RKPD Tahun 2021.
- Untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pembangunan sejak tahap awal perencanaan, baik dalam perspektif *pendekatan perencanaan secara teknokratik maupun partisipatif*, substansi RKPD yang disusun oleh Pemerintah Daerah diperkaya pula dengan informasi berupa saran/masukan yang dihimpun dari kelompok akademisi, asosiasi profesi, pelaku dunia usaha, kalangan pers, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya, yang dilakukan melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2021. Dengan demikian, produk perencanaan yang akan dihasilkan oleh pemerintah daerah diharapkan telah pula memenuhi prinsip-prinsip pelaksanaan *good governance*.
- Penyusunan RKPD merupakan kesatuan rangkaian dari *proses pendekatan perencanaan pembangunan secara bawah-atas (bottom-up)*, dimulai dari: Musrenbang tingkat desa/kelurahan dan Kecamatan, Musrenbang kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, Musrenbang Provinsi Lampung hingga Musrenbang Nasional; bertujuan untuk menyerap aspirasi dan penyampaian usulan kegiatan pembangunan pada masing-masing lingkup

pemerintahan yang dilaksanakan secara berjenjang.

- Dalam hal proses *pendekatan perencanaan secara atas-bawah (top-down)*, penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2021 juga dipaduserasikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dengan memperhatikan peraturan maupun kebijakan nasional lainnya.

Penyusunan RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana:

1. Secara substansial, RKPD memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan prakiraan maju, berdasarkan urusan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam periode 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, RKPD memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD; dan
4. Secara faktual, RKPD menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, tahun 2021 merupakan tahun ke-2 pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 dan RPJMN 2020-2024 merupakan momentum untuk memacu pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional dalam mengembangkan sektor-sektor produktif yang dapat memperkuat kemandirian masyarakat, yang pada

akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mempersempit ketimpangan antar kelompok dan antar wilayah.

Disatu sisi, untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan, RKPD Provinsi Lampung Tahun 2021 disusun dengan mencermati capaian pembangunan pada tahun sebelumnya serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun perencanaan, seperti yang saat ini kita hadapi adanya wabah pandemic covid 19 yang berdampak pada seluruh tatanan kehidupan social dan ekonomi masyarakat. Disisi yang lain, dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2021 juga diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian target pembangunan nasional.

Perpaduan dari berbagai tinjauan tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2021, yang meliputi bidang pembangunan : 1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia; 2) Pembangunan Infrastruktur; 3) Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan; 4) Reformasi Birokrasi; 5) Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya; 6) Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2021.

## **1.2 Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;



5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;

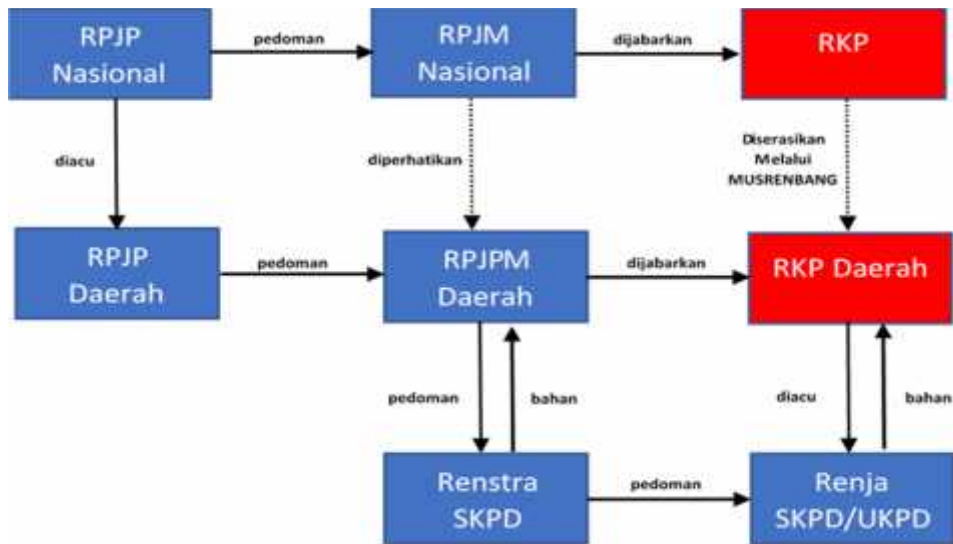
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019.
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung.

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan pelaksanaan layanan dasar kepada masyarakat dan rencana pemanfaatan ruang/wilayah dengan rencana pembangunan daerah.

Gambar I-1

Skema Hubungan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah



#### 1.4 Maksud dan Tujuan

Secara substantif, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2021 memuat deskripsi tentang gambaran umum daerah, capaian sasaran pembangunan sebelumnya, arah kebijakan pembangunan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, berdasarkan urusan dan kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan pemerintah daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang. Seluruh uraian dalam RKPD tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kesinambungan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung yang disinergikan dengan RPJMN Tahun 2019-2024 dan RKP Tahun 2021.

Adapun tujuan penyusunan RKPD adalah:

- 1) Mengoptimalkan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.



- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.
- 3) Memberikan arah dan pedoman kepada semua SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
- 4) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.
- 5) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi tahapan dan mekanisme antara perencanaan dan penganggaran, dimana RKPD merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 yang diusulkan oleh Gubernur Lampung untuk disepakati bersama dengan DPRD Provinsi Lampung sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun 2021.
- 6) Menyediakan satu bahan tolok ukur untuk melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2021

#### **1.2. Dasar Hukum**

Menjelaskan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2021

- 1.3. Hubungan Antardokumen  
Menjelaskan tentang keterkaitan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan dokumen perencanaan lainnya
- 1.4. Maksud dan Tujuan  
Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2021
- 1.5. Sistematika  
Menjelaskan sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2021

## **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

- 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah  
Menjelaskan tentang capaian pembangunan Provinsi Lampung berdasarkan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan RKPD Tahun lalu dan RPJMD 2015 - 2019  
Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung tahun 2019 dan pencapaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2019.
- 2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah  
Menjelaskan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta isu strategis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

## **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah  
Menjelaskan tinjauan pembangunan ekonomi nasional dan Provinsi Lampung hingga tahun 2019, serta arah kebijakan, tantangan dan proyeksi pembangunan ekonomi tahun 2020 dan tahun 2021

- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah  
Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan pembangunan tahun 2021

#### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah  
Menjelaskan tinjauan kebijakan Pembangunan dalam RKP 2021 serta tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung tahun 2021.
- 4.2 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2021  
Menjelaskan Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan berdasarkan misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
- 4.3 Pembangunan Kewilayahan Provinsi Lampung  
Menjelaskan rencana pembangunan tahun 2021 menggunakan pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan tersebut dilakukan guna mengurangi kesenjangan antar wilayah, dengan penanganan secara lintas sektoral pada setiap wilayahnya.

#### **BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA**

- 5.1 Pokok- Pokok Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota  
Menjelaskan pokok-pokok arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota tahun 2021
- 5.2 Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten/Kota  
Menjelaskan target capaian sasaran makro kabupaten/kota tahun 2021



## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD Tahun 2021, indikator dan target program dan kegiatan, lokasi, pagu usulan dan prakiraan maju pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah serta sinkronisasi dan dukungan Program Prioritas Daerah dan Nasional.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

Menjelaskan sasaran dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah dan perangkat daerah Provinsi Lampung tahun 2021.

## **BAB VIII PENUTUP**

Berisi rangkuman singkat dan penegasan tentang penyusunan RKPD tahun 2021.

## BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

#### 2.1.1 Kondisi Geografis Daerah

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan  $3^{\circ}45'$  sampai  $6^{\circ}45'$  Lintang Selatan dan  $103^{\circ}40'$  sampai  $105^{\circ}50'$  Bujur Timur. Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas  $35.288,35 \text{ km}^2$  termasuk 188 pulau disekitarnya. Provinsi Lampung juga memiliki wilayah lautan sepanjang 12 mil laut dari garis pantai kearah laut lepas dengan luas perairan diperkirakan lebih kurang  $24.820 \text{ km}^2$  dan panjang garis pantai lebih kurang 1.105 km. Garis pantai perairan Lampung secara garis besar terdiri atas empat wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semaka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km). Batas administratif wilayah Provinsi Lampung adalah:

- Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di sebelah utara
- Selat Sunda di sebelah selatan
- Laut Jawa di sebelah timur
- Samudera Indonesia di sebelah barat

Gambar II-1  
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2019

Secara administratif, Provinsi Lampung dibagi ke dalam 15 (lima belas) Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Kabupaten Lampung Barat dengan ibukota Liwa.
2. KabupatenTanggamus dengan ibukota Kota Agung.
3. Kabupaten Lampung Selatan dengan ibukota Kalianda.
4. Kabupaten Lampung Timur dengan ibukota Sukadana.
5. Kabupaten Lampung Utara dengan ibu kota Kotabumi.
6. Kabupaten Lampung Tengah dengan ibu kota Gunung Sugih.
7. Kabupaten Tulang Bawang dengan ibukota Menggala.
8. Kabupaten Way Kanan dengan ibukota Blambangan Umpu.
9. Kabupaten Pesawaran dengan ibukota Gedong Tataan.
10. Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu.
11. Kabupaten Mesuji dengan ibukota Wiralaga Mulya.
12. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibukota Panaragan.
13. Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui.
14. Kota Bandar Lampung.
15. Kota Metro.

Sementara itu, secara luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah Kabupaten terluas di Provinsi Lampung dan juga memiliki jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa terbanyak. Untuk wilayah terkecil dimiliki oleh Kota Metro seiring kecilnya luas wilayah, Kota Metro pun memiliki jumlah Kecamatan dan Kelurahan tersedikit di Provinsi Lampung.

Tabel II-1  
Luas Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa /Kelurahan	Luas (Ha)
1	Lampung Barat	15	136	212.603,25
2	Tanggamus	20	302	290.270,82
3	Lampung Selatan	17	260	221.952,68
4	Lampung Timur	24	264	386.527,17
5	Lampung Tengah	28	314	454.400,21
6	Lampung Utara	23	247	252.954,22
7	Way Kanan	14	227	366.070,58
8	Tulang Bawang	15	151	313.074,28
9	Pesawaran	11	144	127.911,40
10	Pringsewu	9	131	61.447,57
11	Mesuji	7	105	220.577,13

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa /Kelurahan	Luas (Ha)
12	Tulang Bawang Barat	9	96	124.759,03
13	Pesisir Barat	11	118	304.613,37
14	Kota Bandar Lampung	20	126	18.325,68
15	Kota Metro	5	22	7.315,38
<b>Provinsi Lampung</b>		<b>228</b>	<b>2.643</b>	<b>3.362.802,75</b>

Sumber: Luas wilayah diukur di atas Peta Rupa Bumi Indonesia (BIG) skala 1:25.000, tahun 2016

### 2.1.2 Kondisi Topografi

Secara topografi, wilayah Provinsi Lampung dibagi ke dalam 5 (lima) unit topografi, yaitu :

- a. Daerah topografis berbukit sampai bergunung.  
Meliputi lereng-lereng yang curam atau terjal dengan kemiringan berkisar 25%, dan ketinggian rata-rata 300 m di atas permukaan laut. Daerah ini meliputi Bukit Barisan dengan puncak tonjolan-tonjolannya berada pada Gunung Tanggamus, Gunung Pesawaran, dan Gunung Rajabasa.
- b. Daerah topografis berombak sampai bergelombang.  
Ciri-ciri khusus daerah ini adalah terdapatnya bukit - bukit sempit, kemiringannya antara 8% sampai 15% dan ketinggian antara 300 m sampai 500 m dari permukaan laut. Daerah ini membatasi daerah pegunungan dengan dataran alluvial, vegetasi yang terdapat di daerah ini adalah tanaman-tanaman perkebunan seperti: kopi, cengkeh, lada dan tanaman pertanian peladangan seperti : padi, jagung, dan sayur-sayuran.
- c. Daerah dataran alluvial  
Daerah ini sangat luas meliputi Lampung Tengah sampai mendekati pantai sebelah Timur, yang merupakan bagian hilir (*downstream*) dari sungai-sungai yang besar seperti Way Sekampung, Way Tulang Bawang, dan Way Mesuji. Ketinggian di daerah ini berkisar antara 25 m sampai 75 m, dengan kemiringan 0% sampai 3%. Pada bagian pantai sebelah Barat dataran alluvial menyempit dan memanjang menurut arah Bukit Barisan.



d. Daerah dataran rawa pasang surut

Di sepanjang pantai timur merupakan daerah rawa pasang surut dengan ketinggian 1/2 m sampai 1 m, pengendapan air menurut naiknya pasang.

e. Daerah River Basin

River basin atau daerah aliran sungai adalah hamparan wilayah yang dibatasi oleh pembatas topografi yang menerima dan mengumpulkan air hujan serta unsur hara. Provinsi Lampung memiliki 6 (enam) River Basin yang utama, yaitu River Basin Jepara, River Basin Tulang Bawang, River Basin Seputih, River Basin Sekampung, River Basin Semangka, dan River Basin Way Mesuji

Sebagian besar lahan di Provinsi Lampung merupakan kawasan hutan yaitu mencapai 1.004.735 Ha (28,47%) dari luas daratan Provinsi Lampung. Selain itu merupakan daerah perkebunan (20,92%); tegalan/ladang (20,50%); daerah pertanian, dan perumahan.

### **2.1.3 Kondisi Geologi**

Batuan yang tertua dan tersingkap di Wilayah Lampung adalah batuan malihan/metamorf yang terdiri dari sekis, genes, filit, kuarsit, dan pualam yang secara keseluruhan termasuk dalam kompleks Gunungkasih (Ptgm). Umur kompleks ini belum diketahui dengan pasti, namun diperkirakan Pra-Karbon. Batuan tua lainnya adalah sedimen laut dalam yang terdiri dari batu pasir dan batu lempung dengan sisipan rijang dan batu gamping dikenal dengan nama Formasi Menanga (Km).

Batuan gunung api berkomposisi andesitik (lava, breksi, tufa) yang terubah dan terkekarkan kuat dipetakan sebagai Formasi Tarahan (Tpot), diperkirakan setara dengan Formasi Kikim yang terdapat di daerah Bengkulu. Umur formasi ini diperkirakan Paleosen Tengah–Oligosen Awal. Litologi tuf dan breksi dikuasai oleh sisipan tufit, diendapkan di lingkungan benua, mungkin busur gunung api, magmatisma ada kaitannya dengan penujaman, secara regional dapat dikorelasikan dengan formasi kikim. Kondisi ini ditafsirkan sebagai sisa busur gunung apipaleogen yang tersingkap.

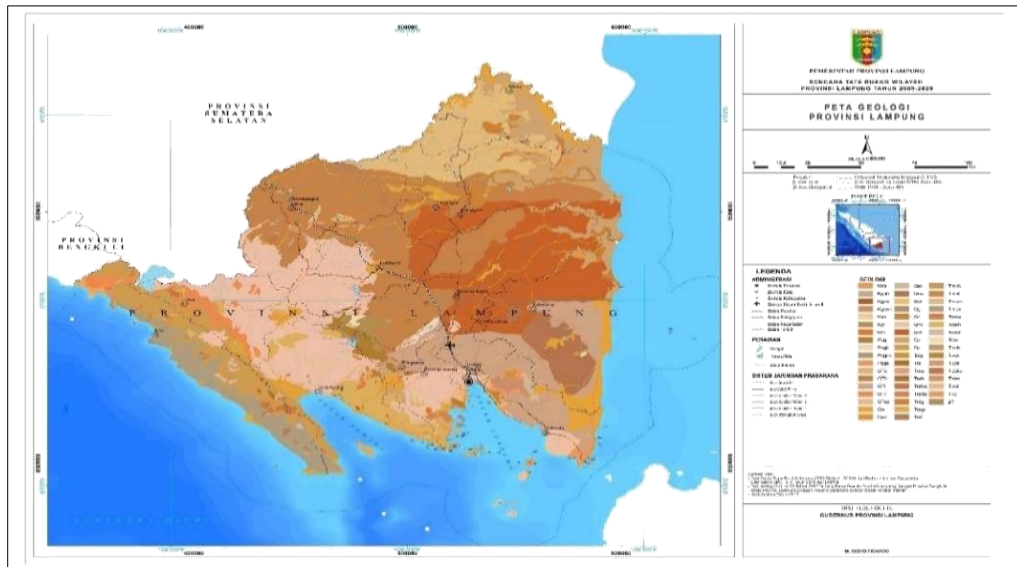
Keberadaannya sering disebut sebagai bukti penunjaman (subduction) di sepanjang Parit Sunda yang terus berlangsung. Formasi Sabu, Formasi Campang dan Formasi Tarahan tersingkap di Jalur Bukit Barisan, Batuan Granit- Granodiorit yang menerobos Batuan Granitoid Kapur Akhir menunjukkan umur 48,37 – 34,57 juta tahun (Eosen – Oligosen).

Perkembangan geologi tersier di daerah ini, selanjutnya menunjukkan perbedaan yang nyata antara jalur Jambi-Palembang, Bukit Barisan dan Bengkulu. Perbedaan tersebut dicerminkan dengan adanya perbedaan sedimentasi cekungan yang terdapat di ketiga jalur tersebut. Pada jaman Oligosen Akhir- Miosen Tengah di jalur Jambi-Palembang terjadi sedimentasi genangan laut di cekungan Sumatera Selatan yang diwakili oleh *Formasi Talangakar (Tomt)* yang terdiri dari batu pasir kuarsa, konglomerat kuarsa, batu pasir terdiri dari serpihan gampingan, napal, batu lempung dan batu lanau, *Formasi Gading (Tomg)* yang terdiri dari batu pasir, batu lanau dan batu lempung dengan sisipan batu gamping dan lignit, dan *Formasi Baturaja (Tmb)* terdiri dari batu gamping terumbu, kalkarenit dengan sisipan serpih gampingan. Di jalur Bukit Barisan terjadi kegiatan gunung api yang diwakili oleh *Formasi Hulusimpang (Tomh)* terdiri dari breksi gunung api, lava, tufa bersusunan andesit/basaltik, terubah, berurat kuarsa (*Tmos*) yang terdiri dari perselingan batu lempung, batu pasir, batu lanau, serpih, terkadang gampingan.

*Tektonik* yang terjadi pada Miosen Tengah diikuti oleh sedimentasi laut dangkal yang dicerminkan oleh *Formasi Airbenakat* (terdapat di luar Provinsi Lampung), Setelah tektonik yang terjadi pada Pliosen Tengah, sebagian besar daerah ini terangkat ke permukaan, di jalur Jambi-Palembang diendapkan *Formasi Kasai (Qtk)* yang berlingkungan darat (perselingan batu pasir tufaan dengan tufa berbatu apung, struktur silangsiur, sisipan tipis lignit dan kayu terkesikkan). Di jalur Bukit Barisan di endapkan *Formasi Ranau (Qtr)* yang terdiri dari breksi batuapung, tufa mikaan, tufa batu apung, dan kayu terkersikkan, dan *Formasi Bintunan (Qtb)* yang terdiri dari batu pasir tufaan, tufa pasir, batu lempung tufaan, konglomerat aneka batuan, tufa berbatuapung dan sisa tumbuhan. Seluruh *formasi Kasai, Ranau, Lampung*

selama Pliosen Akhir–Pliosen terlipat lemah dan tererosi di akhir Plistosen. Sejak itu kegiatan gunung api berlangsung di jalur Jambi–Palembang dan Bengkulu hanya terjadi sedimentasi. Kondisi geologi Wilayah Provinsi Lampung, disajikan dalam Peta Geologi Provinsi Lampung pada gambar di bawah ini.

Gambar II-2  
Peta Geologi Provinsi Lampung



Sumber : Pemerintah Provinsi Lampung

#### 2.1.4 Kondisi Hidrologi

Provinsi Lampung memiliki 3 (tiga) Wilayah Sungai (WS) meliputi WS Mesuji – Tulang Bawang, WS Seputih – Sekampung dan WS Semaka. Sumber daya air tawar di Provinsi Lampung tersebar di 5 (lima) Daerah Aliran Sungai (DAS). Bagian terbesar dari hulu sungai ini berada di Kabupaten Lampung Barat, sebagian Lampung Utara dan sebagian Tanggamus. DAS di Provinsi Lampung beserta luasnya dapat di lihat pada tabel dan peta di bawah ini.

Tabel II-2 Daerah  
Aliran Sungai (DAS) Provinsi Lampung

No	DAS	Luas (Km <sup>2</sup> )
1	DAS Jepara	2.232
2	DAS Mesuji	3.365
3	DAS Sekampung	5.187

No	DAS	Luas (Km <sup>2</sup> )
4	DAS Semangka	6.521
5	DAS Seputih	6.776
6	DAS Tulang Bawang	9.346

Sumber: Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLHD) 2015

Gambar II-3  
Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung



Sumber : Pemerintah Provinsi Lampung

Secara hidrologi di Provinsi Lampung terdapat 7 (tujuh) cekungan air tanah, yaitu cekungan air tanah Kalianda, cekungan air tanah Bandar Lampung, cekungan air tanah Metro – Kotabumi, cekungan air tanah Talang Padang, cekungan air tanah Kota Agung, cekungan air tanah Batu Raja dan cekungan air tanah Danau Ranau. Luas masing – masing CAT di Provinsi Lampung disajikan pada tabel dan gambar berikut di bawah ini:

Tabel II-3  
Luas Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung

NO	NAMA CAT	Luas Cat (Ha)	Lokasi Cat
1	CAT Bandar Lampung	44.381,32	Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung selatan, Tanggamus
2	CAT Talang Padang	60.964,60	Pringsewu, Tanggamus
3	CAT Kalianda	23.543,92	Lampung Selatan
4	CAT Baturaja	43.019,06	Way Kanan

NO	NAMA CAT	Luas Cat (Ha)	Lokasi Cat
5	CAT Metro-Kotabumi	2.040.169,77	Tulang Bawang, Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, Lampung Utara, Metro, Pesawaran, Pringsewu, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat, dan Way kanan
6	CAT Kota Agung	279.955,88	Lampung Barat, Pesisir Barat, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat
7	CAT Ranau	78.893,68	Lampung Barat, Pesisir Barat

Sumber: Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan, diukur di atas Peta RBI, 2016

Gambar II-4  
Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung



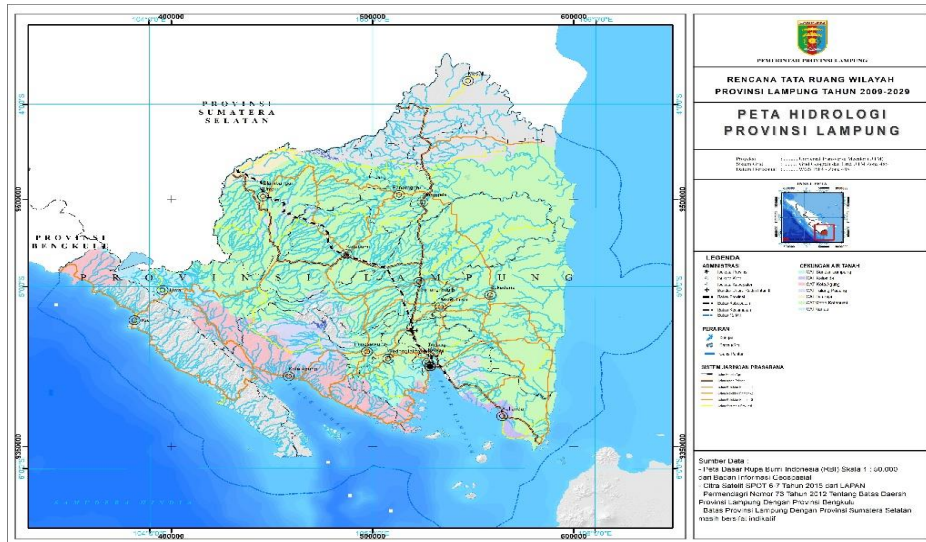
Sumber : Pemerintah Provinsi Lampung

Dalam rangka konservasi air tanah terdapat beberapa zona pemanfaatan air tanah, yaitu:

- a. Zona Aman Potensi Tinggi (ZONA I)
- b. Zona Aman Potensi Sedang (ZONA II)
- c. Zona Aman Potensi Kecil (ZONA III)
- d. Zona Imbuh / Resapan (ZONA IV)
- e. Zona Bukan CAT



Gambar II-5  
Peta Hidrologi Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2019

### 2.1.5 Kondisi Klimatologi

Provinsi Lampung beriklim tropis-humid, karena terletak di bawah garis khatulistiwa 5° Lintang Selatan. Angin laut lembah yang bertiup dari Samudera Indonesia dengan dua musim angin setiap tahunnya, yaitu bulan November hingga Maret angin bertiup dari arah Barat dan Barat Laut, dan bulan Juli hingga Agustus angin bertiup dari arah Timur dan Tenggara. Kecepatan angin rata-rata tercatat sekitar 5,83 km/jam. Suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C - 28°C, dengan suhu maksimum sebesar 33°C dan minimum sebesar 20°C. Kelembaban udara di beberapa stasiun pengamatan menunjukkan kisaran antara 75% - 95%. Rata-rata curah hujan bulanan setiap tahunnya sebesar 168,95 mm/bulan dan rata-rata curah tahunan adalah antara 1.500 s/d 3.500 mm, sebagaimana diperlihatkan pada tabel II-4 dan gambar II-6.

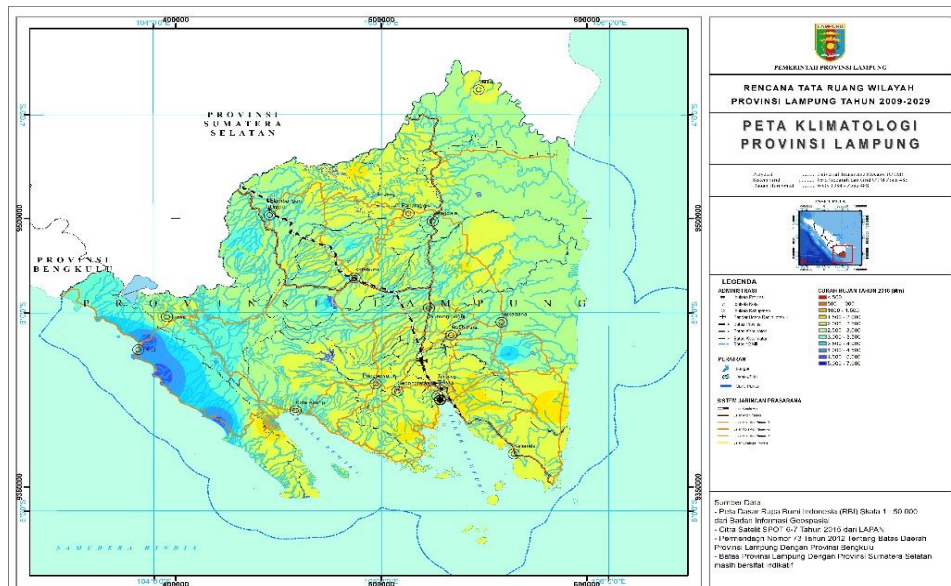
Tabel II-4  
Curah Hujan Rata-Rata Pertahun (Mm)

No	Kabupaten/ Kota	Curah Hujan Rata-Rata Pertahun (Mm)				
		<1.500	2.000-2.500	2.500-3.000	3.000-3.500	>3.500
1	Bandar Lampung	-	809,92	1.023,00	-	-
2	Lampung Barat	-	151,90	151.900,00	9.383,00	7.811,00

No	Kabupaten/ Kota	Curah Hujan Rata-Rata Tahun (Mm)				
		<1.500	2.000-2.500	2.500-3.000	3.000-3.500	>3.500
3	Lampung Selatan	-	13.979,00	7.517,80	-	-
4	Lampung Tengah	6.629,00	21.711,00	17.095,00	-	-
5	Lampung Timur	-	15.378,00	23.271,80	-	-
6	Lampung Utara	0,76	10.179,00	13.196,00	1.919,00	-
7	Mesuji	-	19.560,00	2.362,40	-	-
8	Metro	-	0,03	731,50	-	-
9	Pesawaran	-	6.996,37	5.545,42	-	-
10	Pesisir Barat	-	14,80	11.160,00	18.510,01	309,70

(Sumber: Laporan KLHS RPJMD 2019-2024)

Gambar II-6  
Peta Klimatologi Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2019

### 2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

Dari aspek geografis, Provinsi Lampung mempunyai posisi yang strategis di ujung selatan Pulau Sumatera, sehingga menjadi gerbang Pulau Sumatera dari arah Pulau Jawa. Agar posisi yang strategis tersebut dapat berdampak optimal bagi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan kawasan pengembangan potensi meliputi :

## 1. Kawasan Hutan Produksi

Dalam arahan tata ruang, hutan mempunyai fungsi khusus yaitu berfungsi lindung, konservasi, dan untuk pendukung kehidupan serta segala ekosistemnya disamping menghasilkan produk kehutanan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan pengolahan kayu. Oleh sebab itu arahan budidaya untuk kehutanan adalah pengembangan hasil hutan non-kayu.

Kawasan budidaya kehutanan meliputi kawasan hutan produktif terbatas (HPT) dan hutan produksi tetap (HP). Hutan Produksi Terbatas terletak di Kabupaten Pesisir Barat, sedangkan hutan produksi tetap tersebar di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan. Deliniasi kawasan hutan produksi tetap didasarkan kepada fungsi hutan yang ada.

## 2. Kawasan Pertanian dan Perikanan

Berdasarkan hasil analisis, luas total dari kawasan peruntukan pertanian hingga tahun 2029 adalah 6.351,90 km<sup>2</sup>. Beberapa komoditas yang memiliki produktivitas yang dapat dijadikan komoditas unggulan di Provinsi Lampung adalah tanaman padi, ubi kayu, dan jagung. Lahan pertanian tanaman pangan basah dan kering yang ada diupayakan dipertahankan keberadaannya dalam rangka mempertahankan swasembada pangan yang telah dicapai sebelumnya dan untuk mengembangkan pertanian kerakyatan. Lokasi pertanian lahan basah di Provinsi Lampung tersebar diseluruh wilayah Provinsi Lampung kecuali Bandar Lampung sedangkan Luas areal pertanian tanaman pangan lahan kering tersebar pada kabupaten-kabupaten kecuali Kabupaten Lampung Barat dan Tanggamus.

Potensi perikanan di Lampung sangat besar yang terbagi dalam tiga wilayah, yaitu sepanjang pesisir pantai timur (Laut Jawa), Selat Sunda (Teluk Lampung dan Teluk Semangka) dan sepanjang pesisir pantai barat. Untuk jenis perikanan tangkap seperti tuna mata esar, setuhuk, setuhuk loreng, tuna

sirip biru dan albakora, sebaran meliputi daerah pesisir pantai Barat, Teluk Lampung di Pesawaran, Teluk Semangka di Kabupaten Tulang Bawang dan Pesisir Pantai Timur Sumatera lainnya, perikanan budidaya air payau dikembangkan di pesisir pantai Timur, Pesisir Barat dan Pesawaran yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian hutan mangroove, agar dapat menjaga ekosistem pesisir dan kelautan. Sedangkan budidaya kolam dapat dikembangkan di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Luas kawasan perikanan ini adalah 128.846,16 Ha yang terdiri dari 73.024 Ha perikanan budidaya air payau dan 55.823 Ha perikanan budidaya air tawar. Pelabuhan perikanan dikembangkan di Kabupaten Tulang Bawang (Kuala Teladas), Kabupaten Lampung Barat (Kuala Krui dan Bengkunt), Kota Bandar Lampung (Lempasing), Kabupaten Tanggamus (Kota Agung) dan Kabupaten Lampung Timur (Labuan Maringgai). Wisata bahari dikembangkan di sepanjang pesisir Lampung, khususnya di sepanjang pesisir Barat Sumatera.

Gambar II-7  
Peta Kawasan Pertanian dan Perikanan



Sumber : Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2019

### 3. Kawasan Perkebunan

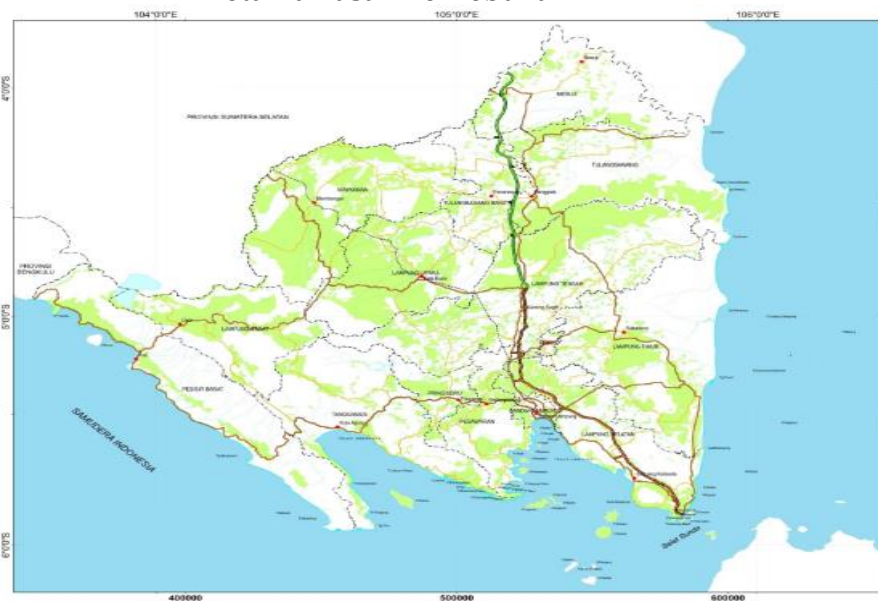
Sektor perkebunan terus dikembangkan dengan kombinasi perkebunan rakyat dan perkebunan skala besar. Luas kawasan peruntukan perkebunan hingga tahun 2029 adalah 9.645,35 km<sup>2</sup>. Pengembangan komoditas ini diarahkan untuk pengembangan kegiatan industri ekonomi kerakyatan.

Tanaman perkebunan tersebut diarahkan pada lahan-lahan di beberapa kabupaten, yaitu :

Tabel II-5  
Sebaran Komoditas Perkebunan

Komoditi	Kabupaten
kopi, lada, tebu, kakau dan kelapa	Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Barat, Pringsewu, Tulang bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Pesawaran dan Tanggamus
Tebu	Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan dan Tulang Bawang Barat
Sawit	Lampung Tengah, Lampung Selatan, Mesuji, Tulang Bawang Barat dan Tulang Bawang.

Gambar II-8  
Peta Kawasan Perkebunan



Sumber : Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2019

#### 4. Kawasan Pertambangan

Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan didasarkan pada potensi bahan tambang dan lokasi usaha tambang yang ada di Provinsi Lampung. Sebaran potensi pertambangan di Provinsi Lampung meliputi:



- a. Kabupaten Tanggamus (cadangan) meliputi ziolit (437.670.000 m<sup>3</sup>), emas (415.677 ton), batu bara (867.000 ton), geothermal (400 Kw), bentonit (88.700.000 m<sup>3</sup>) dan granit (62.500.000 m<sup>3</sup>, dan andesit di Kecamatan Kelumbayaan;
- b. Kabupaten Lampung Barat (cadangan) meliputi andesit (1.000.000 m<sup>3</sup>), emas (16.783Ha), geothermal (430 Kw), trass (2.750.000 m<sup>3</sup>) diatomea (170.000 m<sup>3</sup>) dan perlit (10.500.000 m<sup>3</sup>);
- c. Kabupaten Lampung Utara (cadangan), yaitu andesit (97.400.000 m<sup>3</sup>); Kabupaten Way Kanan (cadangan) meliputi batubara (131.250.000), emas (829.680 ton), marmer (615.800.000 m<sup>3</sup>), kaolin (2.929.000 m<sup>3</sup>) dan batu mulia (40.000 m<sup>3</sup>);
- d. Kabupaten Mesuji (cadangan), yaitu batubara (360.000 km<sup>2</sup>);
- e. Kabupaten Tulang Bawang Barat (cadangan) yaitu pasir kuarsa (3.600.000 m<sup>3</sup>) dan migas (dalam penelitian);
- f. Kabupaten Lampung Tengah (cadangan) meliputi andesit (443.260.000 m<sup>3</sup>), emas (102.875 ton), batubara 2.358.855 ton), biji besi (68.457 ton), fedspar (389.350.000 m<sup>3</sup>) dan granit (980.600.000 m<sup>3</sup>).
- g. Kabupaten Lampung Timur (cadangan) meliputi andesit (3.449.511 m<sup>3</sup>), pasir kuarsa (32.575.000 m<sup>3</sup>) dan minyak bumi (dalam penelitian).
- h. Kabupaten Lampung Selatan (cadangan) meliputi andesit (87.340.000 m<sup>3</sup>), zeolit (8.000 m<sup>3</sup>), batu bara (5.000 ton), biji besi (1.902.000 ton), pasir besi (5.071 m<sup>3</sup>), emas (10.732,5 ton), mangan (243.000 ton), granit (287.000.000 m<sup>3</sup>).
- i. Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung dan Gunung Rajabasa terdapat cadangan batubara dan panas bumi dengan deposit dalam tahap penelitian.

Kawasan pertambangan di Provinsi Lampung dapat dilihat secara lebih jelas pada gambar dibawah ini :

Gambar II-9  
Peta Kawasan Pertambangan



Sumber : Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2019

## 5. Kawasan Perindustrian

Pengelolaan kawasan industri kecil, terutama industri pengolahan hasil pertanian diarahkan untuk dikembangkan diseluruh kabupaten, terutama pada lokasi yang dekat dengan penghasil sumberdaya. Hingga saat ini, kawasan industri yang akan dipertahankan pengembangannya sebagai kawasan industri seluas 194,4 km<sup>2</sup>. Kawasan Industri di Provinsi Lampung terdapat di wilayah Tanjung Bintang Lampung Selatan seluas 350 Ha. Industri besar terutama industri berteknologi tinggi diarahkan untuk dikembangkan di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Pesawaran sesuai dengan kesesuaian lokasi, tata guna lahan, dan dukungan prasarana, dan potensi daerah sekitar yang ditetapkan berdasarkan analisa daya dukung ekosistem. Adapun sebaran kawasan peruntukan industri Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, meliputi:

### a. Kawasan Industri Maritim Kabupaten Tanggamus

- b. Kawasan Industri Way Pisang, Kabupaten Lampung Selatan
- c. Kawasan Industri Mesuji, Kabupaten Mesuji
- d. Kawasan Industri Lampung Tengah
- e. Kawasan Industri Way Kanan
- f. Kawasan Industri Tulang Bawang Barat
- g. Kawasan Industri Lampung (KAIL II), Kabupaten Lampung Selatan
- h. Kawasan Industri Tulang Bawang
- i. Kawasan Industri Katibung, Kabupaten Lampung Selatan

#### 6. Kawasan Pariwisata

Strategi pengembangan pariwisata Provinsi Lampung diarahkan untuk pengembangan potensi wisata alam dengan menekankan kegiatan perjalanan wisata yang aktif, di mana wisatawan terlibat secara fisik dan emosional dalam suatu kegiatan tertentu, bukan sekedar perjalanan wisata pasif. Sehingga pengembangan pariwisata Provinsi Lampung tidak semata-mata pada kegiatan berwisata yang mengandung aktivitas secara fisik namun juga pengkayaan wawasan pengetahuan (*gaining insight*).

Pengembangan pariwisata Provinsi Lampung didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu:

- a. Mendorong motivasi wisatawan mencari sesuatu yang baru, otentik dan mempunyai pengalaman perjalanan wisata yang berkualitas;
- b. Mendorong motivasi dan keputusan untuk melakukan perjalanan ditentukan oleh minat tertentu/khusus dari wisatawan dan bukan dari pihak-pihak lain;
- c. Mendorong wisatawan melakukan perjalanan berwisata pada umumnya mencari pengalaman baru yang dapat diperoleh dari obyek sejarah, makanan lokal, olahraga, adat istiadat, kegiatan di lapangan dan petualangan alam.

Pengembangan pariwisata dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung lebih menekankan pada pengembangan pariwisata di kawasan budidaya. Potensi pariwisata di kawasan Lindung,

seperti Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dan lain-lain dibahas secara terpisah dalam bahasan Rencana Pengelolaan kawasan Lindung.

Rencana pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung, sebagai berikut:

1. Pengembangan wisata Pantai Barat Lampung; meliputi Tanggamus, Lampung Barat, dan Pesisir Barat
2. Pengembangan Kawasan TNWK Lampung Safari Way Kambas *Park and Conservation Center*.
3. Pengembangan kawasan wisata terintegrasi Teluk Lampung; meliputi Kabupaten Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran dan Tanggamus.

Tabel II-6  
Pengelolaan Kawasan Pariwisata Provinsi Lampung

NO	KATEGORI	POTENSI	LOKASI	KETERANGAN
1.	Wisata Alam	Pantai	Kabupaten Pesisir Barat, Pesawaran dan Lampung Selatan	rekreasi alam
		Pegunungan	Lampung Barat, Pesawaran, Lampung Selatan	
		Danau	Way Jepara (Lampung Utara), Ranau (Kabupaten Lampung Barat)	
		Air Terjun	Way Kanan dan Lampung Barat	
		Minat Khusus	Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro	mobil dan motor <i>off-road</i>
		Minat Khusus	Kabupaten Pesawaran	<i>paragliding</i> dan <i>gantole</i>
		Minat Khusus	Way Semangka (Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus), serta Way Semong (Kabupaten Tanggamus), Way Besai (Kabupaten Lampung Barat), Bandar Lampung	arung jeram
		Minat Khusus	Way Kambas/Way Kanan (Kabupaten Lampung Timur)	<i>Trekking</i>
		Minat Khusus	Lampung Timur, Tanggamus	pengamatan satwa liar
2.	Wisata Bahari	Minat Khusus	Pulau Sebesi dan Pulau Sebuku (Lampung Selatan), Pulau Pahawang, Tanjung Putus, Pubu Tegal	selam, mancing, <i>snorkling</i>

NO	KATEGORI	POTENSI	LOKASI	KETERANGAN
		Minat Khusus	Pulau Condong (Lampung Selatan), Pulau Pahawang, Tanjung Putus, Pabu Tegal	selam, mancing, <i>snorkling</i>
		Minat Khusus	Krui (Pesisir Barat)	<i>Surfing</i>
3.	Wisata Budaya	Wisata Sejarah	Sumber Jaya (Lampung Barat)	Situs Masa Pra Sejarah
		Wisata Sejarah	Sukau (Lampung Barat)	Situs masa Hindu dan Budha
		Wisata Sejarah	Pesisir Tengah (Pesisir Barat)	Situs Masa Islam
		Wisata Sejarah	Pasemah (Lampung Selatan)	Prasasti Batu Tulis Kerajaan Sriwijaya
		Wisata Sejarah	Pugung Raharjo (Lampung Timur)	Situs masa Pra Sejarah
		Wisata Sejarah	Tulang Bawang	Situs Kerajaan Tulang Bawang
		Wisata Ziarah	Lampung Selatan	Makam Radin Intan II
		Wisata Ziarah	Pesisir Tengah (Lampung Barat)	Makam Islam
		Wisata Ziarah	Way Kanan	Makam Raja-raja Way Kanan
		Wisata Ziarah	Goa Maria (Pringsewu), Makan KH. Gholib (Pringsewu)	Ziarah umat Katholik
4.	Wisata Buatan	Wisata Museum	Kota Bandar Lampung	Museum Lampung
		Wisata Museum	Gedong Tataan	Museum Transmigrasi
		Wisata Museum	Kota Bandar Lampung	Gedung Juang 45
		Wisata Monumen	Bakauheni (Lampung Selatan)	Menara Siger
		Wisata Monumen	Kota Bandar Lampung	Monumen Krakatau
		Wisata Taman Rekreasi	Kota Bandar Lampung	Taman Bumi Kedaton, Taman Budaya Lampung dan Lembah Hijau
		Wisata Resort	Kalianda (Lampung Selatan)	Resort Grand Elty

Sumber : Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2019

### 2.1.7 Wilayah Rawan Bencana

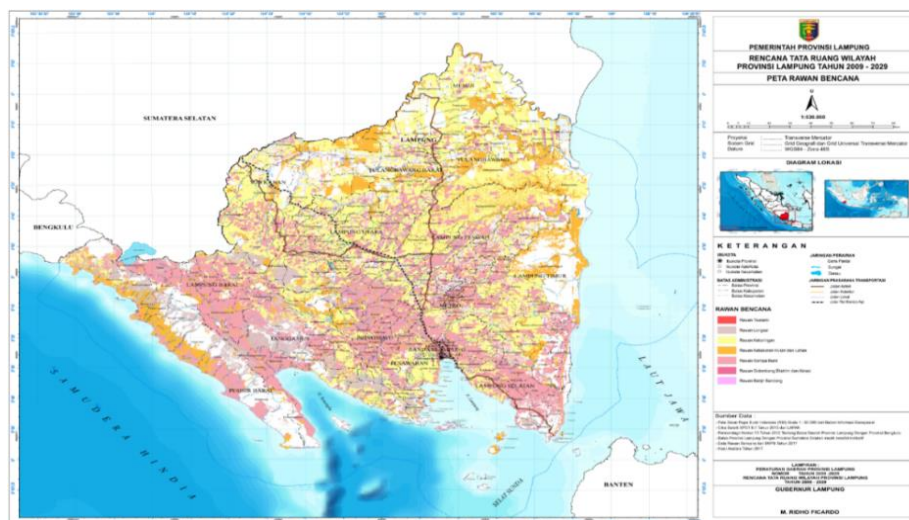
Kawasan rawan bencana alam terdiri atas daerah yang sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, longsor, gerakan



tanah/gempa, puting beliung, tsunami dan kebakaran hutan. Kawasan rawan bencana di Provinsi Lampung meliputi:

1. Bencana tanah longsor tersebar di Kabupaten Lampung Utara, Tanggamus, Lampung Barat, Pesawaran, Pesisir Barat dan Lampung Selatan.
2. Untuk kasus kebakaran hutan tersebar di Kabupaten Mesuji, Way Kanan, Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, dan Lampung Timur.
3. Bencana tsunami dan gelombang pasang berpotensi terjadi di sepanjang pesisir wilayah Provinsi Lampung.
4. Banjir tersebar di Kabupaten Pesawaran, Mesuji, Tulang Bawang, Lampung Timur, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Utara, Pesisir Barat, Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung.
5. Gempa Bumi tersebar di Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, Pesawaran, Bandar Lampung.
6. Puting Beliung tersebar di Kabupaten Lampung Tengah, Way Kanan, Pringsewu, Pesawaran, Bandar Lampung.

Gambar II-10  
Peta Rawan Bencana Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2019

Kawasan rawan bencana alam geologi tersebar diseluruh wilayah Provinsi Lampung yang terjadi akibat aktivitas tektonik pengaruh Sesar

Mayor, yaitu Sesar Semangko, dan Sesar Mentawai, dan Sesar Minor, serta aktivitas vulkanik. Berdasarkan DIBI, tercatat 10 (sepuluh) jenis bencana yang pernah terjadi di Provinsi Lampung, yaitu banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, letusan gunungapi, cuaca ekstrim dan tanah longsor. Pengelompokan potensi bencana di Provinsi Lampung disesuaikan dengan kondisi daerah serta sejarah kejadian yang pernah terjadi. Berdasarkan kedua hal tersebut, diperoleh potensi bencana di Provinsi Lampung seperti terlihat pada tabel berikut :

1. Banjir

Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena peningkatan volume air akibat hujan deras, luapan air sungai atau pecahnya bendungan.

Tabel II-7  
Potensi Luas Bahaya Banjir di Provinsi Lampung

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Lampung Barat	26.326	Tinggi
2	Tanggamus	42.033	Sedang
3	Lampung Selatan	70.032	Tinggi
4	Lampung Timur	255.051	Tinggi
5	Lampung Tengah	380.268	Tinggi
6	Lampung Utara	188.770	Sedang
7	Way Kanan	264.609	Sedang
8	Tulang Bawang	307.150	Tinggi
9	Pesawaran	49.171	Sedang
10	Pringsewu	34.822	Sedang
11	Mesuji	202.391	Tinggi
12	Tulang Bawang Barat	126.726	Tinggi
13	Pesisir Barat	55.070	Sedang
14	Bandar Lampung	10.092	Sedang
15	Metro	6.179	Sedang
<b>PROVINSI LAMPUNG</b>		<b>2.018.690</b>	<b>TINGGI</b>

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2019

2. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Pada umumnya gelombang ekstrim dan abrasi terjadi karena gelombang angin yang timbul akibat tiupan angin di permukaan laut.

Tabel II-8  
Potensi Luas Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Provinsi Lampung

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Lampung Barat	196	Tinggi
2	Tanggamus	4.775	Sedang
3	Lampung Selatan	5.302	Sedang
4	Lampung Timur	2.564	Sedang
5	Tulang Bawang	1.796	Sedang
6	Pesawaran	3.940	Sedang
7	Pesisir Barat	4.786	Tinggi
8	Bandar Lampung	515	Sedang
<b>PROVINSI LAMPUNG</b>		<b>23.874</b>	<b>TINGGI</b>

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2019

### 3. Gempa Bumi

Gempa bumi merupakan salah satu bencana yang disebabkan oleh faktor geologi. Gempabumi adalah peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba.

Tabel II-9  
Potensi Luas Bahaya Gempabumi di Provinsi Lampung

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Lampung Barat	214.278	TINGGI
2	Tanggamus	279.859	TINGGI
3	Lampung Selatan	70.032	SEDANG
4	Lampung Timur	394.580	TINGGI
5	Lampung Tengah	380.268	SEDANG
6	Lampung Utara	257.047	TINGGI
7	Way Kanan	367.375	TINGGI
8	Tulang Bawang	311.079	TINGGI
9	Pesawaran	136.949	SEDANG
10	Pringsewu	60.899	SEDANG
11	Mesuji	218.400	TINGGI
12	Tulang Bawang Barat	120.100	TINGGI
13	Pesisir Barat	270.265	TINGGI
14	Bandar Lampung	17.660	SEDANG
15	Metro	8.854	TINGGI
<b>PROVINSI LAMPUNG</b>		<b>3.107.645</b>	<b>TINGGI</b>

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2019

4. Kebakaran Hutan dan Lahan

Perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan kurang berfungsinya hutan atau lahan dalam menunjang kehidupan yang berkelanjutan sebagai akibat dari penggunaan api yang tidak terkendali maupun faktor alam yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan atau lahan. Perhitungan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dilihat berdasarkan jenis hutan dan lahan, iklim, dan jenis tanah.

Tabel II-10

Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Lampung Barat	58.780	Tinggi
2	Tanggamus	40.923	Tinggi
3	Lampung Selatan	20.859	Tinggi
4	Lampung Timur	134.246	Tinggi
5	Lampung Tengah	69.619	Tinggi
6	Lampung Utara	27.712	Tinggi
7	Way Kanan	135.733	Sedang
8	Tulangbawang	131.045	Tinggi
9	Pesawaran	17.088	Tinggi
10	Pringsewu	6.092	Tinggi
11	Mesuji	109.123	Tinggi
12	Tulang Bawang Barat	34.655	Sedang
13	Pesisir Barat	203.990	Tinggi
14	Bandar Lampung	136	Tinggi
15	Metro	36	Tinggi
<b>PROVINSI LAMPUNG</b>		<b>990.037</b>	<b>TINGGI</b>

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2019

5. Kekeringan

Kekeringan adalah suatu kondisi dalam kurun waktu yang panjang, bulan atau tahun, dimana suatu daerah mengalami kekurangan air. Pada umumnya, hal ini terjadi ketika daerah tersebut secara terus-menerus mengalami hujan di bawah rata-rata.

Tabel II-11  
Tabel Potensi Luas Bahaya Kekeringan di Provinsi Lampung

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Lampung Barat	214.278	Tinggi
2	Tanggamus	279.861	Sedang
3	Lampung Selatan	70.032	Sedang
4	Lampung Timur	394.580	Tinggi
5	Lampung Tengah	380.268	Tinggi
6	Lampung Utara	257.047	Tinggi
7	Way Kanan	367.375	Tinggi
8	Tulangbawang	311.082	Tinggi
9	Pesawaran	136.959	Sedang
10	Pringsewu	60.899	Sedang
11	Mesuji	218.400	Tinggi
12	Tulang Bawang Barat	120.100	Tinggi
13	Pesisir Barat	270.264	Sedang
14	Bandar Lampung	17.660	Sedang
15	Metro	8.854	Tinggi
<b>PROVINSI LAMPUNG</b>		<b>3.107.659</b>	<b>TINGGI</b>

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2019

#### 6. Epidemologi dan Wabah Penyakit

Epidemi, wabah, atau kejadian luar biasa (KLB) adalah wabah penyakit yang menyebar secara cepat, luas dan besar. Epidemologi atau wabah dan KLB merupakan ancaman bencana yang diakibatkan oleh menyebarnya penyakit menular yang berjangkit di suatu daerah tertentu dalam waktu tertentu. Pada skala besar epidemi ini dapat menyebabkan korban jiwa.

Tabel II-12  
Potensi Luas Bahaya Epidemologi dan Wabah Penyakit di Provinsi Lampung

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	LUAS (Ha)
1	Tanggamus	2.036	Sedang
2	Lampung Selatan	11.936	Tinggi
3	Lampung Timur	17	Tinggi
4	Lampung Tengah	16.988	Tinggi
5	Way Kanan	205	Tinggi
6	Pesawaran	3.879	Tinggi
7	Pringsewu	10.520	Tinggi
8	Mesuji	2	Tinggi



NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	LUAS (Ha)
9	Bandar Lampung	3.782	Tinggi
10	Metro	12	Tinggi
<b>PROVINSI LAMPUNG</b>		<b>49.377</b>	<b>SEDANG</b>

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2019

## 7. Letusan Gunung Api

Letusan Gunung Api di Provinsi Lampung terjadi pada tahun 1883. Setelah meletusnya gunung Krakatau tersebut, saat ini Gunung Api Anak Krakatau yang terletak di Kabupaten Lampung masih aktif dan bahkan seringkali mengalami erupsi.

Tabel II-13

Potensi Luas Bahaya Letusan Gunung api Krakatau di Provinsi Lampung

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	LAMPUNG SELATAN	2.651	RENDAH
<b>PROVINSI LAMPUNG</b>		<b>2.651</b>	<b>RENDAH</b>

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2019

## 8. Tanah Longsor

Tanah longsor adalah pergerakan suatu massa batuan, tanah atau bahan rombakan material penyusun lereng bergerak ke bawah atau keluar lereng di bawah pengaruh gravitasi. Tanah longsor dapat terjadi disebabkan adanya gangguan kestabilan pada lereng dan dapat dipicu oleh curah hujan, kejadian gerakan tanah, dan getaran.

Tabel II-14

Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Lampung

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Lampung Barat	116.197	Tinggi
2	Tanggamus	131.727	Tinggi
3	Lampung Selatan	17.721	Tinggi
4	Lampung Timur	343	Tinggi
5	Lampung Tengah	19.269	Tinggi
6	Lampung Utara	26.405	Tinggi
7	Way Kanan	23.942	Tinggi
8	Pesawaran	52.103	Tinggi
9	Pringsewu	10.676	Tinggi

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
10	Pesisir Barat	88.781	Tinggi
11	Bandar Lampung	3.223	Tinggi
<b>PROVINSI LAMPUNG</b>		<b>490.387</b>	<b>TINGGI</b>

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2019

## 9. Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsor gelincir pada area hulu sungai.

Tabel II-15  
Potensi Luas Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Lampung

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Lampung Barat	2.515	Tinggi
2	Tanggamus	2.060	Tinggi
3	Lampung Tengah	6.808	Tinggi
4	Lampung Utara	30	Tinggi
5	Way Kanan	13.888	Tinggi
6	Pesisir Barat	4.015	Tinggi
<b>PROVINSI LAMPUNG</b>		<b>29.316</b>	<b>TINGGI</b>

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2019

## 10. Tsunami

Tsunami merupakan rangkaian gelombang laut yang menjalar dengan kecepatan tinggi. Sebagian besar tsunami disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut dengan kedalaman kurang dari 60 km dan magnitudo lebih dari 7 SR.

Tabel II-16  
Potensi Luas Bahaya Tsunami di Provinsi Lampung

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Lampung Barat	202	Tinggi
2	Tanggamus	2.791	Tinggi
3	Lampung Selatan	4.596	Tinggi

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
4	Lampung Timur	1	Tinggi
5	Pesawaran	926	Tinggi
6	Pesisir Barat	2.639	Tinggi
7	Bandar Lampung	198	Tinggi
<b>PROVINSI LAMPUNG</b>		<b>11.353</b>	<b>TINGGI</b>

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2019

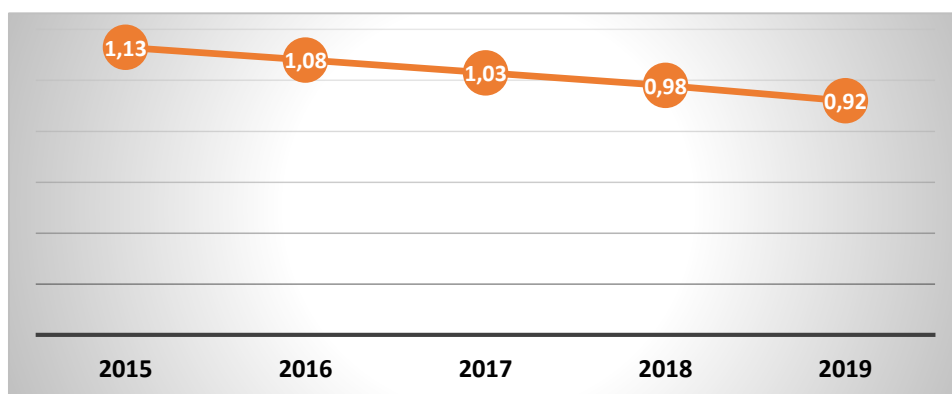
### 2.1.8 Kondisi Demografi

Kondisi Demografi sebuah wilayah dapat memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.

#### Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan penduduk provinsi Lampung dari tahun 2015 – 2019 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 1,13 tahun 2015 menjadi 0,92 tahun 2019. Hal ini mengindikasikan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam pengendalian kuantitas penduduk.

Grafik II-1  
Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Lampung (Persen)  
tahun 2015-2019



Sumber : BPS, 2019-2020

#### Jumlah dan Distribusi Penduduk

Jumlah Penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2019 sebanyak 8.447.737 jiwa yang tersebar pada 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

Berdasarkan sebarannya, jumlah penduduk yang terbesar berada pada Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah penduduk sebanyak 1.281.310 jiwa disusul oleh Kota Bandar Lampung sebanyak 1.051.500 jiwa dan Kabupaten Lampung Timur sebanyak 1.044.320 jiwa. Sedangkan Kabupaten dengan penduduk terkecil adalah Kabupaten Pesisir Barat yaitu sebanyak 154,895 jiwa atau 1,83 persen penduduk Povinsi Lampung. Untuk tingkat kepadatan penduduk Lampung pada tahun 2019, sebesar 243,99 Jiwa Per Km2 dan untuk wilayah terpadat di Provinsi Lampung adalah oleh Kota Bandar Lampung dengan tingkat kepadatan sebesar 3.552,36 Jiwa Per Km2 disusul oleh Kota Metro sebesar 2.709,35 dan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 1.444,03. Sebaran penduduk Provinsi Lampung di Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II-17**  
**Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2015-2019**

No.	Kabupaten/Kota	JUMLAH PENDUDUK					% Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2
		2015	2016	2017	2018	2019		
1	Lampung Tengah	1.239.096	1.250.486	1.261.498	1.271.566	1.281.310	15,17	336,95
2	Lampung Timur	1.008.797	1018424	1.027.476	1.036.193	1.044.320	12,36	196,12
3	Bandar Lampung	979.287	997728	1.015.910	1.033.803	1.051.500	12,45	3.552,36
4	Lampung Selatan	972.579	982885	992.763	1.002.285	1.011.286	11,97	1.444,03
5	Lampung Utara	606.092	609304	612.100	614.701	616.897	7,30	226,31
6	Tanggamus	573.904	580383	586.624	592.603	598.299	7,08	198,07
7	Way Kanan	432.914	437530	441.922	446.113	450.109	5,33	114,78
8	Tulang Bawang	429.515	435125	440.511	445.797	450.902	5,34	130,08
9	Pesawaran	426.389	431198	435.827	440.192	444.380	5,26	198,07
10	Pringsewu	386.891	390486	393.901	397.219	400.187	4,74	640,30
11	Lampung Barat	293.105	295689	298.286	300.703	302.828	3,58	141,32
12	Tulang Bawang Barat	264.712	266973	269.162	271.206	273.215	3,23	227,49
13	Mesuji	195.682	196913	198.092	199.168	200.198	2,37	91,67
14	Metro	158.415	160729	162.976	165.193	167.411	1,98	2.709,35
15	Pesisir Barat	149.890	151288	152.529	153.743	154.895	1,83	53,28
<b>Provinsi Lampung</b>		<b>8,117,268</b>	<b>8,205,141</b>	<b>8.289.577</b>	<b>8.370.485</b>	<b>8.447.737</b>	<b>99,99</b>	<b>243,99</b>

Sumber : BPS,2020

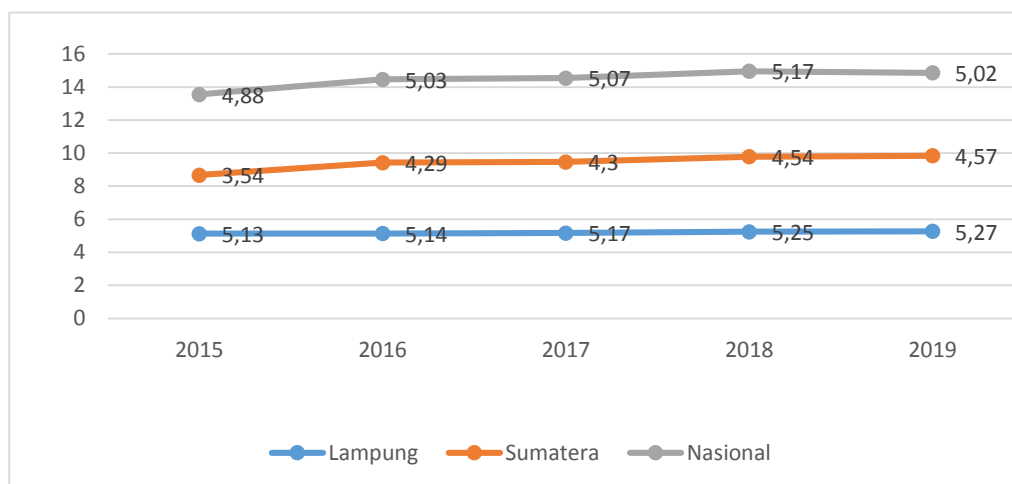
## 2.2. Capaian Indikator Kinerja Daerah

### 2.2.1 Aspek Kesejahteraan Rakyat

#### 2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Selama 5 (lima) tahun terakhir, perekonomian Lampung memperlihatkan *trend* yang terus meningkat yaitu : 5,13 persen di tahun 2015, menjadi 5,14 persen di tahun 2016, meningkat menjadi 5,16 pada tahun 2017, tumbuh 5,25 persen pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 5,27 persen. Ditengah lesunya perekonomian global dan nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung di tahun 2019 masih di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi di pulau Sumatera yang sebesar 4,57 persen maupun rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,02 persen.

Grafik II-2  
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Sumatera dan Provinsi Lampung  
Tahun 2015 – 2019



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung pada tahun 2019 menunjukkan bahwa sebanyak 8 kabupaten/kota yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi di atas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi, yaitu Kota Bandar Lampung memiliki angka pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 6,24 persen, diikuti Kota Metro sebesar 5,61 persen. Gambaran pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel II-18  
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung  
Tahun 2015 – 2019 (Persen)

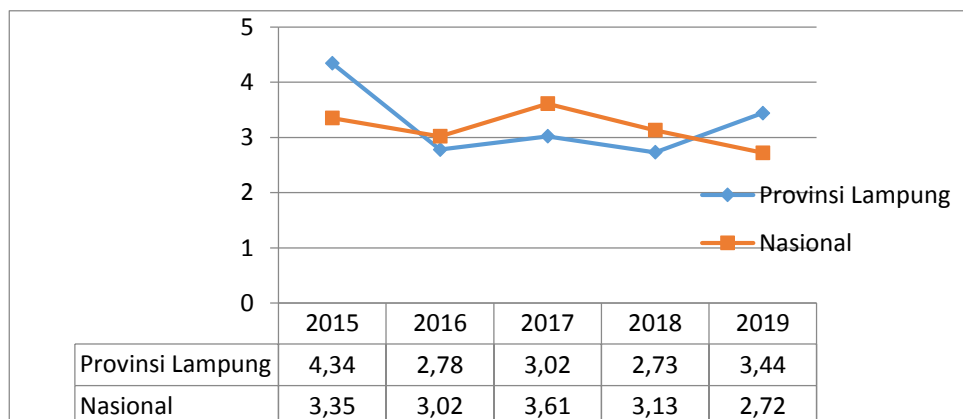
Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019
Lampung Barat	5.32	5.01	5.03	5.14	5.20
Tanggamus	5.5	5.18	5.19	5.02	5.03
Lampung Selatan	5.38	5.22	5.46	5.26	5.14
Lampung Timur	4.58	4.54	4.58	3.78	3.85
Lampung Tengah	5.38	5.61	5.27	5.45	<b>5.46</b>
Lampung Utara	5.43	5.10	5.21	5.33	<b>5.36</b>
Way Kanan	5.27	5.12	5.11	5.21	5.19
Tulang Bawang	5.02	5.42	5.45	5.49	<b>5.48</b>
Pesawaran	5.03	5.07	5.01	5.10	5.02
Pringsewu	5.22	5.04	5.11	5.03	5.06
Mesuji	5.23	5.10	5.20	5.31	<b>5.29</b>
Tuba Barat	5.35	5.27	5.55	5.46	<b>5.38</b>
Pesisir Barat	4.94	5.30	5.33	5.35	<b>5.39</b>
Bandar Lampung	6.33	6.43	6.28	6.21	<b>6.24</b>
Metro	5.87	5.90	5.66	5.69	<b>5.61</b>
<b>Lampung</b>	<b>5.13</b>	<b>5.14</b>	<b>5.16</b>	<b>5.25</b>	<b>5.27</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

### 2.2.1.2 Inflasi Daerah

Laju inflasi atau perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung dihitung dengan menggunakan data inflasi dari 2 (dua) kota yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

Grafik II-3  
Perkembangan Inflasi Gabungan Provinsi Lampung dan Nasional  
Tahun 2015 – 2019 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019

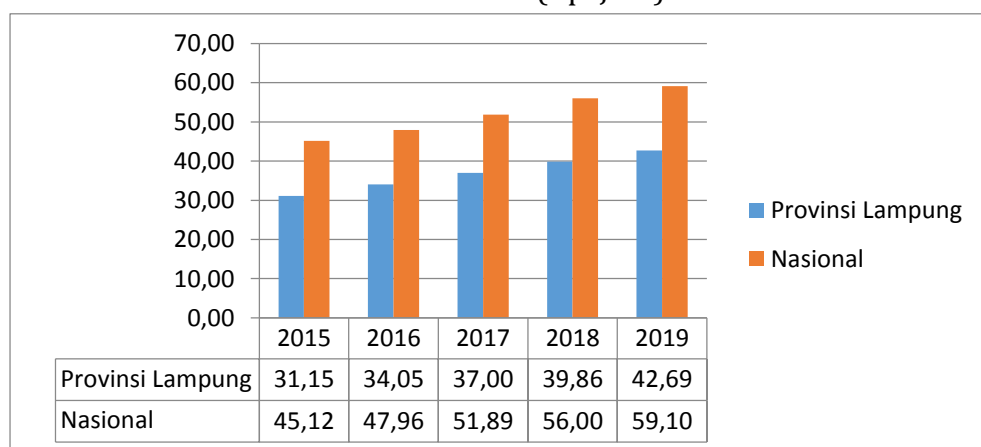


Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa Inflasi Provinsi Lampung pada tahun 2019 tercatat sebesar 3,44 persen dan di atas inflasi nasional sebesar 2,72 persen. Jika dilihat pada tabel di atas dan inflasi yang terjadi selama 2 (dua) tahun terakhir, terjadi kenaikan inflasi daerah dari 2,73 persen tahun 2018 menjadi 3,44 persen pada tahun 2019 sementara inflasi nasional mengalami penurunan dari 3,13 persen tahun 2018 menjadi 2,72 persen pada tahun 2019. Meningkatnya Inflasi Provinsi Lampung masih berada dalam rentang target tingkat inflasi  $3,5 \pm 1$  persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat inflasi yang terkendali dan dapat menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat, yang juga mendukung stabilitas perekonomian regional khususnya insentif pada sisi suplai produksi (produsen).

### 2.2.1.3 PDRB per Kapita

PDRB perkapita Provinsi Lampung selama kurun waktu 2015 s.d 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. PDRB per Kapita penduduk Lampung pada tahun 2019 sebesar 42,69 Juta Rupiah meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 39,86 Juta . Meski demikian, angka tersebut masih di bawah rata-rata PDRB per Kapita secara Nasional yang tercatat sebesar 59,10 Juta Rupiah.

Grafik II-4  
Perbandingan PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional  
Tahun 2015 – 2019 (Rp. Juta)



Sumber : BPS 2019

Tabel II-19  
PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung  
Tahun 2015 – 2019 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	Rata2 Pertumb. (%)
Bandar Lampung	40.26	44.84	49.30	53.00	<b>56.59</b>	<b>8,90</b>
Lampung Tengah	39.45	44.12	48.32	52.17	<b>56.16</b>	<b>9,24</b>
Mesuji	37.37	41.19	45.09	49.01	<b>52.84</b>	<b>9,05</b>
Tulang Bawang	37.70	41.35	45.09	48.37	<b>51.65</b>	<b>8,20</b>
Lampung Selatan	32.30	35.52	38.60	41.63	<b>44.60</b>	<b>8,41</b>
Tulang Bawang Barat	30.71	33.87	36.61	39.56	42.17	8,26
Lampung Timur	30.38	32.49	35.18	38.48	40.74	7,63
Lampung Utara	27.79	30.77	33.55	36.07	39.11	8,93
Metro	28.01	31.09	33.63	35.67	38.02	7,95
Pesawaran	27.48	29.83	32.11	34.43	36.91	7,66
Way Kanan	23.24	25.28	27.40	29.38	31.38	7,80
Pesisir Barat	21.56	23.90	25.88	27.86	30.02	8,64
Pringsewu	20.77	22.78	24.59	26.20	28.12	7,88
Tanggamus	19.39	21.24	22.87	24.54	26.15	7,77
Lampung Barat	17.49	19.00	20.50	22.02	23.74	7,94
<b>Lampung</b>	<b>31.15</b>	<b>34.05</b>	<b>37.00</b>	<b>39.86</b>	<b>42.69</b>	<b>8,20</b>

*Sumber : BPS 2019, diolah*

Perkembangan PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Lampung lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan dimana dari 15 Kabupaten/Kota , terdapat 5 (lima) Kabupaten/Kota yang PDRBnya meningkat dan diatas Provinsi, yaitu Kota Bandar Lampung sebesar 56,59 persen dan tertinggi dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 8,90 persen, diikuti Kabupaten mesuji dan Lampung tengah masing-masing sebesar 9,05 persen dan 9,24 persen. Sedangkan rata-rata pertumbuhan PDRB Perkapita terendah berada di Kabupaten Lampung Timur dan Pesawaran masing-masing sebesar 7,63 persen dan 7,66 persen.

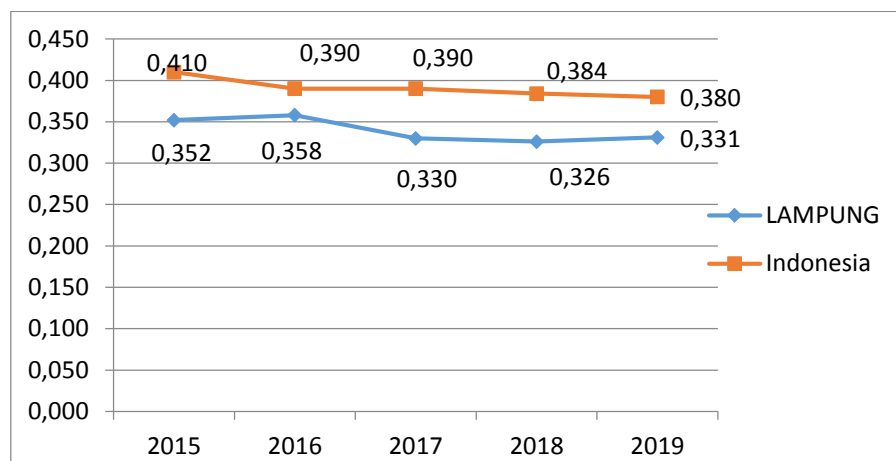
#### 2.2.1.4 Ketimpangan Pendapatan

Ukuran ketimpangan pendapatan penduduk melalui Indeks Gini digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk. Skala nilai Indeks

Gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Pada periode tahun 2015 hingga 2019, Indeks Gini Provinsi Lampung menunjukkan tren yang menurun dari 0,352 tahun 2015 menjadi 0,331 pada tahun 2019 berada dibawah rata-rata Nasional sebesar 0,380. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Lampung masih cukup rendah.

Meskipun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, kesenjangan pendapatan sangat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti: peningkatan kriminalitas atau konflik sosial. Oleh karenanya, upaya melakukan redistribusi pendapatan antarkelompok pendapatan akan tetap menjadi fokus perhatian, sehingga mampu mendorong redistribusi perekonomian daerah.

Grafik II-5  
Indeks Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2015 – 2019



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2019

### Distribusi dan Ketimpangan Ekonomi Wilayah

Struktur ekonomi dapat dilihat dalam konteks kewilayahan, yakni dengan mengamati kontribusi PDRB masing-masing kabupaten/kota terhadap pembentukan total PDRB Provinsi Lampung. Di tahun 2019, kontribusi terbesar disumbang Kabupaten Lampung Tengah sebesar 19,75 persen, disusul Kota Bandar Lampung di posisi ke dua dengan kontribusi sebesar 16,34 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Pesisir Barat sebesar 1,28 persen dan Kota Metro 1,75 persen serta Kabupaten Lampung Barat 1,97 persen.

Tabel II-20  
Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung  
terhadap Total PDRB Tahun 2015 – 2019 (Persen)

No.	Kabupaten Kota	2015	2016	2017	2018	2019
1	Lampung Barat	2.03	2.00	1.98	1.97	1.97
2	Tanggamus	4.41	4.38	4.34	4.32	4.30
3	Lampung Selatan	12.44	12.42	12.38	12.38	12.38
4	Lampung Timur	12.13	11.77	11.68	11.83	11.68
5	Lampung Tengah	19.35	19.62	19.70	19.69	19.75
6	Lampung Utara	6.67	6.67	6.64	6.58	6.62
7	Way Kanan	3.98	3.93	3.91	3.89	3.88
8	Tulang Bawang	6.41	6.40	6.42	6.40	6.39
9	Pesawaran	4.64	4.57	4.52	4.50	4.50
10	Pringsewu	3.18	3.16	3.13	3.09	3.09
11	Mesuji	2.90	2.88	2.89	2.90	2.90
12	Tulang Bawang Barat	3.22	3.22	3.18	3.18	3.16
13	Pesisir Barat	1.28	1.29	1.28	1.27	1.28
14	Bandar Lampung	15.61	15.91	16.19	16.26	16.34
15	Metro	1.76	1.78	1.77	1.75	1.75
	Jumlah	100	100	100	100	100

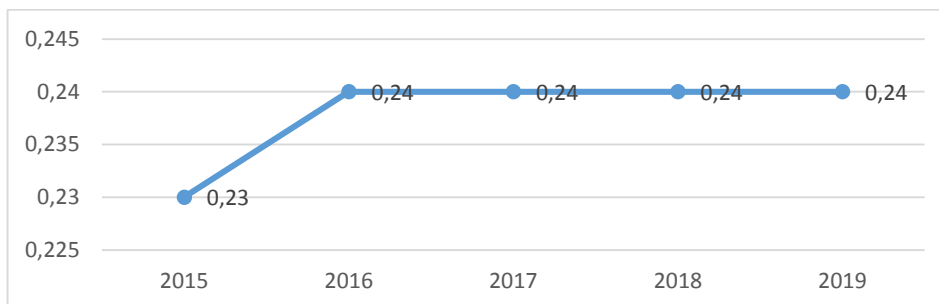
(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019)

### 2.2.1.5 Ketimpangan Ekonomi Wilayah (Indeks Williamson)

Kesenjangan antarwilayah di Provinsi Lampung tidak terlepas dari adanya keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur daerah, dan faktor-faktor lain, termasuk diantaranya kemampuan ekonomi dan keuangan pemerintah daerah.

Salah satu model yang cukup representatif untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi antar wilayah adalah Indeks Williamson. Skala nilai Indeks Williamson berada pada kisaran 0 hingga 1. Angka nol menunjukkan tingkat perekonomian wilayah yang sangat merata, sementara angka satu menunjukkan tingkat perekonomian wilayah yang sangat tidak merata (sangat timpang).

Grafik II-6  
Indeks Williamson Provinsi Lampung



Sumber : BPS 2019, data diolah

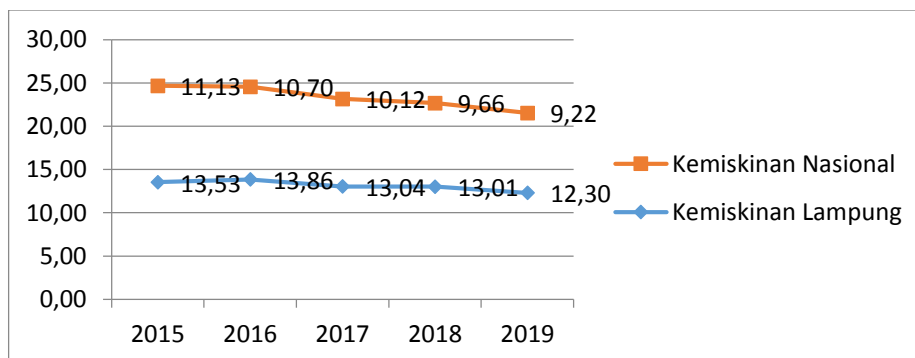
Indeks *Williamson* Provinsi Lampung sepanjang periode tahun 2015-2018 cenderung stabil. Nilai indeks pada tahun 2015 sebesar 0,23 meningkat menjadi 0,24 di tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019. Secara teoritis, angka kesenjangan tersebut masih berada pada tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah yang rendah (kurang dari 0,35).

### 2.2.1.6. Kemiskinan

#### Persentase penduduk miskin

Perentase penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami penurunan dari 13,01 persen di tahun 2018 menjadi 12,30 persen di 2019, namun angka kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas persentase penduduk miskin secara Nasional yang pada tahun 2019 berada pada angka 9,22 persen.

Grafik II-7  
Persentase Penduduk Miskin Indonesia dan Lampung  
Tahun 2015 – 2019



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019

Berdasarkan metode penghitungannya, bahwa tingkat kemiskinan tersebut menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar terhadap makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk (Rp/kapita/bulan). Artinya, tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh tingkat daya beli.

**Tabel II-21**  
**Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung**  
**Tahun 2015 – 2019 (Ribu Jiwa)**

<b>LOKASI</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Kota</b>	197,94	227,44	211,97	230,20	224,69
<b>Desa</b>	902,74	912,34	871,77	861,40	816,79
<b>Kota + Desa</b>	1.100,68	1.139,78	1.083,74	1.091,60	1041,48

*Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019*

Berdasarkan Tabel II-21, penduduk miskin di Provinsi Lampung pada tahun 2019 berada lebih banyak di wilayah perdesaan yaitu sebesar 816,79 ribu jiwa, angka tersebut tercatat menurun dibandingkan tahun 2018 sebesar 861,40 ribu jiwa sedangkan di wilayah perkotaan juga mengalami penurunan yaitu dari sebesar 230,20 ribu jiwa tahun 2018 menjadi 224,69 ribu jiwa tahun 2019.

Selanjutnya berdasarkan tabel II-22, kondisi kemiskinan ditingkat Kabupaten/Kota juga harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Utara sebanyak 15,24 persen, Kabupaten Pesawaran sebesar 15,19 persen dan Kabupaten Lampung Utara sebesar 19,9 yang merupakan 3 (tiga) Kabupaten termiskin di Provinsi Lampung.

**Tabel II-22**  
**Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota**  
**Tahun 2015 - 2019 (Persen)**

<b>Wilayah</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin (Persen)</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Lampung Utara	23.2	22.92	21.55	20.85	19.9
Pesawaran	17.61	17.31	16.48	15.97	15.19
Lampung Timur	16.91	16.98	16.35	15.76	15.24



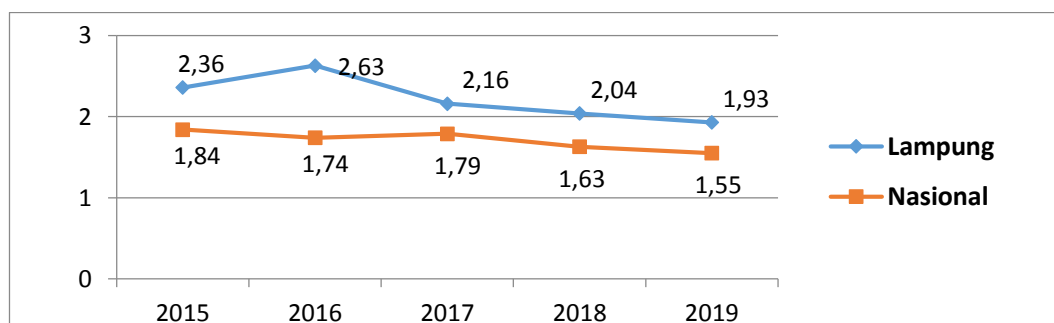
Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Lampung Selatan	16.27	16.16	15.16	14.86	14.31
Pesisir Barat	15.81	15.91	15.61	14.98	14.48
Lampung Barat	14.18	15.06	14.32	13.54	12.92
Way Kanan	14.61	14.58	14.06	13.52	13.07
Tanggamus	14.26	14.05	13.25	12.48	12.05
Lampung Tengah	13.3	13.28	12.90	12.62	12.03
Pringsewu	11.8	11.73	11.30	10.5	10.15
Tulang Bawang	10.25	10.2	10.09	9.7	9.35
Bandar Lampung	10.33	10.15	9.94	9.04	8.71
Metro	10.29	10.15	9.89	9.14	8.68
Tulang Bawang Barat	8.23	8.4	8.11	8.1	7.75
Mesuji	8.2	8	7.66	7.55	7.47
<b>Provinsi</b>	<b>14.35</b>	<b>14.29</b>	<b>13.69</b>	<b>13.14</b>	<b>12.30</b>

(Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2019)

### Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman kemiskinan Provinsi Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung menurun dari 2,36 persen di tahun 2015 menjadi 1,93 persen di 2019, dan angka kedalaman kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas persentase penduduk miskin secara Nasional yang pada tahun 2019 berada pada angka 1,55 persen.

Grafik II-8  
Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Indonesia dan Lampung tahun 2015 - 2019 (persen)

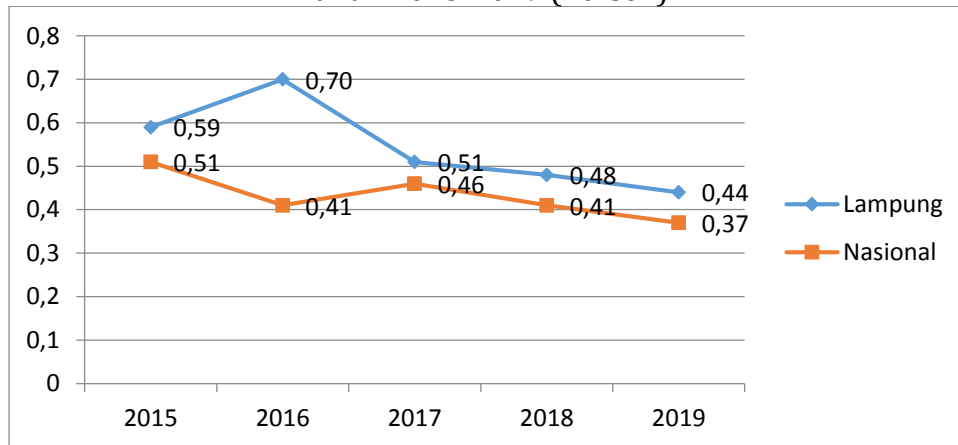


(Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2019)

## Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan berguna untuk memberi gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung menurun dari 0,59 persen di 2015 menjadi 0,44 persen di 2019, dan Keparahan Kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas persentase penduduk miskin secara Nasional yang pada tahun 2019 berada pada angka 0,37 persen.

Grafik II-9  
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional dan Lampung  
Tahun 2015-2019 (Persen)

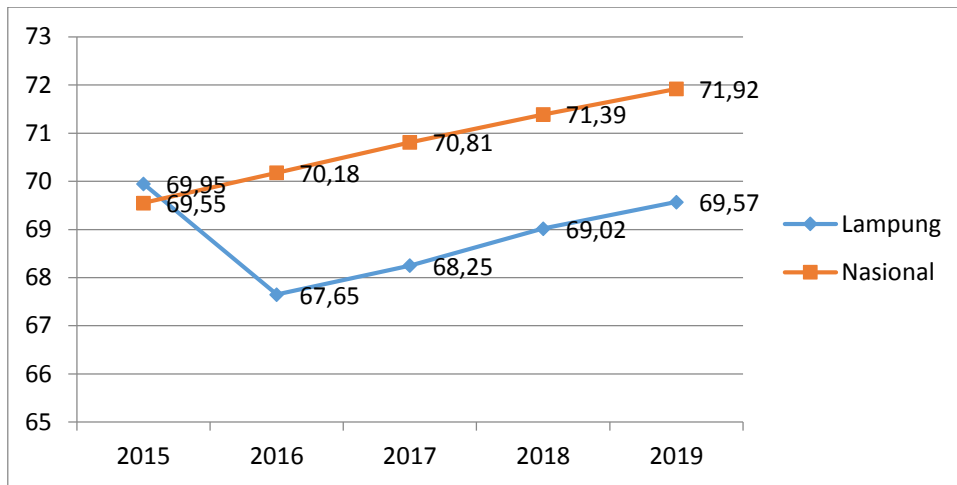


(Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2019)

### 2.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Selama periode tahun 2016 s.d. 2019 IPM Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 67,65 di tahun 2016 menjadi 69,57 di tahun 2019. Namun, peningkatan IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata IPM Nasional sebesar 71,92.

Grafik II-10  
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dan Indonesia  
Tahun 2015 – 2019



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2019

Dilingkup Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung adalah daerah dengan tingkat Pembangunan Manusia tertinggi yakni sebesar 77,33, diikuti Kota Metro sebesar 76,77 dan Kabupaten Lampung Tengah sebesar 70,04. Sedangkan Kabupaten dengan IPM terendah adalah Kabupaten Mesuji sebesar 63,52; diikuti Kabupaten Pesisir Barat sebesar 63,79 dan Kabupaten Pesawaran sebesar 65,75.

Tabel II-23  
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota,  
Tahun 2015 – 2019

Wilayah	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Lampung Barat	64.54	65.45	66.06	66.74	67.5
Kabupaten Tanggamus	63.66	64.41	64.94	65.67	66.37
Kabupaten Lampung Selatan	65.22	66.19	66.95	67.68	68.22
Kabupaten Lampung Timur	67.10	67.88	68.05	69.04	69.34
Kabupaten Lampung Tengah	67.61	68.33	68.95	69.73	70.04
Kabupaten Lampung Utara	65.20	65.95	66.58	67.17	67.63
Kabupaten Way Kanan	65.18	65.74	65.97	66.63	67.19
Kabupaten Tulang Bawang	66.08	66.74	67.07	67.70	68.23

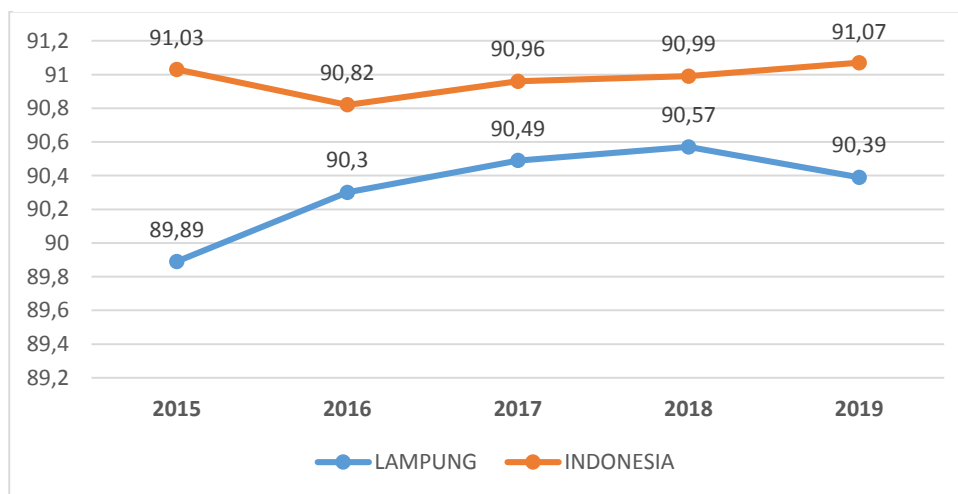
Wilayah	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Pesawaran	62.70	63.47	64.43	64.97	65.75
Kabupaten Pringsewu	67.55	68.26	68.61	69.42	69.97
Kabupaten Mesuji	59.79	60.72	61.87	62.88	63.52
Kabupaten Tulang Bawang Barat	63.01	63.77	64.58	65.30	65.93
Kabupaten Pesisir Barat	60.55	61.50	62.20	62.96	63.79
Kota Bandar Lampung	74.81	75.34	75.98	75.63	77.33
Kota Metro	75.10	75.45	75.87	76.22	76.77
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>66.95</b>	<b>67.65</b>	<b>68.25</b>	<b>69.02</b>	<b>69.57</b>

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2019

### 2.2.1.8 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Lampung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan dari 89,89 tahun 2015 menjadi 90,39 tahun 2019 namun angka ini masih dibawah angka nasional. Meskipun dibawah nasional, dengan adanya peningkatan nilai IPG tersebut, mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung secara konsisten berusaha untuk melakukan penyetaraan gender (pengarusutamaan gender).

Grafik II-11  
Indeks Pembangunan Gender Provinsi Lampung dan Indonesia  
Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2019

Peningkatan IPG Provinsi Lampung diikuti juga dengan peningkatan IPG Kabupaten/Kota, tercatat pada tahun 2018 dari 15 Kabupaten/kota terdapat 6 Kabupaten/Kota yang nilai IPGnya berada diatas Provinsi yaitu ; Kota Metro, Bandar Lampung, Pesisir Barat, Lampung Barat, Tanggamus, dan Pringsewu. Sedangkan Kabupaten dengan tingkat IPG terendah adalah Kabupaten Mesuji sebesar 84,49.

Tabel II-24  
 Persentase IPG Menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung  
 Tahun 2013-2018

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2013	2014	2015	2017	2018
Lampung Barat	91,29	91,54	91,65	92,47	92,74
Tanggamus	89,35	89,61	89,79	90,71	91,14
Lampung Selatan	88,37	88,82	88,89	89,52	89,87
Lampung Timur	87,28	87,42	87,51	87,85	88,67
Lampung Tengah	88,97	88,99	89,08	89,23	89,57
Lampung Utara	87,48	87,69	87,85	88,69	89,34
Way Kanan	87,28	87,45	87,54	87,85	88,25
Tulang Bawang	86,99	87,39	88,08	88,51	88,69
Pesawaran	84,70	85,33	86,13	87,25	87,57
Pringsewu	91,95	92,27	92,37	92,26	92,59
Mesuji	81,16	83,36	84,38	83,82	84,49
Tulang Bawang Barat	87,09	87,42	87,93	88,08	88,53
Pesisir Barat	90,67	92,18	92,07	92,84	93,40
Kota Bandar Lampung	93,00	93,25	93,69	93,53	93,55
Kota Metro	92,86	94,61	94,64	94,97	94,98
<b>LAMPUNG</b>	<b>88,84</b>	<b>89,62</b>	<b>89,89</b>	<b>90,49</b>	<b>90,57</b>

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2018

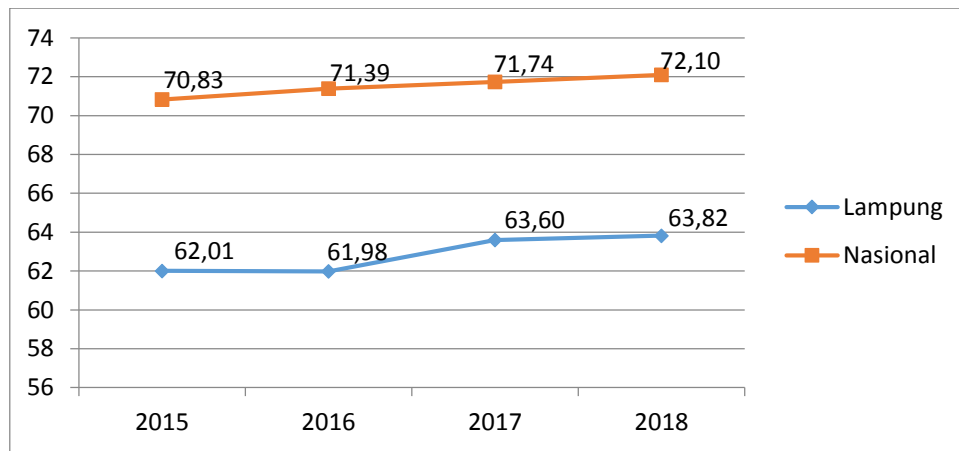
*\*) Kondisi Data S/d Maret 2019 ; Angka Indeks Pembangunan Gender Provinsi Lampung pada tahun 2019 adalah 90,39 namun pada tingkat Kabupaten/Kota data belum tersedia.*

### 2.2.1.9 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Komposit pembentuk IDG adalah (1) keterlibatan perempuan di parlemen, (2) perempuan sebagai tenaga profesional, dan (3) sumbangan pendapatan perempuan. IDG Provinsi Lampung tahun 2018 adalah 63,82, berada di bawah rata-rata IDG Nasional sebesar 72,10. *Trend* IDG Provinsi Lampung tahun 2015-2018 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.

Grafik II-12  
Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Lampung dan Indonesia  
Tahun 2015-2018



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2018

Dilingkup Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Kabupaten dengan IDG tertinggi adalah Kota Metro sebesar 78,75 diikuti oleh Kabupaten Tanggamus sebesar 69,90 dan Kabupaten Pesawaran sebesar 67,03. Sedangkan IDG terendah adalah Kabupaten Lampung Tengah sebesar 53,52.

Tabel II-25  
Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung  
Tahun 2013-2018

Wilayah	2013	2014	2015	2017	2018
Lampung Barat	68,07	49,16	59,86	60,47	63,84
Tanggamus	55,94	63,69	68,17	69,77	69,90
Lampung Selatan	61,22	58,33	56,88	57,66	58,14
Lampung Timur	62,92	60,86	60,71	60,01	60,73
Lampung Tengah	59,36	52,09	55,64	55,75	53,52
Lampung Utara	61,28	54,37	60,17	60,90	61,41



Wilayah	2013	2014	2015	2017	2018
Way Kanan	66,12	65,42	66,59	68,46	65,30
Tulang Bawang	57,88	59,96	65,43	62,78	62,52
Pesawaran	64,39	68,65	70,08	70,51	67,03
Pringsewu	60,48	62,55	62,54	62,95	63,81
Mesuji	67,68	47,61	61,12	61,40	61,71
Tulang Bawang Barat	55,37	54,75	59,26	62,74	59,74
Pesisir Barat	0	57,12	67,73	64,34	63,90
Kota Bandar Lampung	61,53	59,53	59,05	62,11	62,39
Kota Metro	73,93	76,29	78,54	78,92	78,75
<b>LAMPUNG</b>	<b>65,62</b>	<b>62,99</b>	<b>62,01</b>	<b>63,60</b>	<b>63,82</b>

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2018

### 2.2.1.10 Ketenagakerjaan

#### Angka Kerja, Penduduk Yang Berkerja dan Pengangguran

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yang merupakan Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Berdasarkan data pada tabel dibawah, TPAK Lampung pada lima terakhir mengalami perkembangan yang fluktuatif. Sedangkan dalam empat tahun terakhir persentase jumlah angkatan kerja yang terserap dalam dunia kerja terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2016 persentase jumlah angkatan kerja yang berkerja sebesar 95,38 persen, tahun 2017 meningkat menjadi 95,67 persen, tahun 2018 menjadi 95,94 persen dan pada tahun 2019 menjadi 95,56 persen.

Tabel II-26  
Kondisi Makro Ketenagakerjaan Provinsi Lampung 2015-2019

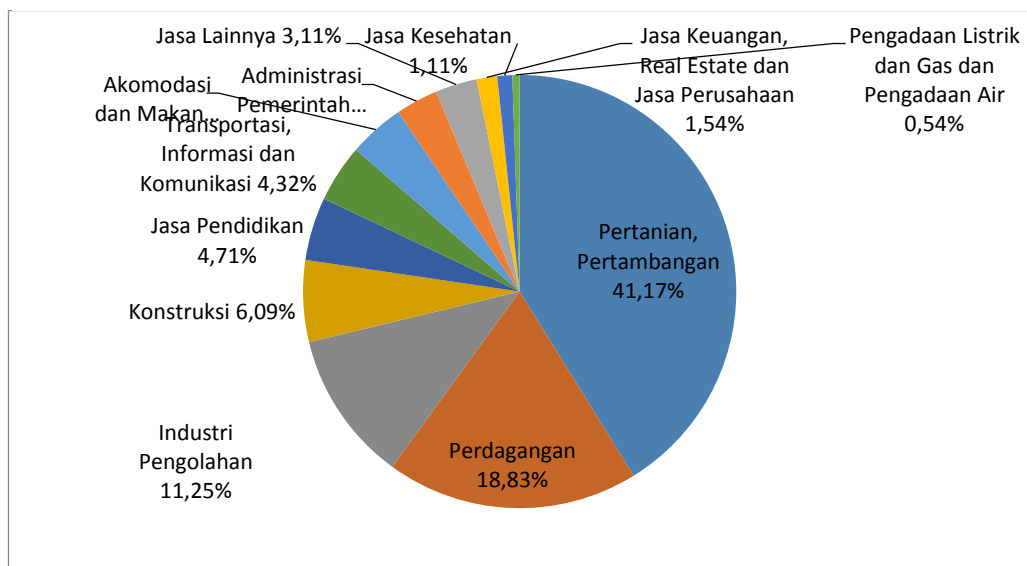
STATUS KETENAGAKERJAAN	2015	2016	2017	2018	2019
Penganggur	196,9	190,3	176,3	171,7	171,5
Bukan angkatan Kerja	2.009,9	1.799,5	1.931,2	1.842,6	1.900,70
Persentase angkatan kerja yang bekerja	94.86	95.38	95.67	95.94	95.56
TPAK	65.59	69.61	67.83	69.67	69.09

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019

## Distribusi Tenagakerja

Data BPS bulan Agustus 2019 masih menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor paling dominan dalam penyerapan lapangan kerja yang mencapai 41,17 persen, diikuti oleh sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi sebesar 18,83 persen. Besarnya sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi mengindikasikan semakin besarnya peluang sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), nonformal, dan jasa-jasa yang merujuk pada sektor pariwisata. Hal ini merupakan sinyal positif untuk mengurangi ketergantungan sektor pertanian yang cenderung bersifat musiman.

Grafik II-13  
Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Kerja, Agustus 2019



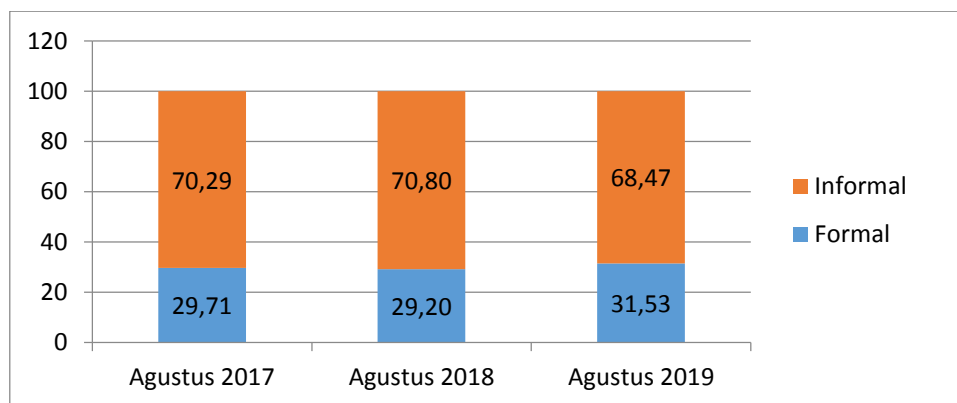
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019

Distribusi tenaga kerja dapat juga dilihat dari status pekerjaan. Terdapat 7 status pekerjaan yaitu (1) berusaha sendiri, (2) berusaha dibantu buruh tidak tetap, (3) berusaha dibantu buruh tetap, (4) buruh/karyawan, (5) pekerja bebas di pertanian, (6) pekerja bebas di nonpertanian dan (7) pekerja keluarga/tidak dibayar. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama diatas, kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan

termasuk Kategori pekerja formal dan sisanya termasuk dalam kategori pekerja informal.

Dari Grafik II-14, dapat dilihat bahwa persentase jumlah penduduk pekerja informal dari Agustus 2017 s.d 2019 fluktuatif, mengalami kenaikan dari tahun 2017 ke tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami penurunan, yaitu dari 70.29 persen pada tahun 2017, meningkat menjadi 70,80 persen pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 menurun sebesar 68.47 persen. Sedangkan pada sektor pekerja formal dari tahun pengamatan 2017 s.d 2018 mengalami peningkatan, dari 29,71 persen pada tahun 2017 menjadi 29,20 persen pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 31.53 persen pada tahun 2019.

Grafik II-14  
Persentase Jumlah Penduduk Bekerja menurut Kegiatan Formal-Informal  
Tahun 2017-2019



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019

### Tingkat Pengangguran Terbuka

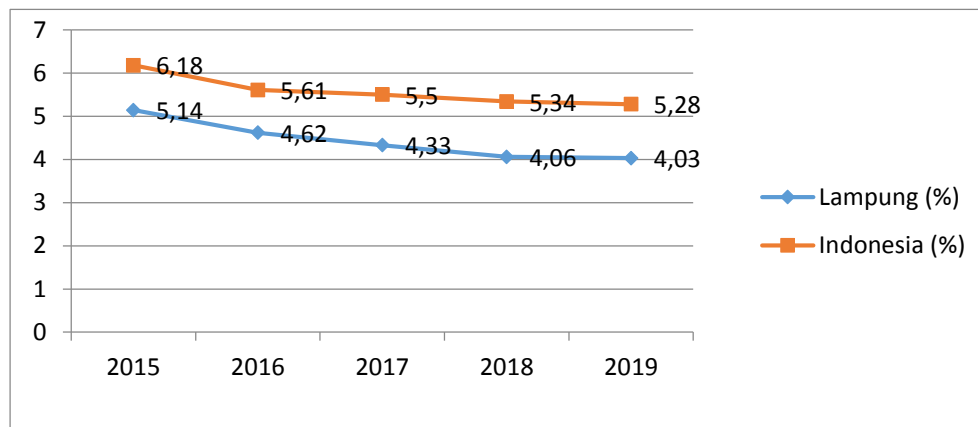
Penilaian terhadap Indikator ketenagakerjaan di suatu wilayah selain Distribusi Tenaga Kerja, adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu merupakan ukuran yang menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Tabel II-27  
Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia dan Lampung  
Tahun 2015 – 2019 (Persen)

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Lampung (%)	5,14	4,62	4,33	4,06	4,03
Indonesia (%)	6,18	5,61	5,5	5,34	5,28

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2019

Grafik II-15  
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Indonesia  
Tahun 2015 – 2019 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2019

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Lampung selama tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pada tahun periode 2015, TPT Provinsi Lampung tercatat sebesar 5,14 persen dan terus menurun hingga pada tahun 2019 sebesar 4,03 persen. Angka pengangguran Lampung ini masih di bawah angka pengangguran Nasional sebesar 5,28 persen.

Berdasarkan Tabel dibawah, sebaran penduduk yang berstatus sebagai penganggur terbuka pada periode tahun 2015-2019, jumlah penduduk yang menganggur di wilayah perdesaan (*rural area*) lebih tinggi dibanding penduduk di wilayah perkotaan (*urban area*). Di tahun 2019, sebanyak 5,55 persen angkatan kerja di perkotaan berstatus sebagai penganggur terbuka (pencari kerja), setara dengan 97,4 ribu orang jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 74,1 ribu. Sedangkan di

wilayah perdesaan (*rural area*) tingkat pengangguran tercatat 4,32 persen setara dengan 74,1 ribu orang, jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 96,9 ribu. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan jumlah pengangguran di wilayah perdesaan sedangkan di wilayah perkotaan terjadi peningkatan angka pengangguran sebesar 22,6 ribu.

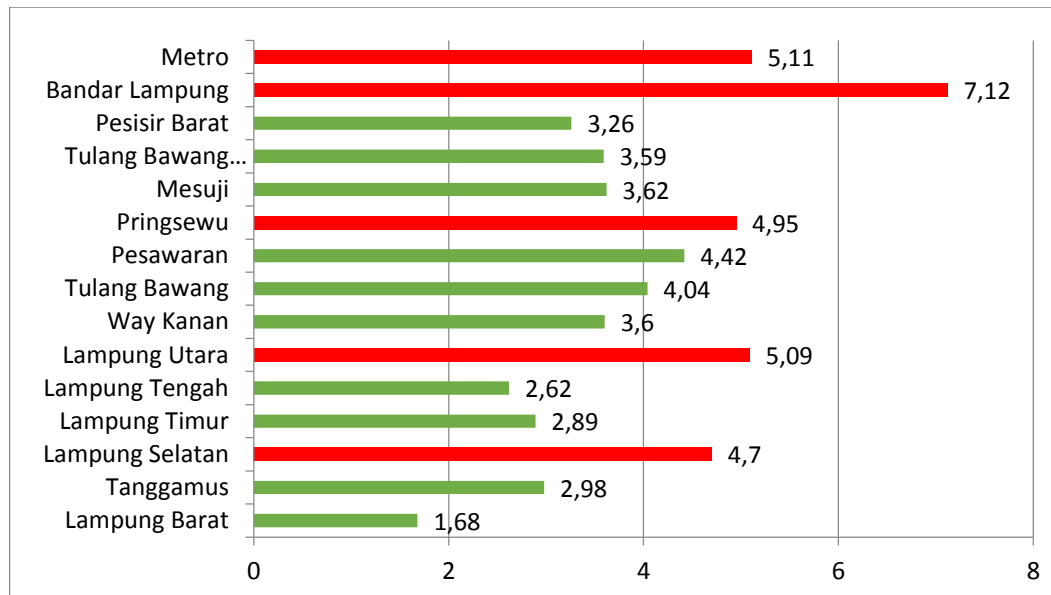
Tabel II-28  
Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Wilayah Kota-Desa  
Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019

LOKASI	2015		2016		2017		2018		2019	
	Jumlah absolut (ribu)	(%)	Jumlah absolut (ribu)	(%)	Jumlah absolut (ribu)	(%)	Jumlah absolut (ribu)	(%)	Jumlah absolut (ribu)	(%)
<b>Kota</b>	82,1	7,82	76,5	6,46	78,9	6,46	74,8	6,04	97,4	5,67
<b>Desa</b>	114,8	4,12	113,8	3,87	97,3	3,33	96,9	3,24	74,1	4,32
<b>Kota + Desa</b>	196,9	5,14	190,3	4,62	176,3	4,33	171,7	4,06	171,5	4,03

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2019

Di tingkat kabupaten/kota TPT tertinggi berada di Kota Bandar Lampung yang mencapai 7,12 persen. Angka ini selisih 2,01 persen, lebih besar dibanding TPT Kota Metro yang mencapai 5,11 persen (posisi kedua tertinggi). Ini menunjukkan bahwa TPT di perkotaan juga masih tinggi. Wilayah lain yang berada di atas rata-rata Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Lampung Utara, Pringsewu, Pesawaran dan Lampung Selatan. Sedangkan Lampung Barat berada di posisi terendah untuk kategori TPT dengan angka 1,68 persen.

**Grafik II-16**  
Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota  
se-Provinsi Lampung 2019



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2019

#### 2.2.1.11 Persentase PAD terhadap Pendapatan

Persentase PAD terhadap Pendapatan didapat dari PAD dibagi jumlah pendapatan. Rasio Target PAD terhadap target APBD dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami fluktuasi, diawali 47,40% di tahun 2015 dan sebesar 40,52% di tahun 2019. Hal ini dapat dilihat pada Tabel II-29 dan Grafik II-17

**Tabel II-29**  
Rasio PAD terhadap APBD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

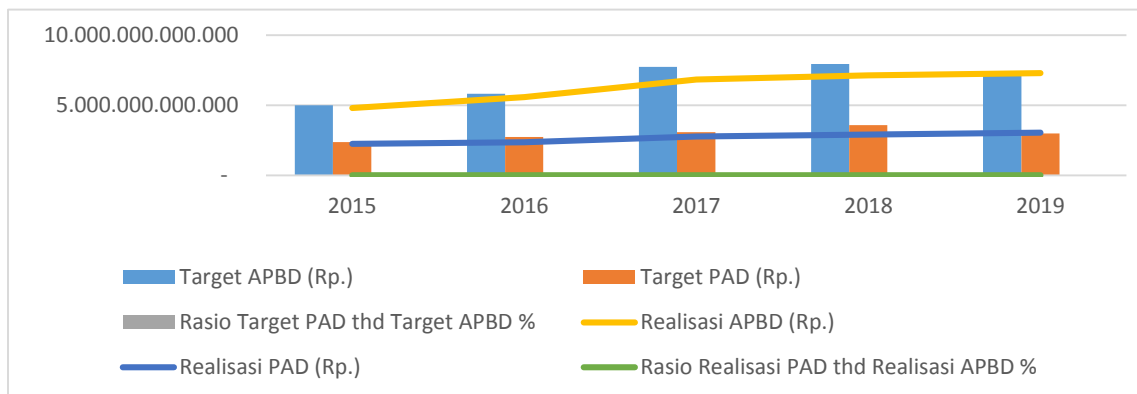
No.	Thn	Target APBD (Rp.)	Target PAD (Rp.)	Rasio Target PAD thd Target APBD %	Realisasi APBD (Rp.)	Realisasi PAD (Rp.)	Rasio Realisasi PAD thd Realisasi APBD %
1	2015	4,987,226,142,596	2,363,789,222,943	47.40	4,789,035,573,578	2,247,288,679,813	46.93
2	2016	5,825,907,142,160	2,739,699,673,189	47.03	5,585,023,474,025	2,365,097,213,971	42.35
3	2017	7,725,116,345,282	3,080,908,289,668	39.88	6,822,818,640,215	2,759,859,176,654	40.45
4	2018	7,935,916,843,959	3,565,784,165,917	44.93	7,137,049,975,851	2,902,313,507,327	40.67
5	2019	7,371,432,528,025	2,987,249,600,061	40,52	7,277,774,464,693	3,029,324,859,696	41.62

Sumber: Bank Indonesia, 2019



Sama halnya dengan Rasio Realisasi PAD terhadap Realisasi APBD dari tahun 2015 sampai tahun 2018 mengalami fluktuasi, diawali 46,93% di tahun 2015 terus menurun hingga 40,67% di tahun 2018 dan akhirnya mengalami pelambatan peningkatan menjadi 41,62% di tahun 2019.

Grafik II-17  
Rasio PAD terhadap APBD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019



(Sumber: Bank Indonesia, diolah)

#### 2.2.1.12 Opini BPK

Pemerintah Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2015-2019 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Pemberian penilaian Opini WTP diberikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya dalam perbaikan dan peningkatan terhadap Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi. Capaian SAKIP Provinsi Lampung pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dari tahun 2015, yaitu dari predikat **CC** tahun 2015 menjadi predikat **B** pada tahun 2016. Sedangkan untuk hasil penilaian Sakip tahun 2017, 2018 menjadi predikat **B** dan 2019 mendapat predikat **B**.

Capaian Reformasi Birokrasi Provinsi Lampung tahun 2016 juga mengalami peningkatan dari 21,37 (D) pada tahun 2015 menjadi 56,13 (CC) pada tahun 2016. Sedangkan untuk hasil penilaian Reformasi Birokrasi tahun

2017 dan 2018 adalah 57,63 (C) dan 58,49 (CC) dan pada Tahun 2019 meningkat menjadi 60,05 (B)

### 2.2.1.13 Angka Kriminalitas

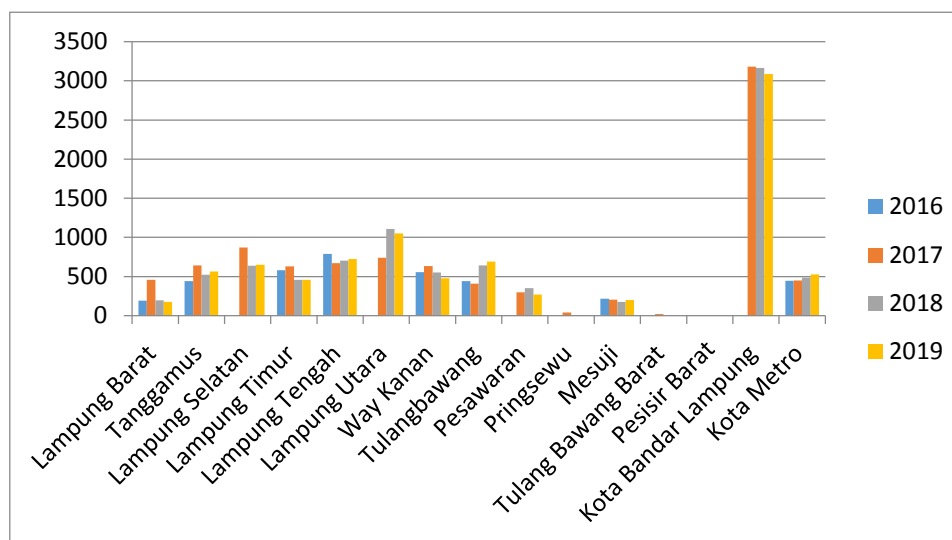
Dari Tabel II-31 dan Grafik II-21 ,dapat dilihat bahwa angka kriminalitas di Kabupaten/Kota paling banyak terjadi di kota Bandar Lampung, disusul kemudian Kabupaten Lampung Utara, yang mengindikasikan pada kabupaten dan kota tersebut banyak pelaku kejahatan yang mayoritas begal dan perampok.

Tabel II-30  
Angka Kriminalitas di Kab/Kota se-Provinsi Lampung  
Tahun 2016-2019

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEJAHATAN PADA TAHUN			
	2016	2017	2018	2019
Lampung Barat	191	456	198	176
Tanggamus	442	640	522	563
Lampung Selatan	1.069	871	639	650
Lampung Timur	582	629	456	456
Lampung Tengah	789	671	703	723
Lampung Utara	1.282	741	1107	1049
Way Kanan	558	633	552	478
Tulang Bawang	440	408	640	690
Pesawaran	-	298	350	268
Pringsewu	-	40	-	-
Mesuji	217	206	175	201
Tulang Bawang Barat	-	20	-	-
Pesisir Barat	-	-	-	-
Kota Bandar Lampung	3.034	3181	3165	3087
Kota Metro	447	451	487	528
<b>Lampung</b>	<b>7923</b>	<b>8926</b>	<b>8994</b>	<b>8929</b>

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019

Grafik II-18  
Angka Kriminalitas Kab/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2016-2019



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019

#### 2.2.1.14 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Indikator kualitas konsumsi pangan dijabarkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang sangat tergantung oleh keberagaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. Skor PPH ini digunakan sebagai perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah.

Tabel II-31  
Skor PPH Provinsi Lampung Tahun 2013-2019

Keterangan	2014	2015*	2016*	2017	2018	2019
Angka Kecukupan Energi (Kkal/kap/hr)	2062,4	1841,5	1856,5	1963,9	2091,5	2037,5
Persen AKE	103,1	92,1	92,8	97,1	104,3	112,29
Angka Kecukupan Protein (Gram/kap/hr)	54,6	49,6	50,3	54,46	63,3	58
Persen AKP	105,0	95,4	96,7	104,7	104,6	101,9
Skor PPH	83,4	79,3	78	90,6	90,4	91,1

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung

Data menunjukkan, skor PPH Lampung tahun 2014 mendapatkan nilai yang baik sebesar 83,4, namun terus menurun hingga menjadi 78 di tahun

2016. Akan tetapi pada tahun 2017 meningkat sehingga mencapai 90,6 dan tahun 2018 mengalami penurunan mencapai 90,4 dan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 91,1. Skor PPH ini menunjukkan tingkat keragaman konsumsi pangan di Lampung.

#### 2.2.1.15 Penguatan Cadangan Pangan

Pada tahun 2016, 2018, dan 2019, produksi terbesar terdapat pada komoditas buah-buahan yaitu sebanyak 18.403.470, 21.760.156, dan 20.622.357 buah, sedangkan pada tahun 2017, produksi terbesar selain komoditas buah-buahan sebanyak 12.503.670 juga komoditas ubi kayu, yaitu sebanyak 5.451.312 batang ubi kayu. Hal ini dapat dilihat pada Tabel II-35.

Tabel II-32  
Ketersediaan Bahan Pangan Provinsi Lampung berdasarkan Atap  
Tahun 2016-2019

No.	Komoditas	2016		2017		2018		2019	
		produksi	surplus / minus	produksi	surplus / minus	produksi	surplus / minus	produksi	surplus / minus
1	Beras	2,355,419.00	1,467,655	2,489,323	1,588,733	2,460,774	1,666,860	1,226,022	1,896,705
2	Jagung	1,720,196.00	1,525,040	2,518,895	2,235,882	2,179,624	2,176,657	2,113,202	2,321,178
3	Kedelai	9,960.00	-92.41	8,027	-101.7	66,511	(37,339)	12,318	(4,294)
4	Kc. Tanah	4,842.00	1,633	4,401	1,016	3,414	1,634	4,043	2,263
5	Kc. Hijau	1,347.00	264	1,265	187	1,216	227	1,096	106
6	Ubi Kayu	6,481,382.00	5,457,744	5,451,312	4,582,184	4,297,272	4,245,841	4,929,044	5,735,377
7	Ubi Jalar	23,603.00	3,957	22.78	-3,691	2108.16	(2,655)	17,545	(6,193)
8	Buah-buahan	18,403,470	16,264,046	12,503,670	10,954,226	21,760,156		20,622,357	
9	Daging Sapi	12,609.00	6,177	12,991	11,409	13,475	11,794	13,475	11,794
10	Daging Ayam ras/buras	47,303.00	6,656	50,045	5,735	53,811	24,436	42,487	24,436
11	Telur (ayam, itik)	51,893.00	59,937	79,783	9,559	80,116	991	80,116	991
12	Ikan	242,122.00	16,636	328,409	89,980				
13	Susu	669.33	-24.06	681	-24.05	653.151	(22,095)		
14	Gula Pasir	788,783.00	35,915	788,783	700.76	630,440	547,359	630,440	547,359
15	Bawang Merah	2,567.00	-314.6	2,821	-314.4	3,608	(27,152)	36,282	(27,939)
16	Minyak Goreng	130187	1412	129,167	392	542,902	421,248	542,902	421,248

No.	Komoditas	2016		2017		2018		2019	
		produksi	surplus / minus	produksi	surplus/ minus	produksi	surplus/ minus	produksi	surplus/ minus
17	Cabe Merah	47,883.00	20,732	50,203	23,052	43,038	25,631	401,010	32,796

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung

## 2.2.2 Aspek Daya Saing

### 2.2.2.1 Nilai Tukar Petani

NTP dihitung dari rasio Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) dengan Indeks Harga yang Dibayarkan Petani (IB). Penghitungan IB mencakup seluruh pengeluaran rumah tangga petani termasuk bahan makanan, sekolah, berobat, membeli sandang, papan, biaya produksi dan lainnya sehingga tidak mencerminkan pengeluaran riil dari usahanya. Sebagai respon atas kelemahan NTP, maka digunakan juga indikator Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) yaitu rasio indeks harga yang diterima petani dari usaha pertanian dengan indeks harga yang dibayarkan petani untuk pengeluaran usaha pertanian. NTUP Provinsi Lampung untuk seluruh sub sektor di atas nilai 100 yang menunjukkan petani mengalami surplus.

NTP sektor pertanian tahun 2019 pada sub sektor Perikanan tangkap padi palawija dan peternakan mempunyai nilai yang tinggi yaitu sebesar 119,21, 115,78 dan 115,08 sedangkan NTP dari subsektor tanaman perkebunan rakyat menyumbang NTP terkecil yaitu sebesar 85,87.

Tabel II-33  
Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung Tahun 2019

Subsektor					
Padi & Palawija	Hortikultura	Tanaman Perkebunan Rakyat	Peternakan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya
2019	2019	2019	2019	2019	2019
115,78	92,12	85,87	115,08	119,21	95,64

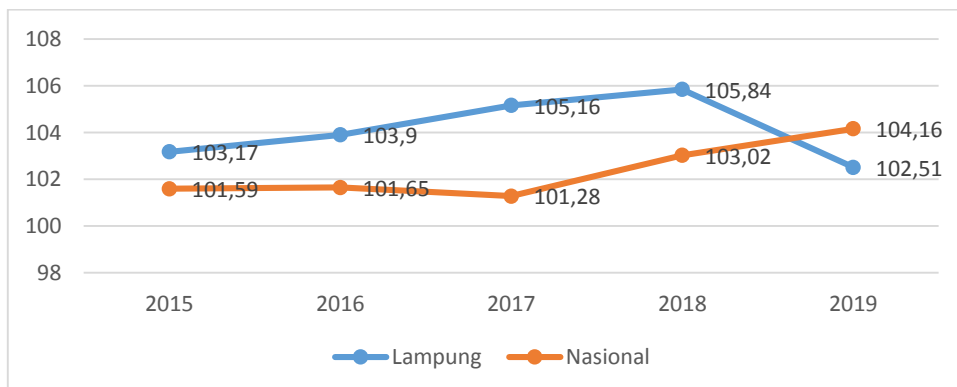
Tabel II-34  
 Nilai Tukar Petani se-Sumatera Tahun 2015-2019

Provinsi	Nilai Tukar Petani (NTP)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	96.64	96.27	94.74	94.73	101.09
Sumatera Utara	98.61	100.18	99.39	97.98	113.69
Sumatera Barat	97.74	98.90	96.97	95.31	103.40
Riau	95.24	98.68	102.97	97.97	123.93
Kepulauan Riau	99.45	98.16	97.54	96.5	101.38
Jambi	95.43	98.59	100.78	99.48	110.47
Sumatera Selatan	96.87	94.58	95.03	93.61	100.64
Kepulauan Bangka Belitung	104.70	101.43	95.79	86.88	105.92
Bengkulu	93.92	93.06	94.49	94.01	116.71
Lampung	103.17	103.90	105.16	105.84	102.51

Sumber: BPS Lampung, 2019

Dari Grafik dibawah, dapat dilihat NTP Provinsi Lampung dari tahun 2015 sampai tahun 2018 terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2019 menurun sebesar 3,33 dibanding tahun 2018, sedangkan NTP di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2015 hingga tahun 2017, selanjutnya meningkat terus hingga tahun 2019 dengan NTP sebesar 104,16, angka tersebut lebih tinggi dari NTP provinsi Lampung yang senilai 102,51.

Grafik II.19  
 Tren Nilai Tukar Petani antara Provinsi Lampung dan Indonesia



Sumber: BPS 2019 diolah



### 2.2.2.2 Rasio pinjaman terhadap simpanan di Perbankan

Rasio pinjaman terhadap simpanan atau dalam bahas inggris disebut dengan loan to deposit rasio (LDR), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (bisa disebut dengan likuiditas) dengan membagi total kredit terhadap total Dana Pihak Ketiga. Likuiditas perbankan perlu dikelola guna memenuhi kebutuhan saat nasabah mengambil dananya dan pada saat menyalurkan pinjaman (kredit) kepada peminjam (debitur).

Disuatu waktu jika nilai LDR terlalu tinggi, artinya perbankan tidak memiliki likuiditas yang cukup memadai untuk menutup kewajibannya terhadap nasabah (DPK). Sebaliknya jika nilai LDR terlalu rendah ini artinya perbankan memiliki likuiditas yang cukup akan tetapi profit yang didapat menjadi lebih rendah.

Tabel II-35  
Tabel Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Perbankan

KETERANGAN	2015	2016	2017	2018	2019
PDRB - ADHB (Rp)	252.883.103	279.417.617	306.700.431	333.670.883	333.670.883
KREDIT - LOKASI PROYEK (Rp)	60.756.477	65.174.832	68.139.692	78.609.927	83.461.712
Rasio Kredit thd. PDRB (%)	23,58	24,03	23,33	22,22	23,56
KREDIT - LOKASI BANK (Rp Miliar)	48.709.741	52.603.804	64.369.882	64.356.858	65.867.315
DANA PIHAK KETIGA - LOKASI BANK (Rp Miliar)	36.628.078	39.978.367	43.651.898	47.037.222	49.545.284
LDR (Loan to Deposit Ratio) - (%)	148.8680484	133,2058434	147,4618162	136,8211301	132,9436645

Sumber: Bank Indonesia, 2019

Lampung di tahun 2015 memiliki nilai LDR sebesar 148.86 hal ini mengartikan bahwa kemampuan pihak bank sedang dalam keadaan kurang baik, untuk tahun-tahun selanjutnya mengalami penurunan hingga 132.94 di tahun 2019 hal ini menunjukkan perubahan keuangan yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

## 2.2.3 Aspek Pelayanan Umum

### 2.2.3.1 Pendidikan

#### 2.2.3.1.1 Angka Melek Huruf

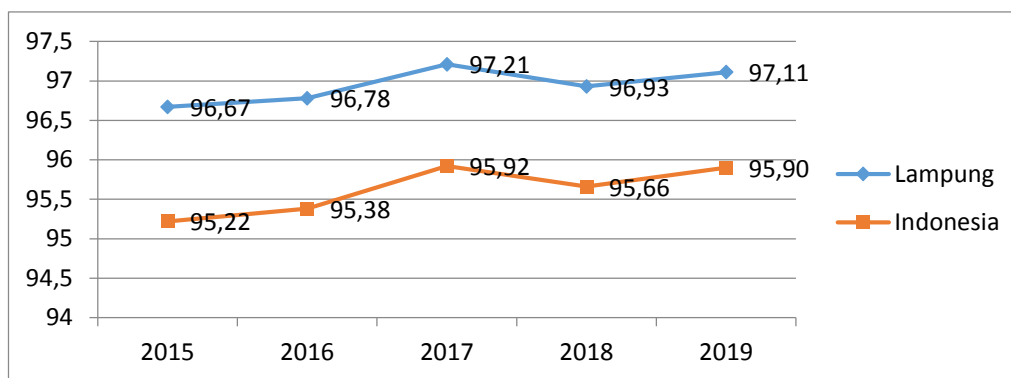
Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah dengan melihat proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis serta terbuka terhadap pengetahuan. Melihat pencapaiannya AMH Provinsi Lampung tahun 2015-2017 di daerah perkotaan maupun perdesaan terus menunjukkan peningkatan, namun menurun pada Tahun 2018 dan kembali meningkat di tahun 2019. Dari studi lapangan ditemukan adanya fakta menarik penyebab penurunan angka melek huruf, dimana banyak masyarakat yang berusia lanjut yang sudah melek huruf setelah beberapa tahun akan kembali buta huruf, ini terjadi karena kemampuan membaca yang telah dimiliki tidak lagi digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Meski fluktuatif angka melek huruf di Provinsi Lampung lebih baik dibandingkan rata-rata angka melek huruf Nasional

Tabel II-36  
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf menurut Daerah Tahun 2015-2019

Wilayah	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kota	98.08	98.41	98.55	98.23	98.36
Desa	96.15	96.18	96.69	96.38	96.55
Kota + Desa	96.67	96.78	97.21	96.93	97.11

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019

Grafik II-20  
Perbandingan Angka Melek Huruf antara Lampung dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019

### 2.2.3.1.2 Angka Partisipasi Sekolah

Ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan, namun hal tersebut tidak berarti meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Adapun APS penduduk Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-37  
Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Usia Provinsi Lampung,  
Tahun 2015-2019

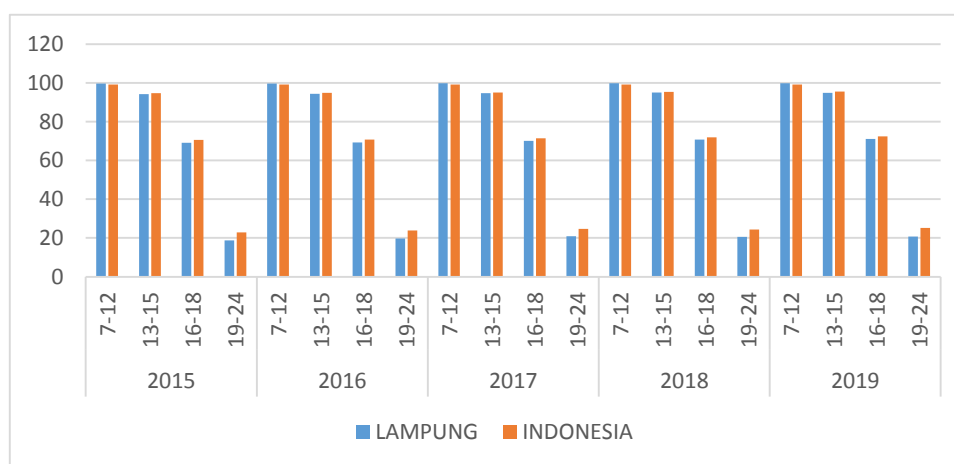
Kelompok Umur	2015	2016	2017	2018	2019
07-12	99,62	99,63	99,78	99,86	99,80
13-15	94,24	94,32	94,76	95,00	94,89
16-18	69,04	69,31	70,03	70,83	71,05
19-24	18,81	19,72	20,96	20,60	20,69

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019

Berdasarkan pengamatan tabel diatas, secara keseluruhan APS Provinsi Lampung terus meningkat pada setiap tahunnya hingga tahun 2018 terkecuali APS kelompok umur 19 – 24 yang pada tahun 2018 mengalami penurunan, hal tersebut juga sejalan dengan penurunan APS pada kelompok usia dan periode yang sama ditingkat rata-rata Nasional, dimana pada tahun

APS usia 19 – 24 di tahun 2017, sebesar 24,77 persen menurun menjadi 24,4 persen ditahun 2018 . Sebaliknya pada tahun 2019 APS menurun pada 2 kelompok umur (07 – 15 thn) dan meningkat pada 2 kelompok umur lainnya.

Grafik II-21  
Angka Partisipasi Sekolah berdasarkan usia Lampung dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019

### 2.2.3.1.3 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang Pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel II-38  
APK menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Lampung 2015-2019

Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019

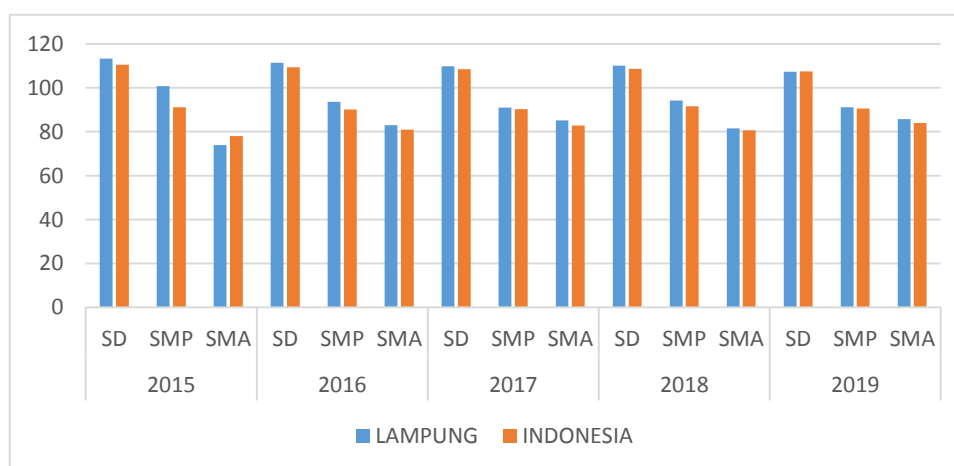
<b>SD</b>	113,38	111,44	109,77	110,11	107,36
<b>SMP</b>	100,83	93,58	91,04	94,18	91,11
<b>SMA</b>	73,9	82,98	85,16	81,56	85,73

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 APK jenjang SD dan SMP mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sementara APK SMA, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Penurunan APK SD dan SMP tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk Lampung yang bersekolah pada jenjang tersebut kini makin sesuai dengan umur yang disyaratkan. Peningkatan APK SMA menunjukkan semakin meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat Lampung untuk mengenyam Pendidikan pada jenjang pendidikan tersebut.

Dilihat dari Grafik II-24 secara umum APK Lampung pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA berada diatas rata-rata APK Nasional.

Grafik II-22  
Angka Partisipasi Kasar SD, SMP, SMA Nasional dan Lampung



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019

#### 2.2.3.1.4 Angka Partisipasi Murni

APM adalah perbandingan penduduk yang sedang sekolah dengan usiatertentu pada jenjang tertentu pula sesuai dengan peruntukannya. Dengan

kata lain APM dapat digunakan untuk mengetahui kesesuaian usia dengan tingkat pendidikan yang dijalannya. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan (Key Development Milestones) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan

Tabel II-39  
Angka Partisipasi Murni Lampung menurut Jenjang Pendidikan  
Tahun 2015-2019

Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
SD	98,32	98,46	99,02	99,21	99,24
SMP	78,2	78,34	79,24	80,23	80,4
SMA	58,39	58,85	58,97	59,18	59,41

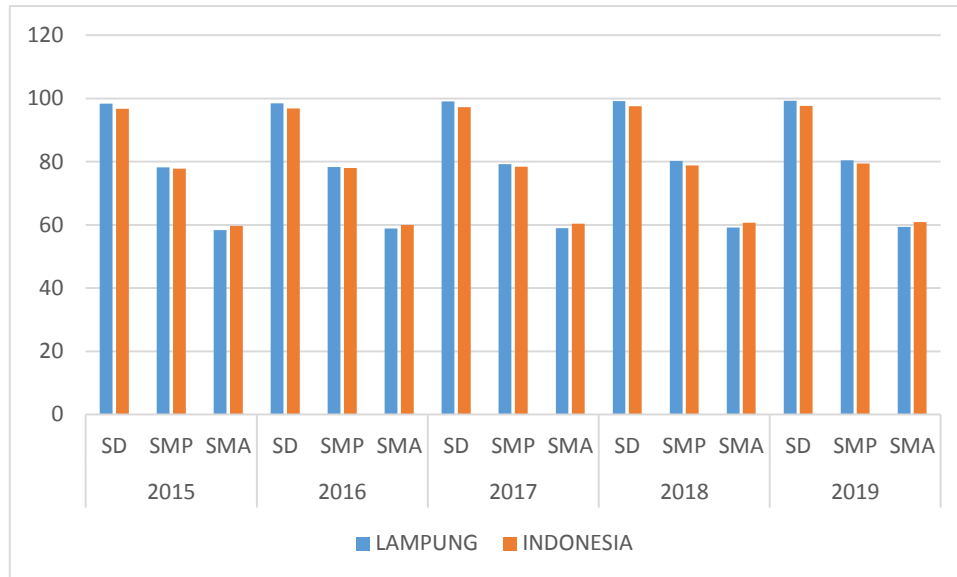
*Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019*

Dari tabel diatas, terlihat bahwa proporsi anak usia sekolah di Provinsi Lampung yang bersekolah tepat waktu pada setiap tahun terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan semakin tinggi serta fasilitas pendidikan di Provinsi Lampung semakin memadai dan semakin mudah diakses oleh masyarakat.

Pada tahun 2019, APM Provinsi Lampung pada jenjang pendidikan SD dan SMP berada diatas rata-rata Nasional, sedangkan APK Provinsi Lampung pada jenjang pendidikan SMA masih berada dibawah rata-rata Nasional.

Grafik II-23

## Perbandingan Angka Partisipasi Murni antara Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2015 – 2019



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019

### 2.2.3.1.5 Angka Putus Sekolah

Indikator Angka Putus Sekolah (APS) digunakan untuk melihat kemajuan pembangunan di bidang pendidikan, serta keterjangkauan dan pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Penilaian berdasarkan proporsi anak kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan.

Tabel II-40  
Angka Putus Sekolah (APS) Provinsi Lampung Tahun 2016-2019

Jenjang Pendidikan	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
SD sederajat	0,75	0,39	0,49	0,10
SMP sederajat	3,27	1,37	1,09	0,22
SMA sederajat	7,25	4,71	2,29	0,39

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2018, NPD 2019, data diolah

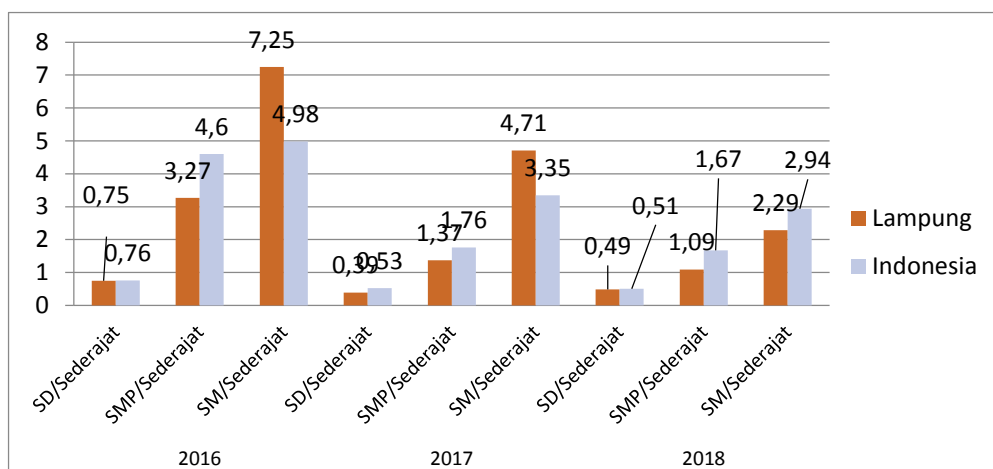
Berdasarkan pada tabel diatas, APS Provinsi Lampung secara umum sejak tahun 2016 hingga 2019 untuk semua jenjang pendidikan terus mengalami penurunan setiap tahunnya, penurunan tersebut menunjukkan



semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan semakin baik.

Pada tahun 2018 peningkatan APS terjadi pada jenjang SD sederajat, yang meningkat sebesar 0,10, meski mengalami peningkatan, namun APS tersebut lebih baik dibandingkan rata-rata APS Sekolah Dasar sederajat secara Nasional. Pencapaian lebih baik dibandingkan rata-rata Nasional juga dicapai pada APS SMP dan SMA.

Grafik II-24  
Perbandingan Angka Putus Sekolah (APS) Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2016-2018



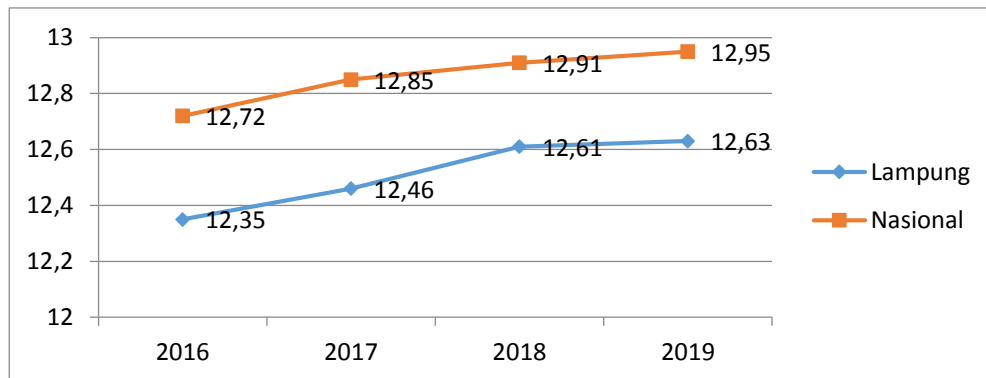
Sumber : NPD 2019, data diolah

### 2.2.3.1.6 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Grafik II-25

### Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Lampung dan Nasional



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019

Selama 4 (empat) tahun terakhir, HLS Provinsi Lampung terus meningkat. Pada tahun 2019 HLS Provinsi Lampung sebesar 12.63 namun angka tersebut masih dibawah rata-rata Nasional yang sebesar 12,95. Dilingkup Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung adalah daerah dengan HLS tertinggi yakni sebesar 14,53, diikuti Kota Metro sebesar 14,34 dan Kabupaten Lampung Tengah sebesar 12,91. Sedangkan wilayah dengan HLS terendah adalah Kabupaten Mesuji sebesar 11,62; diikuti Kabupaten Tulang Bawang 11,88 dan Pesisir Barat sebesar. 11,98.

Tabel II-41  
Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung  
Tahun 2016-2019

Wilayah	Harapan Lama Sekolah			
	2016	2017	2018	2019
Lampung Barat	12.17	12.18	12.19	12.24
Tanggamus	11.93	12.14	12.15	12.17
Lampung Selatan	11.68	12.05	12.17	12.33
Lampung Timur	12.41	12.44	12.83	12.84
Lampung Tengah	12.21	12.6	12.9	12.91
Lampung Utara	12.42	12.43	12.44	12.47
Way Kanan	12.31	12.32	12.33	12.35
Tulang Bawang	11.55	11.71	11.73	11.88
Pesawaran	12.25	12.26	12.28	12.29

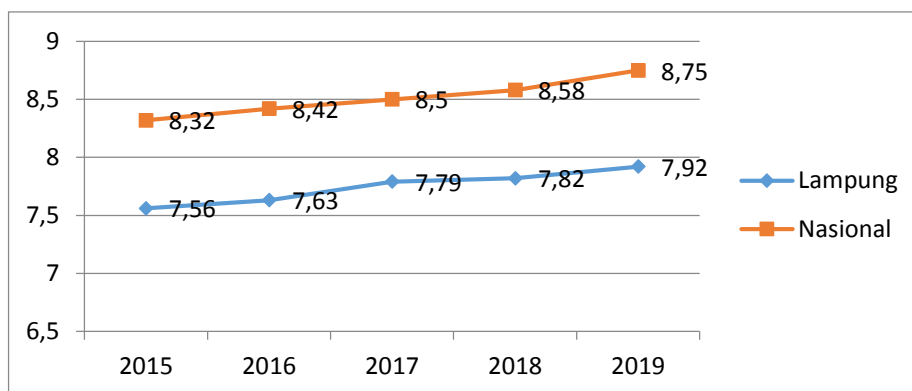
Wilayah	Harapan Lama Sekolah			
	2016	2017	2018	2019
Pringsewu	12.76	12.77	12.78	12.82
Mesuji	11.2	11.59	11.61	11.62
Tulang Bawang Barat	11.97	11.98	11.99	12.04
Pesisir Barat	11.85	11.95	11.97	11.98
Bandar Lampung	13.67	13.87	14.23	14.53
Metro	14.27	14.28	14.29	14.34
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>12.35</b>	<b>12.46</b>	<b>12.61</b>	<b>12.63</b>

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019

### 2.2.3.1.7 Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau waktu, dapat mengetahui perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia. Angka rata-rata lama sekolah memberikan gambaran tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah.

Grafik II-26  
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Lampung dan Indonesia,  
Tahun 2015 - 2019



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019

Berdasarkan pengamatan grafik diatas,RLS Provinsi Lampung terus meningkat selama 5 tahun terakhir, Pada tahun 2019,RLS Provinsi Lampung sebesar 7,92, artinya secara rata-rata penduduk Lampung yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,92 tahun. Namun angka tersebut masih dibawah rata-rata Nasional yang sebesar 8,75. Dilingkup Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung adalah daerah dengan RLS tertinggi yakni sebesar 10,92, diikuti Kota Metro sebesar 10,64 dan Kabupaten Lampung Utara sebesar 8,20. Sedangkan wilayah dengan HLS terendah adalah Kabupaten Mesuji sebesar 6,13; diikuti Kabupaten Mesuji sebesar 6,61 dan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 7,13.

Tabel II-42  
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung  
Tahun 2015-2019

Wilayah	Rata-rata Lama Sekolah				
	2015	2016	2017	2018	2019
Lampung Barat	7.27	7.28	7.33	7.6	7.85
Tanggamus	6.86	6.87	6.88	6.96	7.21
Lampung Selatan	7.24	7.53	7.66	7.67	7.68
Lampung Timur	7.20	7.55	7.56	7.57	7.59
Lampung Tengah	7.14	7.37	7.38	7.51	7.57
Lampung Utara	7.70	7.71	7.99	8.19	8.2
Way Kanan	7.32	7.33	7.34	7.35	7.39
Tulang Bawang	7.11	7.12	7.15	7.22	7.23
Pesawaran	7.23	7.24	7.45	7.47	7.6

Wilayah	Rata-rata Lama Sekolah				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pringsewu	7.83	7.84	7.85	8.01	8.19
Mesuji	6.12	6.13	6.39	6.6	6.61
Tulang Bawang Barat	6.82	6.83	7.09	7.1	7.13
Pesisir Barat	7.47	7.48	7.58	7.59	7.82
Bandar Lampung	10.87	10.88	10.89	10.9	10.92
Metro	10.55	10.56	10.57	10.61	10.64
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>7.56</b>	<b>7.63</b>	<b>7.79</b>	<b>7.82</b>	<b>7.92</b>

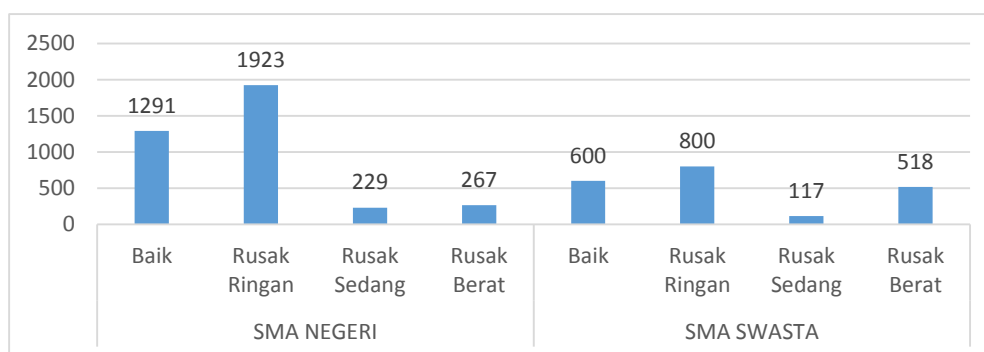
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019

### 2.2.3.1.8 Sarana Dan Prasarana

#### Sekolah Menengah Atas (SMA)

Jumlah sekolah dengan kondisi sarana dan prasarana yang baik di tingkat SMA Negeri dan SMA Swasta di provinsi Lampung yakni dari 1.291 SMA Negeri dan 600 SMA Swasta. Namun jumlah kerusakan ringan masih cukup tinggi yakni dari 1.923 SMA Negeri dan 800 SMA Swasta. Untuk sekolah yang berkondisi rusak berat pada SMA Swasta terhitung lebih tinggi yakni 518, dibandingkan dengan SMA Negeri yakni 267 sekolah. Kondisi sarana dan prasarana SMA yang cukup fluktuatif tersebut disebabkan oleh kondisi alam dan topografi dari setiap daerah serta minimnya anggaran untuk biaya pemeliharannya.

Grafik I-27  
Rasio Sarana dan Prasarana SMA 2015-2017



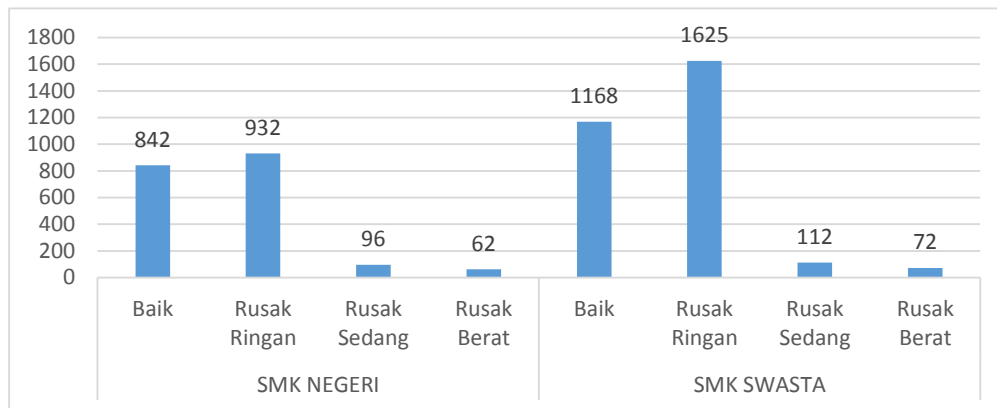
Sumber: Buku Data Pokok Kependidikan Provinsi Lampung 2018-2019.

#### Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Pola sarana dan prasarana sekolah SMK dengan kondisi baik mulai

dari tahun 2018-2019 mirip dengan kondisi SMA dengan tingkat kerusakan ringan masih cukup tinggi yaitu terdapat 932 pada SMK Negeri dan sebanyak 1.625 pada SMK Swasta.

**Grafik II-28**  
Rasio Sarana dan Prasarana SMK Negeri dan SMK Swasta Provinsi Lampung  
Tahun 2018-2019



Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), 2018

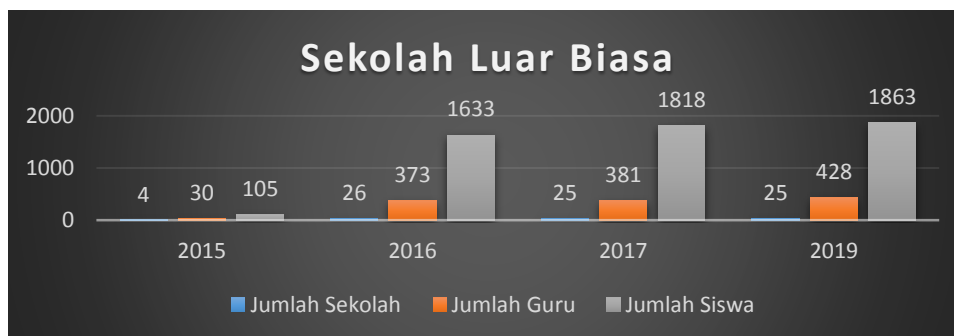
### **Sekolah Luar Biasa (SLB)**

Jumlah sekolah SLB di Provinsi Lampung selama kurun waktu 2015-2019 sebanyak 25 sekolah dengan jumlah siswa 1.863 orang. Jika dilihat dari jumlah siswa maka dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan dalam penerimaan siswa SLB. Secara rinci jumlah siswa SLB dapat dilihat pada tabel berikut .

**Tabel II-43**  
Jumlah Sekolah Luar Biasa Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2019
Jumlah Sekolah	4	26	25	25
Jumlah Guru	30	373	381	428
Jumlah Siswa	105	1.633	1.818	1.863

Grafik II-29  
Sekolah Luar Biasa Tahun 2015-2019



Sumber: Kemendikbud, 2019

### Jumlah Guru dan Murid SMA/SMK

Berdasarkan data Jumlah Guru dan Murid baik SMA maupun SMK dari tahun 2015-2019 secara signifikan mengalami peningkatan, dari jumlah guru SMA sebanyak 10.134 tahun 2015 menjadi 10.706 tahun 2019, demikian juga dengan jumlah guru SMK dari 8.336 tahun 2015 menjadi 9.865 pada tahun 2019. Peningkatan jumlah tenaga guru SMA dan SMK tersebut juga diiringi dengan peningkatan jumlah murid. Secara rinci jumlah guru dan murid dapat dilihat pada tabel berikut.

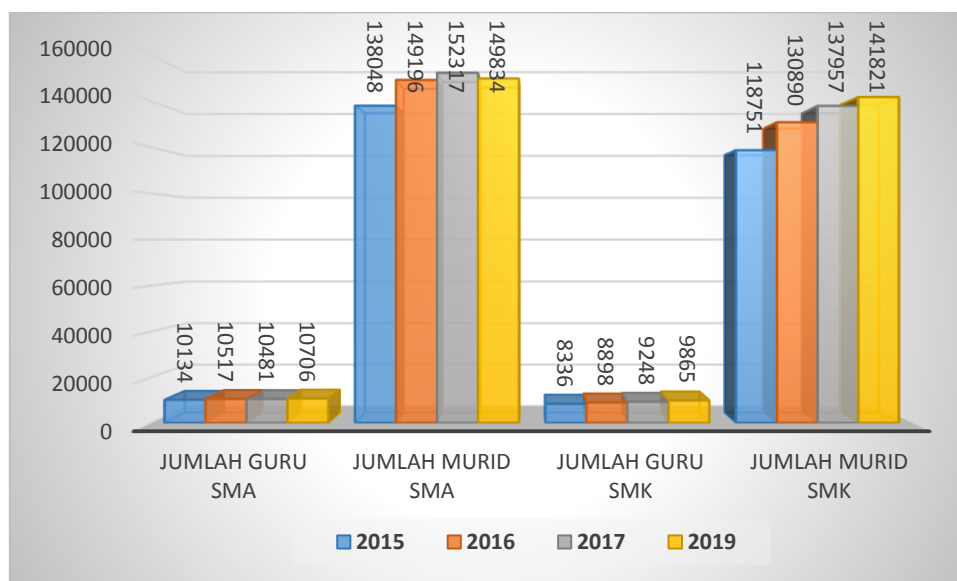
Tabel II-44  
Jumlah Guru dan Murid SMA/SMK Tahun 2015-2019

Tahun	SMA		SMK	
	Guru	Murid	Guru	Murid
2015	10.134	138.048	8.336	118.751
2016	10.517	149.196	8.898	130.890
2017	10.481	153.317	9.248	137.957
2019	10.706	149.834	9.865	141.821

Sumber: Kemendikbud, 2019



Grafik II-30  
Jumlah Guru dan Murid SMA/SMK 2015-2019



Sumber: Kemendikbud, 2019

### Rasio Guru Terhadap Siswa

Perbandingan jumlah guru per jumlah siswa untuk jenjang SMA pada Tahun 2015 1:13, Tahun 2016 1:14 dan Tahun 2017 1:15. Sedangkan untuk perbandingan jenjang SMK pada Tahun 2015 1:14, Tahun 2016 1:15, Tahun 2017 1:15 dan Tahun 2019 1:14. Walaupun data ini menunjukkan bahwa rasio antara guru dengan siswa sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan tetapi perlu diperhatikan bahwa jumlah guru yang dihitung seluruh guru baik PNS maupun non PNS. Ratio guru terhadap siswa di Provinsi Lampung lebih baik daripada ratio tingkat nasional tahun 2019 yang sebesar 1:18 untuk SMA dan 1:17 untuk SMK.

Tabel II-45  
Perbandingan Jumlah guru dan Siswa 2015 – 2019

Perbandingan	2015	2016	2017	2019
Guru: Siswa SMA	1:13	1:14	1:15	1:14
Guru: Siswa SMK	1:14	1:15	1:15	1:14

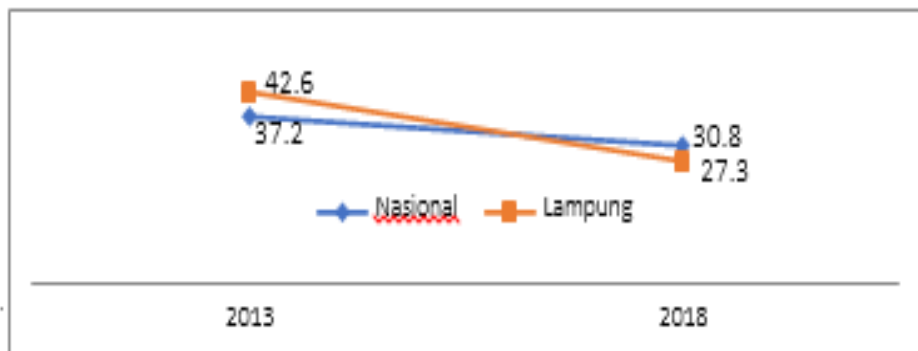
Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), 2019

## 2.2.3.2 Kesehatan

### 2.2.3.2.1 Stunting

Status gizi balita sangat pendek dan pendek (Stunting) merupakan kondisi gangguan pertumbuhan fisik dan otak pada anak. Hal tersebut dapat terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Prevalensi stunting di Provinsi Lampung berdasarkan Riskesdas 2013 dan 2018 cenderung menurun dari 42,6 % di tahun 2013 menjadi 27,3 % di tahun 2018, begitu juga dengan angka nasional yang turun dari angka 37,2 % di tahun 2013 menjadi 30,8 % di tahun 2018. Jika dibandingkan dengan nasional yang turun sebesar 6,4 %, penurunan angka stunting di Lampung lebih besar yaitu 15,3 %, sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

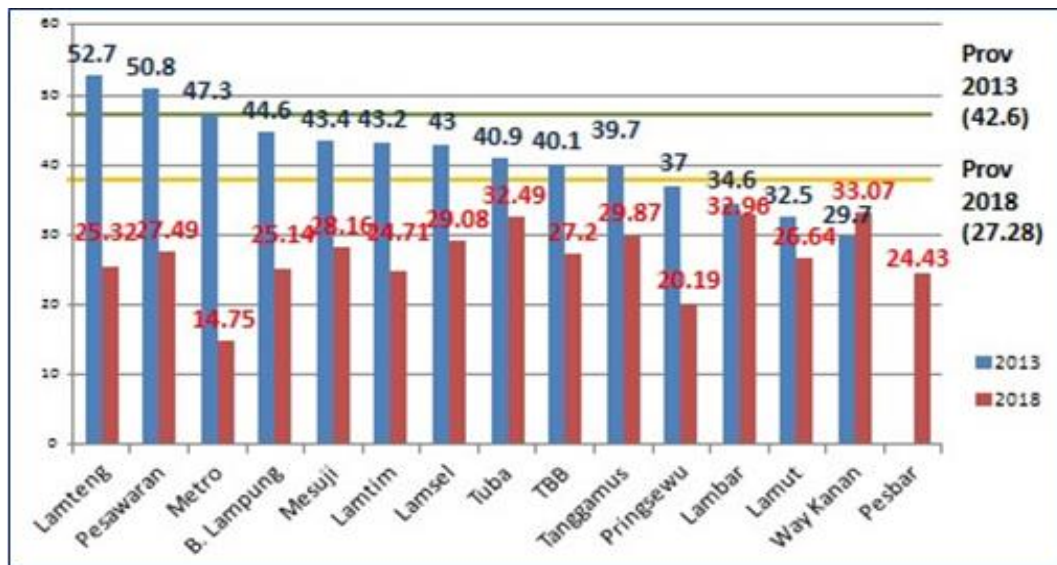
Grafik II-31  
Prevalensi Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting) Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2013 dan 2018



Sumber: Riskesdas 2018

Hal ini menjadi penyemangat bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk lebih fokus dalam menangani stunting dan dapat mencapai target yang diharapkan dengan kegiatan stunting terintegrasi dengan seluruh OPD baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pencegahan stunting penting dilakukan agar tidak terjadi *lost generation* dan menjadi tanggung jawab semua pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Berikut grafik prevalensi stunting per kabupaten/kota di Provinsi Lampung:

Grafik II-32  
Prevalensi Status Gizi Balita (Tb/U) Stunting Menurut Kabupaten/Kota di  
Lampung Tahun 2013 & 2018 (RISKESDAS)



Sumber: Riskesdas 2018

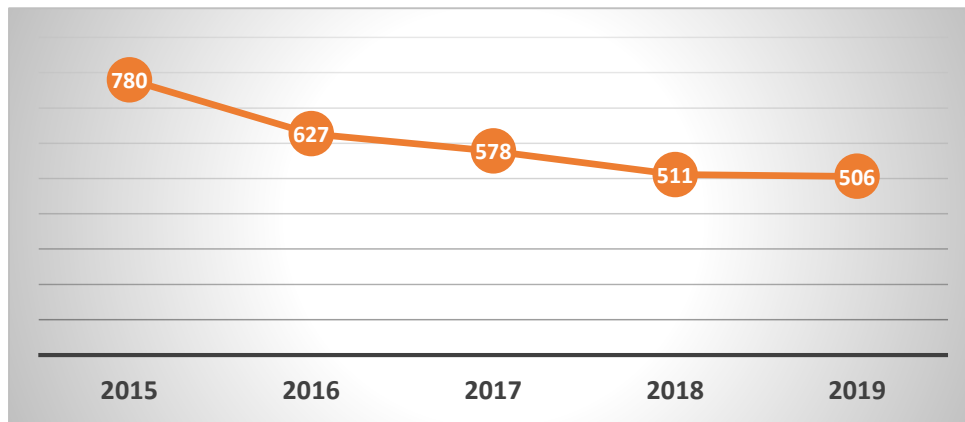
Intervensi stunting di Provinsi Lampung telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dengan lokus 3 kabupaten prioritas, yaitu: Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah dan Lampung Timur. Kemudian di tahun 2019 ini terdapat penambahan lokus Kabupaten Tanggamus, dan tahun 2020 nanti ada perluasan lokus kembali dengan penambahan Kabupaten Lampung Utara dan Pesawaran, sehingga kabupaten prioritas stunting di Provinsi Lampung tahun 2020 sebanyak 6 kabupaten.

Berbagai program pemerintah terkait penanganan stunting telah banyak dilakukan baik dalam intervensi gizi spesifik (bidang kesehatan) dan intervensi sensitive (non kesehatan) namun angka prevalensi stunting masih tinggi. Hal ini dikarenakan belum adanya konvergensi program.

### 2.2.3.2.2 Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia kurang 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup pada waktu yang sama. Kematian bayi terjadi pada masa bayi perinatal (0-6 hari), diikuti kematian pada masa bayi neonatal (7 - 28 hari) dan masa bayi (>28 hari - < 1 tahun).

**Grafik II-33**  
**Trend Kasus Kematian Bayi di Provinsi Lampung**  
**Tahun 2015-2019**

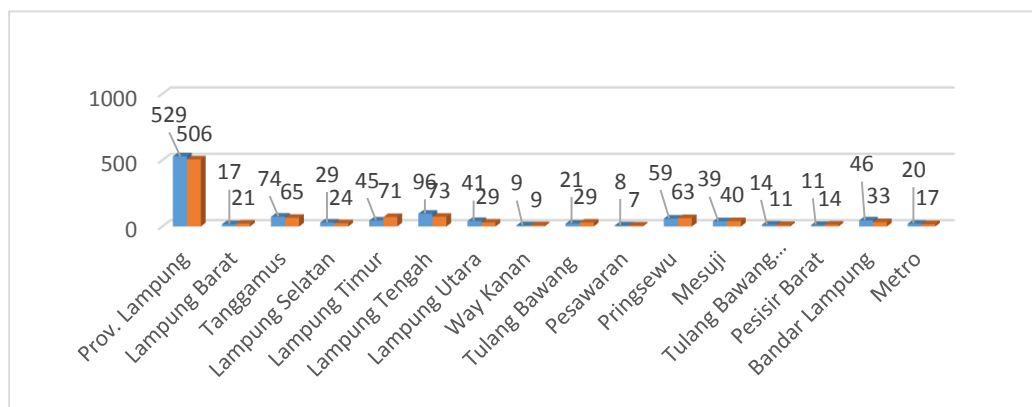


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

AKB di Provinsi Lampung, selama 5 tahun terakhir, menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2015 angka kematian bayi di Provinsi Lampung sebanyak 780, menurun menjadi 578 di tahun 2017 dan pada tahun 2019 menjadi 506 kematian bayi.

Berdasarkan Kasus Kematian Bayi menurut Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung pada tahun 2019, kasus kematian bayi terbanyak terjadi di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 73 kasus, kemudian Kabupaten Lampung Timur sebanyak 71 kasus dan Tanggamus sebanyak 65 kasus, sedangkan wilayah dengan kasus kematian bayi terkecil adalah Kabupaten Pesawaran dengan 7 kasus kematian Bayi.

**Grafik II-34**  
**Kasus kematian Bayi Per-Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung**  
**Tahun 2018 dan 2019**



Sumber : Data Dinas Kesehatan 2019

### 2.2.3.2.2 Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (Akaba) adalah jumlah kematian anak umur 0- <5 tahun per 1000 kelahiran hidup. Akaba menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi penyakit infeksi dan kecelakaan.

Akaba di Provinsi Lampung berdasarkan hasil Sensus Penduduk dan SDKI dari tahun 1997 s.d 2012 terus mengalami penurunan yaitu dari 64 per 1000 kelahiran hidup tahun 1997 menurun menjadi 38 per 1000 Kelahiran Hidup tahun 2012, Akaba Provinsi Lampung selama 18 tahun terakhir lebih baik dibandingkan Akaba Nasional.

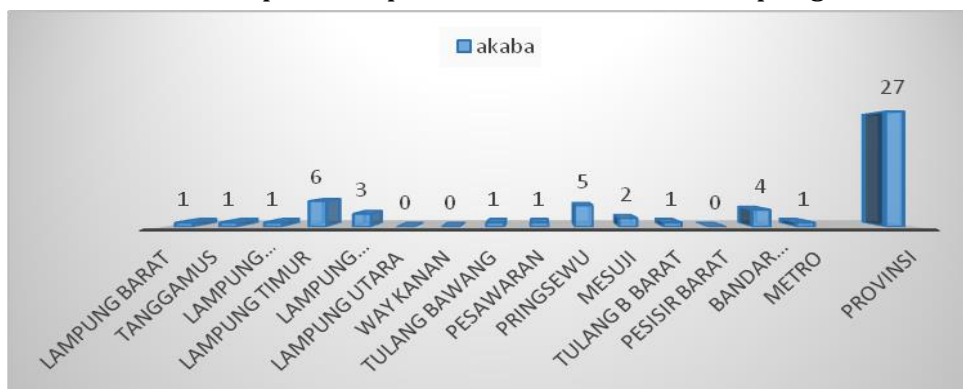
Tabel II-46  
Angka Kematian Balita di Provinsi Lampung dan Indonesia  
Tahun 2002 – 2012

Wilayah	1994	1997	1999	2007	2012
Lampung	58	64	60	55	38
Indonesia	93	71	60	-	43

Sumber : BPS, 2014

Untuk kasus kematian Akaba berdasarkan Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung tahun 2017, kasus kematian Balita terbanyak terjadi di Kabupaten Lampung Timur sebanyak 6 kasus, Kabupaten Pringsewu 5 kasus dan Bandar Lampung sebanyak 4 kasus.

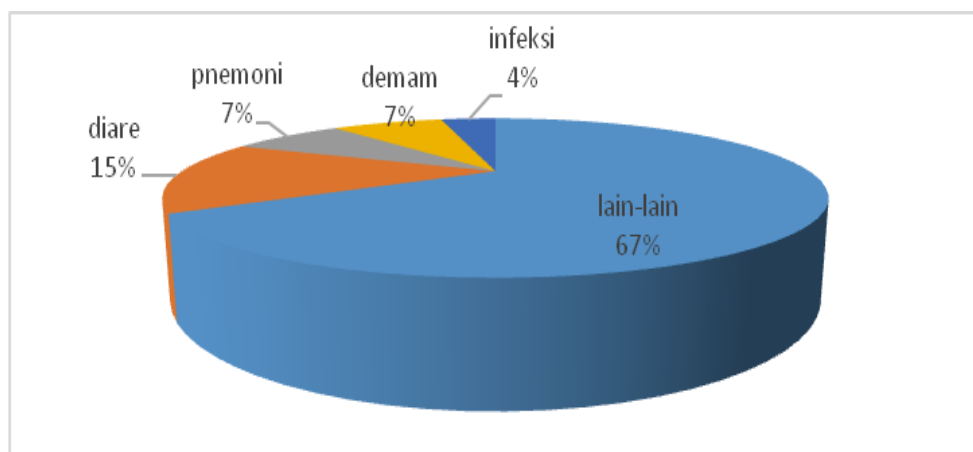
Grafik II-35  
Kasus Kematian Balita per Kabupaten Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017



Sumber : SDKI, 2018

Untuk penyebab kematian Balita di Provinsi Lampung, secara spesifik disebabkan oleh penyakit diare sebanyak 15 persen, *pnemoni* (paru-paru basah) dan demam masing-masing sebesar 7 persen serta infeksi sebanyak 4 persen. Sedangkan penyebab kematian Balita yang disebabkan faktor-faktor lainnya sebanyak 67 persen.

Grafik II-36  
Penyebab Kematian Balita Provinsi Lampung tahun 2017



Sumber : SDKI, 2018

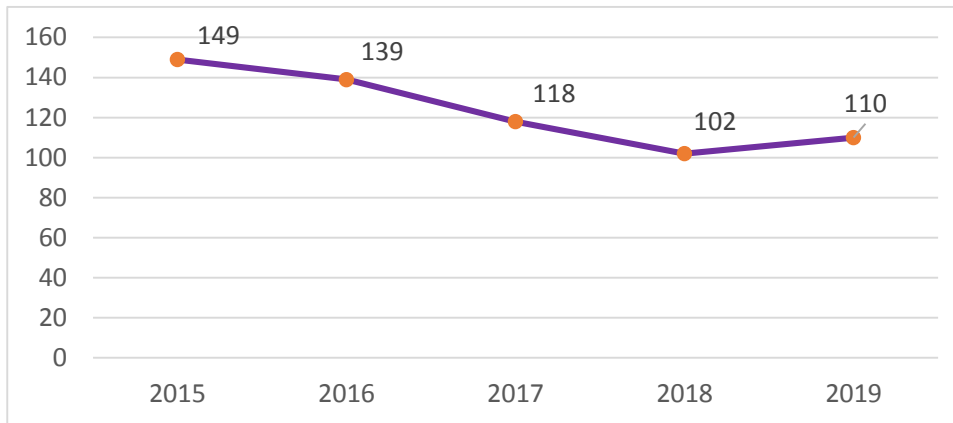
#### 2.2.3.2.3 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan status kesehatan ibu serta kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas.

Berdasarkan grafik dibawah, kasus kematian ibu di Provinsi Lampung pada periode tahun pengamatan 2015 s.d 2019, kasus kematian ibu mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, kematian ibu sebanyak 118 kasus turun menjadi 102 kasus pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi 110 kasus kematian.

Secara rinci penurunan angka kasus kematian ibu terlihat pada grafik II-37 di bawah ini;

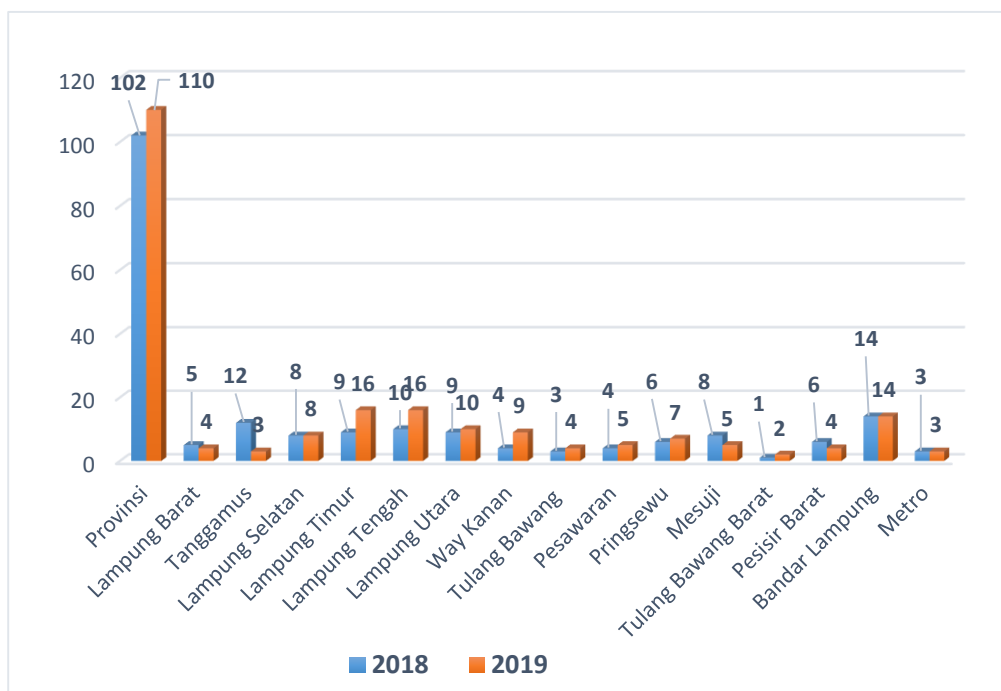
Grafik II-37  
Kasus Kematian Ibu Provinsi Lampung Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas kesehatan 2019

Berdasarkan jumlah Kasus kematian ibu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung tahun 2018 s.d 2019, kasus kematian ibu terbanyak terjadi di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur sebanyak 16 kasus, diikuti Kota Bandar Lampung 14 kasus, sebagaimana terlihat pada Grafik II.38

Grafik II-38  
Kasus Kematian Ibu di Kab/Kota Provinsi Lampung Tahun 2018-2019



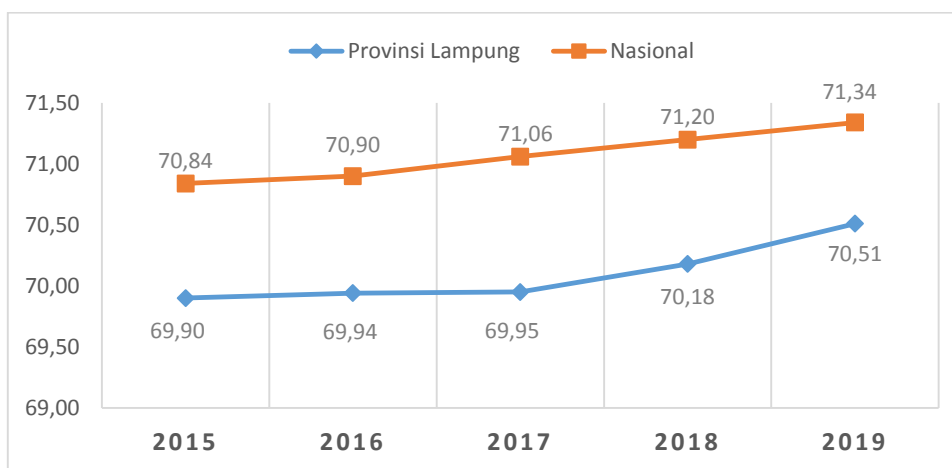
Sumber : Data Dinas Kesehatan 2019



### 2.2.3.2.4 Angka Harapan Hidup

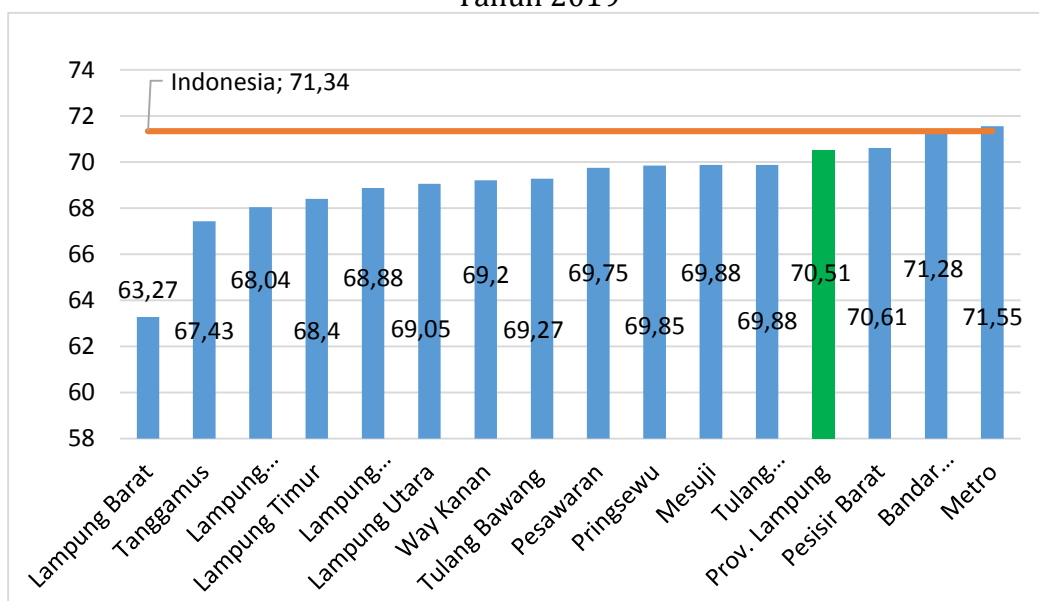
Selama 5 tahun terakhir Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Provinsi Lampung terus meningkat dari 69,90 pada tahun 2015, menjadi 70,51 pada tahun 2019, meski terus meningkat, AHH Provinsi Lampung masih dibawah rata-rata AHH Nasional.

Grafik II-39  
Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung dan Indonesia



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019

Grafik II-40  
Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2019



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa angka harapan hidup Kota Bandar Lampung (71,28), Kota Metro (71,55) dan Kabupaten Pesisir Barat (70,61) berada di atas AHH Provinsi Lampung sedangkan Kabupaten dengan AHH terendah adalah Kabupaten Tanggamus sebesar 67, 43 dan Lampung Barat sebesar 63,27.

#### 2.2.3.2.5 Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas)

Puskesmas adalah konsep dasar pelayanan kesehatan primer yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (jenjang tingkat pertama). Puskesmas memiliki tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal.

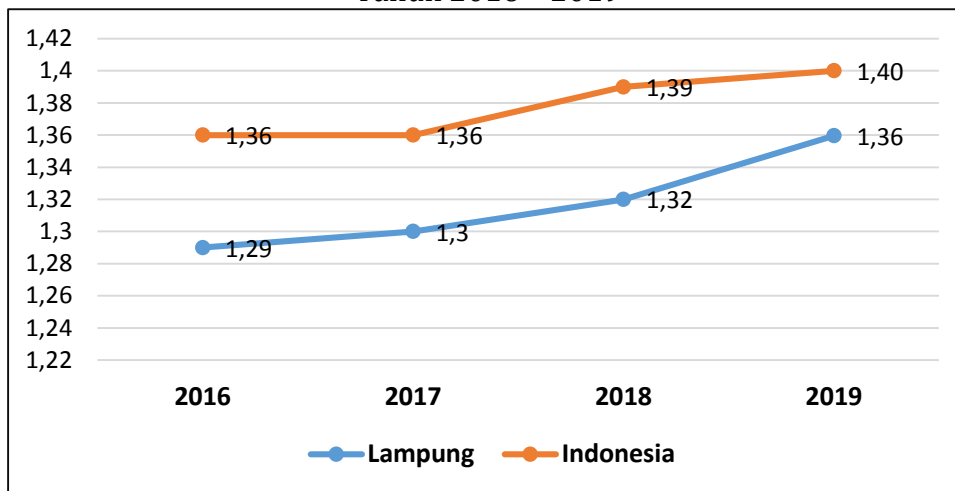
Berdasarkan tabel II-47, jumlah Puskesmas semakin meningkat, dari 291 unit pada tahun 2015 meningkat menjadi 310 unit pada tahun 2019. Namun demikian, peningkatan jumlah Puskesmas tidak secara langsung menggambarkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer di suatu wilayah. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer dapat dilihat secara umum dari rasio Puskesmas terhadap Kecamatan, dimana rasio ideal adalah 1 Puskesmas menanggapi 1 Kecamatan. Seiring dengan penambahan jumlah Puskesmas, rasio Puskesmas terhadap kecamatan di Provinsi Lampung juga terus meningkat setiap tahunnya dan telah memenuhi rasio ideal, namun demikian rasio Puskesmas terhadap Kecamatan di Provinsi Lampung masih dibawah rata-rata Nasional.

Tabel II-47  
Jumlah Puskesmas Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

Provinsi	Jumlah Puskesmas				
	2015	2016	2017	2018	2019
Lampung	291	292	297	302	310

Sumber: Profil Kesehatan, 2019

Grafik II-41  
Rasio Puskesmas per Kecamatan di Provinsi Lampung  
Tahun 2016 – 2019



Sumber: Profil Kesehatan, 2019

#### 2.2.3.2.6 Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (Rumah Sakit)

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat selain upaya promotif dan preventif, diperlukan juga upaya kuratif dan rehabilitatif. Upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dapat diperoleh melalui rumah sakit yang juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56/Menkes/PER/I/2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit mengelompokkan rumah sakit berdasarkan penyelenggaraan, yaitu rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah dan rumah sakit swasta. Rumah sakit pemerintah adalah unit pelaksana teknis dari instansi pemerintah (Kementerian Kesehatan, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Lainnya). Rumah sakit daerah adalah pelaksana teknis dari daerah (pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota). Sedangkan rumah sakit swasta adalah badan hukum yang bersifat nirlaba. Peraturan tersebut juga mengelompokkan rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Adapun rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau

satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

Jumlah Rumah Sakit di Lampung dari tahun 2015 s.d 2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki RSUD hanya 11 daerah, pada tahun 2019 seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung telah memiliki RSUD sendiri. Pada tahun 2016, Pemerintah Provinsi telah membangun 1 lagi RSUD yaitu RSUD Bandar Negara Husada, sehingga Pemerintah Provinsi Lampung memiliki 2 RSUD dan 1 RS Khusus. Sedangkan untuk jumlah RS Swasta, pada tahun 2015 berjumlah 37 yang terdiri dari 26 RS Umum dan 11 RS Khusus, pada tahun 2019 meningkat menjadi 58 Rumah Sakit terdiri dari 36 RS Umum dan 22 RS Khusus.

Tabel II-48  
Data Sarana Pelayanan Rumah Sakit Di Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

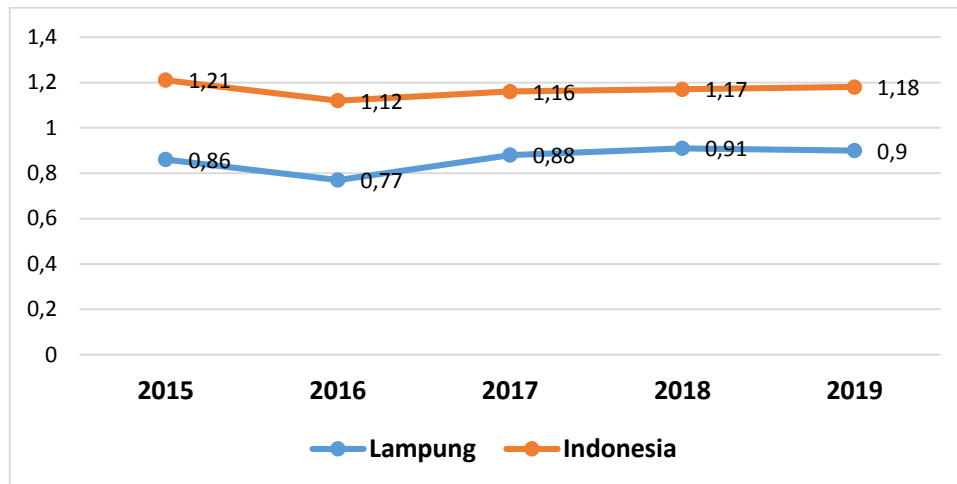
No	Parameter	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>	<b>Rumah Sakit Pemerintah</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
	a RSUD Provinsi	1	2	2	2	2
	b RSUD Kabupaten/Kota	12	14	15	15	15
	c RS. Khusus Provinsi	1	1	1	1	1
	d RS. Polri	1	1	1	1	1
	e RS. Tentara	1	1	1	1	1
<b>2</b>	<b>Rumah Sakit Swasta</b>	<b>43</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>57</b>	<b>58</b>
	a RS. Umum	31	31	36	36	36
	b RS. Khusus	12	15	21	21	22

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2019

Terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dan perorangan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap 1.000 penduduk. Standar WHO adalah 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk. Rasio tempat tidur di rumah sakit di Indonesia dari tahun 2015-2019 sekitar 1 per 1.000 penduduk. Jumlah tempat tidur di Indonesia sudah tercukupi menurut WHO. Perbandingan Rasio tempat tidur

provinsi Lampung masih dibawah ratio di Indonesia yang dapat tergambar pada Grafik dibawah ini.

Grafik II-42  
Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per 1.000 penduduk di Lampung dan Indonesia Tahun 2015 - 2019



Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2019

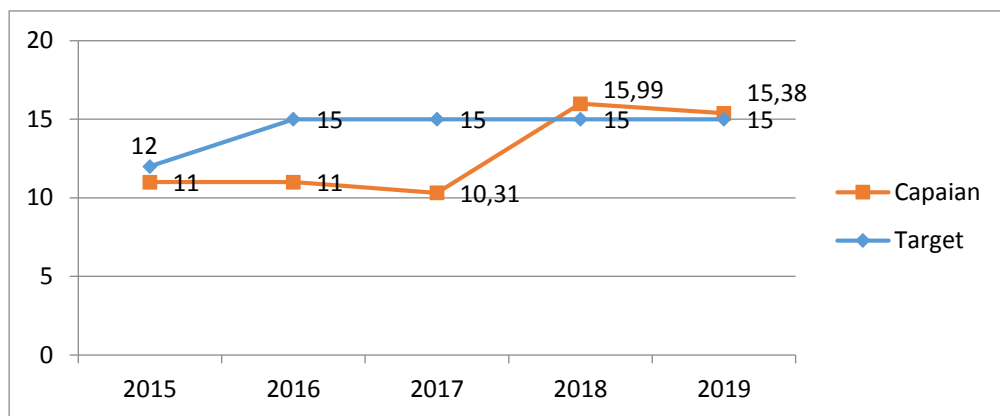
#### 2.2.3.2.7 Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan merupakan sumber daya manusia yang peranan dan keberadaannya sangat penting dan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Banyak faktor yang dapat dilihat dari tenaga kesehatan yaitu tingkat pendidikan, profesionalisme dan kompetensinya. Tenaga kesehatan merupakan faktor input dalam pelaksanaan program kesehatan.

#### Rasio Dokter

Pada tahun 2019 rasio dokter di Lampung sebesar 15,38, turun dibandingkan dengan capaian tahun 2018. Namun angka capaian ini sudah memenuhi target rasio dokter umum yakni 15.

Grafik II-43  
Tren Ratio Dokter Per satuan Penduduk Di Provinsi Lampung  
Tahun 2015-2019



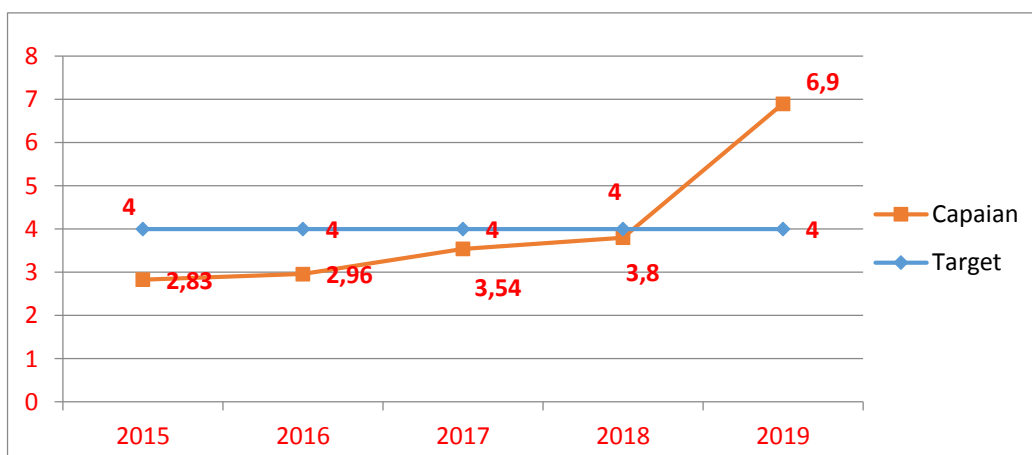
Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Lampung, 2019

Selain melihat rasio dokter umum dengan 100.000 penduduk perlu juga dilihat rasio dokter umum terhadap sarana puskesmas. Rasio dokter umum terhadap puskesmas tahun 2017 yaitu 1,65 artinya setiap puskesmas memiliki rata-rata satu hingga dua dokter.

### Rasio Dokter Spesialis terhadap 100.000 Penduduk

Tahun 2019 Rasio Dokter spesialis di Provinsi Lampung terhadap 100.000 penduduk, mencapai 6,9 dokter spesialis per 100.000 penduduk angka ini telah mencapai target Nasional yang diharapkan.

Grafik II-44  
Tren Rasio Spesialis di Provinsi Lampung Per 100.000 penduduk  
Tahun 2015-2019

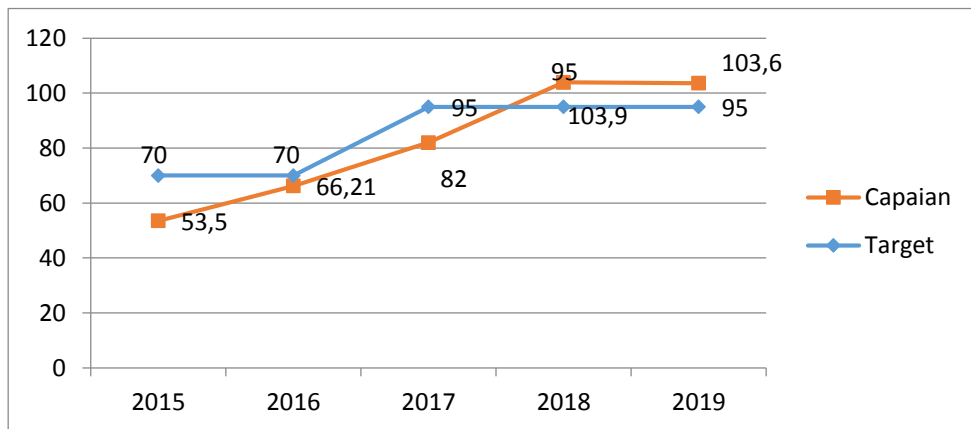


Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Lampung

### Rasio Bidan Terhadap 100.000 Penduduk

Tahun 2019 rasio bidan terhadap 100.000 penduduk baru mencapai 103,6 bidan per 100.000 penduduk. Angka ini telah mencapai target dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Rasio Bidan terhadap penduduk selama tiga tahun terakhir cenderung meningkat, rasio pada tahun 2019 adalah 103,6% artinya setiap 100.000 penduduk dilayani oleh sekitar 103 bidan.

Grafik II-45  
Rasio Bidan Spesialis di Provinsi Lampung Per 100.000 penduduk  
Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2019

### 2.2.3.2.8. Pandemi Covid – 19 di Provinsi Lampung

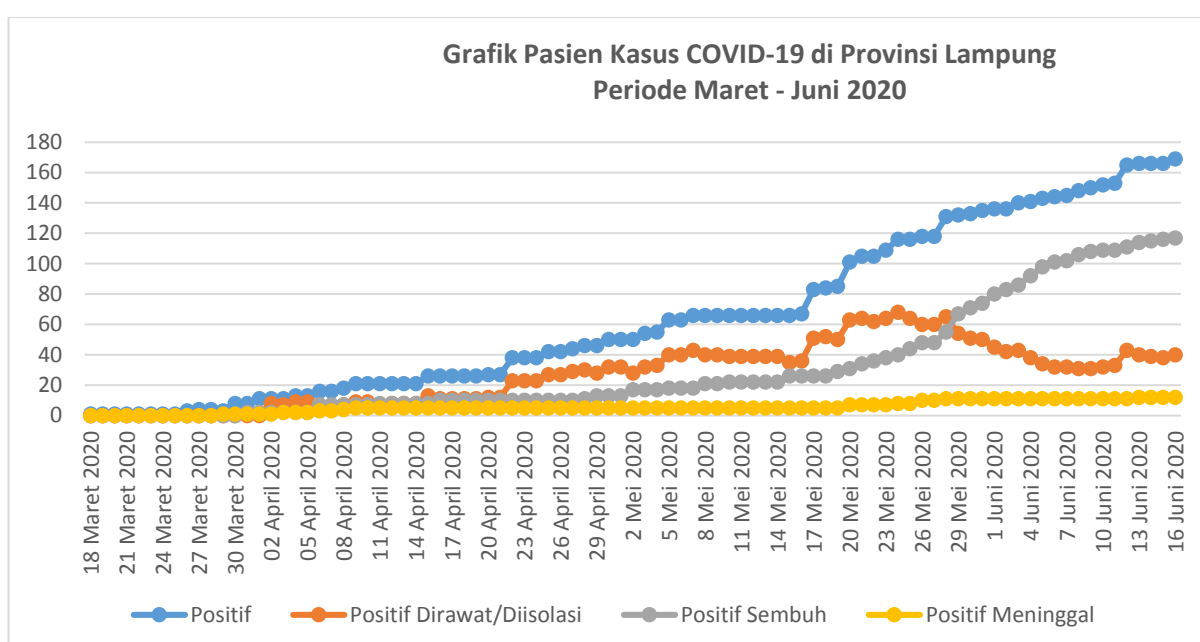
Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang setelah diidentifikasi bahwa pneumonia tersebut sebagai jenis baru corona virus (Novel Corona Virus) dan WHO resmi menetapkan penyakit novel corona virus dengan sebutan *Corona virus Disease* (COVID-19). Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama virus corona di Indonesia. Penyebaran Covid 19 di Provinsi Lampung pertama kali dilaporkan pada tanggal 18 Maret 2020 setelah ditemukan satu pasien positif Covid 19.

Kasus penyebaran Covid-19 meningkat signifikan, berdasarkan data yang tercatat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung bahwa sampai dengan bulan Juni 2020 terdapat 166 orang yang positif COVID-19 dan 142 orang



Pasien Dalam Pengawasan dan dari 166 orang Positiv covid tersebut, sebanyak 12 orang meninggal dunia. Namun demikian angka kasus covid-19 di Provinsi Lampung tersebut masih cukup rendah dibandingkan dengan angka kasus covid-19 pada Provinsi lain di Indonesia, Tim Gugus Tugas Covid-19 Pusat telah menetapkan Provinsi Lampung sebagai Provinsi Peringkat Kedua Terbaik dalam menekan angka kasus Pandemi Covid-19.

Gambar 1. Grafik Perkembangan Pasien Kasus COVID-19 di Provinsi Lampung



### 2.2.3.3. Pertanian

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung selama kurun waktu jangka menengah 5 (lima) tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Peningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian mendukung upaya peningkatan produksi tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai) serta hortikultura. Diukur melalui peningkatan IP dilahan pertanian.
2. Peningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Diukur melalui peningkatan jumlah produksi.

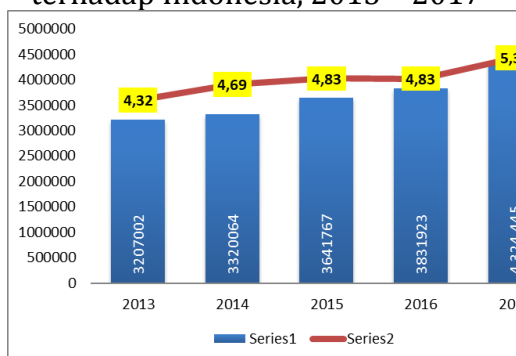
Tabel II-49  
Analisis Capaian Kinerja Sasaran, 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi	
1	Produksi Padi	Ton	4.435.844	2.164.089	48,32
2	Produksi Jagung	Ton	2.234.548	2.374.384	103,16
3	Produksi Kedelai	Ton	15.356	12.318	77,88
4	Produksi Cabe Besar	Ton	41.301	45.380	125,00
5	Produksi Bawang Merah	Ton	1.108	3.609	155,63
6	Produksi Nenas	Ton	648.341	622.880	110,55
7	Produksi Pisang	Ton	1.600.193	1.438.559	72,79
8	Produksi Pepaya	Ton	123.092	64.813	90,07
9	Produksi Manggis	Ton	4.938	3.581	72,00

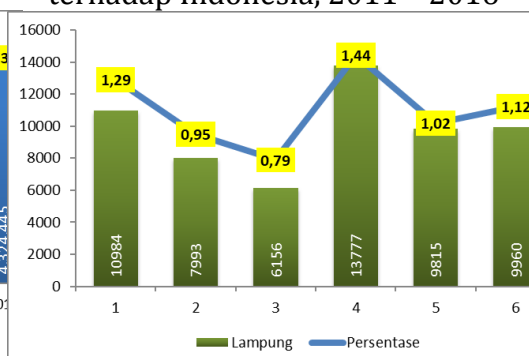
Sumber: Dinas TPH & KP Provinsi Lampung 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2017 tidak seluruhnya dapat tercapai, seperti produksi padi, jagung, kedelai, nenas, pisang dan manggis. Indeks pertanaman (IP) menunjukkan kekerapan pertanaman pada sebidang lahan. Peningkatan IP merupakan upaya peningkatan produksi dalam menghadapi masalah peningkatan kebutuhan jagung, penyempitan lahan, dan keterbatasan lahan untuk ekstensifikasi. Lahan kering dan lahan sawah perlu dimanfaatkan secara maksimal dengan peningkatan IP.

Grafik II-46  
Produksi Padi dan Persentasenya terhadap Indonesia, 2013 - 2017



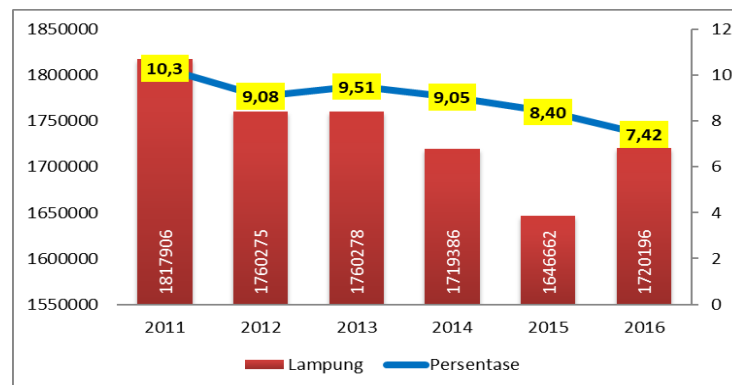
Grafik II-47  
Produksi Kedelai dan Persentasenya terhadap Indonesia, 2011 - 2016



Tahun 2016 produksi padi Lampung secara nasional berdasarkan Angka Ramalan II berada pada peringkat 7 dari 10 provinsi sentra produksi padi nasional dengan kontribusi sebesar 5,32% terhadap produksi padi

nasional sebesar 81.286.794 ton. Keberhasilan Provinsi Lampung mendukung program pemerintah berswasembada beras dengan peningkatan produksi tahun 2017, mendapatkan apresiasi dari Menteri Pertanian kepada Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Berprestasi Tingkat Nasional dalam Inovasi Pangan dan Pertanian Tahun 2016.

Grafik II-48  
Produksi Jagung dan Persentasenya terhadap Indonesia Tahun 2011 – 2016



Untuk kinerja bidang hortikultura pada komoditas cabai besar melebihi target capaian dikarenakan adanya bantuan dukungan dari APBN dan APBD berupa 74 Ha tersebar di kabupaten sentra cabai yaitu Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Tanggamus. Untuk pepaya ada bantuan 18 Ha di Kabupaten Lampung Tengah. Untuk komoditi pisang karena permintaan yang tinggi sehingga minat petani untuk budidaya pisang meningkat. Untuk komoditi tomat karena harga di pasaran cukup stabil sehingga minat petani untuk budidaya tomat masih stabil. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura antara lain:

1. Pengadaan sarana/peralatan pengolahan hasil berupa mesin pecah kulit/paddy husker (1 unit), mesin pencacah beras/*rice polisher* (1 unit), mesin penggerak (1 unit), *frame* dan perlengkapannya (1 set);
2. Fasilitasi dukungan pengembangan sarana prasarana STA, rehab gedung untuk fasilitasi penerapan SRG di Kabupaten Lampung Tengah;
3. Pengadaan peralatan pengolahan hasil hortikultura (manggis/cabai /tomat/pisang) berupa vacuum fryer (1 buah), mesin pengolah dodol dan

selai buah (1 buah), mesin pemotong dodol (1 buah), serta botol kemasan (1 paket);

4. Pembangunan/pengembangan jaringan irigasi pertanian (JIDES, JITUT) sepanjang 480 hektar
5. Pembuatan embung sebanyak 4 unit, pembuatan/rehabilitasi cekdam 2 unit;
6. Pemanfaatan sumber air dengan pompa *groundtank* 1 unit, pengadaan pompa air sebanyak 15 unit;
7. Pembuatan sumbur bor sebanyak 17 unit;
8. Optimasi lahan rawa melalui perbaikan saluran drainase di tingkat usaha tani (Tata Air Mikro/TAM) sepanjang 400 hektar di Kabupaten Mesuji;
9. Peningkatan produksi padi sawah sebesar 5 ton/ha GKG di seluas 50 hektar di Kabupaten Tulang Bawang;
10. Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) berbasis padi hibrida dan aplikasi *transplanter* dengan teknologi jejer legowo seluas 1.000 hektar di 13 kabupaten;
11. Peningkatan penggunaan pupuk organik oleh kelompok tani untuk tanaman pangan melalui pemberdayaan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dan pengadaan Alat Pembuat Pupuk Organik (APPO) sebanyak 8 unit di Kabupaten Tanggamus;
12. Tanam kedelai seluas 40 hektar, melalui kegiatan reklamasi lahan di Kabupaten Lampung Selatan;
13. Penyaluran benih (Cadangan Benih Daerah) untuk penggantian tanaman puso akibat bencana (kekeringan/banjir). sebanyak 7.292,50 kg untuk luasan 1.312.50 hektar;

#### **2.2.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral**

Pembangunan sektor energi di Provinsi Lampung dapat dilihat dari meningkatnya rasio elektrifikasi tahun 2015 sebesar 80,46 persen dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 78 persen, walaupun masih terjadi defisit listrik sebesar 60,70 MW.

Tabel II-50

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Cakupan Pelayanan dan Kualitas Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung

No	Indikator	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD (2019)	Capaian s/d 2015 terhadap 2019
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Laju pertumbuhan sektor pertambangan	0,93	2,06	4,20	203,88	2,50	168,00%
2	Rasio elektrifikasi rumah tangga	78	72,00	80,46	111,75	83,47	96,39%

Pada tahun 2015 realisasi laju pertumbuhan sektor pertambangan mencapai angka 4,20% atau 203,88% dibandingkan target yang ditetapkan. Dengan capaian ini, kinerja yang dicapai telah masuk kriteria **sangat tinggi**, bila disandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini juga telah menyumbang sebanyak 168% dari target 2,50% pada tahun 2019.

Untuk rasio elektrifikasi rumah tangga capaian kinerjanya sebesar 111,75% dari target 72,00% dan menyumbang capaian target akhir RPJMD sebesar 96,39%.

Untuk memenuhi kebutuhan energi di Lampung telah dilakukan upaya penambahan investasi bidang energi yaitu:

- 1) Pembangunan PLTU Mulut Tambang di Mesuji (dengan melibatkan Shen Hua China) kapasitas 350 MW
- 2) Pembangunan PLTG di Lampung Timur (kerjasama PLN dengan PGN) kapasitas 2 X 50 MW dan 2 X 100 MW

Untuk mendukung penyediaan energi di masyarakat, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung membangun Pemanfaatan Energi Terbarukan Berbasis Bioenergi. Pemberian peralatan berbasis biomassa dan bioenergi kepada masyarakat yaitu Hibah kelompok tani Maju Mulya Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. 2. Kelompok Tani Risma Asri Pekon Gisting Permai, Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. 3. Masyarakat di Desa Pesawaran, Kecamatan

Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Untuk memperluas penggunaan energi sumber daya mineral dilakukan Peneliitan dan Evaluasi Potensi Sumber Daya Mineral di 2 kabupaten yaitu Kabupaten Way Kanan dan Lampung Selatan. Berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2015, telah dicapai:

1. Jumlah dana bagi hasil migas di Provinsi Lampung pada Tahun 2015 capaiannya sasarannya 100% dengan pembagian hasil migas untuk 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
2. Jumlah SPBU yang diawasi dalam pengawasan penyaluran bahan bakar kendaraan bermotor pada tahun 2015 sebanyak 131 unit SPBU dan 19 Unit SPBK di 15 kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, atau 100% target capaian sasarannya.

Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung, pada Tahun Anggaran 2015 baru dipasang 4 unit PLTMH di wilayah Provinsi Lampung yaitu: 1. Hibah ke masyarakat Tiyuh Panaragan Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 2. Hibah ke masyarakat Kampung Bumisari, Kecamatan Rawapitu Kabupaten Tulang Bawang. 3. Hibah ke Masyarakat Desa Buay Nyerupa Kecamatan Sukau. Kabupaten Lampung Barat. 4. Hibah ke Masyarakat Desa Tanjung Beringin. Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara.

### **2.2.3.6 Pariwisata**

Di tahun 2016, jumlah wisatawan nusantara ditargetkan sebanyak 5.235.954 orang. Target ini dipatok naik sebanyak 9,09% dibandingkan capaian tahun 2015 yang sebanyak 4.759.950 orang. Realisasinya pada tahun 2016 menunjukkan capaian sebanyak 7.381.774 orang wisatawan nusantara atau sebanyak 129,06% dibandingkan target. Capaian ini juga berarti 103,06% dibandingkan target pada akhir RPJMD yaitu sebanyak 7.155.495 orang wisatawan nusantara. Pencapaian ini juga bermakna kinerja **sangat tinggi** untuk pencapaian sasaran 7 dalam IKU tahun 2016. Jumlah wisatawan

mancanegara pada tahun 2016 ditargetkan 115.639 orang atau naik sebesar 9,12% dibandingkan capaian tahun 2014 sebanyak 105.081 orang wisatawan mancanegara. Realisasi pada tahun 2016 sebanyak 115.053 orang atau dengan capaian 99,49% dibandingkan target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini juga bermakna kinerja **sangat tinggi** untuk pencapaian sasaran 7 dalam IKU tahun 2016.

Tabel II-51  
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah

No	Indikator	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD (2019)	Capaian s/d 2016 terhadap 2019
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah wisatawan nusantara	5.530.803	5.235.945	7.381.774	129.06	7.155.495	103.06
2	Jumlah wisatawan	114.907	115.639	115.053	99.49	153.914	66.22

Untuk meningkatkan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Lampung, pembangunan pariwisata tahun 2016 diarahkan pada pengembangan kawasan strategis pariwisata dan kawasan industri pariwisata terkelola di Teluk Lampung yang terintegrasi dengan Taman Hutan Rakyat Wan Abdul Rahman dan Wisata Gunung Krakatau, Pesisir Barat, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), dan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), melalui:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana TAHURA WAR, Labuhan Jukung, dan Way Kambas
- 2) Penyelenggaraan *event-event* wisata dan budaya (*surfing contest*, Festival Krakatau, *Biking Explore* Lampung, jelajah Tahura WAR, dan Lampung *Fashion Week*)
- 3) Promosi pariwisata dan peluang investasi kepariwisataan (Festival Tongtong di Belanda dan *Indonesia Fair* di Australia)

Upaya promosi dan pembangunan pariwisata di Provinsi Lampung berhasil menarik wisatawan yang berkunjung. Hal ini ditunjukkan dengan



jumlah wisatawan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, seperti pada tabel di bawah bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Lampung dari tahun 2012 – 2016 semakin meningkat yaitu dari 2.639.370 orang menjadi 7.496.827 orang di tahun 2016.

Tabel II-52  
Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara, 2012 – 2016

No.	TAHUN	WISATAWAN		TOTAL
		NUSANTARA	MANCANEGERA	
1.	2012	2.581.165	58.205	2.639.370
2.	2013	3.392.165	75.590	3.467.755
3.	2014	4.327.228	95.528	4.422.756
4.	2015	5.530.803	114.907	5.645.710
5.	2016	7.381.774	115.053	7.496.827

### 2.2.3.7 Kelautan dan Perikanan

Kinerja pembangunan di bidang kelautan dan perikanan menunjukkan peningkatan kualitas. Selama kurun waktu 5 tahun , produksi perikanan cenderung mengalami peningkatan dari 38.703,9 ton pada tahun 2014 menjadi 25.733,6 ton pada tahun 2018. Produksi perikanan pada tahun 2018 berdasarkan Kabupaten/Kota, pada tabel II-53 terlihat bahwa Kabupaten Lampung Timur menyumbang produksi yang terbanyak yaitu sebesar 32.395,16 ton (22,7%) dan diikuti oleh Kabupaten Lampung Selatan sebesar 25.733,6 ton (18%). Sedangkan kabupaten/kota yang terendah adalah Way Kanan sebesar 41,28 ton dan Way kanan sebesar 160,87 ton. Secara rinci kinerja bidang kelautan dan perikanan sebagai berikut:

Tabel II-53  
Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap, 2014 – 2018

No	Kabupaten/ Kota	Produksi Perikanan Tangkap-Laut (Ton)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Lampung Selatan	38.703,93	24.969,00	24.239,20	31.230,21	25.733,60

No	Kabupaten/ Kota	Produksi Perikanan Tangkap-Laut (Ton)				
		2014	2015	2016	2017	2018
2	Lampung Tengah	3.475,13	1.530,20	2.123,80	1.119,63	3.533,69
3	Lampung Utara	1930,6917	1.879,90	2.072,80	1.828,10	1.180,34
4	Lampung Barat	173,20	356,00	549,00	428,30	540,77
5	Tulang Bawang	12651,446	18.900,80	20.168,00	22.613,24	19.808,46
6	Tanggamus	15.557,89	23.724,90	18.984,40	16.996,51	12.061,40
7	Lampung Timur	42.088,60	40.183,10	41.488,80	43.155,39	32.395,16
8	Way Kanan	578,31	198,80	163,10	230,80	160,87
9	Pesawaran	8.141,32	14.014,30	14.207,30	14.598,79	14.614,29
10	Pringsewu	84,2055	58,50	31,20	58,50	41,28
11	Mesuji	1158,8	1.166,00	1.342,20	1.492,51	1.617,47
12	Tulang Bawang Barat	336,7479	356,20	532,60	520,80	169,67
13	Bandar Lampung	27.269,54	29.653,30	31.319,50	32.069,40	17.018,52
14	Metro	-	-	-	-	-
15	Pesisir Barat	12.005,77	11.916,70	11.940,10	11.761,67	13.668,38
	<b>TOTAL</b>	<b>164.155,59</b>	<b>168.907,70</b>	<b>169.162,00</b>	<b>178.103,85</b>	<b>142.543,90</b>

### 2.2.3.8 Perdagangan

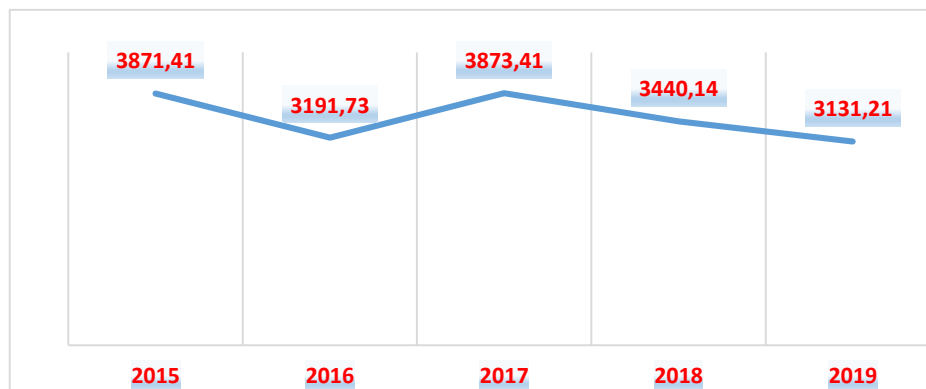
Perkembangan Pembangunan Provinsi Lampung selama kurun waktu 2017 menunjukkan pertumbuhan dan struktur perekonomian daerah Lampung semakin baik. Hasil yang dicapai Dinas Perdagangan dalam pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan Tahun 2017 sebagai berikut:

#### 1) *Ekspor*

Perkembangan ekspor sampai dengan tahun 2017 baik dilihat dari sisi volume maupun nilai menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya. Jumlah Ekspor di Provinsi Lampung sampai dengan Desember 2017 sebanyak US\$ 3.873,41.

Perkembangan Ekspor jangka waktu 2 tahun terakhir (2018 – 2019) secara komulatif mengalami penurunan sebesar US\$ 308,93 juta. Selanjutnya dapat kita lihat pada grafik dan tabel di bawah ini:

Grafik II-49  
Jumlah Nilai Ekspor Provinsi Lampung, 2015-2019



Sumber : Sumber : Dinas Perindag Provinsi Lampung 2020

Tabel II-54  
Perbandingan Ekspor Berdasarkan Komoditas Utama

KOMODITI	FOB (US.\$ JUTA)	
	2018	2019
Lemak & Minyak Hewan/Nabati	34,96	28.28
Kopi, Teh, Rempah-rempah	9,7	13.50
Batu Bara	13,98	15.41
Olahan dari buah-buahan/Sayuran	4,69	5.64
Ampas/Sisa Industri Makanan	4,22	6.65
Total 5 komoditas utama	67,54	69.49
Lainnya	32,46	30.51
<b>TOTAL EKSPOR</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Dinas Perindag Provinsi Lampung 2020

Berdasarkan pencermatan tabel diatas, komoditas yang mengalami peningkatan tertinggi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 adalah komoditas kopi, teh, dan rempah rempah yang naik sebesar 3,8, diikuti dengan komoditas ampas/sisa industri makanan naik 2,43.

Dari data komoditas unggulan sampai dengan akhir tahun 2019

sebesar US\$2.929,48 juta, dengan penyumbang ekspor terbesar Provinsi Lampung dari komoditas utama yaitu lemak & minyak hewan/nabati dengan nilai sebesar US\$ 828.32 juta, diikuti hasil batu bara dengan nilai sebesar US\$ 451.54 juta, selanjutnya hasil perkebunan yaitu kopi, teh, rempah-rempah dengan nilai sebesar US\$ 395.48 juta.

Tabel II-55  
Ekspor Berdasarkan Komoditas Utama Provinsi Lampung, 2019

KOMODITI	2019	PERSENTASE
Lemak & Minyak Hewan/ Nabati	828,32	39.96
Batu Bara	395,48	10.05
Kopi, The, Rempah-Rempah	451,54	18.71
Bubur Kayu/ Pulp	165,28	4.61
Olahan Dari Buah-Buahan/ Sayuran	194,96	6.01
Lainnya	893,9	20.66
<b>TOTAL EKSPOR</b>	<b>2.929,48</b>	<b>100.00</b>

Berdasarkan negara tujuan, ekspor terbesar provinsi Lampung Tahun 2019 yaitu Amerika Serikat dengan nilai ekspor US \$ 385,94 juta atau 13,17% dari total ekspor Lampung tahun 2019. Selanjutnya Pakistan merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua dengan nilai ekspor US\$ 226,38 atau 7,73% dari total ekspor Lampung tahun 2019. Negara tujuan ekspor terbesar Provinsi Lampung lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

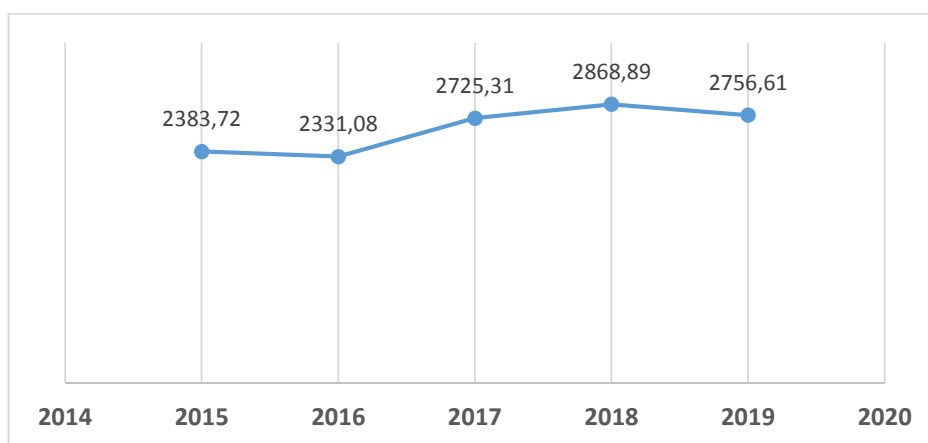
Tabel II-56  
Ekspor Provinsi Lampung berdasarkan Negara Tujuan, 2018-2019

NO	NEGARA TUJUAN	NILAI (US.\$ JUTA)	%
1	Tiongkok	385,94	13,17
2	India	138,6	4,73
3	Amerika Serikat	192,06	6,56
4	Italia	226,38	7,73
5	Brazil	67,1	2,29
6	Negara Lainnya	1.919,39	65,52
	<b>Total</b>	<b>2.929,48</b>	<b>100,00</b>

## 2) Impor

Jumlah Impor di Provinsi Lampung sampai dengan bulan Desember tahun 2019 sebanyak US \$ juta 2.756,61. Perkembangan Impor jangka waktu 2 tahun terakhir (2017 - 2018) secara kumulatif mengalami penurunan US\$ juta 112,28.

Grafik II-50  
Nilai Impor Provinsi Lampung, 2015 - 2019 (juta US\$)



## 3) Neraca Perdagangan

Perkembangan Perdagangan Luar Negeri Provinsi Lampung sampai bulan Desember 2017 sangat fluktuatif dan bisa dilihat dari ekspor dan impor migas dan non-migas yang cenderung turun naik. Selama tahun 2017 perkembangan neraca perdagangan Lampung menunjukkan peningkatan. Neraca Perdagangan Provinsi Lampung pada tahun 2017 menunjukkan Surplus sebesar US\$ juta 1.148,10 dengan Nilai Ekspor US\$ juta 3.873,41 dan Nilai Impor US\$ juta 2.725,31

Tabel II-57  
Neraca Perdagangan Non-migas Provinsi Lampung  
Januari - Desember 2017

PERIODE	EKSPOR (USD JUTA)	IMPOR (USD JUTA)	DEFISIT/SURPLUS
Januari	360,07	236,04	124,04
Februari	353,13	216,50	136,63
Maret	334,50	248,39	86,11
April	301,47	218,61	82,86

PERIODE	EKSPOR (USD JUTA)	IMPOR (USD JUTA)	DEFISIT/SURPLUS
Mei	300,85	287,78	13,07
Juni	265,42	157,14	108,28
Juli	305,84	260,32	45,52
Agustus	375,42	172,13	203,29
September	300,00	247,91	52,09
Oktober	392,86	185,82	207,04
November	298,08	265,47	32,61
Desember	285,29	229,20	56,09
Tahunan	3.873,41	2.725,31	1.148,10

#### 4) Jumlah Sertifikasi Mutu Barang Ekspor

Jumlah Sertifikasi mutu barang yang telah diterbitkan oleh UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Ekspor Dinas Perdagangan Provinsi Lampung pada Tahun 2015 sebanyak 1.850 Sertifikat yang terdiri dari; Kopi sebanyak 1.727 Sertifikat, Lada sebanyak 77 Sertifikat, Coklat sebanyak 32 Sertifikat, Kayu Manis sebanyak 0 Sertifikat, dan Karet sebanyak 14 Sertifikat.

#### 2.2.3.9 Perindustrian

Kegiatan industri pengolahan di Lampung secara umum juga menunjukkan peningkatan produksi. Sepanjang tahun 2011-2016 lapangan usaha industri pengolahan tumbuh 5,91 persen rata-rata per tahunnya. Kegiatan industri di Lampung keseluruhannya merupakan pengolahan komoditi non-migas, sedangkan minyak dan gas bumi yang ada baru sebatas kegiatan eksplorasi sumber daya alam. Menurut jenis industri, produksi kertas/barang dari kertas/percetakan tahun 2014 mengalami pertumbuhan tertinggi 12,17 persen.

Selain itu produk lain yang juga tumbuh signifikan adalah industri barang galian bukan logam, industri alat angkutan, industri mesin dan perlengkapannya, industri batu bara dan pengilangan minyak, industri logam dasar, serta industri tekstil dan pakaian jadi yang diperkirakan tumbuh di atas 5 persen.

### **2.2.3.10 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

#### **Infrastruktur Jalan**

Transportasi merupakan kunci utama pengembangan wilayah. Tujuan pembangunan transportasi di Provinsi Lampung adalah untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan membuka daerah-daerah ekonomi potensial yang terisolir, sehingga mampu meningkatkan perekonomian wilayah. Untuk itu Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk meningkatkan kuantitas. Tantangan pembangunan bidang infrastruktur jalan adalah tingginya tingkat kerusakan jalan yang mencapai 7-10% pertahun. Permasalahan kerusakan jalan selama ini disebabkan oleh overload kendaraan, konstruksi yang tidak sesuai kriteria kelas jalan dan dipicu oleh genangan air di badan jalan akibat minimnya saluran drainase. Permasalahan 'pembangunan jalan yang tidak terintegrasi dengan saluran drainase' merupakan issue Provinsi Lampung maupun nasional. Hal ini disebabkan karena pembangunan drainase membutuhkan anggaran yang juga tidak sedikit sementara kemampuan pendanaan relative terbatas, sehingga pembangunan jalan lebih berfokus untuk mengejar target panjang jalan/jalan mantab.

Tujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas dasar wilayah yang dijabarkan dalam sasaran tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegritas dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang didukung oleh indikator kinerja utama kemantapan jalan provinsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan keberhasilan capaian sasaran yang telah dilakukan oleh Provinsi Lampung selama kurun waktu tahun 2015-2018 adalah sebagaimana tabel berikut ;

Tabel II-59

## Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2019

Indikator	Capaian 2019	2019			Target Akhir RPJMD (2019)	Capaian s/d 2019
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Kemantapan Jalan Provinsi	74,41 %	75,00 %	74,41 %		85,00 %	

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Lampung, 2019 diolah

Berdasarkan tabel II-59, tingkat kemantapan jalan provinsi Lampung pada tahun 2019 sebesar 74,41% dari target yang ditetapkan sebesar 75%. Jika dilihat dari target yang ditetapkan dalam RPJMD, pelaksanaan kinerja pembangunan dalam bidang infrastruktur dan sarana transportasi meliputi pembangunan dan perawatan jalan dan jembatan belum sesuai dengan yang diharapkan.

Tabel II-60

## Kondisi Jalan Ruas Provinsi, 2015 – 2019

TAHUN	MANTAP (%)	TIDAK MANTAP (%)	KENAIKAN (%)
2015	67,02	32,98	1,97
2016	70,02	29,96	3,00
2017	77,04	22,96	7,02
2018	79,89	20,11	2,85
2019	74,41	25,58	-5,47

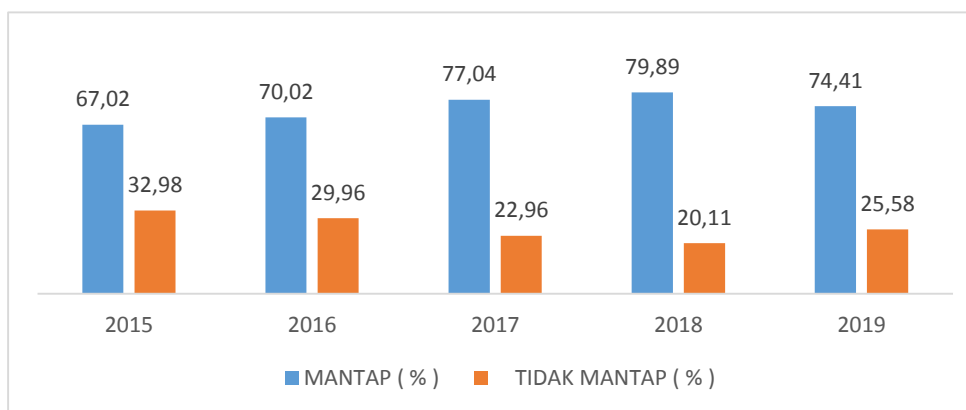
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2019 diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi ruas jalan provinsi Lampung tahun 2015-2019 kondisi mantap terus mengalami peningkatan dari 67,02% tahun 2015 menjadi 74,41% pada tahun 2019. Hal ini juga diikuti dengan menurunnya kondisi jalan tidak mantap dari 32,98% tahun 2015 menjadi 25,58% pada tahun 2019. Peningkatan kondisi ruas jalan mantap dan tidak mantap dapat dilihat pada grafik II-51.

Grafik II-51



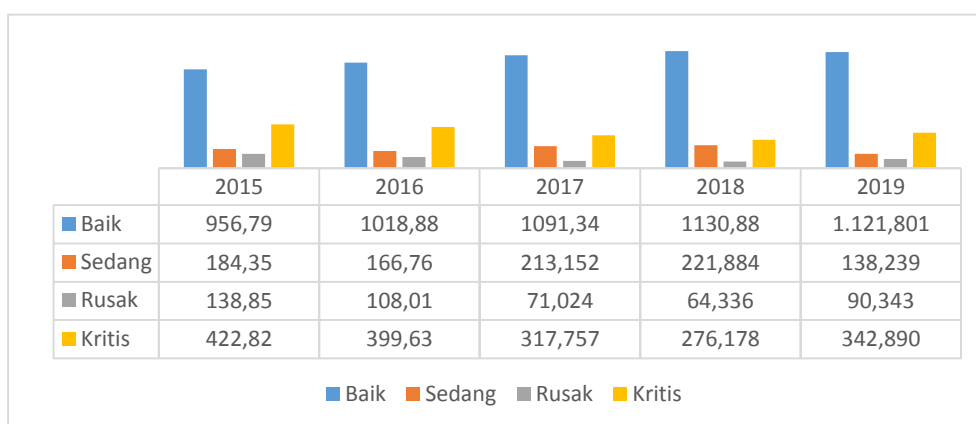
### Perbandingan Kondisi Jalan Mantap dan Tidak Mantap 2015–2019



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2019 diolah

Jika dilihat dari kondisi jalan menurut tingkat kerusakan, maka dapat dijelaskan bahwa kondisi jalan provinsi dengan kondisi baik selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan dari 956,79 pada tahun 2015 menjadi 1.121,801 pada tahun 2019. Untuk kondisi rusak juga mengalami penurunan dari 1138,85 tahun 2015 menjadi 90,343 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang konsisten dalam berkomitmen untuk menangani ruas jalan provinsi menjadi lebih baik. Secara rinci dapat dilihat pada grafik II-52.

Grafik II-52  
Perbandingan Kondisi Jalan menurut Tingkat Kerusakan,  
Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2019 diolah

Sedangkan, untuk kemantapan kondisi jalan negara tahun 2016 mencapai 89,90% dari panjang ruas jalan nasional sepanjang 1.292,25 km.

Perbandingan kondisi jalan nasional di Provinsi Lampung kondisi baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-62  
Kondisi Jalan Nasional di Provinsi Lampung, 2016

Tahun	Panjang Ruas Nasional (km)	Kondisi							
		Mantap				Tidak Mantap			
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
2016	1,292.25	811.08	62,77	350.57	27,13	63.91	4,94	66.65	5,16
% Mantap		89.90							
% Tidak Mantap						<b>10,10</b>			

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2019 diolah

## 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2019 dan Realisasi RPJMD

### 2.3.1 Kinerja RKPD Provinsi Lampung Tahun 2019

Berdasarkan evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD), Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019, diperoleh rekapitulasi data pelaksanaan Renja PD khususnya pada belanja pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel II-58  
Hasil Pelaksanaan Program pada Renja PD/RKPD Provinsi Lampung Tahun 2019

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
1	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	1	1	841,648,000	841,648,000	100	0	839,158,000	100	100
	Publikasi dan Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1	1	841,648,000	841,648,000	100	0	839,158,000	100	100
2	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	1	3	3,120,625,000	3,120,625,000	100	0	3,067,189,360	98	100
	Pembinaan Siswa Berprestasi TK/SD/SMP/SLB dan LPI	1	1	2,450,300,000	2,450,300,000	100	0	2,420,573,460	99	100
	Manajemen Pelaksanaan Bantuan BOS SD/SMP	1	1	55,325,000	55,325,000	100	0	55,065,000	100	100
	Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah	1	1	615,000,000	615,000,000	100	0	591,550,900	96	100
3	<b>Program Pendidikan Menengah</b>	1	10	415,350,561,976	415,350,561,976	100	0	401,423,194,193	97	100
	Oprasional SMK Unggulan Negara Bumi Ilir Lampung Tengah	1	1	3,207,452,000	3,207,452,000	100	0	3,114,289,558	97	100
	Operasional SMAN Olahraga Lampung di Kota Metro	1	1	3,184,000,000	3,184,000,000	100	0	3,114,258,123	98	100
	Pengembangan Wawasan Pendidikan Menengah	1	1	6,764,825,000	6,764,825,000	100	0	5,931,510,238	88	100
	Pengembangan Wawasan Pendidik Menengah Umum dan Kejuruan	1	1	1,693,167,600	1,693,167,600	100	0	1,693,167,600	100	100
	Peningkatan Mutu Kelembagaan Sekolah Menengah Atas	1	1	46,339,086,066	46,339,086,066	100	0	46,243,630,666	100	100
	Workshop Pembinaan Pramuka bagi SMA/SMK	1	1	1,943,839,980	1,943,839,980	100	0	1,927,709,980	99	100
	Peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar SMA	1	1	510,148,100	510,148,100	100	0	507,748,100	100	100
	Peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar SMK	1	1	4,277,523,230	4,277,523,230	100	0	3,999,715,878	94	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1	1	311,970,000,000	311,970,000,000	100	0	299,457,212,500	96	100
	Peningkatan Mutu Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan	1	1	35,460,520,000	35,460,520,000	100	0	35,433,951,550	100	100
4	<b>Program Pendidikan Luar Biasa</b>	1	2	<b>5,737,021,950</b>	<b>5,737,021,950</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>5,613,703,950</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
	Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK PLK ) Dikdas	1	1	1,000,000,000	1,000,000,000	100	0	997,116,000	100	100
	Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK PLK ) Dikmen	1	1	4,737,021,950	4,737,021,950	100	0	4,616,587,950	97	100
5	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	1	3	<b>20,438,045,237</b>	<b>20,438,045,237</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>20,427,617,843</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Peningkatan Mutu Guru Melalui Guru Berprestasi	1	1	500,000,000	500,000,000	100	0	497,425,600	99	100
	Peningkatan Mutu PTK Dikdasmen	1	1	4,355,995,237	4,355,995,237	100	0	4,350,884,843	100	100
	Peningkatan Kesejahteraan Guru Honor Murni TK/PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs, SMA/SMK	1	1	15,582,050,000	15,582,050,000	100	0	15,579,307,400	100	100
6	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	1	10	<b>8,702,672,347</b>	<b>8,702,672,347</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>8,565,179,539</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	1	1	339,943,920	339,943,920	100	0	337,857,600	99	100
	Penerapan Sistem Data Bidang Pendidikan Provinsi Lampung	1	1	448,957,205	448,957,205	100	0	438,562,846	98	100
	Pelaksanaan Publikasi Pembangunan Pendidikan	1	1	1,192,634,500	1,192,634,500	100	0	1,185,675,500	99	100
	Koordinasi Program UKS Provinsi Lampung	1	1	425,000,000	425,000,000	100	0	423,759,150	100	100
	Lampung Mengajar	1	1	4,850,000,000	4,850,000,000	100	0	4,744,878,000	98	100
	Pelayanan Kependidikan Wilayah I	1	1	397,366,000	397,366,000	100	0	397,028,000	100	100
	Pelayanan Kependidikan Wilayah II	1	1	256,793,982	256,793,982	100	0	256,793,980	100	100
	Pelayanan Kependidikan Wilayah III	1	1	380,079,700	380,079,700	100	0	369,177,423	97	100
	Pelayanan Kependidikan Wilayah IV	1	1	201,670,000	201,670,000	100	0	201,670,000	100	100
	Pelayanan Kependidikan Wilayah V	1	1	210,227,040	210,227,040	100	0	209,777,040	100	100
7	<b>Pengembangan dan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan</b>	1	4	<b>1,039,722,300</b>	<b>1,039,722,300</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1,029,086,150</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
	Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan	1	1	272,164,000	272,164,000	100	0	268,464,000	99	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp.	%	%
	Peningkatan Kompetensi Pemanfaatan TIK untuk pendidikan	1	1	325,407,000	325,407,000	100	0	324,045,850	100	100
	Pengembangan Layanan Informasi Teknologi Publik untuk Pendidikan	1	1	218,961,100	218,961,100	100	0	216,111,100	99	100
	Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis TIK	1	1	223,190,200	223,190,200	100	0	220,465,200	99	100
<b>8</b>	<b>Pendidikan Agama dan Budi Pekerti</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>389,700,000</b>	<b>389,700,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>384,450,000</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
	Peningkatan kualitas siswa terhadap pemahaman agama dan budi pekerti	1	1	389,700,000	389,700,000	100	0	384,450,000	99	100
<b>9</b>	<b>Program Pendidikan Tinggi</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7,726,274,900</b>	<b>7,726,274,900</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>7,536,274,900</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
	Peningkatan Mutu PTN/PTS	1	1	7,726,274,900	7,726,274,900	100	0	7,536,274,900	98	100
<b>10</b>	<b>Program Kegiatan Belajar Mengajar</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>187,863,477,000</b>	<b>187,863,477,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>179,718,682,484</b>	<b>96</b>	<b>100</b>
	Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana SMK (DAK)	1	1	91,128,584,000	91,128,584,000	100	0	87,911,493,615	96	100
	Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana SMA (DAK)	1	1	91,848,454,000	91,848,454,000	100	0	89,342,495,958	97	100
	Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana SLB (DAK)	1	1	4,886,439,000	4,886,439,000	100	0	2,464,692,911	50	100
<b>11</b>	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,737,105,000</b>	<b>1,737,105,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1,729,697,567</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Peningkatan ketersediaan Obat Publik dan Pengamanan Napza	1	1	1,697,105,000	1,697,105,000	100	100	1,690,075,567	100	100
	Peningkatan Pelayanan Kosmetika	1	1	40,000,000	40,000,000	100	100	39,622,000	99	100
<b>12</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>17,429,110,500</b>	<b>17,429,110,500</b>	<b>100</b>	<b>91</b>	<b>16,759,371,325</b>	<b>96</b>	<b>100</b>
	Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan Dasar	1	1	14,105,110,500	14,105,110,500	100	100	13,856,482,640	98	100
	BOK Provinsi	1	1	3,324,000,000	3,324,000,000	100	71	2,902,888,685	87	100
<b>13</b>	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>69,500,900</b>	<b>69,500,900</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>57,250,900</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
	Penyuluhan Kesehatan Jiwa Masyarakat	1	1	69,500,900	69,500,900	100	0	57,250,900	82	82
<b>14</b>	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3,801,066,800</b>	<b>3,801,066,800</b>	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>516,625,000</b>	<b>14</b>	<b>25</b>
	Perbaikan Gizi Masyarakat	1	1	3,801,066,800	3,801,066,800	100	80	516,625,000	14	25
<b>15</b>	<b>Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>190,000,000</b>	<b>190,000,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>185,747,317</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
	Peningkatan Kualitas Sanitasi Dasar	1	1	190,000,000	190,000,000	100	100	185,747,317	98	100
<b>16</b>	<b>Program Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>314,262,000</b>	<b>314,262,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>291,246,450</b>	<b>93</b>	<b>100</b>

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Peningkatan Surveillance Epidemiologi & Penanggulangan Wabah	1	1	160,022,000	160,022,000	100	100	142,785,050	89	100
	Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	1	1	154,240,000	154,240,000	100	100	148,461,400	96	100
17	<b>Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata</b>	1	6	115,723,295,818	115,723,295,818	100	77	96,909,129,805	84	96
	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	1	1	24,797,397,540	24,797,397,540	100	99	23,460,154,456	95	88
	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	1	1	2,137,196,740	2,137,196,740	100	27	1,985,685,659	93	169
	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	1	1	742,918,957	742,918,957	100	0	742,904,650	100	100
	Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah sakit (WVIP, VIP, Kelas I, II, Dan III)	1	1	85,889,260,741	85,889,260,741	100	25	68,955,245,100	80	75
	Pembangunan gedung administrasi	1	1	1,833,114,000	1,833,114,000	100	0	1,441,732,100	79	100
	Pembangunan Gedung Penunjang Rumah Sakit	1	1	323,407,840	323,407,840	100	25	323,407,840	100	100
18	<b>Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata</b>	1	1	5,036,035,104	5,036,035,104	100	63	3,727,197,104	74	100
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung rumah sakit	1	1	5,036,035,104	5,036,035,104	100	63	3,727,197,104	74	100
19	<b>Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan</b>	1	4	10,723,298,984	10,723,298,984	100	1,211	9,807,866,236	91	99
	Upaya peningkatan pelayanan rehabilitasi mental/ terapi pasien RSJ	1	1	68,950,900	68,950,900	100	0	68,548,467	99	99
	Peningkatan Upaya Kesehatan Perorangan dan Rujukan (Pajak Rokok)	1	1	1,145,377,021	1,145,377,021	100	100	606,585,345	53	50
	Upaya Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan	1	1	1,641,700,000	1,641,700,000	100	100	1,636,246,979	100	100
	Pelayanan Rumah Sakit Bandar Negara Husada	1	1	7,867,271,063	7,867,271,063	100	100	7,496,485,445	95	100
20	<b>Program kebijakan dan manajemen Pembangunan Kesehatan</b>	1	5	1,065,960,000	1,065,960,000	100	725	1,045,422,030	98	99
	Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan	1	1	274,787,000	274,787,000	100	100	267,577,650	97	100
	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Dinkes Provinsi Lampung	1	1	585,854,000	585,854,000	100	100	573,189,380	98	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	1	1	62,936,000	62,936,000	100	100	62,936,000	100	100
	Mitra Praja Utama	1	1	50,000,000	50,000,000	100	100	50,000,000	100	100
	Penyusunan Rencana Kerja dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa	1	1	92,383,000	92,383,000	100	0	91,719,000	99	99
21	<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD</b>	1	2	214,495,000,000	214,495,000,000	100	417	218,862,453,007	102	57
	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	1	1	200,000,000,000	200,000,000,000	100	208	206,046,276,834	103	18
	Peningkatan Mutu Layanan Rumah Sakit Jiwa	1	1	14,495,000,000	14,495,000,000	100	0	12,816,176,173	88	96
22	<b>Program Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak dan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b>	1	1	41,622,000	41,622,000	100	100	33,520,000	81	50
	Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak dan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1	1	41,622,000	41,622,000	100	100	33,520,000	81	50
23	<b>Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>	1	1	1,238,688,504	1,238,688,504	100	50	1,218,352,614	98	94
	Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang mampu	1	1	1,238,688,504	1,238,688,504	100	50	1,218,352,614	98	94
24	<b>Program Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional</b>	1	1	50,000,000	50,000,000	100	100	45,618,000	91	100
	Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional	1	1	50,000,000	50,000,000	100	100	45,618,000	91	100
25	<b>Program Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</b>	1	2	383,788,660	383,788,660	100	100	292,127,510	76	75
	Peningkatan Mutu Pengawasan/Pembinaan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	1	1	40,000,000	40,000,000	100	100	36,130,000	90	100
	Pelayanan Kalibrasi Alat Kesehatan	1	1	343,788,660	343,788,660	100	100	255,997,510	74	74
26	<b>Program Pemberantasan Penyakit</b>	1	1	200,595,700	200,595,700	100	100	194,991,200	97	100
	Pengendalian Penyakit Menular	1	1	200,595,700	200,595,700	100	100	194,991,200	97	100
27	<b>Program Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	1	4	1,613,943,000	1,613,943,000	100	100	1,458,664,525	90	92
	Peningkatan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	1	1	783,143,000	783,143,000	100	100	710,644,600	91	100
	Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan	1	1	450,000,000	450,000,000	100	100	371,858,500	83	100
	Peningkatan Mutu UPTD Bapelkes	1	1	330,800,000	330,800,000	100	100	327,164,607	99	100
	Peningkatan Kelembagaan dan Tata Laksana Kepegawaian	1	1	50,000,000	50,000,000	100	100	48,996,818	98	50

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
28	<b>Program Promosi Kesehatan</b>	1	2	921,130,000	921,130,000	100	100	813,730,464	88	100
	Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	1	449,010,000	449,010,000	100	100	432,771,029	96	100
	Upaya Kesehatan Bersumberdaya Kesehatan (UKBM)	1	1	472,120,000	472,120,000	100	100	380,959,435	81	100
29	<b>Program Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan</b>	1	1	47,590,529,364	47,590,529,364	100	100	47,575,273,500	100	100
	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka JKN	1	1	47,590,529,364	47,590,529,364	100	100	47,575,273,500	100	100
30	<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>	1	31	544,886,812,500	544,886,812,500	100	206	397,031,512,335	73	99
	Perencanaan Pembangunan Jalan	1	1	2,539,460,000	2,539,460,000	100	200	2,439,622,560	96	100
	Perencanaan Pembangunan Jembatan	1	1	1,585,669,000	1,585,669,000	100	300	1,560,595,000	98	100
	Pembangunan Jembatan	1	1	3,804,917,500	3,804,917,500	100	200	2,442,340,370	64	100
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1	1	187,784,000	187,784,000	100	0	202,484,000	108	100
	Pengawasan teknis pembangunan/pemeliharaan jembatan	1	1	1,353,109,000	1,353,109,000	100	200	1,343,569,250	99	100
	Pengawasan teknis pembangunan/pemeliharaan jalan koridor 1-6	1	1	2,900,412,500	2,900,412,500	100	200	2,861,239,200	99	100
	Pengawasan teknis pembangunan/pemeliharaan jalan koridor 7-12	1	1	3,305,742,500	3,305,742,500	100	200	3,270,922,000	99	100
	Pengawasan teknis pembangunan/pemeliharaan jalan koridor 13-17	1	1	2,100,010,500	2,100,010,500	100	200	2,078,918,475	99	100
	Pengawasan teknis pembangunan/pemeliharaan jalan koridor 18-22	1	1	3,375,642,500	3,375,642,500	100	250	3,340,035,800	99	100
	Pembangunan jalan provinsi koridor 1	1	1	19,070,150,000	19,070,150,000	100	200	5,197,710,000	27	75
	Pembangunan jalan provinsi koridor 2	1	1	25,120,150,000	25,120,150,000	100	250	12,242,640,000	49	100
	Pembangunan jalan provinsi koridor 3	1	1	31,816,150,000	31,816,150,000	100	200	33,535,208,380	105	100
	Pembangunan jalan provinsi koridor 4	1	1	26,670,150,000	26,670,150,000	100	200	11,007,336,100	41	93
	Pembangunan jalan provinsi koridor 5	1	1	11,456,915,000	11,456,915,000	100	200	4,304,185,700	38	90
	Pembangunan jalan provinsi koridor 6	1	1	11,480,110,000	11,480,110,000	100	200	28,940,685,100	252	100
	Pembangunan jalan provinsi koridor 7	1	1	11,470,150,000	11,470,150,000	100	200	5,197,720,000	45	100
	Pembangunan jalan provinsi koridor 8	1	1	25,130,110,000	25,130,110,000	100	200	26,645,095,400	106	100
	Pembangunan jalan provinsi koridor 9	1	1	24,680,110,000	24,680,110,000	100	200	49,429,187,200	200	100
	Pembangunan jalan provinsi koridor 10	1	1	13,697,201,000	13,697,201,000	100	200	9,649,338,000	70	100
	Pembangunan jalan provinsi koridor 11	1	1	25,140,330,000	25,140,330,000	100	200	22,813,715,000	91	100
	Pembangunan jalan provinsi koridor 12	1	1	48,845,439,000	48,845,439,000	100	200	21,530,458,700	44	97
	Pembangunan jalan provinsi koridor 13	1	1	24,680,110,000	24,680,110,000	100	200	8,898,554,000	36	100
	Pembangunan jalan provinsi koridor 14	1	1	27,130,110,000	27,130,110,000	100	200	11,128,149,300	41	98



No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp.	%	%
	Pembangunan jalan provinsi koridor 15	1	1	14,880,110,000	14,880,110,000	100	200	10,613,441,000	71	100
	Pembangunan jalan provinsi koridor 16	1	1	3,880,110,000	3,880,110,000	100	200	1,790,100,000	46	100
	Pembangunan jalan provinsi koridor 17	1	1	20,980,110,000	20,980,110,000	100	200	15,110,025,000	72	100
	Pembangunan jalan provinsi koridor 18	1	1	51,284,110,000	51,284,110,000	100	200	19,883,040,000	39	100
	Pembangunan jalan provinsi koridor 19	1	1	22,882,110,000	22,882,110,000	100	200	13,078,110,000	57	100
	Pembangunan jalan provinsi koridor 20	1	1	23,780,110,000	23,780,110,000	100	200	8,629,700,000	36	100
	Pembangunan jalan provinsi koridor 21	1	1	34,080,110,000	34,080,110,000	100	200	13,802,705,000	41	100
	Pembangunan jalan provinsi koridor 22	1	1	25,580,110,000	25,580,110,000	100	200	44,064,681,800	172	100
<b>31</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6,189,067,400</b>	<b>6,189,067,400</b>	<b>100</b>	<b>1,577</b>	<b>5,003,008,573</b>	<b>81</b>	<b>80</b>
	Penyusunan dan Legalisasi RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah (RTRKS/RDTR/KSCT) Provinsi Lampung	1	1	271,670,400	271,670,400	100	0	262,550,400	97	100
	Fasilitasi dan Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	1	1	916,448,000	916,448,000	100	2,5	723,816,654	79	80
	Pembinaan Teknis Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1	1	826,640,000	826,640,000	100	25	594,325,378	72	95
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	1	1	3,250,920,000	3,250,920,000	100	200	2,808,919,600	86	100
	Pengawasan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	1	1	620,489,000	620,489,000	100	2,5	376,541,647	61	78
	Fasilitasi Legislasi Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota	1	1	302,900,000	302,900,000	100	0	236,854,894	78	100
<b>32</b>	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>111,385,114,000</b>	<b>111,385,114,000</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>70,533,141,050</b>	<b>63</b>	<b>99</b>
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1	1	202,552,000	202,552,000	100	200	406,203,910	201	100
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	1	1	4,284,110,000	4,284,110,000	100	200	3,676,504,053	86	98
	Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 1	1	1	9,535,220,000	9,535,220,000	100	200	5,639,992,943	59	100
	Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 2	1	1	5,735,220,000	5,735,220,000	100	200	2,847,105,500	50	92
	Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 3	1	1	5,735,220,000	5,735,220,000	100	200	2,592,320,000	45	100
	Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 4	1	1	1,935,604,000	1,935,604,000	100	200	1,718,911,475	89	100
	Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 5	1	1	5,735,220,000	5,735,220,000	100	200	2,599,920,000	45	100
	Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 7	1	1	3,835,220,000	3,835,220,000	100	200	1,745,220,000	46	100
	Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 8	1	1	7,635,220,000	7,635,220,000	100	200	5,271,828,600	69	100
	Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 9	1	1	1,935,604,000	1,935,604,000	100	200	890,604,000	46	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp.	%	%
	Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 10	1	1	7,920,220,000	7,920,220,000	100	200	4,319,585,500	55	96
	Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 11	1	1	3,835,220,000	3,835,220,000	100	200	1,745,000,000	45	100
	Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 13	1	1	5,734,620,000	5,734,620,000	100	200	3,119,570,400	54	95
	Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 14	1	1	3,835,220,000	3,835,220,000	100	200	1,745,150,000	46	100
	Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 15	1	1	1,935,220,000	1,935,220,000	100	200	889,970,000	46	100
	Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 16	1	1	3,835,220,000	3,835,220,000	100	200	1,745,210,000	46	100
	Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 17	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 18	1	1	3,835,604,000	3,835,604,000	100	200	3,415,892,100	89	100
	Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 19	1	1	7,635,220,000	7,635,220,000	100	200	2,600,210,000	34	75
	Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 20	1	1	5,735,220,000	5,735,220,000	100	200	3,093,920,000	54	100
	Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 21	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Pemeliharaan berkala jalan provinsi koridor 22	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Pemeliharaan rutin dengan sistem mantri jalan UPTD Wil. I	1	1	4,097,360,000	4,097,360,000	100	200	4,095,852,469	100	100
	Pemeliharaan rutin dengan sistem mantri jalan UPTD Wil. II	1	1	3,382,360,000	3,382,360,000	100	200	3,371,368,450	100	100
	Pemeliharaan rutin dengan sistem mantri jalan UPTD Wil. III	1	1	4,482,360,000	4,482,360,000	100	200	4,473,623,400	100	100
	Pemeliharaan rutin dengan sistem mantri jalan UPTD Wil. IV	1	1	3,602,360,000	3,602,360,000	100	200	3,600,218,600	100	100
	Pemeliharaan rutin dengan sistem mantri jalan UPTD Wil. V	1	1	3,602,360,000	3,602,360,000	100	200	3,589,973,400	100	100
	Pemeliharaan rutin dengan sistem mantri jalan UPTD Wil. VI	1	1	1,347,360,000	1,347,360,000	100	200	1,338,986,250	99	100
<b>33</b>	<b>Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3,881,867,000</b>	<b>3,881,867,000</b>	<b>100</b>	<b>175</b>	<b>3,823,408,050</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
	Penyusunan Sistem Informasi/Database Jalan	1	1	284,700,000	284,700,000	100	200	284,030,000	100	100
	Penyusunan leger jalan Provinsi Lampung	1	1	3,597,167,000	3,597,167,000	100	171	3,539,378,050	98	100
<b>34</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>723,139,000</b>	<b>723,139,000</b>	<b>100</b>	<b>425</b>	<b>688,680,070</b>	<b>95</b>	<b>99</b>
	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat untuk Satgas PCA	1	1	50,000,000	50,000,000	100	0	50,000,000	100	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp.	%	%
	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat untuk UPTD Wil. I	1	1	50,000,000	50,000,000	100	0	50,000,000	100	100
	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat untuk UPTD Wil. II	1	1	50,000,000	50,000,000	100	0	49,288,000	99	100
	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat untuk UPTD Wil. III	1	1	50,000,000	50,000,000	100	0	49,550,000	99	100
	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat untuk UPTD Wil. IV	1	1	50,000,000	50,000,000	100	0	50,000,000	100	100
	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat untuk UPTD Wil. V	1	1	50,000,000	50,000,000	100	0	50,000,000	100	100
	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat untuk UPTD Wil. VI	1	1	50,000,000	50,000,000	100	0	50,000,000	100	100
	Pengadaan alat-alat laboratorium	1	1	266,074,000	266,074,000	100	225	257,782,070	97	100
	Pemeliharaan dan kalibrasi alat laboratorium	1	1	107,065,000	107,065,000	100	0	82,060,000	77	78
<b>35</b>	<b>Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>8,963,898,000</b>	<b>8,963,898,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2,923,808,235</b>	<b>33</b>	<b>94</b>
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	1	1	4,700,000,000	4,700,000,000	100	100	885,847,330	19	67
	OP Irigasi/Rawa 1.000-3.000 Ha (swakelola)	1	1	1,296,139,000	1,296,139,000	100	100	914,986,650	71	100
	OP Waduk Sungai (swakelola)	1	1	1,000,000,000	1,000,000,000	100	100	701,887,000	70	100
	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Irigasi	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	65,012,000	65	100
	Pengelolaan Pos Hidrologi	1	1	125,000,000	125,000,000	100	100	78,374,000	63	100
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Bangunan Pelengkapannya	1	1	650,000,000	650,000,000	100	100	9,571,000	1	100
	Peningkatan Sistem Informasi Sumber Daya Air	1	1	92,759,000	92,759,000	100	100	66,428,800	72	100
	Manajemen Sistem Irigasi	1	1	200,000,000	200,000,000	100	100	154,566,175	77	100
	Perencanaan Teknis Bidang Operasi dan Pemeliharaan	1	1	300,000,000	300,000,000	100	100	31,498,480	10	100
	Monitoring dan Pelaporan Bidang Pengairan	1	1	500,000,000	500,000,000	100	100	15,636,800	3	0
<b>36</b>	<b>Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>7,150,000,000</b>	<b>7,150,000,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1,448,514,232</b>	<b>20</b>	<b>92</b>
	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya.	1	1	3,500,000,000	3,500,000,000	100	100	565,708,349	16	50
	Rehabilitasi Embung, Waduk, Situ dan Bangunan Penampung air lainnya (swakelola)	1	1	300,000,000	300,000,000	100	100	286,186,000	95	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp.	%	%
	Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Semangka	1	1	250,000,000	250,000,000	100	100	164,596,366	66	100
	Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Seputih - Sekampung	1	1	250,000,000	250,000,000	100	100	80,659,132	32	100
	Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Mesuji - Tulang Bawang	1	1	250,000,000	250,000,000	100	100	32,399,405	13	100
	Pembangunan Irigasi Desa (PID)	1	1	200,000,000	200,000,000	100	100	142,630,700	71	100
	Pembangunan / Revitalisasi Bendung dan Bangunan Air Lainnya	1	1	1,800,000,000	1,800,000,000	100	100	38,961,000	2	100
	Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	1	1	400,000,000	400,000,000	100	100	110,194,780	28	100
	Perencanaan Teknis Bidang Konservasi	1	1	200,000,000	200,000,000	100	100	27,178,500	14	100
37	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>	1	3	400,000,000	400,000,000	100	100	49,338,350	12	67
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah dan Persampahan	1	1	200,000,000	200,000,000	100	100	4,134,350	2	0
	Koordinasi dan Pendampingan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	18,668,000	19	100
	Koordinasi dan Pendampingan Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	26,536,000	27	100
38	<b>Program pengendalian banjir</b>	1	5	1,100,000,000	1,100,000,000	100	83	617,779,490	56	100
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	85,165,070	85	100
	Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa dalam Rangka Pengendali Banjir	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	88,183,800	88	100
	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai	1	1	550,000,000	550,000,000	100	50	129,713,800	24	100
	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	85,853,220	86	100
	Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Pengaman Pantai	1	1	250,000,000	250,000,000	100	100	228,863,600	92	100
39	<b>Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh</b>	1	3	400,000,000	400,000,000	100	167	51,174,876	13	0
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pedesaan Potensial	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	9,062,000	9	0

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Agropolitan/Minapolitan	1	1	200,000,000	200,000,000	100	200	39,688,726	20	0
	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Strategis	1	1	100,000,000	100,000,000	100	200	2,424,150	2	0
<b>40</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,150,000,000</b>	<b>1,150,000,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>452,230,712</b>	<b>39</b>	<b>38</b>
	Pembangunan Sarana & Prasarana Air Bersih Pedesaan	1	1	200,000,000	200,000,000	100	100	21,718,300	11	100
	Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan	1	1	650,000,000	650,000,000	100	100	389,866,562	60	20
	Perencanaan Teknis Infrastruktur Pedesaan dan Wilayah Strategis	1	1	200,000,000	200,000,000	100	100	37,148,400	19	0
	Koordinasi dan pendampingan kota tanpa kumuh	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	3,497,450	3	100
<b>41</b>	<b>Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7,250,582,000</b>	<b>7,250,582,000</b>	<b>100</b>	<b>206</b>	<b>6,630,120,900</b>	<b>91</b>	<b>100</b>
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	1	1	6,098,475,000	6,098,475,000	100	203	5,487,310,200	90	100
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1	1	1,152,107,000	1,152,107,000	100	233	1,142,810,700	99	100
<b>42</b>	<b>Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1,169,852,000</b>	<b>1,169,852,000</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>1,155,934,300</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
	Inspeksi Kondisi Jembatan	1	1	175,016,000	175,016,000	100	200	173,842,000	99	100
	Inspeksi Kondisi Jalan Koridor 1-6	1	1	253,596,000	253,596,000	100	200	250,578,500	99	100
	Inspeksi Kondisi Jalan Koridor 7-12	1	1	276,780,000	276,780,000	100	200	271,855,900	98	100
	Inspeksi Kondisi Jalan Koridor 13-17	1	1	227,740,000	227,740,000	100	200	222,832,900	98	100
	Inspeksi Kondisi Jalan Koridor 18-22	1	1	236,720,000	236,720,000	100	200	236,825,000	100	100
<b>43</b>	<b>Program Pembinaan Jasa Konstruksi</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3,600,835,000</b>	<b>3,600,835,000</b>	<b>100</b>	<b>208</b>	<b>2,895,497,203</b>	<b>80</b>	<b>96</b>
	Pengaturan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1	1	893,237,000	893,237,000	100	200	808,808,694	91	100
	Pengawasan Jasa Konstruksi	1	1	481,731,000	481,731,000	100	200	425,529,069	88	100
	Pengelolaan Rumija	1	1	531,900,000	531,900,000	100	200	506,807,240	95	100
	Pelatihan bidang konstruksi	1	1	1,386,974,000	1,386,974,000	100	200	1,154,352,200	83	93
	Partisipasi dalam event konstruksi	1	1	306,993,000	306,993,000	100	0	0	0	100
<b>44</b>	<b>Pembangunan Jalan-jalan Strategis</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>98,587,758,000</b>	<b>98,587,758,000</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>54,099,481,450</b>	<b>55</b>	<b>97</b>
	Perencanaan pembangunan jalan dan jembatan strategis	1	1	1,423,027,000	1,423,027,000	100	200	1,387,888,600	98	100
	Pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan strategis	1	1	2,274,571,000	2,274,571,000	100	200	2,005,287,050	88	90
	Pembangunan jalan dan jembatan strategis	1	1	94,890,160,000	94,890,160,000	100	200	50,706,305,800	53	97

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
45	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	1	16	30,233,270,160	30,233,270,160	100	101	22,616,124,606	75	66
	Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	7,518,000	8	100
	Pengembangan Permukiman dan Bangunan	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	2,809,450	3	0
	Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Bidang Permukiman dan Bangunan	1	1	200,000,000	200,000,000	100	100	184,964,050	92	100
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	1	1	300,000,000	300,000,000	100	100	29,807,060	10	10
	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan pertanahan	1	1	75,000,000	75,000,000	100	100	17,805,000	24	39
	Fasilitasi perumahan layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	1	1	50,000,000	50,000,000	100	133	49,669,200	99	99
	Fasilitasi pengembangan perumahan di wilayah strategis dan cepat tumbuh	1	1	25,033,270,160	25,033,270,160	100	100	18,240,366,188	73	73
	Perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	1	1	75,000,000	75,000,000	100	100	60,863,800	81	81
	Monitoring dan evaluasi bidang perumahan dan pertanahan	1	1	75,000,000	75,000,000	100	100	64,496,850	86	86
	Penyelenggaraan Rumah Swadaya	1	1	300,000,000	300,000,000	100	100	181,180,350	60	82
	Penyelenggaraan Rumah Susun dan Rumah Khusus	1	1	75,000,000	75,000,000	100	100	67,488,843	90	99
	Pemberdayaan Masyarakat Pada Pembiayaan Perumahan	1	1	75,000,000	75,000,000	100	100	67,213,260	90	99
	Penyelenggaraan Rumah Umum dan Rumah Komersil	1	1	75,000,000	75,000,000	100	100	74,580,600	99	99
	Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	1	3,500,000,000	3,500,000,000	100	100	3,412,893,555	98	96
	Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan	1	1	50,000,000	50,000,000	100	100	22,204,300	44	44
	Perencanaan Pemanfaatan Pertanahan	1	1	150,000,000	150,000,000	100	100	132,264,100	88	88
46	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	1	9	8,450,000,000	8,450,000,000	100	114	3,414,673,751	40	97
	Pengendalian Banjir Kawasan Lingkungan Perumahan (wilayah utara)	1	1	250,000,000	250,000,000	100	100	23,940,000	10	100
	Pengendalian Banjir Kawasan Lingkungan Perumahan (wilayah selatan)	1	1	250,000,000	250,000,000	100	100	49,068,500	20	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan (wilayah utara)	1	1	650,000,000	650,000,000	100	100	287,900,591	44	50
	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan (wilayah selatan)	1	1	2,000,000,000	2,000,000,000	100	120	1,592,126,690	80	100
	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi (wilayah utara)	1	1	500,000,000	500,000,000	100	200	417,943,750	84	100
	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi (wilayah selatan)	1	1	1,100,000,000	1,100,000,000	100	100	617,065,050	56	100
	Perencanaan Teknis Bidang Permukiman	1	1	200,000,000	200,000,000	100	100	24,090,900	12	100
	Koordinasi Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Infrastruktur Cipta Karya	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	4,958,650	5	100
	Monitoring dan Pelaporan Bidang Permukiman	1	1	3,400,000,000	3,400,000,000	100	100	397,579,620	12	100
47	<b>Program Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung dan Lingkungan</b>	1	5	172,849,000,000	172,849,000,000	100	93	63,931,920,792	37	64
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung dan Lingkungan	1	1	169,199,000,000	169,199,000,000	100	91	63,159,198,198	37	60
	Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung dan Lingkungan	1	1	3,250,000,000	3,250,000,000	100	100	732,176,794	23	67
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pelestarian Cagar Budaya	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	16,032,650	16	100
	Pembangunan dan Rehabilitasi Relief, Ornamen, Tugu, Monumen, Taman dan Lansekap	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	5,410,650	5	100
	Perencanaan Teknis Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan	1	1	200,000,000	200,000,000	100	100	19,102,500	10	100
48	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	1	3	574,822,500	574,822,500	100	100	436,237,250	76	94
	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	16,672,250	17	100
	Pengelolaan dan pengembangan website dinas	1	1	324,822,500	324,822,500	100	100	271,062,400	83	89
	Penyediaan basis data dan perumahan dan pertanahan	1	1	150,000,000	150,000,000	100	100	148,502,600	99	99
49	<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>	1	3	1,274,141,230	1,274,141,230	100	100	1,255,718,192	99	100
	Posko Siaga Bencana	1	1	179,541,230	179,541,230	100	100	170,102,892	95	100
	Peningkatan kapasitas pelajar terhadap penanggulangan bencana	1	1	194,600,000	194,600,000	100	100	194,249,800	100	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana	1	1	900,000,000	900,000,000	100	100	891,365,500	99	100
50	<b>Program Kedaruratan dan Logistik</b>	1	3	193,300,000	193,300,000	100	100	190,429,550	99	140
	Pelatihan Penataan Pergudangan Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung	1	1	36,675,000	36,675,000	100	100	36,610,000	100	100
	Pemantauan dan Monitoring Penanggulangan Bencana di Provinsi Lampung	1	1	125,000,000	125,000,000	100	100	123,659,550	99	100
	Pelatihan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Provinsi dan Kabupaten/ Kota	1	1	31,625,000	31,625,000	100	100	30,160,000	95	200
51	<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>	1	3	172,640,020	172,640,020	100	211	147,158,400	85	47
	Pendidikan Konseling Pasca Bencana	1	1	75,000,000	75,000,000	100	100	65,092,000	87	100
	Identifikasi dan Verifikasi Pasca Bencana	1	1	97,640,020	97,640,020	100	100	82,066,400	84	100
	Sosialisasi Pemulihan fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat Desa dan Kecamatan pasca bencana	1	1	0	0	0	0	0	0	0
52	<b>Program penegakan Peraturan Perundang undangan</b>	1	3	966,926,000	966,926,000	100	100	951,652,784	98	100
	Penyuluhan Perda bagi Masyarakat dan badan Usaha	1	1	386,608,000	386,608,000	100	100	385,152,000	100	100
	Penindakan penegakan Perda	1	1	384,494,000	384,494,000	100	100	370,999,001	96	100
	Koordinasi dan Fasilitasi serta Monitoring dan Evaluasi PPNS	1	1	195,824,000	195,824,000	100	100	195,501,783	100	100
53	<b>Peningkatan Perlindungan Masyarakat (Linmas)</b>	1	4	432,964,826	432,964,826	100	100	417,187,200	96	100
	Pendataan dan monitoring kesiapan anggota perlindungan masyarakat se- Provinsi Lampung	1	1	120,000,096	120,000,096	100	100	119,023,300	99	100
	Bimtek kesiagaan linmas pencegahan dan penanggulangan	1	1	96,415,900	96,415,900	100	100	93,089,900	97	100
	Pemberdayaan SDM Linmas kab/kota	1	1	196,538,000	196,538,000	100	100	186,468,000	95	100
	Peningkatan peran Pol.PP dalam rangka pengawasan penanggulangan kesehatan masyarakat	1	1	20,010,830	20,010,830	100	100	18,606,000	93	100
54	<b>Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibmas)</b>	1	9	5,565,082,000	5,565,082,000	100	100	5,362,209,900	96	100
	Penegakkan disiplin Tri Budaya GDN Prov.Lampung	1	1	30,768,000	30,768,000	100	100	30,753,000	100	100



No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Pemantauan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Trantibum	1	1	206,400,000	206,400,000	100	100	198,629,100	96	100
	Pengamanan untuk rasa dan pengamanan di8 lingkup Pemprov Lampung	1	1	250,000,000	250,000,000	100	100	172,455,000	69	100
	Pengamanan dalam rangka pelaksanaan pemakaman pejabat dan mantan pejabat	1	1	46,000,000	46,000,000	100	86	33,106,600	72	100
	Tertib administrasi pelaksanaan upacara di lingkup pemprov Lampung	1	1	29,550,000	29,550,000	100	100	29,540,000	100	100
	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	1	1	42,500,000	42,500,000	100	100	42,385,000	100	100
	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	1	1	291,300,000	291,300,000	100	100	188,109,100	65	100
	Pengendalian keamanan lingkungan	1	1	3,570,064,000	3,570,064,000	100	100	3,569,113,000	100	100
	Pengawasan dan pengamanan pimpinan daerah dan tamu jabatan /VIP, aset-aset daerah Provinsi Lampung	1	1	1,098,500,000	1,098,500,000	100	100	1,098,119,100	100	100
55	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	1	1	<b>169,410,000</b>	<b>169,410,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>94,960,000</b>	<b>56</b>	<b>100</b>
	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendampingan sosial pemberdayaan fakir miskin perkotaan	1	1	169,410,000	169,410,000	100	100	94,960,000	56	100
56	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	1	3	<b>1,084,452,650</b>	<b>1,084,452,650</b>	<b>100</b>	<b>64</b>	<b>1,049,542,378</b>	<b>97</b>	<b>105</b>
	Perlindungan Korban Tindak kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah	1	1	172,166,000	172,166,000	100	44	164,303,250	95	116
	Peningkatan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada Anak yang berhadapan dengan hukum pada UPTD ABH Insan Berguna	1	1	450,097,500	450,097,500	100	60	424,747,378	94	100
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	1	1	462,189,150	462,189,150	100	83	460,491,750	100	100
57	<b>Program pembinaan anak terlantar</b>	1	4	<b>3,182,099,500</b>	<b>3,182,099,500</b>	<b>100</b>	<b>83</b>	<b>3,152,389,160</b>	<b>99</b>	<b>100</b>

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak putus sekolah terlanter pada UPTD PSBR Radin Intan	1	1	761,850,000	761,850,000	100	57	753,516,324	99	100
	Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlanter pada PSAA Harapan Bangsa	1	1	1,085,534,500	1,085,534,500	100	83	1,079,497,299	99	100
	Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlanter pada UPTD PSAA Budi Asih	1	1	1,067,445,000	1,067,445,000	100	58	1,052,105,537	99	100
	Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak	1	1	267,270,000	267,270,000	100	100	267,270,000	100	100
58	<b>Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b>	1	2	1,345,032,300	1,345,032,300	100	100	1,322,554,326	98	100
	Asistensi dan perlindungan sosial disabilitas	1	1	298,135,800	298,135,800	100	100	298,135,800	100	100
	Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas pada UPTD PRSPD	1	1	1,046,896,500	1,046,896,500	100	100	1,024,418,526	98	100
59	<b>Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo</b>	1	1	1,067,773,000	1,067,773,000	100	85	1,055,183,177	99	100
	Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia terlanter pada UPTD PSLU Tresna Werdha Lampung	1	1	1,067,773,000	1,067,773,000	100	85	1,055,183,177	99	100
60	<b>Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)</b>	1	1	607,520,000	607,520,000	100	31	528,310,608	87	100
	Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada Gepeng pada UPTD PRSTS Mardi Guna	1	1	607,520,000	607,520,000	100	31	528,310,608	87	100
61	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	1	4	408,352,000	408,352,000	100	100	405,290,700	99	100
	KSN EXPO dan Pameran Pembangunan ( Lampung Fair )	1	1	75,810,000	75,810,000	100	100	75,810,000	100	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kesetiakawanan Sosial	1	1	148,000,000	148,000,000	100	100	147,998,700	100	100
	Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	1	1	111,480,000	111,480,000	100	100	111,480,000	100	100
	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial	1	1	73,062,000	73,062,000	100	100	70,002,000	96	100
<b>62</b>	<b>Program Keluarga Harapan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>87,800,000</b>	<b>87,800,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>87,599,500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Penanggulangan Kemiskinan (Pelaporan dan tindak lanjut program)	1	1	87,800,000	87,800,000	100	100	87,599,500	100	100
<b>63</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan dan Pemagangan</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1,886,404,200</b>	<b>1,886,404,200</b>	<b>100</b>	<b>56</b>	<b>1,788,178,581</b>	<b>95</b>	<b>98</b>
	Peningkatan kompetensi tenaga kerja pada BLK Bandar Lampung	1	1	700,000,000	700,000,000	100	42	695,632,621	99	100
	Peningkatan kompetensi tenaga kerja pada BLK Kalianda	1	1	270,000,000	270,000,000	100	40	254,094,380	94	100
	Peningkatan kompetensi tenaga kerja pada BLK Metro	1	1	250,000,000	250,000,000	100	41	225,489,445	90	100
	Peningkatan kompetensi tenaga kerja pada BLK Way Abung	1	1	209,724,200	209,724,200	100	67	194,196,500	93	100
	Peningkatan pembinaan pemagangan tenaga kerja	1	1	320,000,000	320,000,000	100	141	283,886,635	89	93
	Peningkatan dan pengembangan kapasitas lembaga pelatihan kerja	1	1	79,000,000	79,000,000	100	100	79,000,000	100	100
	Pembinaan dan pengembangan kelembagaan produktifitas tenaga kerja	1	1	57,680,000	57,680,000	100	100	55,879,000	97	100
<b>64</b>	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,353,855,800</b>	<b>1,353,855,800</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1,277,089,167</b>	<b>94</b>	<b>98</b>
	Peningkatan pembinaan penempatan tenaga kerja dalam negeri	1	1	623,965,800	623,965,800	100	100	587,636,015	94	100
	Peningkatan pembinaan penempatan tenaga kerja luar negeri	1	1	629,890,000	629,890,000	100	100	603,660,652	96	100
	Pembinaan dan pengembangan informasi pasar kerja	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	85,792,500	86	88
<b>65</b>	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>164,616,000</b>	<b>164,616,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>164,616,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Peningkatan, pengembangan dan pembinaan kewirausahaan	1	1	164,616,000	164,616,000	100	100	164,616,000	100	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
66	<b>Program Pengembangan data dan informasi</b>	1	2	379,068,000	379,068,000	100	100	319,030,735	84	100
	Profil ketenagakerjaan	1	1	133,380,000	133,380,000	100	100	128,589,055	96	100
	Penyusunan dokumen perencanaan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	1	1	245,688,000	245,688,000	100	100	190,441,680	78	100
67	<b>Program Pengembangan Hubungan Industrial</b>	1	3	375,000,000	375,000,000	100	100	356,550,137	95	100
	Pengembangan kapasitas organisasi pekerja, pengusaha dan lembaga hubungan industrial	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	94,764,720	95	100
	Pembinaan syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja	1	1	200,000,000	200,000,000	100	100	189,075,647	95	100
	Pembinaan/pencegahan perselisihan dan penyelesaian hubungan industrial	1	1	75,000,000	75,000,000	100	100	72,709,770	97	100
68	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan</b>	1	3	400,000,000	400,000,000	100	100	315,015,500	79	83
	Peningkatan, pembinaan dan pengawasan norma kerja	1	1	150,000,000	150,000,000	100	100	142,319,100	95	100
	Pembinaan dan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	1	1	175,000,000	175,000,000	100	100	124,906,000	71	80
	Teknis pemeriksaan dan penindakan tindak pidana ketenagakerjaan	1	1	75,000,000	75,000,000	100	100	47,790,400	64	70
69	<b>Program Pembinaan dan Pengujian K3</b>	1	2	300,000,000	300,000,000	100	100	172,045,248	57	80
	Pengujian Kesehatan dan Lingkungan Kerja di Perusahaan	1	1	225,000,000	225,000,000	100	100	102,880,053	46	60
	Peningkatan Kapasitas SDM Praktisi K3 dan Promosi	1	1	75,000,000	75,000,000	100	100	69,165,195	92	100
70	<b>Program Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan</b>	1	3	1,492,273,960	1,492,273,960	100	100	1,491,700,086	100	100
	Pelatihan dan Penilaian keberhasilan bagi peningkatan peran perempuan menuju keluarga sehat sejahtera (P3KSS), gerakan sayung ibu dan nakerwan	1	1	230,006,960	230,006,960	100	100	230,006,960	100	100
	Kegiatan Pembinaan bagi Keluarga Miskin dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif	1	1	339,579,000	339,579,000	100	100	339,579,000	100	100
	Kegiatan Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan	1	1	922,688,000	922,688,000	100	100	922,114,126	100	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
71	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pencegahan dan Penanganan Trafficking , KDRT, dan Korban Pelecehan Seksual</b>	1	7	1,541,833,000	1,541,833,000	100	100	1,528,189,793	99	100
	Forum Anak Daerah	1	1	360,800,000	360,800,000	100	100	357,174,100	99	100
	Operasional Tim Koordinasi, Pelayanan dan Pembinaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)-LIP Provinsi Lampung	1	1	381,500,000	381,500,000	100	100	381,097,333	100	100
	Koordinasi, Monitoring, Investigasi, Pendampingan Kasus Kekerasan dan Trafficking serta Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	1	1	128,437,000	128,437,000	100	100	126,637,000	99	100
	Fasilitasi dan Koordinasi Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TKPP), Klinik Menopause dan UPT-PKTK	1	1	221,229,000	221,229,000	100	100	216,829,000	98	100
	Peningkatan Perlindungan Anak di Provinsi Lampung	1	1	172,198,000	172,198,000	100	100	168,895,000	98	100
	Kegiatan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	1	1	169,693,000	169,693,000	100	100	169,631,360	100	100
	Sosialisasi dan Monitoring tentang Perlindungan Perempuan dari Situasi Khusus dan Darurat serta Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan	1	1	107,976,000	107,976,000	100	100	107,926,000	100	100
72	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>	1	1	112,952,000	112,952,000	100	100	111,718,200	99	100
	Koordinasi, Fasilitasi, dan Pemantauan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di Provinsi Lampung	1	1	112,952,000	112,952,000	100	100	111,718,200	99	100
73	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	1	1	96,535,000	96,535,000	100	100	94,449,700	98	100
	Kegiatan Strategi Percepatan Pelaksanaan PUG	1	1	96,535,000	96,535,000	100	100	94,449,700	98	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp.	%	%
74	<b>Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</b>	1	2	353,000,000	353,000,000	100	100	352,999,254	100	100
	Up dating data terpilah gender dan anak	1	1	143,050,000	143,050,000	100	100	143,050,000	100	100
	Membangun Jejaring Informasi dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1	1	209,950,000	209,950,000	100	100	209,949,254	100	100
75	<b>Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan</b>	1	23	3,736,440,415	3,736,440,415	100	92	3,714,057,850	99	100
	Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Mutu Keamanan Pangan Segar	1	1	103,790,707	103,790,707	100	100	103,786,300	100	100
	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	1	1	39,388,099	39,388,099	100	100	39,284,700	100	100
	Analisa dan Pemantauan SKPG dan PDRP	1	1	15,063,309	15,063,309	100	100	14,903,500	99	100
	Analisa dan Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan	1	1	38,031,292	38,031,292	100	100	37,085,500	98	100
	Kegiatan Akses Pangan	1	1	48,724,300	48,724,300	100	100	48,594,300	100	100
	Operasional Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan OKKPD	1	1	12,248,000	12,248,000	100	100	9,724,700	79	100
	Surveilan dan Pengawasan Produk Hasil Pertanian Yang Sudah Sertifikasi / Registrasi / Produk yang Beredar	1	1	55,722,000	55,722,000	100	100	55,689,000	100	100
	Penyempurnaan Dokumen Sistem Mutu Mengacu pada ISO/IEC 17065	1	1	13,300,000	13,300,000	100	100	13,300,000	100	100
	Sertifikasi, Registrasi Produk Labelisasi Prima 3 mendukung Terminal Agrobisnis	1	1	165,000,000	165,000,000	100	67	157,972,000	96	100
	Audit Internal	1	1	10,300,000	10,300,000	100	100	10,300,000	100	100
	Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian di Lokasi Sentra	1	1	47,300,000	47,300,000	100	100	47,295,000	100	100
	Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	1	1	40,520,000	40,520,000	100	100	40,520,000	100	100
	Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional	1	1	68,677,500	68,677,500	100	100	68,677,500	100	100
	Promosi Pangan Segar dan Olahan	1	1	125,000,000	125,000,000	100	100	124,985,000	100	100
	Hari Pangan Sedunia Tk. Provinsi dan Tk. Nasional	1	1	350,431,000	350,431,000	100	100	350,431,000	100	100
	Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan	1	1	127,976,000	127,976,000	100	100	126,156,400	99	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp.	%	%
	Pengembangan jejaring keamanan pangan dan promosi keamanan pangan segar	1	1	93,266,213	93,266,213	100	100	93,135,000	100	100
	Pengembangan usaha pangan lokal	1	1	32,163,000	32,163,000	100	100	29,599,500	92	100
	Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil pertanian	1	1	52,751,355	52,751,355	100	100	52,742,750	100	100
	Penyusunan Pola Pangan Harapan	1	1	26,000,000	26,000,000	100	100	26,000,000	100	100
	Pembinaan dan Pemantauan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	1	1	2,208,184,640	2,208,184,640	100	100	2,202,352,800	100	100
	Penyusunan Prognosa Ketersediaan dan Neraca Bahan	1	1	21,745,000	21,745,000	100	100	20,664,900	95	100
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan	1	1	40,858,000	40,858,000	100	100	40,858,000	100	100
76	<b>Program Penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil</b>	1	6	2,123,759,501	2,123,759,501	100	92	1,504,616,916	71	25
	Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota	1	1	78,723,803	78,723,803	100	83	14,956,544	19	100
	Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pencatatan sipil Kabupaten/Kota	1	1	78,743,883	78,743,883	100	83	28,711,155	36	100
	Pengembangan dan Perhimpunan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	65,012,635	65,012,635	100	33	43,788,829	67	100
	Kegiatan Sosialisasi tentang Kerjasama pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan se- Provinsi Lampung	1	1	89,100,200	89,100,200	100	100	21,567,362	24	0
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan se Provinsi Lampung	1	1	34,667,980	34,667,980	100	33	30,408,898	88	100
	Kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1	1	1,777,511,000	1,777,511,000	100	33	1,365,184,128	77	100
77	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	1	3	1,438,962,000	1,438,962,000	100	100	1,407,482,439	98	100
	Pelatihan perempuan pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif bagi kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga (UEP-UP2K)	1	1	100,428,000	100,428,000	100	100	100,426,750	100	100
	Operasional Kelompok Kerja Pemberdayaan	1	1	900,000,000	900,000,000	100	100	888,311,915	99	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Kesejahteraan Keluarga									
	Gerbang Desa	1	1	438,534,000	438,534,000	100	100	418,743,774	95	100
<b>78</b>	<b>Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>435,630,000</b>	<b>435,630,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>433,526,755</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Pelatihan dan Pengembangan BUMDES	1	1	251,630,000	251,630,000	100	100	250,608,055	100	100
	Pelatihan Tata Kelola Pasar Desa	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	99,786,000	100	100
	Rakernis Kemitraan Swasta/BUMN dan Usaha Kecil Menengah di Pedesaan	1	1	84,000,000	84,000,000	100	100	83,132,700	99	100
<b>79</b>	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1,314,023,150</b>	<b>1,314,023,150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1,311,148,277</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Promosi Hasil Pembangunan Desa	1	1	126,400,000	126,400,000	100	100	126,400,000	100	100
	Temu Konsultasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	1	89,040,000	89,040,000	100	0	88,934,235	100	0
	Pelaksanaan, Pemantauan dan Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Rangka Pembangunan Partisipatif	1	1	354,184,800	354,184,800	100	100	354,003,473	100	100
	Pembentukan Desa Model Untuk Meningkatkan Keluarga Sejahtera Prov.Lampung	1	1	89,687,350	89,687,350	100	100	89,671,550	100	100
	Monitoring evaluasi pelaksanaan dana desa	1	1	554,711,000	554,711,000	100	100	552,158,419	100	100
	Pembinaan Pendampingan Profesional Desa	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	99,980,600	100	100
<b>80</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PERKUATAN DESA, ADMINISTRASI DAN KELEMBAGAAN DESA</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,153,800,000</b>	<b>1,153,800,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1,120,106,124</b>	<b>97</b>	<b>100</b>
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	1	1	200,000,000	200,000,000	100	100	200,000,000	100	100
	Penilaian Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi	1	1	763,800,000	763,800,000	100	100	730,810,814	96	100
	Pembentukan Labsite/Desa Percontohan	1	1	190,000,000	190,000,000	100	100	189,295,310	100	100
<b>81</b>	<b>PROGRAM PEMANTAPAN KOORDINASI PROG. KHUSUS LINTAS SEKTORAL</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>331,516,250</b>	<b>331,516,250</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>330,719,320</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Adat Budaya Masyarakat	1	1	169,630,250	169,630,250	100	100	169,240,300	100	100
	Bantuan Pelaksanaan TMMD Provinsi Lampung	1	1	53,560,000	53,560,000	100	100	53,151,020	99	100
	Koordinasi Kelompok Kerja Operasional Posyandu (POKJANAL POSYANDU) dalam rangka pemberdayaan Posyandu	1	1	108,326,000	108,326,000	100	100	108,328,000	100	100
<b>82</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN, PENERAPAN &amp; PEMB. TTG, SDA, DAN LH</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>747,092,000</b>	<b>747,092,000</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>746,720,970</b>	<b>100</b>	<b>167</b>
	Pameran/Gelar, Lokakarya dan Rakornis TTG Nasional	1	1	304,000,000	304,000,000	100	100	303,893,468	100	100
	Pelatihan penguatan kelembagaan posyantek	1	1	36,092,000	36,092,000	100	0	36,091,000	100	0
	Pekan Inovasi Perkembangan (PIN) Desa	1	1	200,000,000	200,000,000	100	100	199,906,322	100	100
	Pembinaan dan Pengelolaan Kelembagaan Pamsimas Pedesaan	1	1	115,000,000	115,000,000	100	100	114,982,790	100	100
	Pelatihan Pengembangan Lahan Pesisir	1	1	92,000,000	92,000,000	100	100	91,847,390	100	100
<b>83</b>	<b>Program Koordinasi Program Keluarga Berencana</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>316,600,091</b>	<b>316,600,091</b>	<b>100</b>	<b>1,133</b>	<b>270,078,519</b>	<b>85</b>	<b>71</b>
	Koordinasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Provinsi Lampung	1	1	168,060,800	168,060,800	100	33	146,852,063	87	100
	Koordinasi Pokja Ketahanan Keluarga Provinsi Lampung	1	1	85,917,934	85,917,934	100	2,333	64,933,222	76	100
	KIE Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Remaja	1	1	62,621,357	62,621,357	100	33	58,293,234	93	100
	Sosialisasi Program KB terhadap Pasangan Usia Subur (PUS)	1	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>84</b>	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>665,371,000</b>	<b>665,371,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>606,868,227</b>	<b>91</b>	<b>100</b>
	Perencanaan program prasarana dan fasilitas perhubungan	1	1	150,000,000	150,000,000	100	100	146,622,412	98	100
	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	1	1	241,520,000	241,520,000	100	100	220,573,952	91	100
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1	1	75,627,000	75,627,000	100	100	57,209,413	76	100
	Rapat koordinasi jajaran jajaran sektor perhubungan se Indonesia serta rakor jajaran sektor perhubungan di daerah	1	1	50,000,000	50,000,000	100	100	39,418,950	79	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Koordinasi Pelaksanaan RAD Emisi GRK Prov. Lampung Sektor Transportasi bidang Energi	1	1	50,000,000	50,000,000	100	100	45,343,750	91	100
	Perencanaan dan Pelaporan Program/Kegiatan	1	1	98,224,000	98,224,000	100	100	97,699,750	99	100
<b>85</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Pemeliharaan Fasilitas LLAJ	1	1	50,000,000	50,000,000	100	0	0	0	0
<b>86</b>	<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1,105,120,000</b>	<b>1,105,120,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1,000,742,968</b>	<b>91</b>	<b>100</b>
	Pengendalian dan Pengawasan Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum dan operasional transportasi	1	1	650,000,000	650,000,000	100	100	579,310,450	89	100
	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan umum	1	1	105,120,000	105,120,000	100	100	102,222,940	97	100
	Pembinaan dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor, Pengusaha karoseri Kendaraan Bermotor dan Pengusaha angkutan umum	1	1	200,000,000	200,000,000	100	100	186,079,880	93	100
	Sistem Informasi Perijinan Angkutan Umum, Survei Load Faktor dan Kinerja BUS AKDP dan AKAP	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	83,520,628	84	100
	Pengembangan Sistem Informasi Transportasi Lampung	1	1	50,000,000	50,000,000	100	100	49,609,070	99	100
<b>87</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>245,804,164</b>	<b>82</b>	<b>100</b>
	Pendidikan dan Pelatihan SAR Daerah Lampung	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	70,863,190	71	100
	Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu lintas/Wahana Tata Nugraha (WTN) Tingkat Nasional	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	79,196,974	79	100
	Pendidikan dan Pelatihan Keselamatan KA	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	95,744,000	96	100
<b>88</b>	<b>Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5,762,679,610</b>	<b>5,762,679,610</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1,191,158,822</b>	<b>21</b>	<b>100</b>
	Pengaturan Lalu Lintas pada event-event tertentu di Provinsi Lampung	1	1	150,000,000	150,000,000	100	100	145,869,480	97	100
	Penyelenggaraan Angkutan Lebaran dan Natal dan Tahun Baru serta Pengendalian Angkutan Haji	1	1	580,000,000	580,000,000	100	100	532,373,750	92	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan lalu lintas pada objek/lokasi pengembangan wisata dan tempat tertentu lainnya	1	1	4,982,679,610	4,982,679,610	100	100	467,248,042	9	100
	kegiatan forum LLAJ	1	1	50,000,000	50,000,000	100	100	45,667,550	91	100
89	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	1	2	<b>246,755,800</b>	<b>246,755,800</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>245,306,034</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
	Penerbitan majalah Saburai	1	1	100,299,800	100,299,800	100	0	99,375,634	99	100
	Peningkatan Penyebaran Informasi bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan	1	1	146,456,000	146,456,000	100	0	145,930,400	100	100
90	<b>Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</b>	1	1	<b>69,505,000</b>	<b>69,505,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>67,934,900</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
	Pendidikan dan pelatihan bidang kominfo	1	1	69,505,000	69,505,000	100	0	67,934,900	98	100
91	<b>Program kerjasama informasi dan media massa</b>	1	5	<b>907,397,621</b>	<b>907,397,621</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>904,858,099</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat melalui mobil unit film	1	1	69,999,966	69,999,966	100	0	68,235,866	97	100
	Publikasi hasil pembangunan melalui media elektronik	1	1	110,847,902	110,847,902	100	0	110,847,902	100	100
	Publikasi hasil pembangunan melalui media luar Ruang (Baliho, banner,spanduk)	1	1	421,283,553	421,283,553	100	0	421,283,553	100	100
	Penyebarluasan Informasi pembangunan melalui pameran dan Harkitnas	1	1	175,266,200	175,266,200	100	0	175,266,200	100	100
	Penyebaran Informasi Melalui Media	1	1	130,000,000	130,000,000	100	0	129,224,578	99	100
92	<b>Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi</b>	1	6	<b>6,014,003,776</b>	<b>6,014,003,776</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>5,779,437,691</b>	<b>96</b>	<b>100</b>
	Pengembangan jaringan teknologi dan sistem informasi	1	1	4,597,350,283	4,597,350,283	100	0	4,436,779,925	97	100
	Pengembangan Media Center	1	1	85,100,000	85,100,000	100	0	84,979,250	100	100
	Pengembangan pemberdayaan telematika pada masyarakat	1	1	62,290,780	62,290,780	100	0	62,099,750	100	100
	Pengembangan informasi berbasis website	1	1	553,348,493	553,348,493	100	0	481,243,652	87	100
	Assesment pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Provinsi Lampung	1	1	35,853,920	35,853,920	100	0	35,838,790	100	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp.	%	%
	Penyusunan dan rencana pengembangan TIK	1	1	680,060,300	680,060,300	100	0	678,496,324	100	100
<b>93</b>	<b>Program Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga komunikasi</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>18,842,945</b>	<b>18,842,945</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>18,784,045</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Diseminasi Informasi Melalui Media Komunikasi	1	1	18,842,945	18,842,945	100	0	18,784,045	100	100
<b>94</b>	<b>Program Peningkatan sistem Monitoring dan Evaluasi</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9,977,000</b>	<b>9,977,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>9,621,800</b>	<b>96</b>	<b>100</b>
	Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Penyiaran	1	1	9,977,000	9,977,000	100	0	9,621,800	96	100
<b>95</b>	<b>Program Kerjasama Antar Lembaga</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,761,632,000</b>	<b>1,761,632,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1,705,412,798</b>	<b>97</b>	<b>80</b>
	Penyelesaian Sengketa Informasi	1	1	1,761,632,000	1,761,632,000	100	0	1,705,412,798	97	80
<b>96</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>650,906,200</b>	<b>650,906,200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>642,630,552</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
	Penilaian kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS	1	1	81,002,874	81,002,874	100	0	80,598,550	100	100
	Temu konsultasi pemberdayaan usaha KUMKM	1	1	123,982,500	123,982,500	100	0	123,059,700	99	100
	Sosialisasi KUMK 15 kab/kota	1	1	141,288,000	141,288,000	100	0	140,355,200	99	100
	Pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerah	1	1	115,181,000	115,181,000	100	0	109,644,500	95	100
	Pendampingan pusat layanan usaha terpadu (PLUT)	1	1	75,851,200	75,851,200	100	0	75,851,200	100	100
	Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Sosialisasi kebijakan bidang pengawasan dan pemeriksaan	1	1	22,752,750	22,752,750	100	0	22,752,630	100	100
	Pengawasan kepatuhan legalitas koperasi dan sanksi	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Peningkatan kemitraan antara koperasi dengan perusahaan pabrikan dan perkulakan	1	1	46,814,556	46,814,556	100	0	46,335,556	99	100
	Percepatan pengembangan jaminan kredit daerah	1	1	44,033,320	44,033,320	100	0	44,033,216	100	100
<b>97</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>623,127,126</b>	<b>623,127,126</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>295,196,000</b>	<b>47</b>	<b>100</b>
	Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD	1	1	586,105,000	586,105,000	100	0	258,174,000	44	100
	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD	1	1	37,022,126	37,022,126	100	0	37,022,000	100	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp.	%	%
98	<b>Program Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM</b>	1	2	0	0	0	0	0	0	0
	Peningkatan jenis usaha koperasi	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi koperasi	1	1	0	0	0	0	0	0	0
99	<b>Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMKM</b>	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Diklat Kewirausahaan bagi Pengelola Koperasi wanita	1	1	0	0	0	0	0	0	0
100	<b>Program Peningkatan Kualitas SDM koperasi dan UMKM</b>	1	3	3,071,256,470	3,071,256,470	100	0	3,065,690,850	100	100
	Bimtek akuntansi koperasi bagi pengelola koperasi jasa keuangan	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM	1	1	2,921,420,000	2,921,420,000	100	0	2,918,876,550	100	100
	Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM Koperasi	1	1	149,836,470	149,836,470	100	0	146,814,300	98	100
101	<b>Program peningkatan dan pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</b>	1	5	211,926,500	211,926,500	100	0	211,438,050	100	100
	Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi	1	1	102,318,500	102,318,500	100	0	102,308,850	100	100
	Koordinasi kelembagaan Dan Updating data keragaan koperasi	1	1	34,608,000	34,608,000	100	0	34,311,800	99	100
	Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Pembinaan dan evaluasi monitoring terhadap koperasi	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Peningkatan kualitas tata laksana koperasi melalui perizinan koperasi simpan pinjam	1	1	75,000,000	75,000,000	100	0	74,817,400	100	100
102	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi-</b>	1	4	1,192,570,400	1,192,570,400	100	92	1,192,080,400	100	91
	Peningkatan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	1	1	117,570,400	117,570,400	100	50	117,480,400	100	100
	Pameran Promosi Investasi Dalam Negeri	1	1	375,000,000	375,000,000	100	100	375,000,000	100	133

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp.	%	%
	Pembuatan bahan promosi	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	99,600,000	100	67
	Promosi investasi bersama BKPM RI/Kemenlu RI di Luar Negeri	1	1	600,000,000	600,000,000	100	100	600,000,000	100	100
<b>103</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>463,656,000</b>	<b>463,656,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>440,883,600</b>	<b>95</b>	<b>114</b>
	Evaluasi dan updating data PMA/PMDN di Prov.Lampung	1	1	63,412,000	63,412,000	100	100	63,412,000	100	100
	Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dan Perizinan	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	100,000,000	100	100
	Pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal	1	1	113,600,000	113,600,000	100	100	112,837,600	99	133
	Penyelenggaraan informasi layanan perizinan	1	1	75,000,000	75,000,000	100	100	75,000,000	100	100
	Pembinaan, verifikasi dan validasi izin bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan non perizinan B	1	1	111,644,000	111,644,000	100	100	89,634,000	80	100
<b>104</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>557,756,000</b>	<b>557,756,000</b>	<b>100</b>	<b>87</b>	<b>556,753,000</b>	<b>100</b>	<b>105</b>
	Peningkatan kualitas pelayanan terpadu bidang pemerintahan dan kesra	1	1	289,338,000	289,338,000	100	87	289,338,000	100	105
	Pemantauan dan pelaksanaan pelaporan PTSP di bidang penanaman modal	1	1	96,310,000	96,310,000	100	100	95,790,000	99	100
	Pembinaan dan sinkronisasi pelayanan perizinan penanaman modal	1	1	82,808,000	82,808,000	100	100	82,808,000	100	100
	Pelayanan perizinan secara elektronik	1	1	89,300,000	89,300,000	100	100	88,817,000	99	53
<b>105</b>	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>798,166,800</b>	<b>798,166,800</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>791,701,856</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
	Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)	1	1	50,000,000	50,000,000	100	100	44,967,000	90	100
	Pembinaan Pemuda Pelopor	1	1	16,569,010	16,569,010	100	100	16,562,840	100	100
	Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA)	1	1	681,083,910	681,083,910	100	100	680,471,236	100	100
	Kegiatan Kepemudaan	1	1	25,666,680	25,666,680	100	100	25,312,580	99	100
	Pembinaan Pramuka	1	1	24,847,200	24,847,200	100	100	24,388,200	98	100
<b>106</b>	<b>Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>29,120,000</b>	<b>29,120,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>28,991,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	1	1	29,120,000	29,120,000	100	100	28,991,000	100	100
<b>107</b>	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>3,045,929,000</b>	<b>3,045,929,000</b>	<b>100</b>	<b>282</b>	<b>2,238,994,519</b>	<b>74</b>	<b>35</b>

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Provinsi Lampung	1	1	80,000,000	80,000,000	100	100	80,000,000	100	100
	Pembinaan Kelompok Olahraga Prestasi dan Klub Olahraga Pelajar	1	1	147,130,000	147,130,000	100	100	147,130,000	100	100
	Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Bededikasi dan Berprestasi	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Event Olahraga Provinsi	1	1	32,000,000	32,000,000	100	100	31,903,800	100	100
	TC POPNAS dan POPNAS	1	1	1,103,200,000	1,103,200,000	100	100	334,001,209	30	100
	Kejuaraan Tingkat Provinsi (Gubernur Cup)	1	1	75,000,000	75,000,000	100	100	74,690,000	100	100
	Penyelenggaraan Perlombaan dan Pertandingan Tingkat Nasional	1	1	148,000,000	148,000,000	100	100	133,105,600	90	100
	Pusat pendidikan dan latihan olah raga daerah (PPLPD)	1	1	50,000,000	50,000,000	100	100	40,435,260	81	100
	Pengembangan Olahraga Rekreasi	1	1	600,000,000	600,000,000	100	100	597,636,800	100	100
	Pembinaan Atlet PPLP	1	1	810,599,000	810,599,000	100	100	800,091,850	99	100
<b>108</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>640,000,000</b>	<b>640,000,000</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>622,243,477</b>	<b>97</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga	1	1	280,000,000	280,000,000	100	0	276,960,900	99	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga pada UPTD	1	1	80,000,000	80,000,000	100	100	79,780,000	100	100
	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan	1	1	250,000,000	250,000,000	100	100	238,068,577	95	100
	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepramukaan	1	1	30,000,000	30,000,000	100	100	27,434,000	91	100
<b>109</b>	<b>Program Pelayanan Manajemen Keolahragaan, Kepemudaan dan Kepramukaan</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>68,873,000</b>	<b>68,873,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>67,638,472</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kepemudaan dan Kepramukaan	1	1	50,772,000	50,772,000	100	100	49,538,472	98	100
	Penyediaan Jasa Publikasi dan Dokumentasi	1	1	18,101,000	18,101,000	100	100	18,100,000	100	100
<b>110</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>119,666,000</b>	<b>119,666,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>116,849,767</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
	Pengumpulan dan Pengolahan Data	1	1	119,666,000	119,666,000	100	0	116,849,767	98	100
<b>111</b>	<b>Pengamanan Informasi Rahasia</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>70,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>68,747,576</b>	<b>98</b>	<b>60</b>
	Penerimaan dan Pengiriman Berita Provinsi Lampung ke Pusat, Prov. Se-Indonesia dan Kab/Kota Se-Provinsi Lampung	1	1	70,000,000	70,000,000	100	0	68,747,576	98	60

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp.	%	%
	Sosialisasi Peralatan Persandian	1	1	0	0	0	0	0	0	0
112	<b>Pengamanan Jaringan Komunikasi Sandi</b>	1	2	119,799,178	119,799,178	100	0	117,738,536	98	83
	Pengamanan Ruang Pimpinan dan Tempat Strategis	1	1	39,799,178	39,799,178	100	0	39,538,112	99	67
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1	1	80,000,000	80,000,000	100	0	78,200,424	98	100
113	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	1	4	1,878,042,600	1,878,042,600	100	0	1,828,524,243	97	100
	Pembinaan dan Pengembangan Kesenian dan Perfilman di Sekolah	1	1	1,161,098,600	1,161,098,600	100	0	1,152,858,200	99	100
	Pembinaan dan Orientasi Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	1	1	232,417,000	232,417,000	100	0	232,188,043	100	100
	Pembinaan dan Pelestarian Sejarah dan Nilai Budaya	1	1	279,822,000	279,822,000	100	0	279,822,000	100	100
	Pembinaan dan Pengembangan Cagar Budaya	1	1	204,705,000	204,705,000	100	0	163,656,000	80	100
114	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	1	5	4,446,338,870	4,446,338,870	100	0	4,382,545,700	99	99
	Museum Day/Peringatan Ulang Tahun Museum Sedunia dan Hari Museum Indonesia	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Pelestarian dan Pengembangan BCB Koleksi museum	1	1	225,350,080	225,350,080	100	0	223,940,880	99	100
	Peningkatan Layanan dan Publikasi Museum	1	1	83,063,000	83,063,000	100	0	78,470,800	94	100
	Peningkatan Fungsi Penyelenggaraan Museum	1	1	187,925,790	187,925,790	100	0	181,433,910	97	100
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	1	1	3,950,000,000	3,950,000,000	100	0	3,898,700,110	99	100
115	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	1	6	5,377,691,600	5,377,691,600	100	0	5,106,066,567	95	45
	Pengembangan Kesenian dan kebudayaan daerah	1	1	494,849,150	494,849,150	100	0	494,849,150	100	100
	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	1	1	2,913,634,400	2,913,634,400	100	0	2,846,614,052	98	100
	Peningkatan Apresiasi dan Kreativitas Pelaku Seni Budaya	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Peningkatan dan pengembangan seni pertunjukan	1	1	140,663,600	140,663,600	100	0	117,814,500	84	100
	Peningkatan Fungsi Lembaga Seni Budaya Daerah	1	1	151,544,450	151,544,450	100	0	142,816,700	94	100
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Taman Budaya	1	1	1,677,000,000	1,677,000,000	100	0	1,503,972,165	90	100
116	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	1	3	1,013,140,000	1,013,140,000	100	46	937,597,451	93	183



No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp.	%	%
	Pengembangan perpustakaan berbasis E-Library	1	1	342,950,000	342,950,000	100	40	305,394,000	89	150
	Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan	1	1	270,000,000	270,000,000	100	50	259,338,634	96	200
	Pembinaan Perpustakaan Kab/Kota se Provinsi Lampung	1	1	400,190,000	400,190,000	100	50	372,864,817	93	200
<b>117</b>	<b>Program perbaikan sistem administrasi kearsipan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>85,000,000</b>	<b>85,000,000</b>	<b>100</b>	<b>33</b>	<b>11,933,750</b>	<b>14</b>	<b>100</b>
	Pengumpulan dan Pemeliharaan Arsip Statis	1	1	85,000,000	85,000,000	100	33	11,933,750	14	100
<b>118</b>	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>190,000,000</b>	<b>190,000,000</b>	<b>100</b>	<b>29</b>	<b>91,210,600</b>	<b>48</b>	<b>250</b>
	Penataan dan Pendataan Dokumen Arsip Daerah	1	1	115,000,000	115,000,000	100	25	34,268,500	30	300
	Pengelolaan Arsip Online	1	1	75,000,000	75,000,000	100	33	56,942,100	76	200
<b>119</b>	<b>Program peningkatan kualitas pelayanan informasi</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>331,838,000</b>	<b>331,838,000</b>	<b>100</b>	<b>1,621</b>	<b>221,802,367</b>	<b>67</b>	<b>5</b>
	Peningkatan Kualitas pelayanan Deposit	1	1	42,088,000	42,088,000	100	300	40,580,470	96	25
	Kegiatan Bimbingan Teknis Kearsipan	1	1	100,000,000	100,000,000	100	5	5,048,175	5	2
	Pembinaan SDM Kearsipan Kabupaten/ Kota	1	1	100,000,000	100,000,000	100	2	86,423,722	86	4
	Promosi melalui media, pameran dan dokumentasi yang ada pada Badan Perpustakaan Arsip Daerah.	1	1	89,750,000	89,750,000	100	500	89,750,000	100	20
<b>120</b>	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6,063,153,762</b>	<b>6,063,153,762</b>	<b>100</b>	<b>3,796</b>	<b>1,096,342,731</b>	<b>18</b>	<b>2</b>
	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	1	1	100,000,000	100,000,000	100	50	99,428,610	99	150
	Peningkatan budaya baca melalui Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar membaca	1	1	646,120,000	646,120,000	100	67	222,849,106	34	150
	Publikasi dan Sosialisasi Serah Simpan/Karya Cetak dan Karya Rekam	1	1	71,787,680	71,787,680	100	160	55,144,050	77	50
	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	1	1	4,980,731,082	4,980,731,082	100	817	500,108,274	10	10
	Otomasi Data Perpustakaan Umum Daerah	1	1	104,515,000	104,515,000	100	25	79,461,600	76	0
	Pemeliharaan Buku Bacaan Perpustakaan	1	1	160,000,000	160,000,000	100	33	139,351,091	87	250

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp.	%	%
121	<b>Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir</b>	1	6	821,557,401	821,557,401	100	125	821,557,401	100	80
	Kegiatan Bidang KP3K	1	1	349,059,501	349,059,501	100	100	349,059,501	100	10
	Perencanaan penataan ruang dan pengelolaan wilayah laut, Pesisir dan pulau-pulau kecil	1	1	183,839,000	183,839,000	100	100	183,839,000	100	95
	Pendayagunaan Pesisir, pulau-pulau kecil dan jasa kelautan	1	1	135,617,300	135,617,300	100	100	135,617,300	100	33
	Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan perairan dan jenis biota	1	1	92,250,000	92,250,000	100	125	92,250,000	100	80
	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha ekonomi Produktif	1	1	50,000,000	50,000,000	100	100	50,000,000	100	100
	Pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	1	1	10,791,600	10,791,600	100	100	10,791,600	100	30
122	<b>Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut</b>	1	4	148,620,466	148,620,466	100	400	275,902,966	186	22
	Pembinaan dan Pemberdayaan POKMASWAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Peningkatan kesadaran hukum dan penegakan hukum dalam perdayagunaan sumberdaya laut	1	1	60,512,850	60,512,850	100	250	187,795,350	310	40
	Pengembangan Pengawasan SDKP yang partisipatif	1	1	88,107,616	88,107,616	100	100	88,107,616	100	83
	Penanganan dan penindakan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan	1	1	0	0	0	0	0	0	0
123	<b>Program pengembangan budidaya perikanan</b>	1	5	1,280,466,543	1,280,466,543	100	100	1,280,466,543	100	54
	Jaminan Keamanan Mutu Hasil Perikanan Budidaya	1	1	51,312,800	51,312,800	100	100	51,312,800	100	47
	Pendampingan Prasehatkan	1	1	24,875,000	24,875,000	100	100	24,875,000	100	100
	Bantuan Benih ikan Pada Pembudidaya skala kecil	1	1	935,992,864	935,992,864	100	100	935,992,864	100	67
	Operasional unit Pembenihan Pemerintah	1	1	96,469,879	96,469,879	100	100	96,469,879	100	75
	Pengembangan prasarana perikanan budidaya	1	1	171,816,000	171,816,000	100	100	171,816,000	100	33
124	<b>Program pengembangan perikanan tangkap</b>	1	11	5,086,924,455	5,086,924,455	100	98	4,979,348,961	98	62
	Kegiatan Bidang Tangkap	1	1	4,193,457,000	4,193,457,000	100	100	4,062,305,800	97	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp.	%	%
	Restocking (Penebaran Benih ikan) di Perairan Umum Daratan (PUD) dan Sosialisasi rumah ikan	1	1	192,626,610	192,626,610	100	100	192,626,610	100	100
	Bantuan Paket Penangkapan Ikan untuk nelayan skala kecil	1	1	73,200,000	73,200,000	100	100	73,200,000	100	20
	Peningkatan Pelayanan Kesyahbandaran di pelabuhan Perikanan	1	1	16,870,000	16,870,000	100	33	16,870,000	100	100
	Pendaftaran dan penandaan kapal perikanan	1	1	14,508,250	14,508,250	100	100	14,508,250	100	30
	Penerapan CPIB di pelabuhan Perikanan dan diatas kapal perikanan	1	1	59,710,250	59,710,250	100	100	59,710,250	100	100
	Pembinaan dan penataan pelayanan perizinan kewenangan daerah	1	1	55,036,820	55,036,820	100	100	55,036,820	100	71
	Pembinaan kenelayanan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB)	1	1	35,813,850	35,813,850	100	100	35,813,850	100	43
	Operasional kegiatan di UPTD Pelabuhan Perikanan Wil I	1	1	267,279,405	267,279,405	100	100	267,279,405	100	0
	Operasional kegiatan di UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II	1	1	76,987,600	76,987,600	100	100	76,987,600	100	30
	Operasional kegiatan di UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III	1	1	101,434,670	101,434,670	100	83	125,010,376	123	40
125	<b>Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</b>	1	3	<b>606,453,198</b>	<b>606,453,198</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>606,453,198</b>	<b>100</b>	<b>93</b>
	Lomba Masak Ikan Khas Lampung Dalam Rangka HUT Provinsi Lampung	1	1	167,638,600	167,638,600	100	100	167,638,600	100	80
	Apresiasi / Pelatihan Pembina Mutu Daerah	1	1	57,078,100	57,078,100	100	100	57,078,100	100	100
	Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Hasil Perikanan export dan konsumsi Lokal	1	1	381,736,498	381,736,498	100	100	381,736,498	100	80
126	<b>Program Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Monitoring Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kelautan</b>	1	2	<b>113,089,060</b>	<b>113,089,060</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>113,089,060</b>	<b>100</b>	<b>67</b>
	Perencanaan, Pengendalian dan Monitoring Evaluasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan	1	1	98,921,710	98,921,710	100	100	98,921,710	100	67
	Sinkronisasi data dan program ke Kab/Kota dan Pusat	1	1	14,167,350	14,167,350	100	100	14,167,350	100	70

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp.	%	%
127	<b>Program Pengembangan Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan</b>	1	1	57,500,000	57,500,000	100	100	57,500,000	100	100
	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan	1	1	57,500,000	57,500,000	100	100	57,500,000	100	100
128	<b>PROGRAM EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA</b>	1	3	832,000,000	832,000,000	100	100	685,982,540	82	100
	Pelestarian dan Aktualisasi Ekraf Berbasis Kearifan Lokal	1	1	94,000,000	94,000,000	100	100	93,332,540	99	100
	Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif	1	1	342,500,000	342,500,000	100	100	198,400,000	58	100
	Pelaksanaan Promosi Ekonomi Kreatif	1	1	395,500,000	395,500,000	100	100	394,250,000	100	100
129	<b>PROGRAM EKONOMI KREATIF BERBASIS MEDIA DESAIN DAN IPTEK</b>	1	1	130,000,000	130,000,000	100	100	129,038,360	99	100
	Pengembangan fasilitas berbasis media desain dan iptek	1	1	130,000,000	130,000,000	100	100	129,038,360	99	100
130	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KREATIFITAS SUMBER DAYA MANUSIA</b>	1	1	10,289,000	10,289,000	100	100	10,289,000	100	100
	Pengembangan kreasi, daya cipta dan kreatifitas	1	1	10,289,000	10,289,000	100	100	10,289,000	100	100
131	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	1	4	1,048,403,160	1,048,403,160	100	100	1,040,991,160	99	100
	Penyelenggaraan Festival Krakatau	1	1	560,000,000	560,000,000	100	100	556,700,000	99	100
	Dukungan Daya Tarik Even Pariwisata	1	1	1,252,160	1,252,160	100	100	1,252,160	100	100
	Penyusunan dan pembuatan bahan - bahan promosi pariwisata	1	1	310,000,000	310,000,000	100	100	306,698,000	99	100
	Pelaksanaan promosi pariwisata	1	1	177,151,000	177,151,000	100	100	176,341,000	100	100
132	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	1	4	6,200,046,700	6,200,046,700	100	100	6,164,314,426	99	99
	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	1	1	348,004,000	348,004,000	100	100	337,527,900	97	100
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	1	1	174,777,000	174,777,000	100	100	174,620,500	100	100
	Pengembangan infrastruktur dan ekosistem destinasi pariwisata	1	1	5,662,309,200	5,662,309,200	100	100	5,637,244,576	100	100
	Pengembangan daya tarik wisata di UPTD Menara Siger	1	1	14,956,500	14,956,500	100	100	14,921,450	100	33
133	<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>	1	5	1,647,053,000	1,647,053,000	100	106	1,633,768,100	99	68

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp.	%	%
	Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database	1	1	134,786,000	134,786,000	100	100	130,770,500	97	100
	Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata	1	1	529,100,000	529,100,000	100	125	527,350,000	100	100
	Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata	1	1	374,680,000	374,680,000	100	100	373,679,000	100	100
	Pengembangan Jaringan Kerjasama Pariwisata	1	1	608,487,000	608,487,000	100	100	601,968,600	99	100
	Pengembangan Industri Pariwisata	1	1	0	0	0	100	0	0	0
<b>134</b>	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>208,956,000</b>	<b>208,956,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>195,960,200</b>	<b>94</b>	<b>100</b>
	Pemberdayaan petani melalui pengembangan kelembagaan petani	1	1	150,000,000	150,000,000	100	100	137,454,200	92	100
	Pembinaan kelompok budidaya ternak (ruminansia dan non ruminansia)	1	1	50,000,000	50,000,000	100	100	49,550,000	99	100
	Peningkatan populasi ternak di provinsi lampung	1	1	8,956,000	8,956,000	100	100	8,956,000	100	100
<b>135</b>	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>692,438,820</b>	<b>692,438,820</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>685,988,820</b>	<b>99</b>	<b>86</b>
	Pengembangan sarana dan prasarana UPTD (DAK + Dana Pendampingan)	1	1	0	0	0	100	0	0	0
	Peningkatan peran kelembagaan Usaha Agribisnis Tanah Pangan dan Hortikultura	1	1	30,000,000	30,000,000	100	100	29,685,000	99	100
	Lampung Fair dan dukungan promosi lainnya	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	99,941,000	100	100
	Dukungan kerjasama penyediaan kebutuhan pangan dengan Provinsi DKI Jakarta dan FKD-MPU	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Sosialisasi dan pembinaan sistem pertanian organik dan penerapan mutu produk tanaman pangan dan hortikultura	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Pengembangan kerjasama pemasaran dan distribusi produk TPH melalui UPPG/BUMP/STA dan Fasilitasi SRG	1	1	150,000,000	150,000,000	100	100	149,389,000	100	100
	Peningkatan ragam produk turunan yang prospektif berbasis komoditas perkebunan unggulan	1	1	75,000,000	75,000,000	100	100	75,000,000	100	100
	Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin perkebunan	1	1	116,510,820	116,510,820	100	100	116,510,820	100	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Promosi Produk Komoditi Unggulan Perkebunan	1	1	220,928,000	220,928,000	100	100	215,463,000	98	100
136	<b>Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>15,434,628,978</b>	<b>15,434,628,978</b>	<b>100</b>	<b>105</b>	<b>11,455,571,227</b>	<b>74</b>	<b>95</b>
	Pemasyarakatan benih hortikultura bermutu dan pengawalan pemberian penghargaan bagi petugas/pelaku usaha hortikultura	1	1	49,999,811	49,999,811	100	100	49,340,000	99	100
	Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan P3/GP3A/IP3A	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Operasional Laboratorium Mutu Benih UPTD BP2MB	1	1	15,000,000	15,000,000	100	100	13,000,000	87	100
	Koordinasi penyusunan pupuk bersubsidi, pengawasan, Verifikasi dan Validasi penyaluran pupuk bersubsidi	1	1	600,000,000	600,000,000	100	100	597,401,950	100	100
	Pengelolaan Horti Park	1	1	818,550,000	818,550,000	100	100	817,827,846	100	100
	Bimbingan dan penerapan Teknologi Usaha Tani Tembakau	1	1	6,602,325,700	6,602,325,700	100	100	2,657,656,605	40	60
	Konservasi air di lahan kering	1	1	6,750,000,000	6,750,000,000	100	100	6,730,986,900	100	100
	Pengawasan mutu dan monitoring peredaran Benih / Bibit	1	1	64,000,000	64,000,000	100	100	63,146,000	99	100
	Pengembangan budidaya tanaman pangan dengan pola tanam ganda (kebun percontohan di Pekalongan)	1	1	88,520,000	88,520,000	100	100	87,768,165	99	100
	Penerapan teknologi Budidaya Horikultura secara optimal pada lahan kering	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Pengawasan dan Monitoring penerapan LP2B Provinsi di Kabupaten / Kota	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	99,784,000	100	100
	Peningkatan kualitas SDM melalui TOT pemandu lapang GAP terkait peningkatan Mutu usaha dan Produk komoditas buah	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Registrasi kebun dan lahan usaha sera inventarisasi/pemetaan potensi buah dan sayuran di provinsi Lampung	1	1	45,424,982	45,424,982	100	100	45,365,000	100	100
	Pembinaan dan Fasilitasi benih unggul dalam rangka peningkatan produksi padi dan kedelai melalui cadangan benih daerah (CBD)	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	94,078,500	94	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	pengembangan kawasan tanaman buah (pisang)	1	1	42,574,885	42,574,885	100	100	42,555,900	100	100
	Peningkatan Produktivitas Perbenihan Tanaman Pangan	1	1	80,000,000	80,000,000	100	100	79,938,600	100	100
	Pengembangan agrowisata terpadu di Provinsi Lampung	1	1	48,233,600	48,233,600	100	100	46,721,761	97	100
	Operasional Laboratorium Perlintan	1	1	30,000,000	30,000,000	100	100	30,000,000	100	100
<b>137</b>	<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>15,580,883,490</b>	<b>15,580,883,490</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>15,314,177,281</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
	Sertifikasi bibit/benih tanaman pangan dan hortikultura	1	1	64,000,000	64,000,000	100	100	63,695,000	100	100
	Pengembangan perbenihan Padi dan Palawija di Balai Benih sebagai Benih Sumber bagi Penangkaran ditingkat petani	1	1	177,299,993	177,299,993	100	100	176,949,600	100	100
	Sinkronisasi/koordinasi/sosialisasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran APBD	1	1	323,079,900	323,079,900	100	100	321,798,900	100	100
	Pengelolaan data statistik dan informasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura	1	1	187,670,000	187,670,000	100	100	183,807,500	98	100
	Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran	1	1	70,000,000	70,000,000	100	100	66,841,200	95	100
	Pemeliharaan Kebun UPTD BBKI	1	1	125,000,000	125,000,000	100	100	100,486,200	80	100
	Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	1	1	40,000,000	40,000,000	100	100	39,989,800	100	100
	Pembinaan dan Peningkatan kinerja brigade alsintan/upja	1	1	60,000,000	60,000,000	100	100	59,677,200	99	100
	Pengawasan peredaran mutu benih	1	1	30,000,000	30,000,000	100	100	29,990,394	100	100
	Pengembangan perbibitan sayuran dan buah-buahan di Balai Benih	1	1	2,090,530,000	2,090,530,000	100	100	2,069,655,836	99	100
	Penilaian Usaha Perkebunan	1	1	25,000,000	25,000,000	100	100	24,161,840	97	100
	Pengembangan Cabai	1	1	32,000,000	32,000,000	100	100	31,167,700	97	100
	Peningkatan Kompetensi Petugas dalam Penerapan Teknologi Pengendalian OPT dengan Agensia Hayati	1	1	304,000,000	304,000,000	100	100	303,888,900	100	100
	DAK Bidang Pertanian TA. 2015	1	1	11,333,528,597	11,333,528,597	100	100	11,238,932,696	99	100
	Pendampingan DAK TA. 2015	1	1	470,000,000	470,000,000	100	100	468,305,000	100	100
	Pengendalian OPT tanaman perkebunan	1	1	25,000,000	25,000,000	100	100	23,847,515	95	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Pengawasan peredaran pupuk bersubsidi dan pestisida	1	1	0	0	0	100	0	0	0
	Sinkronisasi dan Validasi Data base Komuditas Tembakau	1	1	93,775,000	93,775,000	100	100	80,982,000	86	100
	Pembibitan Tanaman Perkebunan	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	0	0	0
	Operasional Brigade Proteksi Perkebunan	1	1	30,000,000	30,000,000	100	100	30,000,000	100	100
<b>138</b>	<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>225,000,000</b>	<b>225,000,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>219,113,100</b>	<b>97</b>	<b>100</b>
	Pengendalian dan pemberantasan penyakit Rabies	1	1	150,000,000	150,000,000	100	100	144,190,400	96	100
	Pengendalian dan pemberantasan penyakit Flu Burung/AI	1	1	75,000,000	75,000,000	100	100	74,922,700	100	100
<b>139</b>	<b>Program peningkatan produksi hasil peternakan</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>4,000,465,000</b>	<b>4,000,465,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2,431,935,903</b>	<b>61</b>	<b>98</b>
	Pembibitan dan perawatan ternak di instalasi Negeri Sakti	1	1	447,240,000	447,240,000	100	100	429,456,095	96	100
	Pembibitan dan perawatan ternak Sapi Bali di BPTP Campang Tiga	1	1	750,000,000	750,000,000	100	100	723,926,988	97	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana di UPTD BIBD Terbanggi Besar (DAK)	1	1	0	0	0	100	0	0	0
	Pengadaan Sarana dan prasarana di UPTD BPTP (Negeri Sakti) (DAK)	1	1	0	0	0	100	0	0	0
	Pengadaan Sarana dan prasarana di UPTD BPTP (Campang Tiga) (DAK)	1	1	2,028,225,000	2,028,225,000	100	100	525,120,960	26	0
	Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium pakan dan keswan	1	1	0	0	0	100	0	0	0
	Operasional laboratorium pakan dan keswan	1	1	75,000,000	75,000,000	100	100	74,800,000	100	100
	Perawatan dan Pemeliharaan Ternak di UPTD BIBD	1	1	700,000,000	700,000,000	100	100	678,631,860	97	100
<b>140</b>	<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>249,216,800</b>	<b>83</b>	<b>100</b>
	Kampanye gizi produk peternakan	1	1	150,000,000	150,000,000	100	100	149,968,000	100	100
	Pengawasan perdagangan lalu lintas ternak (check point)	1	1	100,000,000	100,000,000	100	200	50,000,000	50	50
	Pendampingan kegiatan asuransi usaha tani sapi	1	1	50,000,000	50,000,000	100	100	49,248,800	98	100
<b>141</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Mutu</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>523,348,295</b>	<b>523,348,295</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>413,522,280</b>	<b>79</b>	<b>100</b>



No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp.	%	%
	Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Dana Abadi Pada Layanan Umum Daerah (BLUD)	1	1	235,348,860	235,348,860	100	100	178,102,000	76	100
	Penyaluran perkuatan modal usaha (t.Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perikanan, Peternakan)	1	1	107,999,749	107,999,749	100	100	78,382,578	73	100
	Penagihan dan Inventarisasi data perkuatan permodalan (t.Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perikanan, Peternakan)	1	1	179,999,686	179,999,686	100	100	157,037,702	87	100
142	<b>Program peningkatan konsumsi pangan Hewani yang aman, sehat, utuh dan Halal (ASUH)</b>	1	2	<b>65,000,000</b>	<b>65,000,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>64,889,900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Pembinaan dan koordinasi Kesmavet dan pasca panen	1	1	35,000,000	35,000,000	100	100	34,937,000	100	100
	Pembinaan dan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	1	1	30,000,000	30,000,000	100	100	29,952,900	100	100
143	<b>Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Penyuluh dan Petani</b>	1	4	<b>659,999,573</b>	<b>659,999,573</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>618,395,024</b>	<b>94</b>	<b>100</b>
	Optimalisasi Peran dan Fungsi Penyuluh melalui Fasilitas Biaya Pendampingan kegiatan Penyuluhan	1	1	439,999,875	439,999,875	100	100	400,979,875	91	100
	Penilaian Penyuluh Teladan dan Pelaku Utama Berprestasi	1	1	59,999,903	59,999,903	100	100	59,918,849	100	100
	Temu Teknis Penyuluhan Se-Provinsi Lampung	1	1	49,999,795	49,999,795	100	100	49,996,300	100	100
	Optimalisasi Peran dan Fungsi Penyuluh Melalui Fasilitas Biaya Operasional Penyuluh	1	1	110,000,000	110,000,000	100	100	107,500,000	98	100
144	<b>Program Pengembangan Jejaring Kerjasama Agribisnis dan Kemitraan Agribisnis Pertanian, Perikanan dan Kehutanan</b>	1	2	<b>978,747,944</b>	<b>978,747,944</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>974,612,024</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Pemberdayaan Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Lampung	1	1	513,747,994	513,747,994	100	100	510,981,474	99	100
	Optimalisasi dan pemberdayaan THL_TB dalam membangun kerjasama dan kemitraan pertanian, perikanan dan kehutanan	1	1	464,999,950	464,999,950	100	100	463,630,550	100	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
145	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan</b>	1	1	40,000,000	40,000,000	100	100	35,419,600	89	100
	Penyusunan Programa Penyuluhan	1	1	40,000,000	40,000,000	100	100	35,419,600	89	100
146	<b>Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan</b>	1	1	665,557,379	665,557,379	100	100	665,205,162	100	100
	Fasilitasi kegiatan pengembangan SMK-PP Unggulan Terpadu di Hajimena	1	1	665,557,379	665,557,379	100	100	665,205,162	100	100
147	<b>Program rehabilitasi hutan dan lahan</b>	1	2	235,893,000	235,893,000	100	100	235,326,464	100	100
	Pembinaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1	1	177,797,000	177,797,000	100	100	177,281,114	100	100
	Rehabilitasi Hutan dan lahan serta pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan	1	1	58,096,000	58,096,000	100	100	58,045,350	100	100
148	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan</b>	1	3	192,432,000	192,432,000	100	100	187,459,200	97	100
	Pengamanan hutan	1	1	97,689,000	97,689,000	100	100	93,104,500	95	100
	Penanggulangan gangguan hutan	1	1	51,209,000	51,209,000	100	100	50,823,000	99	100
	Konservasi hutan	1	1	43,534,000	43,534,000	100	100	43,531,700	100	100
149	<b>Program perencanaan dan pengembangan hutan</b>	1	19	13,595,077,500	13,595,077,500	100	99	13,423,660,115	99	101
	Pemantapan Perencanaan, pengelolaan data-informasi serta monitoring dan evaluasi pembangunan kehutanan	1	1	297,120,000	297,120,000	100	100	292,856,620	99	100
	Pengelolaan data spasial kawasan hutan	1	1	45,162,500	45,162,500	100	100	43,229,706	96	100
	Pemantauan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan	1	1	46,072,000	46,072,000	100	100	43,963,500	95	100
	Percepatan penetapan kawasan hutan	1	1	48,882,000	48,882,000	100	100	47,964,200	98	100
	Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batutegi	1	1	341,556,000	341,556,000	100	100	326,270,270	96	117
	Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedung Wani	1	1	135,101,000	135,101,000	100	100	134,473,380	100	100
	Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Muara Dua	1	1	147,784,000	147,784,000	100	100	140,703,400	95	100
	Pengelolaan Wilayah KPH (Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014)	1	1	10,920,837,000	10,920,837,000	100	100	10,845,820,550	99	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Pengelolaan wilayah kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gunung Balak	1	1	120,156,000	120,156,000	100	100	114,739,200	95	100
	Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa	1	1	133,152,000	133,152,000	100	100	133,032,000	100	100
	Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bukit Punggur	1	1	137,058,000	137,058,000	100	100	128,457,208	94	100
	Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rajabasa, Way Pisang, dan Batu Serampok	1	1	148,960,000	148,960,000	100	100	147,678,519	99	100
	Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pematang Neba	1	1	243,267,000	243,267,000	100	100	236,145,004	97	100
	Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Agung Utara	1	1	145,549,000	145,549,000	100	100	132,572,914	91	100
	Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sungai Buaya	1	1	132,158,000	132,158,000	100	100	126,826,800	96	100
	Pengelolaan wilayah kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Waya Tangkit Tebak	1	1	140,679,000	140,679,000	100	86	138,146,168	98	100
	Pengelolaan wilayah kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Terusan	1	1	139,369,000	139,369,000	100	100	136,017,650	98	100
	Pengelolaan wilayah kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pesisir Barat	1	1	126,615,000	126,615,000	100	100	109,408,770	86	100
	Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pesawaran	1	1	145,600,000	145,600,000	100	100	145,354,256	100	100
<b>150</b>	<b>Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3,497,828,000</b>	<b>3,497,828,000</b>	<b>100</b>	<b>83</b>	<b>3,358,539,875</b>	<b>96</b>	<b>121</b>
	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata alam di Tahura Wan Abdul Rachman	1	1	1,321,250,000	1,321,250,000	100	100	1,271,693,909	96	100
	Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman	1	1	346,529,000	346,529,000	100	8	332,455,716	96	1,2
	Optimalisasi Pemanfaatan Kekayaan Hutan	1	1	60,000,000	60,000,000	100	100	58,763,100	98	100
	Peningkatan Promosi dan Penyuluhan Kehutanan	1	1	799,730,000	799,730,000	100	100	725,715,350	91	100
	Pembinaan perhutanan sosial	1	1	970,319,000	970,319,000	100	100	969,911,800	100	100
<b>151</b>	<b>Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>620,000,000</b>	<b>620,000,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>607,502,698</b>	<b>98</b>	<b>100</b>

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Monitoring dan Evaluasi kegiatan pembangunan sektor pertambangan dan energi	1	1	120,000,000	120,000,000	100	100	119,337,000	99	100
	Evaluasi dan pengawasan konservasi pertambangan, reklamasi, dan pasca tambang	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	99,636,000	100	100
	Pembinaan dan pengawasan bidang K3 Lingkungan Pertambangan	1	1	175,000,000	175,000,000	100	100	174,995,550	100	100
	Pembinaan , pengawasan dan inventarisasi data dan informasi perusahaan pertambangan mineral dan batubara	1	1	125,000,000	125,000,000	100	100	118,334,148	95	100
	Inventarisasi aktivitas penambangan masyarakat	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	95,200,000	95	100
152	<b>Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan</b>	1	1	<b>600,000,000</b>	<b>600,000,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>83,828,740</b>	<b>14</b>	<b>100</b>
	Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan	1	1	600,000,000	600,000,000	100	100	83,828,740	14	100
153	<b>Program Peningkatan Pendapatan Daerah dari Hasil Pertambangan</b>	1	2	<b>525,000,000</b>	<b>525,000,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>521,683,800</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
	Pengelolaan/Pengurusan Migas	1	1	425,000,000	425,000,000	100	100	423,275,800	100	100
	Pengawasan penyaluran bahan bakar kendaraan bermotor	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	98,408,000	98	100
154	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Sumber Potensi dan Pemanfaatan Energi Terbarukan dan Energi Alternatif</b>	1	2	<b>650,000,000</b>	<b>650,000,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>647,929,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Pemanfaatan Energi terbarukan Berbasis Bioenergi	1	1	425,000,000	425,000,000	100	100	423,026,000	100	100
	Perencanaan Umum Energi Daerah	1	1	225,000,000	225,000,000	100	100	224,903,000	100	100
155	<b>Peningkatan Kapasitas sistem Pelaporan dan Evaluasi</b>	1	1	<b>62,662,000</b>	<b>62,662,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>62,595,400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	1	1	62,662,000	62,662,000	100	100	62,595,400	100	100
156	<b>Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Mineral, Panas Bumi, dan Geologi</b>	1	2	<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>199,030,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Pengelolaan informasi Geologi dan potensi panas bumi	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	99,360,000	99	100
	Pengembangan dan pendayagunaan air tanah	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	99,670,000	100	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
157	<b>Pengembangan Data dan Informasi Bidang Pertambangan dan Energi</b>	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	99,284,900	99	100
	Inventarisasi data dan informasi potensi dan perusahaan pertambangan dan energi	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	99,284,900	99	100
158	<b>Program Pendidikan Masyarakat</b>	1	3	325,000,000	325,000,000	100	100	315,666,000	97	100
	Penyebarluasan Informasi Hemat Energi dan konservasi Energi di Prov.lampung	1	1	125,000,000	125,000,000	100	100	121,462,000	97	100
	Penyebarluasan Informasi Kebencanaan Geologi	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	99,008,000	99	100
	Penyebarluasan informasi air tanah	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	95,196,000	95	100
159	<b>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	1	4	280,909,600	280,909,600	100	100	258,646,845	92	100
	Pengawasan barang-barang dalam pengawasan (zat berbahaya dan minuman beralkohol)	1	1	33,500,000	33,500,000	100	100	33,425,970	100	100
	Pengawasan barang beredar ber SNI wajib	1	1	48,100,000	48,100,000	100	100	47,912,775	100	100
	Kampanye dan edukasi masyarakat tentang perlindungan konsumen	1	1	150,000,000	150,000,000	100	100	149,801,500	100	100
	Dukungan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kab/Kota	1	1	49,309,600	49,309,600	100	100	27,506,600	56	100
160	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri</b>	1	5	399,955,000	399,955,000	100	100	387,675,328	97	100
	Pemantauan dan informasi stok dan harga bahan pokok serta barang strategis	1	1	36,000,000	36,000,000	100	100	35,700,000	99	100
	Pasar murah bersubsidi	1	1	103,955,000	103,955,000	100	100	98,387,500	95	100
	Partisipasi pameran luar daerah	1	1	120,000,000	120,000,000	100	100	114,869,828	96	100
	Fasilitasi merk dagang dan barcode	1	1	90,000,000	90,000,000	100	100	88,722,200	99	100
	Peningkatan kerjasama pemasaran produk antar daerah	1	1	50,000,000	50,000,000	100	100	49,995,800	100	100
161	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Kalibrasi dan Tertib Ukur</b>	1	2	59,500,000	59,500,000	100	100	39,820,000	67	100
	Sosialisasi dokumen mutu laboratorium ISO 17025	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Verifikasi standar interkomparasi ke luar provinsi dan kab/kota	1	1	59,500,000	59,500,000	100	100	39,820,000	67	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
162	<b>Program Peningkatan Distribusi dan Pemasaran Komoditi Provinsi Lampung</b>	1	1	38,000,000	38,000,000	100	100	37,998,300	100	100
	Membangun jejaring pasar dalam dan luar provinsi	1	1	38,000,000	38,000,000	100	100	37,998,300	100	100
163	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri</b>	1	8	918,550,000	918,550,000	100	96	912,978,909	99	100
	Partisipasi pameran produk ekspor dan komoditi potensial	1	1	130,000,000	130,000,000	100	100	127,210,650	98	100
	Forum koordinasi implementasi kebijakan perdagangan luar negeri	1	1	9,000,000	9,000,000	100	100	8,799,000	98	100
	Bimtek bagi eksportir dan importir pemula	1	1	55,050,000	55,050,000	100	100	53,963,600	98	100
	Fasilitasi bagi eksportir dan calon eksportir dalam rangka akses terhadap pembiayaan untuk mendukung proses ekspor	1	1	48,000,000	48,000,000	100	100	47,377,100	99	100
	Diklat peningkatan pemahaman eksportir dan calon eksportir terhadap dukumen dan persyaratan dalam perdagangan internasional	1	1	58,000,000	58,000,000	100	100	57,166,900	99	100
	Partisipasi pameran produk unggulan di luar negeri	1	1	450,000,000	450,000,000	100	100	450,000,000	100	100
	Pembinaan, fasilitasi dan pencitraan produk unggulan daerah	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Koordinasi dan pengendalian lintas sektoral dalam rangka pengembangan produk dan promosi ke luar negeri	1	1	168,500,000	168,500,000	100	10	168,461,659	100	100
164	<b>Program Pengembangan dan Peningkatan Sertifikasi dan Pengujian Mutu Barang</b>	1	4	429,387,950	429,387,950	100	68	341,068,450	79	100
	Perluasan ruang lingkup pengujian komoditi ekspor CPO, kayu manis, gabah, beras dan karet konvensional	1	1	150,000,000	150,000,000	100	100	61,890,000	41	100
	Peningkatan kompetensi penguji mutu barang dan petugas pengambil contoh	1	1	31,000,000	31,000,000	100	100	30,967,250	100	100
	Peningkatan pelayanan pengujian mutu komoditi	1	1	112,217,950	112,217,950	100	100	112,191,200	100	100
	Peningkatan sarana pengujian laboratorium	1	1	136,170,000	136,170,000	100	22	136,020,000	100	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
165	<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>	1	8	2,169,798,083	2,169,798,083	100	100	2,163,934,294	100	100
	Partisipasi pameran Agro Expo	1	1	356,021,500	356,021,500	100	100	354,214,500	99	100
	Peningkatan Kualitas Prodck olahan pangan berbasis Hortikultura dan Ikan	1	1	144,454,000	144,454,000	100	100	143,415,019	99	100
	Pengembangan Industri Olahan Pangan Berbasis Komoditi Hasil Perkebunan dan kehutanan	1	1	662,050,000	662,050,000	100	100	661,019,600	100	100
	Pengembangan Industri Kerajinan dan Olahan Kulit	1	1	107,127,954	107,127,954	100	100	106,377,954	99	100
	Pengembangan Industri Furniture	1	1	98,544,997	98,544,997	100	100	98,544,997	100	100
	Pengembangan Industri Sandang, Tenun dan Kain Tradisional	1	1	109,141,856	109,141,856	100	100	108,149,859	99	100
	Fasilitas Promosi Produk Kerajinan Khas dan Unggulan Daerah	1	1	605,291,065	605,291,065	100	100	605,068,465	100	100
	Pengembangan IKM Logam dan Mesin	1	1	87,166,711	87,166,711	100	100	87,143,900	100	100
166	<b>Program Pengembangan Sentra Industri Potensial</b>	1	1	92,033,159	92,033,159	100	100	91,964,000	100	100
	Pelatihan Industri Kreatif Berbahan Baku Tanah Liat	1	1	92,033,159	92,033,159	100	100	91,964,000	100	100
167	<b>Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b>	1	5	517,572,987	517,572,987	100	126	504,519,693	97	75
	Pembinaan dan pengawasan industri hijau	1	1	81,930,095	81,930,095	100	136	76,450,603	93	73
	Pengembangan Industri dan Kemasan	1	1	217,607,000	217,607,000	100	100	217,586,700	100	100
	Bimtek Penerapan Standar Mutu Produk IKM	1	1	167,185,676	167,185,676	100	100	162,762,390	97	100
	Kemitraan Antara Industri Kecil, Mengengah dan Besar	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Supervisi Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1	1	50,850,216	50,850,216	100	100	47,720,000	94	80
168	<b>Program Pengembangan Masyarakat melalui Transmigrasi</b>	1	1	155,000,000	155,000,000	100	100	103,830,900	67	100
	Pembinaan penempatan transmigrasi	1	1	155,000,000	155,000,000	100	100	103,830,900	67	100
169	<b>Program Pengembangan Museum Transmigrasi menjadi Pusat Layanan Informasi, Edukasi dan Sejarah Ketrasmigrasian</b>	1	3	300,000,000	300,000,000	100	100	55,804,490	19	31

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp.	%	%
	Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Budaya Benda Bersejarah Bercorak Transmigrasi	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	25,401,800	25	43
	Peningkatan Layanan Publikasi Museum Ketransmigrasian	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	3,094,500	3	31
	Peningkatan Fasilitas Museum Ketransmigrasian	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	27,308,190	27	25
<b>170</b>	<b>Program Pengembangan Kawasan KTM</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>153,000,000</b>	<b>153,000,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>145,705,000</b>	<b>95</b>	<b>100</b>
	Pembinaan dan pengembangan usaha kemitraan di Kawasan KTM	1	1	75,000,000	75,000,000	100	100	73,270,000	98	100
	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana di Kawasan KTM	1	1	78,000,000	78,000,000	100	100	72,435,000	93	100
<b>171</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>7,134,189,000</b>	<b>7,134,189,000</b>	<b>100</b>	<b>1,44</b>	<b>5,635,571,449</b>	<b>79</b>	<b>95</b>
	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	1	1	545,086,000	545,086,000	100	0	545,086,000	100	80
	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	1	1	89,192,000	89,192,000	100	0	88,713,000	99	80
	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1	1	204,256,000	204,256,000	100	0	196,089,500	96	80
	Monitoring Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi	1	1	29,192,000	29,192,000	100	0	28,872,000	99	167
	Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1	1	114,942,000	114,942,000	100	0	106,778,000	93	100
	Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1	1	92,384,000	92,384,000	100	100	92,320,572	100	80
	Evaluasi LAKIP Kabupaten/Kota	1	1	127,320,000	127,320,000	100	0	125,520,800	99	100
	RAKORWASDA	1	1	74,384,000	74,384,000	100	0	25,121,956	34	100
	Monitoring penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)	1	1	188,728,000	188,728,000	100	0	187,847,000	100	100
	Unit Pengendali Gratifikasi	1	1	83,576,000	83,576,000	100	0	68,255,000	82	100
	Pembinaan LHKASN dan LHKPN	1	1	239,631,000	239,631,000	100	0	236,800,200	99	80
	Pelaksanaan Pengawasan/Suervisi /Monitoring Internal Secara Berkala Irbanwil I	1	1	352,024,000	352,024,000	100	0	347,834,000	99	100
	Pelaksanaan Pengawasan/Suervisi /Monitoring Internal Secara Berkala Irbanwil II	1	1	406,258,000	406,258,000	100	0	386,993,000	95	100
	Pelaksanaan Pengawasan/Suervisi /Monitoring Internal Secara Berkala Irbanwil III	1	1	416,465,000	416,465,000	100	0	319,455,000	77	100



No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp.	%	%
	Pelaksanaan Pengawasan/Suervisi /Monitoring Internal Secara Berkala Irbanwil IV	1	1	423,526,000	423,526,000	100	0	194,573,000	46	100
	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Pemeriksaan Reguler) Irbanwil I	1	1	708,369,000	708,369,000	100	0	642,339,000	91	100
	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Pemeriksaan Reguler) Irbanwil II	1	1	746,660,000	746,660,000	100	0	637,575,938	85	100
	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Pemeriksaan Reguler) Irbanwil III	1	1	687,144,000	687,144,000	100	0	687,037,200	100	100
	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Pemeriksaan Reguler) Irbanwil IV	1	1	605,052,000	605,052,000	100	0	484,543,000	80	100
	Kegiatan SABER PUNGLI	1	1	1,000,000,000	1,000,000,000	100	0	233,817,283	23	125
172	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Aparatur pengawasan</b>	1	2	142,192,000	142,192,000	100	0	87,000,000	61	86
	Pelatihan pengembangan Tenaga pemeriksa dan Aparatur pengawasan	1	1	87,000,000	87,000,000	100	0	87,000,000	100	100
	Pengukuhan dan Sosialisasi Auditor Intern Pemerintah (AAIP)	1	1	55,192,000	55,192,000	100	0	0	0	0
173	<b>Program Pengembangan data/informasi</b>	1	6	1,967,636,700	1,967,636,700	100	2,111	1,841,352,875	94	100
	Pengelolaan Simpul Jaringan Data Spasial Nasional	1	1	1,216,606,000	1,216,606,000	100	0	1,108,583,800	91	100
	Penyusunan data indikator utama ekonomi makro dan keuangan daerah Provinsi Lampung	1	1	150,000,000	150,000,000	100	0	141,740,000	94	100
	Pengelolaan Informasi Elektronik (website) Bappeda Provinsi Lampung	1	1	140,730,700	140,730,700	100	44	140,250,700	100	100
	Pengelolaan Perpustakaan Bappeda Provinsi Lampung	1	1	103,337,000	103,337,000	100	0	102,710,015	99	100
	Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	1	1	193,168,000	193,168,000	100	0	184,894,360	96	100
	Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Provinsi Lampung	1	1	163,795,000	163,795,000	100	0	163,174,000	100	100
174	<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>	1	1	112,020,000	112,020,000	100	0	109,159,775	97	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Rapat Koordinasi Pembangunan Se-Wilayah Sumatra	1	1	112,020,000	112,020,000	100	0	109,159,775	97	100
175	<b>Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah</b>	1	1	<b>84,810,000</b>	<b>84,810,000</b>	<b>100</b>	<b>250</b>	<b>84,229,800</b>	<b>99</b>	<b>40</b>
	Pembinaan SDM Aparatur	1	1	84,810,000	84,810,000	100	250	84,229,800	99	40
176	<b>Penguatan Jaringan dan Program Koordinasi Perencanaan</b>	1	10	<b>2,200,452,800</b>	<b>2,200,452,800</b>	<b>100</b>	<b>211</b>	<b>1,901,861,094</b>	<b>86</b>	<b>95</b>
	Promosi Informasi Perencanaan Investasi Daerah	1	1	26,311,000	26,311,000	100	0	8,391,000	32	0
	Koordinasi rencana aksi daerah tentang penurunan gas rumah kaca danantisipasi dampak perubahan iklim dan monev lahan kritis (koordinasi dan monev LH)	1	1	199,844,000	199,844,000	100	0	176,594,000	88	100
	Perencanaan Pengembangan Ekonomi Daerah Lampung	1	1	317,970,000	317,970,000	100	0	300,624,974	95	100
	Perencanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunan	1	1	77,400,000	77,400,000	100	0	76,525,900	99	100
	Penguatan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Lampung	1	1	160,899,000	160,899,000	100	133	153,214,000	95	100
	Akselerasi Pelaksanaan Program Unggulan Daerah Bidang Infrastruktur	1	1	121,153,800	121,153,800	100	0	115,536,400	95	100
	Perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	1	1	358,744,000	358,744,000	100	214	343,270,075	96	100
	Perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah	1	1	339,265,000	339,265,000	100	0	304,069,000	90	100
	Penunjang Program IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management Irrigation Project)	1	1	456,690,000	456,690,000	100	0	291,108,000	64	100
	Penunjang Penguatan Kawasan Perumahan, Permukiman dan Pengelolaan Sumberdaya Air	1	1	142,176,000	142,176,000	100	50	132,527,745	93	100
177	<b>Pengembangan dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Daerah</b>	1	7	<b>1,475,911,000</b>	<b>1,475,911,000</b>	<b>100</b>	<b>139</b>	<b>1,305,504,126</b>	<b>88</b>	<b>100</b>
	Akselerasi pengembangan dunia usaha dan sinergitas pembangunan ekonomi daerah	1	1	343,160,000	343,160,000	100	0	312,206,949	91	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Pengembangan Kawasan Industri dan Pariwisata	1	1	193,160,000	193,160,000	100	200	158,263,826	82	100
	Optimalisasi Pengembangan Kedaulatan Pangan dan Energi	1	1	150,000,000	150,000,000	100	31	125,637,581	84	100
	Penyusunan Analisis Kebijakan Pembangunan Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah	1	1	116,849,000	116,849,000	100	0	59,897,300	51	100
	Penyusunan Analisis Kebijakan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	1	1	230,000,000	230,000,000	100	0	229,848,245	100	100
	Penyusunan Analisis Kebijakan Bidang Ekonomi	1	1	200,000,000	200,000,000	100	0	180,978,225	90	100
	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	1	1	242,742,000	242,742,000	100	0	238,672,000	98	100
<b>178</b>	<b>Pemantauan dan Evaluasi Pelaksana Pembangunan Daerah</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>1,573,311,000</b>	<b>1,573,311,000</b>	<b>100</b>	<b>3,6</b>	<b>1,359,758,883</b>	<b>86</b>	<b>97</b>
	Evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan SKPD Prov.Lampung	1	1	105,844,000	105,844,000	100	0	105,193,300	99	100
	Evaluasi hasil pencapaian renstra bappeda dan koordinasi evaluasi renstra SKPD	1	1	63,077,000	63,077,000	100	0	61,477,300	97	100
	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan Kab / Kota	1	1	293,584,000	293,584,000	100	0	289,515,000	99	100
	Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda	1	1	139,104,000	139,104,000	100	100	132,703,200	95	100
	Peningkatan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan APBN (DK/TP/UB) tahun 2015 - 2019	1	1	114,000,000	114,000,000	100	0	112,384,600	99	100
	Peningkatan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan APBD TA	1	1	110,698,000	110,698,000	100	0	94,861,000	86	100
	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian RAD Pangan dan Gizi 2015-2019	1	1	151,487,000	151,487,000	100	0	125,880,151	83	100
	Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	1	1	95,608,000	95,608,000	100	0	60,415,750	63	100
	Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1	1	103,364,000	103,364,000	100	0	79,987,182	77	100
	Monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan	1	1	326,087,000	326,087,000	100	0	279,512,000	86	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp.	%	%
	Evaluasi capaian SPM bidang pendidikan, kesehatan, trantibumlinmas dan sosial	1	1	70,458,000	70,458,000	100	0	17,829,400	25	0
<b>179</b>	<b>Pengembangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,060,920,000</b>	<b>1,060,920,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1,015,713,400</b>	<b>96</b>	<b>100</b>
	Penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2023	1	1	1,060,920,000	1,060,920,000	100	0	1,015,713,400	96	100
<b>180</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>6,291,241,936</b>	<b>6,291,241,936</b>	<b>100</b>	<b>708</b>	<b>5,034,792,444</b>	<b>80</b>	<b>14</b>
	Penyusunan Pedoman Penyusunan RKA SKPD	1	1	90,000,000	90,000,000	100	3,333	90,000,000	100	3
	Pengendalian dan Pelaporan Penerbitan SPD	1	1	78,351,200	78,351,200	100	2,5	77,894,257	99	4
	Pengelolaan dan Penataan Administrasi Kepegawaian	1	1	4,874,968	4,874,968	100	100	1,194,968	25	100
	Pengumpulan dan Pemeliharaan Arsip Statis Biro Keuangan	1	1	5,580,000	5,580,000	100	1,2	2,509,050	45	8
	Penataan Aset	1	1	4,863,900	4,863,900	100	25	4,863,900	100	400
	Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah	1	1	104,983,000	104,983,000	100	10	47,479,040	45	1
	Penyusunan Perda APBD	1	1	137,274,998	137,274,998	100	5	124,414,998	91	2
	Penyusunan Pergub APBD	1	1	68,539,931	68,539,931	100	5	68,539,931	100	2
	Pencermatan dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Raperda/Raperbup/Raperwali APBD Kab/Kota	1	1	55,924,850	55,924,850	100	100	47,204,850	84	100
	Pencermatan dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Raperda/Raperbup/Raperwali APBD Perubahan Kab/Kota	1	1	60,064,815	60,064,815	100	100	56,924,722	95	100
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang APBD Kab/Kota	1	1	101,524,900	101,524,900	100	33	98,510,300	97	300
	Sosialisasi Regulasi Peraturan Keuangan Daerah	1	1	497,989,910	497,989,910	100	4	15,453,400	3	2,3
	Penyusunan Perda Perubahan APBD	1	1	142,594,900	142,594,900	100	5	127,907,500	90	2
	Penyusunan Pergub Perubahan APBD	1	1	68,539,814	68,539,814	100	5	67,439,814	98	2
	Manajemen peningkatan pengelolaan keuangan berbasis Sistem Informasi Manajemen	1	1	896,534,930	896,534,930	100	10	763,090,751	85	1

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang perubahan APBD Kab/Kota	1	1	101,524,896	101,524,896	100	50	92,104,188	91	200
	Peningkatan Sumberdaya Manusia Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota	1	1	104,999,905	104,999,905	100	10	94,009,305	90	1
	Pengembangan Aplikasi Keuangan Daerah Terintegrasi	1	1	3,699,964,019	3,699,964,019	100	10	3,255,251,470	88	1
	Verifikasi dan Pemantauan Dana DAK Kabupaten/Kota	1	1	67,111,000	67,111,000	100	1,5	0	0	0
<b>181</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>721,915,936</b>	<b>721,915,936</b>	<b>100</b>	<b>638</b>	<b>690,195,426</b>	<b>96</b>	<b>16</b>
	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD	1	1	92,604,822	92,604,822	100	5	91,637,450	99	2
	Pengelolaan administrasi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan	1	1	49,999,865	49,999,865	100	10	49,999,310	100	1
	Peningkatan administrasi belanja pegawai dan penerbitan daftar gaji	1	1	227,996,780	227,996,780	100	164	227,993,066	100	61
	Peningkatan administrasi pelayanan pada Kas Daerah Provinsi Lampung	1	1	118,279,283	118,279,283	100	5	96,399,800	82	2
	Pengelolaan Penerbitan dan Penyusunan Laporan Realisasi SP2D SKPD	1	1	123,640,870	123,640,870	100	143	122,520,000	99	70
	Penyusunan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	1	1	20,419,995	20,419,995	100	5	17,133,300	84	2
	Penatausahaan dan pelaporan Pajak	1	1	43,079,872	43,079,872	100	10	39,260,800	91	1
	Pengelolaan dana transfer ke daerah	1	1	27,814,965	27,814,965	100	10	27,482,300	99	1
	Pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus	1	1	18,079,484	18,079,484	100	10	17,769,400	98	1
<b>182</b>	<b>Program Peningkatan Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1,278,734,252</b>	<b>1,278,734,252</b>	<b>100</b>	<b>658</b>	<b>1,204,336,435</b>	<b>94</b>	<b>15</b>
	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung	1	1	371,260,855	371,260,855	100	10	348,501,114	94	1
	Penyusunan laporan Realisasi bulanan triwulan dan semester pelaksanaan APBD dan prognosis 6 bulan berikutnya	1	1	79,363,915	79,363,915	100	909	76,815,400	97	11
	Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah	1	1	57,640,729	57,640,729	100	769	37,413,647	65	13

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota	1	1	107,195,000	107,195,000	100	56	105,635,000	99	180
	Tindak Lanjut Penyelesaian dan Pemutakhiran Data Keuangan Daerah	1	1	24,670,513	24,670,513	100	1,2	19,672,758	80	8
	Pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan serta pelaporan keuangan daerah berbasis akrual	1	1	549,999,870	549,999,870	100	909	540,423,240	98	11
	Pencatatan Administrasi Pendapatan OPD Provinsi Lampung	1	1	88,603,370	88,603,370	100	100	75,875,276	86	100
<b>183</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>6,022,933,980</b>	<b>6,022,933,980</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>5,853,905,682</b>	<b>97</b>	<b>100</b>
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	1	1	201,100,000	201,100,000	100	100	177,617,000	88	100
	Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban 5 Tahun Akhir Masa Jabatan Bid. Pendapatan & Penyusunan Renstra Dipenda Prov. Lampung Tahun 2014-2019	1	1	55,674,000	55,674,000	100	100	42,114,000	76	100
	Penyusunan perencanaan anggaran tahunan	1	1	24,992,000	24,992,000	100	100	21,035,200	84	100
	Pengamanan dan penyelesaian masalah barang milik Pemerintah Provinsi Lampung	1	1	679,515,685	679,515,685	100	100	602,182,200	89	100
	Pemanfaatan barang milik daerah milik Pemerintah Provinsi Lampung	1	1	188,100,000	188,100,000	100	100	178,846,800	95	100
	Penyusunan buku inventaris barang daerah	1	1	280,600,000	280,600,000	100	100	280,505,035	100	100
	Rekonsiliasi perhitungan Neraca Barang Milik Daerah	1	1	2,332,850,128	2,332,850,128	100	100	2,297,179,183	98	100
	Identifikasi barang milik daerah Pemerintah Provinsi Lampung	1	1	7,280,000	7,280,000	100	100	6,367,300	87	100
	Pembinaan dan supervisi penilaian barang milik daerah internal aprasial	1	1	317,877,000	317,877,000	100	100	317,345,256	100	100
	Investigasi barang milik Pemerintah Provinsi Lampung	1	1	210,643,942	210,643,942	100	100	209,211,775	99	100
	Pengelolaan ketatausahaan barang inventaris yang dikelola oleh Biro Perlengkapan	1	1	218,072,925	218,072,925	100	100	218,024,281	100	100
	Dokumentasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	1	1	35,237,128	35,237,128	100	100	34,752,382	99	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp.	%	%
	Pengembangan dan pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Barang Daerah	1	1	544,997,324	544,997,324	100	100	544,664,044	100	100
	Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelolaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	1	581,534,862	581,534,862	100	100	581,532,636	100	100
	Pengelolaan manajemen informasi BMD	1	1	261,348,004	261,348,004	100	100	260,826,648	100	100
	Penyusunan standarisasi barang dan kebutuhan barang daerah	1	1	83,110,982	83,110,982	100	100	81,701,942	98	100
<b>184</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Pajak</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>3,803,944,656</b>	<b>3,803,944,656</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3,117,318,597</b>	<b>82</b>	<b>66</b>
	Penyusunan Peraturan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Dasar Pengenaan PKB	1	1	183,967,256	183,967,256	100	100	155,554,938	85	100
	Penyusunan Laporan Pajak Daerah	1	1	72,500,000	72,500,000	100	100	70,473,400	97	100
	Perhitungan dan Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi	1	1	48,500,000	48,500,000	100	100	45,767,000	94	100
	Penyusunan Produk Hukum di Sektor Pajak Daerah	1	1	68,822,000	68,822,000	100	100	63,928,100	93	100
	Verifikasi Keberatan dan Sengketa Pajak Daerah	1	1	93,500,000	93,500,000	100	100	84,612,200	90	100
	Optimalisasi Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1	1	1,114,886,430	1,114,886,430	100	100	650,173,600	58	65
	Kerjasama Media Massa Cetak / Elektronik	1	1	678,200,000	678,200,000	100	100	666,550,000	98	100
	Tim Pembina Pemungutan PKB dan BBNKB	1	1	404,740,000	404,740,000	100	100	384,552,104	95	100
	Pelatihan Operator SAMSAT Provinsi Lampung	1	1	222,424,000	222,424,000	100	100	220,814,850	99	100
	Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1	1	198,200,000	198,200,000	100	100	184,291,100	93	100
	Pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1	1	318,825,390	318,825,390	100	100	217,030,128	68	100
	Pengelolaan Pajak Air Permukaan (PAP)	1	1	315,000,000	315,000,000	100	100	303,601,225	96	100
	Pengelolaan Pajak Rokok	1	1	84,379,580	84,379,580	100	100	69,969,952	83	100
<b>185</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Pendapatan Non Pajak</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1,152,210,794</b>	<b>1,152,210,794</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1,078,604,265</b>	<b>94</b>	<b>100</b>
	Rekonsiliasi Target dan Realisasi Pendapatan Non Pajak	1	1	347,271,802	347,271,802	100	100	345,930,232	100	100
	Penyusunan Produk Hukum Daerah di Sektor Non Pajak	1	1	221,041,000	221,041,000	100	100	182,134,576	82	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp.	%	%
	Penyusunan Laporan Penerimaan Non Pajak	1	1	133,298,157	133,298,157	100	100	125,832,957	94	100
	Monitoring, Potensi Retribusi Daerah dan lain-lain PAD yang sah	1	1	361,400,000	361,400,000	100	100	336,788,400	93	100
	Sosialisasi Produk Hukum di Sektor Non Pajak	1	1	89,199,835	89,199,835	100	100	87,918,100	99	100
<b>186</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Teknologi Informasi Pendapatan</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>6,443,799,000</b>	<b>6,443,799,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>6,134,389,305</b>	<b>95</b>	<b>100</b>
	Kajian Banding pengelolaan pendapatan daerah dalam rangka pengembangan sumber-sumber daerah	1	1	92,438,200	92,438,200	100	100	86,895,783	94	100
	Optimalisasi data sistem informasi pengelolaan PKB dan BBNKB	1	1	313,210,800	313,210,800	100	100	300,876,900	96	100
	Klasifikasi dan rekonsiliasi data kendaraan bermotor	1	1	78,116,400	78,116,400	100	100	76,193,500	98	100
	Verifikasi arsip pembayaran PKB dan BBNKB	1	1	91,120,100	91,120,100	100	100	89,940,500	99	100
	Sosialisasi supervisi dan koordinasi pajak dan retribusi daerah dalam rangka optimalisasi PAD	1	1	143,009,500	143,009,500	100	100	142,773,622	100	100
	Peningkatan keamanan akses jaringan dan aplikasi pelayanan samsat	1	1	291,470,000	291,470,000	100	100	289,888,000	99	100
	Pemeliharaan infrastruktur pelayanan samsat	1	1	816,070,000	816,070,000	100	100	815,274,000	100	100
	Penyediaan aksesibilitas aplikasi pelayanan samsat	1	1	4,365,210,000	4,365,210,000	100	100	4,089,643,000	94	100
	Pembangunan dan pengembangan aplikasi pajak daerah	1	1	253,154,000	253,154,000	100	100	242,904,000	96	100
<b>187</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Pendapatan Daerah</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>701,245,875</b>	<b>701,245,875</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>639,231,655</b>	<b>91</b>	<b>100</b>
	Pembinaan Pengendalian Penerimaan Pajak	1	1	300,000,000	300,000,000	100	100	285,942,178	95	100
	Pembinaan Pengendalian Penerimaan Non Pajak	1	1	199,999,705	199,999,705	100	100	164,901,805	82	100
	Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan Identifikasi Pengaduan Dalam Pengelolaan PAD	1	1	201,246,170	201,246,170	100	100	188,387,672	94	100
<b>188</b>	<b>Program Pengembangan Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1,596,580,000</b>	<b>1,596,580,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1,415,001,208</b>	<b>89</b>	<b>100</b>
	Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah di UPTD Wil. I	1	1	196,580,000	196,580,000	100	100	194,307,900	99	100



No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah di UPTD Wil. II	1	1	200,000,000	200,000,000	100	100	146,111,400	73	100
	Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah di UPTD Wil. III	1	1	200,000,000	200,000,000	100	100	193,835,420	97	100
	Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah di UPTD Wil. IV	1	1	200,000,000	200,000,000	100	100	193,253,900	97	100
	Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah di UPTD Wil. V	1	1	200,000,000	200,000,000	100	100	196,585,450	98	100
	Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah di UPTD Wil. VI	1	1	200,000,000	200,000,000	100	100	189,274,800	95	100
	Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah di UPTD Wil. VII	1	1	200,000,000	200,000,000	100	100	192,597,838	96	100
	Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah di UPTD Wil. VIII	1	1	200,000,000	200,000,000	100	100	109,034,500	55	100
189	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Investasi dan Penyertaan Modal serta PPK-BLUD</b>	1	4	892,755,085	892,755,085	100	4,413	744,133,809	83	2
	Optimalisasi investasi Pemerintah Provinsi Lampung	1	1	449,515,000	449,515,000	100	1,767	420,835,880	94	6
	Peningkatan SDM Pengelola Keuangan BLUD	1	1	65,103,895	65,103,895	100	10	38,667,859	59	1
	Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penerimaan PPK BLUD pada SKPD	1	1	335,656,340	335,656,340	100	2,5	284,630,070	85	4
	Pembinaan, Monitoring dan Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	1	1	42,479,850	42,479,850	100	0	0	0	0
190	<b>Peningkatan kualitas aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintah</b>	1	2	105,568,000	105,568,000	100	100	105,210,310	100	100
	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	1	1	61,314,300	61,314,300	100	100	61,302,310	100	100
	Pengembangan dan peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil	1	1	44,253,700	44,253,700	100	100	43,908,000	99	100
191	<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>	1	1	160,000,000	160,000,000	100	100	160,000,000	100	100
	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Bagi Pegawai Negeri Sipil	1	1	160,000,000	160,000,000	100	100	160,000,000	100	100
192	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	1	11	23,681,402,819	23,681,402,819	100	98	22,411,263,495	95	101
	Pendidikan dan pelatihan formal	1	1	1,406,331,852	1,406,331,852	100	95	1,221,484,259	87	98

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp.	%	%
	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	1	1	783,976,000	783,976,000	100	0	774,201,200	99	0
	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di Lingkungan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Lampung	1	1	1,567,952,000	1,567,952,000	100	100	1,560,730,000	100	100
	Diklat Kepemimpinan Tingkat III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	1	1	1,717,464,000	1,717,464,000	100	100	1,636,536,680	95	91
	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Pelayanan Dasar dan Pilihan	1	1	168,056,000	168,056,000	100	100	167,685,927	100	100
	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Non Pelayanan Dasar	1	1	77,103,000	77,103,000	100	100	75,848,638	98	100
192	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Penunjang	1	1	173,944,000	173,944,000	100	100	168,339,457	97	100
	Pengembangan Kompetensi Umum	1	1	436,620,000	436,620,000	100	100	378,567,475	87	100
	Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi	1	1	301,580,000	301,580,000	100	100	277,659,638	92	100
	Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	1	1	759,559,967	759,559,967	100	100	720,199,390	95	100
	Diklat Prajabatan Golongan III CASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kab/Kota se-Provinsi Lampung	1	1	16,288,816,000	16,288,816,000	100	100	15,430,010,831	95	99
193	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	1	4	<b>251,317,409</b>	<b>251,317,409</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>241,016,250</b>	<b>96</b>	<b>100</b>
	Penerbitan Majalah/Buletin Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung	1	1	50,983,986	50,983,986	100	100	48,046,786	94	100
	Lembaga Sertifikasi Profesi	1	1	114,890,760	114,890,760	100	100	109,547,023	95	100
	Komite Penjamin Mutu Diklat	1	1	49,849,886	49,849,886	100	100	47,834,286	96	100
	Peningkatan Kemampuan Penelitian Penelitian Widyaiswara	1	1	35,592,777	35,592,777	100	100	35,588,155	100	100
194	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>	1	13	<b>2,351,204,511</b>	<b>2,351,204,511</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2,339,446,102</b>	<b>99</b>	<b>105</b>
	Penguatan IPTEK dan anugerah inovasi daerah Provinsi Lampung	1	1	303,588,000	303,588,000	100	100	304,414,680	100	100
	Pembuatan/Penyusunan Jurnal Inovasi dan pembangunan provinsi lampung	1	1	234,787,999	234,787,999	100	100	234,178,449	100	100
	Penguatan jaringan penelitian (Jarlit) pendidikan Provinsi Lampung	1	1	109,608,600	109,608,600	100	100	109,150,332	100	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Penyusunan Identifikasi dan Pemanfaatan Hasil Inovasi Daerah	1	1	279,693,700	279,693,700	100	100	276,742,600	99	100
	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1	1	91,845,192	91,845,192	100	100	90,924,180	99	100
	Penelitian dan Pengembangan Penerapan IPTEK dan Inovasi Daerah	1	1	74,422,420	74,422,420	100	100	73,140,084	98	100
	Penelitian dan Pengembangan Keuangan, Aset dan Kerjasama	1	1	113,630,500	113,630,500	100	100	112,399,025	99	100
	Kajian Bidang Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan	1	1	168,111,600	168,111,600	100	100	165,860,730	99	100
	Kajian Bidang Transportasi, Energi dan Infrastruktur	1	1	147,049,000	147,049,000	100	0	146,041,000	99	100
	Pengembangan Riset Daerah	1	1	350,000,000	350,000,000	100	0	349,954,752	100	0
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	1	1	109,273,800	109,273,800	100	100	109,273,800	100	100
	Analisis Perumusan dan Rekomendasi Bidang Pengembangan Perekonomian Daerah	1	1	231,442,700	231,442,700	100	100	229,622,670	99	100
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Data, Diseminasi dan Publikasi Kelitbangan	1	1	137,751,000	137,751,000	100	100	137,743,800	100	100
<b>195</b>	<b>Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>228,743,208</b>	<b>228,743,208</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>227,390,100</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
	Fasilitasi Pengembangan kemitraan dengan masyarakat, organisasi masyarakat, LSM diluar daerah	1	1	228,743,208	228,743,208	100	100	227,390,100	99	100
<b>196</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan BLUD Unit Kerja Bagian Umum</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>600,000,000</b>	<b>600,000,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>599,114,872</b>	<b>100</b>	<b>35</b>
	Peningkatan Pelayanan Wisma Lampung	1	1	600,000,000	600,000,000	100	100	599,114,872	100	35
<b>197</b>	<b>Program Pelayanan Masyarakat Terlantar di luar daerah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>53,486,442</b>	<b>53,486,442</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>53,356,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Fasilitasi masyarakat Lampung terlantar di Jakarta	1	1	53,486,442	53,486,442	100	100	53,356,000	100	100
<b>198</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>126,477,892</b>	<b>126,477,892</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>126,472,824</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Fasilitasi kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik, ekonomi, penyediaan sarana dan prasarana public	1	1	126,477,892	126,477,892	100	100	126,472,824	100	100
<b>199</b>	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>643,729,460</b>	<b>643,729,460</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>627,857,756</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
	Pembinaan Mahasiswa Lampung di Luar Daerah	1	1	643,729,460	643,729,460	100	100	627,857,756	98	100
<b>200</b>	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,438,889,830</b>	<b>1,438,889,830</b>	<b>100</b>	<b>108</b>	<b>781,769,480</b>	<b>54</b>	<b>93</b>
	Pembinaan JDI Hukum	1	1	107,870,000	107,870,000	100	100	107,867,621	100	100
	Pengembangan Sistem Informasi Hukum dan Inventarisasi Produk HK dan Inventarisasi Produk HK Provinsi	1	1	116,019,830	116,019,830	100	100	115,307,990	99	100
	Layanan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah secara Elektronik (LPSE)	1	1	735,000,000	735,000,000	100	917	96,873,360	13	11
	Pengembangan Sistem Informasi LPSE	1	1	480,000,000	480,000,000	100	0	461,720,509	96	100
<b>201</b>	<b>Program Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>134,817,594</b>	<b>134,817,594</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>134,766,400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Monitoring Sekretariat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Aksara Lampung	1	1	34,817,594	34,817,594	100	100	34,767,400	100	100
	Pelaksanaan Seni Sastra Klasik Lampung	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	99,999,000	100	100
<b>202</b>	<b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>33,000,000</b>	<b>33,000,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>32,725,000</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
	Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Terhadap Perempuan dan anak	1	1	33,000,000	33,000,000	100	100	32,725,000	99	100
<b>203</b>	<b>Program Kerjasama Informasi dan Media Massa</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1,954,963,182</b>	<b>1,954,963,182</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1,895,435,172</b>	<b>97</b>	<b>100</b>
	Peliputan Kegiatan Provinsi Lampung	1	1	1,174,503,512	1,174,503,512	100	97	1,114,975,897	95	100
	Pembuatan Sambutan Kepala Daerah	1	1	69,633,395	69,633,395	100	100	69,633,000	100	100
	Ringkasan Analisa Berita dan Kliping	1	1	41,527,425	41,527,425	100	100	41,527,425	100	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	1	669,298,850	669,298,850	100	100	669,298,850	100	100
<b>204</b>	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>41,815,505</b>	<b>41,815,505</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>38,720,505</b>	<b>93</b>	<b>100</b>
	Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja di Daerah Transmigrasi	1	1	41,815,505	41,815,505	100	100	38,720,505	93	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp.	%	%
205	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Keagamaan</b>	1	1	4,954,956,901	4,954,956,901	100	100	4,924,160,601	99	100
	Keimanan dan Ketaqwaan Melalui Budaya Islam	1	1	4,954,956,901	4,954,956,901	100	100	4,924,160,601	99	100
206	<b>Program Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan</b>	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	99,988,000	100	100
	Peningkatan Kesegaran Jasmani Karyawan/ti PEMDA Provinsi Lampung	1	1	100,000,000	100,000,000	100	100	99,988,000	100	100
207	<b>Program peningkatan koordinasi sumber daya pendidikan</b>	1	2	375,000,000	375,000,000	100	100	374,402,000	100	100
	Manajemen Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzah se Provinsi Lampung	1	1	350,000,000	350,000,000	100	100	349,848,000	100	100
	Workshop program pendidikan	1	1	25,000,000	25,000,000	100	100	24,554,000	98	100
208	<b>Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	1	2	173,298,375	173,298,375	100	100	171,357,989	99	100
	Penanganan Sengketa Hukum Di Luar Pengadilan (NON LITIGASI)	1	1	106,299,374	106,299,374	100	100	105,795,669	100	100
	Pelaksanaan Aksi HAM di daerah	1	1	66,999,001	66,999,001	100	100	65,562,320	98	100
209	<b>Program pembinaan &amp; Fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>	1	1	202,662,400	202,662,400	100	100	202,585,300	100	100
	Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan se- Provinsi Lampung	1	1	202,662,400	202,662,400	100	100	202,585,300	100	100
210	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	1	7	1,602,168,795	1,602,168,795	100	100	1,577,339,496	98	100
	Penyuluhan Hukum Terpadu	1	1	90,999,961	90,999,961	100	100	90,949,500	100	100
	Advokasi Bantuan Penyelesaian Sengketa Hukum	1	1	361,699,716	361,699,716	100	100	359,775,640	99	100
	Perencanaan dan Penyusunan Laporan Bidang Hukum	1	1	213,740,261	213,740,261	100	100	207,953,260	97	100
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	1	1	392,094,688	392,094,688	100	90	386,785,187	99	111
	Penyusunan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur	1	1	170,318,194	170,318,194	100	100	168,127,550	99	100
	Evaluasi dan Kajian Kebijakan Daerah di Kabupaten/Kota	1	1	225,019,275	225,019,275	100	100	215,894,800	96	100
	Pembinaan dan Fasilitasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	148,296,700	148,296,700	100	100	147,853,559	100	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp.	%	%
211	<b>Program Peningkatan Peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah</b>	1	3	161,650,000	161,650,000	100	100	150,820,050	93	100
	Pengumpulan / Inventarisasi Data Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan/Urusan Bersama se-Provinsi Lampung	1	1	56,000,000	56,000,000	100	100	47,550,200	85	100
	Fasilitasi, koordinasi kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan	1	1	53,650,000	53,650,000	100	100	53,316,350	99	100
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan / Urusan Bersama se-Provinsi Lampung	1	1	52,000,000	52,000,000	100	100	49,953,500	96	100
212	<b>Program Penataan Kelembagaan</b>	1	4	628,929,000	628,929,000	100	100	597,534,705	95	100
	Administrasi Ketatausahaan, Penyusunan dan Pelaporan Program/Kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	1	1	287,825,000	287,825,000	100	100	285,671,730	99	100
	Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi	1	1	219,814,000	219,814,000	100	100	196,366,810	89	100
	Pembinaan, Evaluasi dan Fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/kota se-Provinsi Lampung	1	1	27,170,000	27,170,000	100	100	23,940,000	88	100
	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	1	1	94,120,000	94,120,000	100	100	91,556,165	97	100
213	<b>Program Peningkatan Kinerja Aparatur</b>	1	3	450,868,000	450,868,000	100	100	439,214,386	97	100
	penyelenggaraan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) pada pemerintah provinsi dan kab/kota se provinsi lampung	1	1	272,064,000	272,064,000	100	100	268,888,936	99	100
	Penyelenggaraan pengembangan penerapan budaya kerja dan SDM Aparatur Negara pada Pemerintah Provinsi Lampung dan 15 Kab/kota Provinsi Lampung	1	1	68,808,000	68,808,000	100	100	68,614,000	100	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Penyelenggaraan Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se-provinsi Lampung	1	1	109,996,000	109,996,000	100	100	101,711,450	92	100
<b>214</b>	<b>Program Koordinasi Pembangunan Ekonomi dan Kemitraan</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>730,037,200</b>	<b>730,037,200</b>	<b>100</b>	<b>131</b>	<b>700,855,567</b>	<b>96</b>	<b>95</b>
	Pengembangan Program Dan Fasilitas rapat Koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1	1	199,040,000	199,040,000	100	0	194,168,833	98	100
	Revitalisasi badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi Lampung	1	1	116,230,300	116,230,300	100	100	115,679,179	100	100
	Pemantauan pemanfaatan hutan bagi perekonomian daerah	1	1	27,604,000	27,604,000	100	100	25,779,000	93	75
	Pemantauan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air bagi perekonomian daerah	1	1	24,178,000	24,178,000	100	100	24,178,000	100	100
	Pelaksanaan program peningkatan kemitraan dengan dunia usaha	1	1	143,270,000	143,270,000	100	175	131,694,655	92	71
	Pembinaan dan pemantauan pengembangan ekonomi kreatif	1	1	63,390,000	63,390,000	100	100	59,490,000	94	100
	Pengawasan distribusi bahan bakar minyak dan gas bersubsidi di Provinsi Lampung	1	1	42,849,600	42,849,600	100	100	38,837,600	91	200
	Evaluasi kinerja pengembangan ekonomi di Provinsi Lampung dalam melaksanakan pengendalian inflasi daerah	1	1	113,475,300	113,475,300	100	100	111,028,300	98	100
<b>215</b>	<b>Program Pengembangan investasi untuk mendukung peningkatan ekonomi daerah</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>131,388,000</b>	<b>131,388,000</b>	<b>100</b>	<b>123</b>	<b>124,862,442</b>	<b>95</b>	<b>81</b>
	Penyelenggaraan Lampung Festival	1	1	100,308,000	100,308,000	100	100	99,558,000	99	100
	Pembinaan pengembangan promosi dan potensi daerah	1	1	31,080,000	31,080,000	100	125	25,304,442	81	80
<b>216</b>	<b>Program Penataan dan Peningkatan Administrasi Pembangunan</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>997,120,000</b>	<b>997,120,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>987,415,179</b>	<b>99</b>	<b>89</b>
	Penatausahaan pengelola kegiatan APBN Provinsi Lampung	1	1	60,000,000	60,000,000	100	0	60,000,000	100	100
	Pembinaan jasa konstruksi	1	1	68,720,000	68,720,000	100	0	68,720,000	100	20

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	320,000,000	320,000,000	100	0	310,295,179	97	100
	Penyusunan Administrasi Poses Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	1	1	120,000,000	120,000,000	100	0	120,000,000	100	100
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	1	1	147,040,000	147,040,000	100	0	147,040,000	100	0
	Pelaporan realisasi APBD Kabupaten/Kota	1	1	72,000,000	72,000,000	100	0	72,000,000	100	100
	Penyusunan standar harga satuan konstruksi dan konsultasi	1	1	145,360,000	145,360,000	100	0	145,360,000	100	0
	Pengendalian dana hibah dan bantuan masyarakat	1	1	64,000,000	64,000,000	100	0	64,000,000	100	100
<b>217</b>	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>333,270,000</b>	<b>333,270,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>332,331,277</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Monitoring evaluasi dan pelaporan kebijakan pupuk bersubsidi, pestisida, dan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) serta dukungan terhadap kerja tim Komisi pengawalan pupuk dan pestisida (KP3)	1	1	104,375,000	104,375,000	100	100	103,670,315	99	100
	Monitoring dan evaluasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Petani (BUMP), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	1	1	228,895,000	228,895,000	100	100	228,660,962	100	100
<b>218</b>	<b>Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>54,125,000</b>	<b>54,125,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>53,925,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Sosialisasi kebijakan tata kelola dan tata niaga Lada Lampung Black Pepper	1	1	54,125,000	54,125,000	100	100	53,925,000	100	100
<b>219</b>	<b>Program Pengembangan Data / Informasi</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>382,280,000</b>	<b>382,280,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>382,134,440</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan LKPJ KDH TA 2013 dan Akhir Masa Jabatan KDH Tahun 2009 - 2014	1	1	228,593,000	228,593,000	100	100	228,510,000	100	100
	Fasilitas dan Koordinasi rencana pemekaran wilayah dan Pembentukan Kecamatan di Kab/Kota se-Provinsi Lampung	1	1	103,000,000	103,000,000	100	100	102,943,000	100	100



No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Otda Kab/Kota se-Provinsi Lampung	1	1	50,687,000	50,687,000	100	100	50,681,440	100	100
<b>220</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Biro</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1,280,369,000</b>	<b>1,280,369,000</b>	<b>100</b>	<b>157</b>	<b>924,642,788</b>	<b>72</b>	<b>63</b>
	Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	1	282,742,950	282,742,950	100	100	269,060,518	95	100
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja	1	1	69,751,050	69,751,050	100	88	60,845,050	87	86
	Pembinaan Bantuan Keagamaan Kepada tokoh-tokoh agama dalam rangka peningkatan keimanan masyarakat	1	1	479,070,000	479,070,000	100	167	158,298,200	33	60
	Pengelolaan Administrasi kegiatan dan ketatausahaan Biro	1	1	156,000,000	156,000,000	100	100	145,684,020	93	100
	Peningkatan sistem pelaporan dan penyusunan rencana Program	1	1	109,061,000	109,061,000	100	100	109,012,000	100	100
	Pengembangan Pengelolaan Keuangan	1	1	183,744,000	183,744,000	100	100	181,743,000	99	100
<b>221</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Bidang Pertambangan dan Kelistrikan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>83,650,400</b>	<b>83,650,400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>83,650,270</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pertambangan kelistrikan serta potensi energi baru dan terbarukan dalam mendukung Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	1	1	83,650,400	83,650,400	100	100	83,650,270	100	100
<b>222</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Keagamaan</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>35,603,881,000</b>	<b>35,603,881,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>32,805,105,995</b>	<b>92</b>	<b>100</b>
	Peningkatan Keimanan / Ketaqwaan Ummat beragama ( Umroh/Wisata Rohani)	1	1	10,470,922,000	10,470,922,000	100	100	8,473,223,804	81	100
	Manajemen Pengelolaan Pembinaan dan Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah	1	1	86,304,000	86,304,000	100	100	86,159,000	100	100
	Peningkatan Pelaksanaan MTQ Tk. Provinsi dan Nasional	1	1	1,637,368,000	1,637,368,000	100	100	1,573,794,800	96	100
	Fasilitasi Pembinaan Kegiatan keagamaan	1	1	442,315,000	442,315,000	100	125	275,892,200	62	80

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Fasilitasi peningkatan Kualitas Pelayanan Jamaah Haji Provinsi Lampung	1	1	22,966,972,000	22,966,972,000	100	100	22,396,036,191	98	100
223	<b>Program Peningkatan Apresiasi Terhadap Kesenian dan Budaya</b>	1	2	553,100,000	553,100,000	100	101	289,894,600	52	99
	Festival Qasidah dan Marhaban Tingkat Provinsi Lampung dan Tingkat Nasional	1	1	407,300,000	407,300,000	100	125	159,013,000	39	80
	Audisi Tim Paduan Suara Gita Bahana Nusantara dan pentas seni budaya islami	1	1	145,800,000	145,800,000	100	100	130,881,600	90	100
224	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	1	4	650,454,000	650,454,000	100	119	516,714,700	79	84
	Peningkatan Koordinasi TP-UKS provinsi Lampung	1	1	226,004,000	226,004,000	100	100	155,522,800	69	100
	Peningkatan Koordinasi, sosialisasi promosi kesehatan	1	1	25,902,000	25,902,000	100	0	0	0	0
	Study pembelajaran usaha kesehatan sekolah(UKS) ke pemenang LSS tingkat nasional.	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Lomba Sekolah Sehat Usaha Kesehatan Sekolah (LSS-UKS)	1	1	398,548,000	398,548,000	100	100	361,191,900	91	100
225	<b>Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</b>	1	1	108,758,272	108,758,272	100	100	101,147,693	93	100
	Peningkatan Kualitas SDM dan Sarana-Prasarana Kehumasan dan Keprotokolan	1	1	108,758,272	108,758,272	100	100	101,147,693	93	100
226	<b>Distribusi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung</b>	1	3	4,881,696,010	4,881,696,010	100	100	4,829,426,350	99	100
	Produksi Foto dan Video Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung	1	1	278,552,230	278,552,230	100	100	246,229,400	88	100
	Penyajian dan Penerangan Informasi Pembangunan melalui Surat Kabar Harian dan Mingguan	1	1	4,261,213,780	4,261,213,780	100	100	4,260,920,000	100	100
	Fasilitasi Pengembangan Informasi melalui PWI	1	1	341,930,000	341,930,000	100	100	322,276,950	94	100
227	<b>Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan</b>	1	1	53,840,000	53,840,000	100	100	53,089,250	99	100
	Fasilitasi dan mediasi konflik-konflik pertanahan	1	1	53,840,000	53,840,000	100	100	53,089,250	99	100
228	<b>Program Pengembangan Wilayah Perbatasan</b>	1	1	128,000,000	128,000,000	100	100	124,691,200	97	100
	Penataan Batas Daerah	1	1	128,000,000	128,000,000	100	100	124,691,200	97	100
229	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan sosial</b>	1	2	191,650,000	191,650,000	100	100	191,100,000	100	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp.	%	%
	Peningkatan Kepedulian Sosial	1	1	191,650,000	191,650,000	100	100	191,100,000	100	100
	Pemantauan kejadian bencana di provinsi lampung	1	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Program kerjasama informasi dan media massa</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>763,875,000</b>	<b>763,875,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>763,844,150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Pertemuan Wartawan dan Cooffe Morning	1	1	67,250,000	67,250,000	100	100	67,250,000	100	100
	Koordinasi Hubungan Masyarakat	1	1	696,625,000	696,625,000	100	100	696,594,150	100	100
<b>231</b>	<b>Program Peningkatan SDM Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>325,000,000</b>	<b>325,000,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>324,936,350</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Bimtek Pengelolaan Tata Usaha Keuangan Bagian TU Keuangan	1	1	325,000,000	325,000,000	100	0	324,936,350	100	100
<b>232</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>489,440,000</b>	<b>489,440,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>489,105,250</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Penunjang Bendahara	1	1	489,440,000	489,440,000	100	0	489,105,250	100	100
<b>233</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>306,323,420</b>	<b>306,323,420</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>303,191,620</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam Forum APPSI, APKASI/APEKSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia)	1	1	140,567,320	140,567,320	100	100	140,229,520	100	100
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	1	1	32,297,100	32,297,100	100	100	30,358,900	94	100
	Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Forum MPU (Provinsi se-Jawa, Bali, Lampung, NTB dan NTT)	1	1	113,236,000	113,236,000	100	100	112,782,200	100	100
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri	1	1	20,223,000	20,223,000	100	100	19,821,000	98	100
<b>234</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>8,368,064,294</b>	<b>8,368,064,294</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>8,034,839,675</b>	<b>96</b>	<b>100</b>
	Penyusunan Standarisasi Satuan Harga Barang	1	1	386,421,147	386,421,147	100	100	286,299,846	74	100
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Daerah Pemerintah Provinsi Lampung	1	1	125,615,928	125,615,928	100	100	121,450,728	97	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Evaluasi dan Penyusunan Laporan LMB/DMB	1	1	355,726,301	355,726,301	100	100	355,498,281	100	100
	Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan dan Ketatausahaan	1	1	182,681,972	182,681,972	100	100	170,654,445	93	100
	Pembinaan dan Evaluasi Pemeliharaan dan Perawatan Barang Daerah,	1	1	101,689,990	101,689,990	100	100	100,810,000	99	100
	Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah	1	1	250,000,000	250,000,000	100	100	234,862,600	94	100
	Perubahan Status Hukum Barang Daerah	1	1	281,716,000	281,716,000	100	100	277,470,000	98	100
	Pembinaan dan Pengelolaan Sistem Manajemen Barang Milik Daerah	1	1	155,599,500	155,599,500	100	100	155,462,333	100	100
	Evaluasi dan Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah	1	1	123,055,460	123,055,460	100	100	122,865,165	100	100
	Koordinasi dan Pemantauan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung	1	1	58,582,478	58,582,478	100	100	58,512,052	100	100
	Pelaksanaan Program Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung	1	1	6,268,734,178	6,268,734,178	100	100	6,072,749,500	97	100
	Retensi Arsip	1	1	17,156,490	17,156,490	100	100	17,155,908	100	100
	Penyusunan Penetapan Laporan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung	1	1	61,084,850	61,084,850	100	100	61,048,817	100	100
235	<b>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</b>	1	2	<b>141,468,000</b>	<b>141,468,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>139,015,071</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
	Fasilitasi Administrasi Anggota DPRD Provinsi /Kab / Kota	1	1	130,990,000	130,990,000	100	100	130,637,071	100	100
	Fasilitasi Kunjungan Kerja Anggota DPRD Provinsi / Kabupaten / Kota lain ke Provinsi Lampung	1	1	10,478,000	10,478,000	100	100	8,378,000	80	100
236	<b>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</b>	1	14	<b>84,014,751,577</b>	<b>84,014,751,577</b>	<b>100</b>	<b>124</b>	<b>82,274,343,562</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
	Pembahasan rancangan peraturan daerah	1	1	5,830,885,966	5,830,885,966	100	120	4,761,089,970	82	100
	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	1	1	4,156,126,450	4,156,126,450	100	100	4,154,595,530	100	100
	Rapat-rapat paripurna	1	1	2,017,132,400	2,017,132,400	100	100	1,968,341,641	98	100
	Kegiatan Reses	1	1	11,496,278,100	11,496,278,100	100	100	11,383,296,000	99	100
	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1	1	9,842,447,200	9,842,447,200	100	125	9,759,137,901	99	100
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi alat kelengkapan	1	1	38,780,655,000	38,780,655,000	100	133	38,660,805,967	100	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	1	1	1,523,054,185	1,523,054,185	100	100	1,522,049,830	100	100
	Kunjungan Kerja DPRD dan Sekretariat DPRD Ke Luar Daerah	1	1	4,781,800,000	4,781,800,000	100	100	4,775,086,573	100	100
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Rencana Kerja DPRD	1	1	698,766,000	698,766,000	100	100	696,482,800	100	100
	Rapat Kerja ADPSI dan Forum Komunikasi Sekretariat DPRD	1	1	364,326,090	364,326,090	100	0	360,974,100	99	100
	Publikasi produk hukum DPRD	1	1	339,989,270	339,989,270	100	0	280,579,720	83	100
	Rapat komisi dan kepanitiaan	1	1	2,404,968,000	2,404,968,000	100	133	2,400,789,630	100	100
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1	1	1,178,323,100	1,178,323,100	100	150	1,133,852,900	96	100
	Uji publik dan sosialisasi produk hukum DPRD	1	1	599,999,816	599,999,816	100	150	417,261,000	70	100
237	<b>Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kelembagaan</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>807,954,239</b>	<b>807,954,239</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>790,953,650</b>	<b>98</b>	<b>6,6</b>
	Pembinaan Kelembagaan KORPRI Kabupaten / Kota	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Pembinaan dan Peningkatan Jiwa Korsa bagi Anggota KORPRI	1	1	100,000,000	100,000,000	100	0	100,000,000	100	0
	Bapor Korpri	1	1	590,000,000	590,000,000	100	0	573,499,800	97	0
	Pembekalan bagi anggota KORPRI yang memasuki masa Purna Bhakti	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Peningkatan Kemitraan pengembangan Produk dan Promosi	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Sosialisasi Netralitas Anggota KORPRI dalam kehidupan Politik dan Birokrasi	1	1	58,320,000	58,320,000	100	0	57,857,100	99	0
	Raker DP KORPRI Provinsi, Kabupaten-Kota se-Provinsi Lampung	1	1	59,634,239	59,634,239	100	0	59,596,750	100	0
	Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum Bagi Anggota Korpri dan Penguatan LKBH Korpri	1	1	0	0	0	0	0	0	0
238	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1</b>	<b>44</b>	<b>599,550,924,611</b>	<b>599,550,924,611</b>	<b>100</b>	<b>1,507</b>	<b>566,745,006,246</b>	<b>95</b>	<b>100</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	1	1	715,948,280	715,948,280	100	425	693,490,425	97	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1	1	24,058,967,430	24,058,967,430	100	125	20,687,296,717	86	95
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	1	1,059,177,800	1,059,177,800	100	105	1,053,859,600	99	71
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	1	1	500,000,000	500,000,000	100	0	429,873,766	86	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	1	1	237,218,000	237,218,000	100	100	235,050,919	99	100
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1	1	1,874,913,540	1,874,913,540	100	105	1,749,096,417	93	100
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1	1	30,654,347,524	30,654,347,524	100	119	28,870,523,665	94	94
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1	1	5,013,503,316	5,013,503,316	100	139	4,732,924,430	94	93
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1	1	684,060,000	684,060,000	100	226	463,075,620	68	55
	Penyediaan alat tulis kantor	1	1	3,853,472,633	3,853,472,633	100	109	3,809,264,479	99	101
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1	1	7,011,234,171	7,011,234,171	100	100	6,705,363,643	96	92
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	1	2,665,604,279	2,665,604,279	100	110	2,336,203,835	88	86
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1	1	2,138,719,458	2,138,719,458	100	107	1,938,736,363	91	97
	Penyediaan peralatan rumah tangga	1	1	841,713,980	841,713,980	100	98	788,754,558	94	91
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	1	2,585,616,924	2,585,616,924	100	257	2,040,868,816	79	100
	Penyediaan bahan logistik kantor	1	1	908,984,523	908,984,523	100	67	814,107,965	90	100
	Penyediaan makanan dan minuman rapat	1	1	14,096,473,510	14,096,473,510	100	95	13,441,808,904	95	95
	Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	1	17,092,324,652	17,092,324,652	100	177	16,123,334,028	94	99
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	1	1	68,337,139,218	68,337,139,218	100	209	63,518,924,511	93	77
	Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1	1	7,061,306,010	7,061,306,010	100	148	6,836,645,556	97	101
	Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Kantor	1	1	180,000,000	180,000,000	100	100	179,173,000	100	100
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Rumah Jabatan	1	1	188,364,000	188,364,000	100	86	188,364,000	100	100
	Penyediaan Jasa Tenaga Ahli	1	1	3,157,703,336	3,157,703,336	100	184	2,654,439,700	84	100
	Penyediaan Jasa Publikasi-	1	1	683,496,720	683,496,720	100	132	617,244,800	90	83
	Pameran dan Promosi Pembangunan	1	1	1,697,211,375	1,697,211,375	100	175	1,549,286,569	91	93
	Penyediaan bahan publikasi dan promosi	1	1	40,000,000	40,000,000	100	100	33,200,000	83	100
	Penyediaan Sewa Tempat/Gedung	1	1	1,767,800,000	1,767,800,000	100	200	1,766,071,530	100	100
	Penataan dan Pengelolaan Gaji Pegawai	1	1	600,000,000	600,000,000	100	0	552,930,850	92	100
	Operasional Pelelangan	1	1	323,133,577	323,133,577	100	100	323,133,577	100	75
	Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD	1	1	396,965,297,409	396,965,297,409	100	368,01	379,432,162,403	96	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp.	%	%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Informasi Teknologi	1	1	53,060,000	53,060,000	100	100	53,060,000	100	100
	Proses pengurusan administrasi kepegawaian	1	1	109,885,483	109,885,483	100	100	103,479,800	94	100
	Pemeliharaan taman kantor	1	1	15,000,000	15,000,000	100	100	15,000,000	100	83
	Pendataan dan penataan dokumen/arsip	1	1	304,258,720	304,258,720	100	470	288,850,400	95	100
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dewan	1	1	252,500,000	252,500,000	100	109	75,374,200	30	100
	Penatausahaan Aset Daerah	1	1	765,201,513	765,201,513	100	109	651,379,896	85	96
	Penyediaan Bahan Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan	1	1	21,392,000	21,392,000	100	100	21,392,000	100	100
	Penataan Asset Pemda Provinsi Lampung	1	1	40,000,000	40,000,000	100	100	39,999,998	100	100
	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi	1	1	319,905,000	319,905,000	100	286	315,328,530	99	65
	Penatausahaan barang milik daerah	1	1	109,121,600	109,121,600	100	1	84,251,600	77	100
	Penatausahaan Asset SKPD	1	1	41,176,450	41,176,450	100	200	41,176,450	100	75
	Penyediaan biaya publikasi	1	1	270,000,000	270,000,000	100	100	236,056,876	87	100
	Penyimpanan dan Pengelolaan Barang	1	1	241,752,180	241,752,180	100	0	240,687,150	100	100
	Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara	1	1	13,940,000	13,940,000	100	100	13,758,700	99	100
<b>239</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>102,076,385,787</b>	<b>102,076,385,787</b>	<b>100</b>	<b>165</b>	<b>82,539,090,824</b>	<b>81</b>	<b>97</b>
	Pembangunan gedung kantor	1	1	3,722,301,300	3,722,301,300	100	100	2,935,674,000	79	100
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1	1	967,224,347	967,224,347	100	100	936,361,798	97	100
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	1	1	10,202,500	10,202,500	100	25	10,202,500	100	100
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1	1	4,118,086,980	4,118,086,980	100	246	3,939,939,351	96	97
	Pengadaan peralatan gedung kantor	1	1	22,704,901,750	22,704,901,750	100	209	16,019,244,758	71	101
	Pengadaan mebeleur	1	1	1,371,231,505	1,371,231,505	100	125	1,348,207,325	98	100
	Pengadaan komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	1	1	7,991,183,850	7,991,183,850	100	100	973,529,200	12	100
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	1	1	1,550,181,118	1,550,181,118	100	533	1,513,461,300	98	100
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	1	15,095,407,000	15,095,407,000	100	137	14,175,679,717	94	104
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	1	1	2,518,072,000	2,518,072,000	100	2,45	2,443,016,140	97	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1	1	17,434,817,505	17,434,817,505	100	150	16,220,462,466	93	100
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	1	1	725,000,000	725,000,000	100	0	723,640,000	100	100
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1	1	1,135,069,150	1,135,069,150	100	109	1,082,136,926	95	102
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	1	1	1,220,000,000	1,220,000,000	100	0	1,217,239,000	100	100
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1	1	5,179,479,515	5,179,479,515	100	161	4,577,700,150	88	93
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1	1	37,000,000	37,000,000	100	0	37,000,000	100	89
	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	1	1	818,286,250	818,286,250	100	100	815,718,250	100	100
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1	1	3,697,241,100	3,697,241,100	100	88	3,504,109,447	95	78
	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	1	1	750,000,000	750,000,000	100	0	748,093,131	100	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Aset Ex Gedung Kantor SKPD	1	1	820,285,897	820,285,897	100	100	814,755,205	99	100
	Peningkatan, perbaikan, pemeliharaan dan pembuatan Sarana OlahRaga serta perbaikan Rumah Adat	1	1	918,000,000	918,000,000	100	100	896,855,000	98	100
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan elektronik	1	1	69,980,000	69,980,000	100	689	69,930,000	100	100
	Penyempurnaan sarana pelayanan kantor	1	1	7,451,470,324	7,451,470,324	100	100	5,772,522,600	77	100
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan perpustakaan	1	1	356,799,896	356,799,896	100	133	354,853,660	99	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat rumah Tangga	1	1	568,900,000	568,900,000	100	133	566,020,700	99	100
	Peningkatan Pelayanan UPTD	1	1	35,809,000	35,809,000	100	100	35,383,400	99	100
	Peningkatan Pelayanan Publikasi Sarana dan Prasarana Olahraga pada UPTD Pengelolaan Gedung Olahraga	1	1	112,254,800	112,254,800	100	100	112,254,800	100	100
	Operasional Rumah Tangga Jabatan/Dinas Ketua DPRD	1	1	697,200,000	697,200,000	100	133	695,100,000	100	100
<b>240</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5,435,844,000</b>	<b>5,435,844,000</b>	<b>100</b>	<b>164</b>	<b>4,357,615,500</b>	<b>80</b>	<b>100</b>
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1	1	4,228,650,000	4,228,650,000	100	406	3,154,020,000	75	100
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	1	1	1,168,696,000	1,168,696,000	100	110	1,166,967,500	100	100



No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp.	%	%
	Pembinaan mental aparatur	1	1	6,998,000	6,998,000	100	0	6,928,000	99	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	1	1	31,500,000	31,500,000	100	0	29,700,000	94	100
<b>241</b>	<b>Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>67,920,000</b>	<b>67,920,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>67,764,850</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Pengurusan PNS yang mencapai batas usia pensiun	1	1	67,920,000	67,920,000	100	100	67,764,850	100	100
<b>242</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>8,918,426,281</b>	<b>8,918,426,281</b>	<b>100</b>	<b>107</b>	<b>8,056,652,540</b>	<b>90</b>	<b>88</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1	1	180,351,200	180,351,200	100	0	131,366,640	73	87
	Pembinaan Pegawai	1	1	971,924,840	971,924,840	100	100	903,242,640	93	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Program	1	1	308,305,801	308,305,801	100	75	305,972,890	99	133
	Pendidikan dan Pelatihan Kursus Singkat	1	1	174,832,000	174,832,000	100	119	64,397,500	37	100
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pegawai/Aparatur	1	1	3,364,349,410	3,364,349,410	100	102	3,345,851,211	99	79
	Analisa Jabatan (ANJAB) SKPD	1	1	43,144,000	43,144,000	100	23	19,527,500	45	61
	Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Pegawai	1	1	162,287,276	162,287,276	100	300	135,440,000	83	67
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1	1	81,218,782	81,218,782	100	100	81,058,800	100	100
	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	1	1	177,649,000	177,649,000	100	368	116,043,446	65	63
	Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja	1	1	386,248,000	386,248,000	100	60	386,668,745	100	100
	Penyusunan Sistem Informasi Kepegawaian dan Mutasi Kenaikan Pangkat	1	1	10,470,000	10,470,000	100	100	10,044,120	96	100
	Koordinasi dan pengawasan evaluasi dan pelaporan (PEP) Efek Gas Rumah Kaca disektor Industri	1	1	77,471,841	77,471,841	100	100	63,178,441	82	100
	Penyusunan dan Updating Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	104,420,000	104,420,000	100	23	96,939,200	93	100
	Pembinaan administrasi kepegawaian dan kegiatan kehumasan	1	1	406,287,000	406,287,000	100	100	372,232,719	92	100
	Rapat Koordinasi Perencanaan Terpadu dan Rapat Koordinasi Intern	1	1	150,000,000	150,000,000	100	100	136,838,086	91	100
	Penyediaan Sarana Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	41,200,000	41,200,000	100	1,2	21,350,960	52	75
	Peningkatan dan Pengembangan SDM PNS	1	1	30,000,000	30,000,000	100	400	18,550,000	62	25
	Laporan Pemahaman dan Penerapan Nilai-nilai Budaya Kerja	1	1	8,766,000	8,766,000	100	100	4,047,000	46	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Pembinaan Mental Spiritual, Seni, Budaya dan Olah Raga	1	1	782,091,820	782,091,820	100	133	765,931,820	98	100
	Dikla Formal dan Bimtek PNS	1	1	54,610,800	54,610,800	100	100	54,610,800	100	100
	Pemetaan Formasi Jabatan	1	1	8,766,000	8,766,000	100	100	4,045,000	46	100
	Pendidikan dan pelatihan PPNS	1	1	96,000,000	96,000,000	100	100	64,499,079	67	100
	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri di Propinsi Lampung	1	1	144,979,906	144,979,906	100	100	102,166,326	70	100
	Pelatihan/Kursus Singkat/Diklat Persandian	1	1	20,000,000	20,000,000	100	0	7,568,000	38	25
	Penyusunan Renstra	1	1	71,626,000	71,626,000	100	100	71,545,400	100	100
	Rapat koordinasi Pol PP	1	1	34,000,000	34,000,000	100	100	34,000,000	100	100
	Pengelolaan administrasi kepegawaian	1	1	25,969,700	25,969,700	100	100	25,835,150	99	100
	Peningkatan jasmani dan rohani aparatur	1	1	50,000,000	50,000,000	100	100	49,587,000	99	100
	Biaya kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1	1	34,000,000	34,000,000	100	100	11,812,962	35	100
	Pra renstra	1	1	51,260,000	51,260,000	100	100	15,051,000	29	100
	Pelatihan dan pendidikan teknis/fungsional	1	1	26,907,000	26,907,000	100	100	10,719,000	40	100
	Pembinaan rohani sumberdaya aparatur	1	1	48,305,000	48,305,000	100	0	37,022,500	77	100
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1	1	516,800,000	516,800,000	100	84	363,528,800	70	79
	Rakor Sinkronisasi Program/Kegiatan dibidang Kominfo	1	1	185,348,905	185,348,905	100	0	184,767,905	100	80
	Analisa Beban Kerja (ABK)	1	1	18,836,000	18,836,000	100	2	16,212,800	86	100
	Peningkatan kompetensi stakeholder bidang Perumahan dan Pertanahan	1	1	70,000,000	70,000,000	100	1	24,999,100	36	36
<b>243</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>1</b>	<b>47</b>	<b>53,668,726,060</b>	<b>53,668,726,060</b>	<b>100</b>	<b>263</b>	<b>51,278,899,404</b>	<b>96</b>	<b>97</b>
	Penyusunan laporan Keuangan	1	1	552,187,956	552,187,956	100	141	508,961,831	92	86
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	1	1	29,534,000	29,534,000	100	114	29,529,800	100	100
	Penyusunan Laporan Bulanan	1	1	34,632,000	34,632,000	100	100	27,246,250	79	87
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1	1	637,904,150	637,904,150	100	171	621,636,929	97	96
	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1	1	26,150,000	26,150,000	100	100	26,054,750	100	100
	Penyusunan Renstra -	1	1	468,546,255	468,546,255	100	125	434,073,202	93	94
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD-	1	1	1,309,511,915	1,309,511,915	100	261	1,249,734,190	95	98
	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD-	1	1	695,745,293	695,745,293	100	153	676,813,882	97	85

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	199,373,325	199,373,325	100	133	198,797,062	100	100
	Penyusunan Program Kegiatan	1	1	815,305,402	815,305,402	100	45	786,415,787	96	211
	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ( RKT )	1	1	30,250,000	30,250,000	100	100	30,149,600	100	100
	Monitoring dan evaluasi program dam pelaksanaan kegiatan	1	1	63,562,880	63,562,880	100	100	35,385,800	56	100
	Penyusunan data kepegawaian	1	1	46,414,200	46,414,200	100	400	46,102,000	99	100
	Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah	1	1	461,510,000	461,510,000	100	0	460,756,100	100	100
	Penatausahaan BMD	1	1	182,885,000	182,885,000	100	0	179,932,300	98	100
	Penyusunan LAKIP dan LPDD	1	1	272,034,638	272,034,638	100	100	271,053,438	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	1	676,009,075	676,009,075	100	129	632,351,050	94	100
	Penyusunan data dan informasi	1	1	25,000,000	25,000,000	100	100	19,620,000	78	100
	Penyusunan Laporan Realisasi Aset	1	1	4,000,000	4,000,000	100	600	4,000,000	100	17
	Rekonsiliasi Realisasi Data Pendapatan Daerah	1	1	165,137,000	165,137,000	100	100	157,609,200	95	100
	Evaluasi Renstra SKPD 2010 - 2014	1	1	17,730,000	17,730,000	100	100	16,671,800	94	100
	Penyusunan Laporan SPJ Fungsional	1	1	289,164,600	289,164,600	100	133	289,161,063	100	100
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1	1	31,150,000	31,150,000	100	100	31,008,500	100	100
	Penyusunan KUA PPAS dan Program/Kegiatan	1	1	20,130,000	20,130,000	100	100	18,969,000	94	100
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	1	1	17,400,000	17,400,000	100	100	17,399,500	100	33
	Peningkatan Kinerja Sistem Perbendaharaan APBD Satker	1	1	40,000,000	40,000,000	100	100	39,103,000	98	100
	Peningkatan Penerimaan Retribusi dan Dokumen Tindak Lanjut LHP	1	1	133,000,000	133,000,000	100	100	126,091,400	95	100
	Penyusunan pelaporan dan pembinaan keuangan	1	1	37,500,000	37,500,000	100	100	37,500,000	100	100
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	1	1	36,999,974	36,999,974	100	173	36,981,974	100	100
	Penyusunan Rencana Program & Evaluasi Kegiatan (Biro Adbang)	1	1	99,280,000	99,280,000	100	0	60,716,734	61	125
	Pelaporan Belanja Daerah APBD Provinsi Lampung (Biro Adbang)	1	1	280,000,000	280,000,000	100	0	239,877,700	86	100
	Pengembangan system informasi database pelaporan pelaksanaan pembangunan (Biro Adbang)	1	1	142,000,000	142,000,000	100	0	146,794,600	103	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Penyusunan Program Kegiatan, Evaluasi, dan Laporan Akhir Tahun Anggaran	1	1	172,749,000	172,749,000	100	0	163,555,000	95	100
	Peningkatan Data dan Informasi	1	1	11,868,000	11,868,000	100	100	11,868,000	100	100
	Penyusunan LAKIP, RKT, LPPD dan Laporan Keuangan	1	1	50,024,000	50,024,000	100	100	46,824,000	94	100
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja	1	1	142,120,000	142,120,000	100	100	139,586,760	98	100
	Pengolahan data dan evaluasi data	1	1	57,600,000	57,600,000	100	0	56,378,626	98	100
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	1	12,470,950	12,470,950	100	0	12,394,074	99	100
	Penyusunan Harga Dasar Upah, Bahan dan Alat Bidang Kebinamargaan Provinsi Lampung	1	1	114,406,000	114,406,000	100	0	103,360,000	90	100
	Penyusunan PPAS dan RKA	1	1	5,936,000	5,936,000	100	0	5,936,000	100	100
	Pembayaran Retensi	1	1	44,070,074,600	44,070,074,600	100	2,6	42,157,844,555	96	99
	Penyusunan Program dan Anggaran	1	1	127,920,500	127,920,500	100	0	121,320,500	95	100
	Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK	1	1	370,615,000	370,615,000	100	0	344,801,200	93	100
	Penyusunan Data Statistik dan Buku Saku Perkebunan dan Peternakan	1	1	75,026,000	75,026,000	100	100	49,771,000	66	100
	Monev dan sinkronisasi program	1	1	43,500,000	43,500,000	100	0	41,533,200	95	100
	Peningkatan pelayanan administrasi perencanaan barang milik daerah	1	1	540,253,347	540,253,347	100	100	533,249,347	99	100
	Penyusunan perjanjian kerja	1	1	34,115,000	34,115,000	100	100	33,978,700	100	100
<b>244</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>3,803,273,500</b>	<b>3,803,273,500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3,091,953,765</b>	<b>81</b>	<b>100</b>
	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	1	1	42,190,000	42,190,000	100	100	41,977,200	99	100
	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan	1	1	67,890,000	67,890,000	100	100	59,165,344	87	100
	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	1	1	141,345,150	141,345,150	100	100	140,936,309	100	100
	Penataan Sistem Administrasi kenaikan pangkat PNS	1	1	82,756,000	82,756,000	100	100	78,967,500	95	100
	Penyajian Informasi Kepegawaian	1	1	78,160,700	78,160,700	100	100	77,771,450	100	100
	Penataan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai	1	1	92,450,000	92,450,000	100	100	90,903,150	98	100
	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	1	1	205,000,000	205,000,000	100	100	192,914,348	94	100
	Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Praja IPDN	1	1	136,661,800	136,661,800	100	100	135,660,586	99	100
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1	1	67,390,000	67,390,000	100	100	66,003,150	98	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)	1	1	51,720,000	51,720,000	100	100	51,692,000	100	100
	Sistem Aplikasi Informasi & Manajemen Kepegawaian terpadu Se - Provinsi Lampung	1	1	38,220,000	38,220,000	100	100	38,147,600	100	100
	Kenaikan Gaji Berkala Otomatis	1	1	9,900,000	9,900,000	100	100	9,900,000	100	100
	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	1	1	328,084,000	328,084,000	100	100	175,041,000	53	100
	Penataan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi	1	1	2,221,626,850	2,221,626,850	100	100	1,701,124,484	77	100
	Penataan PNS dalam jabatan Fungsional	1	1	239,879,000	239,879,000	100	100	231,749,644	97	100
245	<b>Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>2,779,539,872</b>	<b>2,779,539,872</b>	<b>100</b>	<b>296</b>	<b>2,588,027,615</b>	<b>93</b>	<b>943</b>
	Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Provinsi	1	1	326,848,000	326,848,000	100	67	326,764,910	100	100
	Penyusunan RKPD	1	1	129,456,000	129,456,000	100	0	127,933,933	99	100
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan	1	1	201,056,292	201,056,292	100	113	199,493,905	99	89
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung	1	1	140,447,000	140,447,000	100	60	136,149,500	97	100
	Informasi Perencanaan Pembangunan Terpadu (IPPT)	1	1	163,539,000	163,539,000	100	0	163,140,000	100	100
	Penyusunan dan Penetapan Program dan Kegiatan Bandiklatda Provinsi Lampung	1	1	149,304,645	149,304,645	100	100	149,186,835	100	100
	Penyelenggaraan Musrenbang SKPD	1	1	263,318,113	263,318,113	100	133	246,129,870	93	100
	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Perencanaan Online	1	1	175,932,000	175,932,000	100	0	158,883,200	90	100
	Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran (KUA/PPAS dan RKA APBD-P)	1	1	408,741,000	408,741,000	100	129	342,246,250	84	89
	Penyusunan Dokumen Perencanaan BALITBANGNOVDA Provinsi Lampung	1	1	153,499,583	153,499,583	100	100	153,379,073	100	100
	Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota	1	1	90,064,000	90,064,000	100	100	81,152,700	90	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1	1	264,755,439	264,755,439	100	317	191,199,104	72	84
	Updating dan pengembangan sistem informasi elektronik/website	1	1	130,000,000	130,000,000	100	300	129,800,000	100	951
	Penyelenggaraan sosialisasi dokumen perencanaan	1	1	103,352,000	103,352,000	100	100	103,352,000	100	100
	Penyusunan peta potensi investasi	1	1	79,226,800	79,226,800	100	0	79,216,335	100	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp.	%	%
246	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan</b>	1	3	310,582,370	310,582,370	100	101	284,315,510	92	8
	Koordinasi Penanggulangan Bencana Se Provinsi Lampung	1	1	81,499,220	81,499,220	100	100	69,636,960	85	100
	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Aparat terhadap Penanggulangan Bencana	1	1	106,989,750	106,989,750	100	100	99,114,150	93	0
	Sosialisasi dan Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1	1	122,093,400	122,093,400	100	125	115,564,400	95	100
247	<b>Program Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah</b>	1	1	220,200,000	220,200,000	100	0	219,232,100	100	100
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Jaringan Sistem Pelayanan Keuangan	1	1	220,200,000	220,200,000	100	0	219,232,100	100	100
248	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>	1	11	8,157,737,656	8,157,737,656	100	122	8,112,359,196	99	100
	Fasilitasi Kunjungan Kerja DPR dan DPD RI ke Provinsi Lampung	1	1	108,376,000	108,376,000	100	100	100,054,247	92	100
	Fasilitasi Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	1	390,410,500	390,410,500	100	100	389,152,045	100	100
	Koordinasi/Fasilitasi Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1	1	1,075,000,000	1,075,000,000	100	0	1,074,356,000	100	100
	Dialog/Audensi dengan Tokoh-Tokoh, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	1	1	2,150,000,000	2,150,000,000	100	0	2,149,351,000	100	100
	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	1	1	2,075,000,000	2,075,000,000	100	0	2,072,935,008	100	100
	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	1	1	600,956,742	600,956,742	100	100	600,898,958	100	100
	Fasilitasi hubungan daerah dengan negara sahabat dan lembaga internasional	1	1	119,146,332	119,146,332	100	100	118,642,732	100	100
	Pelayanan informasi	1	1	493,803,082	493,803,082	100	100	493,503,000	100	100
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	1	220,095,000	220,095,000	100	100	219,182,250	100	100
	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah	1	1	80,000,000	80,000,000	100	100	50,545,150	63	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Pelaksanaan Acara Kunjungan Kerja Pimpinan didalam maupun diluar Provinsi Lampung	1	1	844,950,000	844,950,000	100	100	843,738,806	100	100
<b>249</b>	<b>Program pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>21,431,116,863</b>	<b>21,431,116,863</b>	<b>100</b>	<b>130</b>	<b>21,330,713,815</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Pengumpulan Data dan Penyusunan, Perubahan RKA	1	1	489,640,000	489,640,000	100	0	489,068,800	100	100
	Pengelolaan dan Pelayanan Operasional TU Pimpinan	1	1	399,660,636	399,660,636	100	100	394,023,000	99	100
	Peningkatan Penatausahaan Bagian TU Keuangan	1	1	616,650,000	616,650,000	100	0	616,472,810	100	100
	Pengelolaan Administrasi Peringatan Hari Besar Nasional dan Kunjungan Kerja Pejabat Negara	1	1	1,158,258,300	1,158,258,300	100	0	1,137,158,250	98	100
	Pengelolaan Administrasi Tata Naskah Dinas Bidang Kearsipan Ketata Usahaan	1	1	441,099,950	441,099,950	100	0	439,979,250	100	100
	Operasional Pelayanan Pemerintahan Daerah	1	1	3,795,000,000	3,795,000,000	100	0	3,791,704,555	100	100
	Pengelolaan dan Pemenuhan Urusan Dalam Pimpinan	1	1	115,520,058	115,520,058	100	100	115,515,000	100	100
	Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pimpinan	1	1	104,680,000	104,680,000	100	100	104,437,900	100	100
	Peningkatan Administrasi Penatausahaan TU Pimpinan	1	1	144,466,042	144,466,042	100	100	142,304,000	99	100
	Operasional dan Pelayanan Keprotokolan	1	1	161,115,500	161,115,500	100	137	152,496,250	95	100
	Peningkatan dan Penataan Administrasi Kepegawaian	1	1	336,776,650	336,776,650	100	0	336,775,550	100	100
	Fasilitasi aspirasi masyarakat	1	1	776,911,800	776,911,800	100	133	774,711,000	100	100
	Peliputan Kegiatan Pimpinan dan Anggota	1	1	4,986,857,302	4,986,857,302	100	133	4,967,197,209	100	100
	Publikasi Hasil Kegiatan DPRD Provinsi Lampung melalui media luar ruangan	1	1	5,356,502,800	5,356,502,800	100	133	5,355,747,850	100	100
	Penyusunan Sambutan	1	1	6,953,125	6,953,125	100	100	6,169,225	89	100
	BAKOHUMAS	1	1	80,499,900	80,499,900	100	100	80,399,900	100	100
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan	1	1	1,144,717,755	1,144,717,755	100	100	1,136,260,652	99	100
	Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Kerja Tamu/Pejabat Negara	1	1	368,177,000	368,177,000	100	100	367,578,800	100	100
	Peningkatan dan Penataan Administrasi Keuangan dan Kepegawaian	1	1	367,630,045	367,630,045	100	100	348,500,682	95	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp	%	%
	Studi Pembelajaran Peningkatan Kapasitas Peran dan Fungsi Staf Ahli Gubernur Lampung di Luar Provinsi Lampung	1	1	350,000,000	350,000,000	100	0	349,957,048	100	100
	Monitoring Prioritas Program Kerja SKPD	1	1	230,000,000	230,000,000	100	0	224,256,084	98	100
250	<b>Program Ketatalaksanaan</b>	1	5	<b>2,210,338,000</b>	<b>2,210,338,000</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>2,167,268,334</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
	Pembinaan Peraturan Bidang Ketatalaksanaan di lingkungan pemerintah provinsi lampung (termasuk kab/kota)	1	1	41,052,000	41,052,000	100	100	40,727,544	99	100
	Penyusunan dan Pemetaan SOP di Lingkungan provinsi dan pembinaaankab/kota	1	1	109,907,000	109,907,000	100	100	108,779,205	99	100
	Peningkatan kualitas pelayanan public pada pemerintah provinsi lampung dan kab/kota se provinsi lampung	1	1	139,628,000	139,628,000	100	100	131,786,983	94	100
	Penyebaran Informasi KPID	1	1	1,782,455,000	1,782,455,000	100	0	1,751,861,132	98	100
	Tatalaksana Administrasi Bagian Tata Usaha Staf Ahli	1	1	137,296,000	137,296,000	100	0	134,113,470	98	100
251	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur</b>	1	4	<b>289,704,000</b>	<b>289,704,000</b>	<b>100</b>	<b>138</b>	<b>287,175,119</b>	<b>99</b>	<b>66</b>
	Pemberdayaan pengembangan dan pengelolaan kepegawaian dan perpustakaan di lingkungan secretariat daerah provinsi lampung	1	1	67,984,000	67,984,000	100	100	66,888,231	98	100
	Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Penyusunan Evaluasi Jabatan pada di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	1	1	167,510,000	167,510,000	100	100	166,970,305	100	100
	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	1	1	54,210,000	54,210,000	100	233	53,316,583	98	31
252	<b>Program Penataan, Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan</b>	1	3	<b>935,792,830</b>	<b>935,792,830</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>933,700,950</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Dukungan operasional Komisi Penyuluhan dan Kajiannya	1	1	49,999,990	49,999,990	100	100	49,606,200	99	100
	Peningkatan kapasitas pendamping dalam penyusunan RDK/RDKK	1	1	99,999,940	99,999,940	100	100	98,301,850	98	100
	Percepatan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan	1	1	785,792,900	785,792,900	100	100	785,792,900	100	100
253	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1	3	<b>615,268,000</b>	<b>615,268,000</b>	<b>100</b>	<b>220</b>	<b>610,928,800</b>	<b>99</b>	<b>100</b>



No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp.	%	%
	Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan dan Ketatausahaan Biro Tapum	1	1	263,699,000	263,699,000	100	100	260,687,800	99	100
	Penyusunan Laporan Perencanaan Biro Tapum	1	1	64,609,000	64,609,000	100	100	63,281,000	98	100
	Pengolahan Administrasi Sistem Informasi Penyelenggaraan Keuangan Daerah dan Ketatausahaan Bior Adbang	1	1	286,960,000	286,960,000	100	0	286,960,000	100	100
254	<b>Program Peningkatan Layanan Pengadaan</b>	1	2	<b>2,882,780,390</b>	<b>2,882,780,390</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>2,279,340,642</b>	<b>79</b>	<b>100</b>
	Layanan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	2,567,715,640	2,567,715,640	100	0	2,006,481,526	78	100
	Pembinaan Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	315,064,750	315,064,750	100	0	272,859,116	87	100
255	<b>Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Database dan Pelaporan Barang/Jasa</b>	1	3	<b>717,598,904</b>	<b>717,598,904</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>665,019,704</b>	<b>93</b>	<b>100</b>
	Penyusunan Database Penyedia Barang/Jasa	1	1	369,998,904	369,998,904	100	0	369,149,204	100	100
	Penanganan Sanggah Pengadaan Barang/Jasa	1	1	300,000,000	300,000,000	100	0	248,283,000	83	100
	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Penyelesaian Sanggah	1	1	47,600,000	47,600,000	100	0	47,587,500	100	100
256	<b>Program Pembinaan Idiologi dan pengembangan wawasan kebangsaan</b>	1	3	<b>967,310,800</b>	<b>967,310,800</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>933,565,810</b>	<b>97</b>	<b>100</b>
	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung	1	1	223,600,000	223,600,000	100	0	203,888,910	91	100
	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Lampung	1	1	175,700,000	175,700,000	100	0	168,430,000	96	100
	Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Provinsi Lampung	1	1	568,010,800	568,010,800	100	0	561,246,900	99	100
257	<b>Program Penanganan Konflik</b>	1	4	<b>758,910,000</b>	<b>758,910,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>670,052,656</b>	<b>88</b>	<b>100</b>
	Fasilitasi FKDM Provinsi Lampung	1	1	147,610,000	147,610,000	100	0	144,624,056	98	100
	Deteksi Dini, Cegah Dini dan Penanganan Konflik	1	1	300,000,000	300,000,000	100	0	284,072,600	95	100
	Fasilitasi Fuldasis Provinsi Lampung	1	1	211,300,000	211,300,000	100	0	165,800,000	78	100
	Dialog Penanganan WNA dan Ormas Asing serta Pencari Suaka	1	1	100,000,000	100,000,000	100	0	75,556,000	76	100

No	Program Lintas Sektor	Jumlah		Pagu (Rp)	Target s/d Bulan 12			Realisasi s/d Bulan 12		
		Prog	Keg		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%	Rp.	%	%
258	<b>Program Pengendalian Stabilitas Daerah</b>	1	2	652,923,600	652,923,600	100	0	535,372,000	82	93
	Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah dengan Intelkam dan Forum/Elemen Masyarakat bidang Kesatuan Bangsa Se-Provinsi Lampung	1	1	68,923,600	68,923,600	100	0	59,370,800	86	100
	Monitoring dan Pengendalian Stabilitas Daerah	1	1	584,000,000	584,000,000	100	0	476,001,200	82	91
259	<b>Program Pendidikan Politik Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga</b>	1	6	781,413,000	781,413,000	100	0	720,708,437	92	65
	Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah	1	1	421,854,000	421,854,000	100	0	409,159,450	97	100
	Pemeriksaan Berkas Persyaratan, Pemutakhiran Data, Peninjauan Lokasi dan Monitoring Kelembagaan Masyarakat Tingkat Provinsi Lampung	1	1	164,300,000	164,300,000	100	0	121,019,037	74	100
	Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Lampung	1	1	50,309,000	50,309,000	100	0	48,221,000	96	100
	Pokja Penelitian dan Pemeriksaan Berkas Persyaratan PAW Kab/Kota se-Provinsi Lampung	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Parpol Provinsi Lampung	1	1	51,460,000	51,460,000	100	0	51,460,000	100	100
	Sosialisasi Undang Undang Pemilu dan Pemilukada	1	1	93,490,000	93,490,000	100	0	90,848,950	97	100

Sumber: Simonev Lampung, 2019

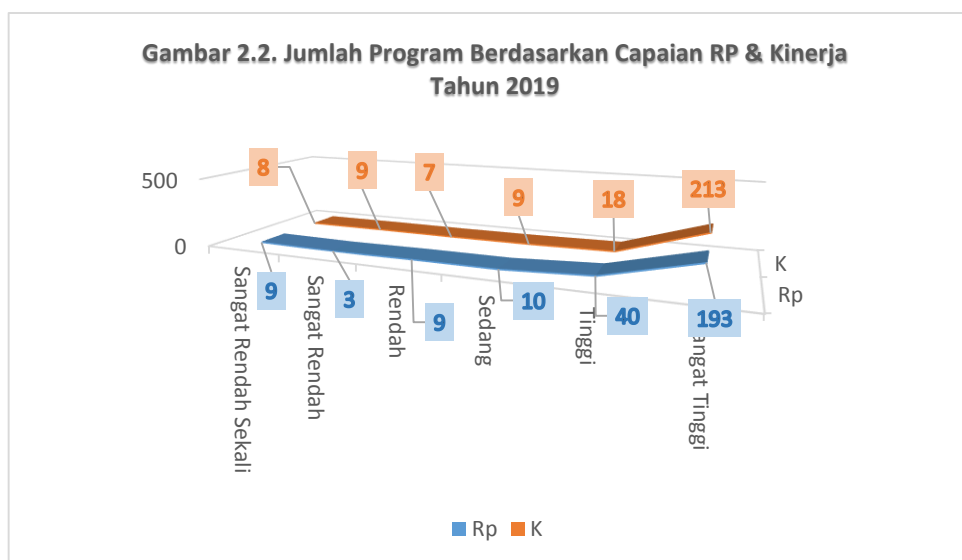
Dari Total 259 Program dan 1.297 Kegiatan yang telah melaksanakan Evaluasi Renja sampai dengan TW 4 Tahun 2019, maka didapat klasifikasi penyerapan kinerja/output Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel II-59  
Tingkat Ketercapaian Keuangan (Rp) dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019

Kriteria	Jumlah Prog dan Keg		KET
	Rp	K	
Sangat Rendah Sekali	79	85	0-25%
Sangat Rendah	63	38	26-50%
Rendah	39	19	51-65%
Sedang	45	36	66-75%
Tinggi	203	71	76-90%
Sangat Tinggi	1160	1331	91-100%
Sangat Tinggi Sekali	0	0	>100%
<b>Jumlah</b>	<b>1580</b>	<b>1580</b>	

Sumber: Simonev Lampung, 2019 data diolah

Grafik II-53  
Jumlah Program Berdasarkan Capaian keuangan dan Kinerja Tahun 2019



Sumber: Simonev Lampung, 2019 diolah

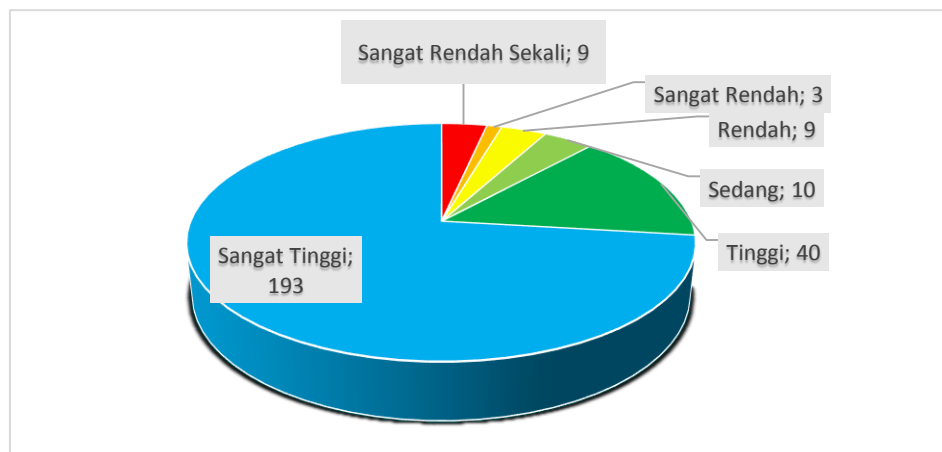
Berdasarkan Tabel II-64, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian kinerja keuangan (Rp) bagi 264 Program dan 1.316 Kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renja/RKPD 2019, adalah

88,67% sesuai dengan data yang sudah terinput dalam aplikasi Simonev dengan klasifikasi sebagai berikut:

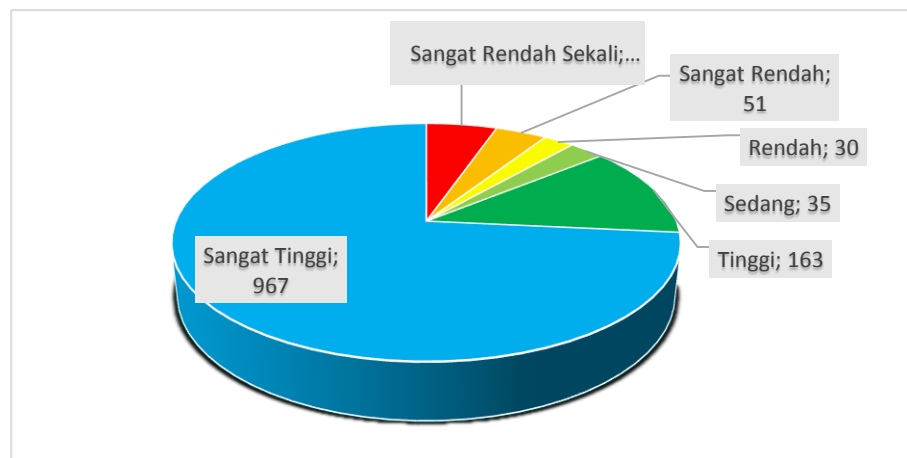
- a. Serapan dengan kategori “sangat rendah sekali” (0-25%) sejumlah 9 Program dan 70 Kegiatan
- b. Serapan dengan kategori “sangat rendah” (26-50%) sejumlah 3 Program dan 51 Kegiatan
- c. Serapan dengan kategori “rendah” (51-65%) sejumlah 9 Program dan 30 Kegiatan
- d. Serapan dengan kategori “sedang” (66-75%) sejumlah 10 Program dan 35 Kegiatan
- e. Serapan dengan kategori “tinggi” (76-90%) sejumlah 40 Program dan 163 Kegiatan
- f. Serapan dengan kategori “sangat Tinggi” (91-100%) sejumlah 193 Program dan 967 Kegiatan

Grafik II-54  
Persentase Program Berdasarkan Capaian Keuangan, Tahun 2019



Sumber: Simonev Lampung, 2019, data diolah

Grafik II-55  
 Prosentase Kegiatan Berdasarkan Capaian Rp. Tahun 2019

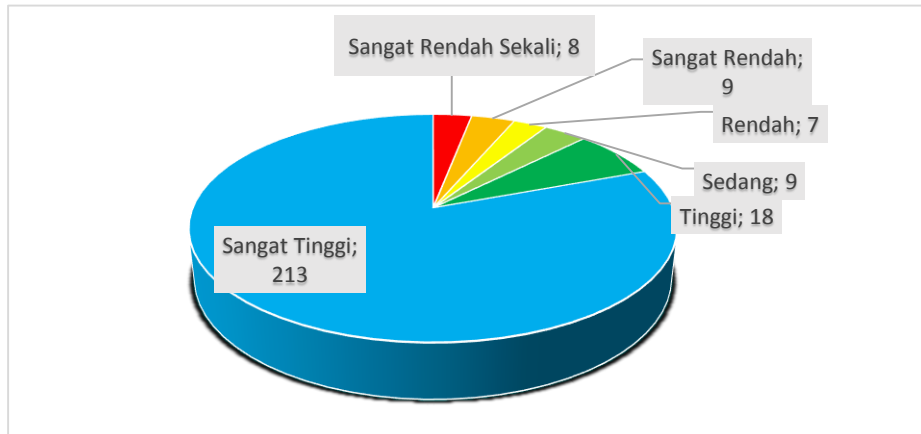


Sumber: Simonev Lampung, 2019, data diolah

2. Rata-rata capaian kinerja fisik (k) bagi 264 Program dan 1.316 Kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renja/RKPD 2019, adalah mencapai 91,89 dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. Serapan dengan kategori “sangat rendah sekali” (0-25%) sejumlah 8 Program dan 77 Kegiatan
  - b. Serapan dengan kategori “sangat rendah” (26-50%) sejumlah 9 Program dan 29 Kegiatan
  - c. Serapan dengan kategori “rendah” (51-65%) sejumlah 7 Program dan 12 Kegiatan
  - d. Serapan dengan kategori “sedang” (66-75%) sejumlah 9 Program dan 27 Kegiatan
  - e. Serapan dengan kategori “tinggi” (76-90%) sejumlah 18 Program dan 53 Kegiatan

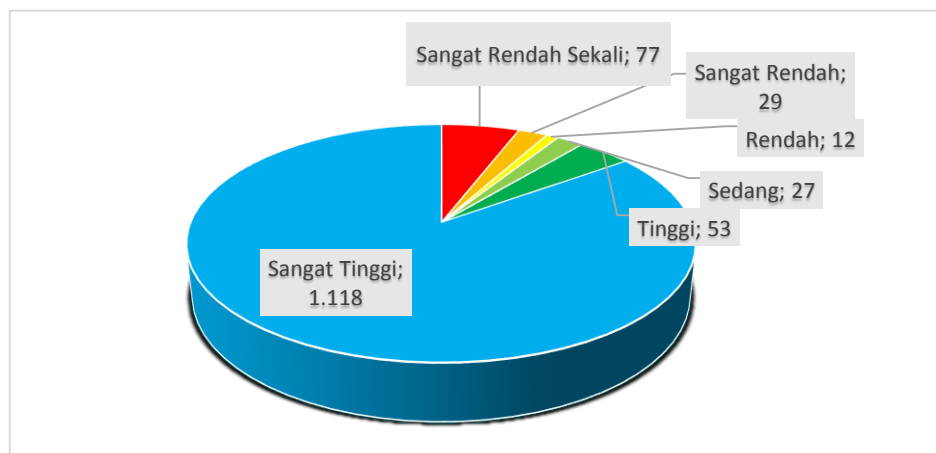
- f. Serapan dengan kategori “sangat Tinggi” (91-100%) sejumlah 213 Program dan 1.118 Kegiatan

Grafik II-56  
Persentase Program Berdasarkan Capaian Kinerja Tahun 2019



Sumber: Simonev Lampung, 2019, data diolah

Grafik II-57  
Persentase Kegiatan Berdasarkan Capaian Kinerja Tahun 2019



Sumber: Simonev Lampung, 2019 data diolah

2. Dengan membandingkan capaian keuangan maupun kinerja Program sebagaimana poin 1 dan 2 atau sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel II- dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
  - a. Terdapat beberapa program dan banyak kegiatan yang perlu diperhatikan terkait sangat rendahnya serapan baik rupiah maupun

kinerja, yakni dibawah 25% (kategori “sangat rendah sekali”). Ada 9 program dan 70 kegiatan yang serapan rupiahnya masuk kategori “sangat rendah sekali”, sementara untuk serapan kinerja yang masuk kategori “sangat rendah sekali” ada 8 program dan 77 kegiatan. Program yang serapan rupiahnya masuk kategori “sangat rendah sekali” yaitu :

- ❖ Program perbaikan gizi masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.801.066.800,- dan serapan anggaran Rp. 516.625.000,- (14%) sementara serapan kinerja 25%;
- ❖ Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,- dan serapan anggaran dan kinerja 0% (tidak terlaksana);
- ❖ Program pemberdayaan usaha koperasi dan UMKM, juga Program pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM, dengan serapan anggaran dan kinerja 0% (tidak terlaksana);
- ❖ Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.762.679.610,- dan serapan anggaran Rp.1.191.158.822,- (21%) sementara capaian kinerja 100%. Artinya hanya dengan anggaran Rp. 1.191.158.822,- sudah tercapai kinerja 100%. Disini terlihat adanya ketidakcermatan pada saat penetapan jumlah anggaran. Hal ini perlu menjadi perhatian pada saat menetapkan anggaran;
- ❖ Program perbaikan system administrasi dengan pagu anggaran Rp. 85.000.000,- dan serapan anggaran Rp. 11.933.750,- (14%) mampu mencapai kinerja 100%. Disini terlihat adanya ketidakcermatan pada saat penetapan jumlah anggaran. Hal ini perlu menjadi perhatian pada saat menetapkan anggaran;
- ❖ Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dengan pagu anggaran Rp. 6.063.153.762,- dan serapan anggaran Rp. 1.096.342.731,- (18%) dengan capaian kinerja 31%;
- ❖ Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- dan serapan anggaran Rp. 83.828.740,- (14%) mampu mencapai kinerja 100%;

artinya hanya dengan Rp. 83.828.740,- saja sudah mampu mencapai kinerja 100%. Disini terlihat adanya ketidakcermatan pada saat penetapan jumlah anggaran. Hal ini perlu menjadi perhatian pada saat menetapkan anggaran;

❖ Program pengembangan museum transmigrasi menjadi pusat layanan informasi, edukasi dan sejarah ketransmigrasian dengan pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- hanya terserap 19% dengan capaian kinerja 31%;

b. Prosentase serapan program dan kegiatan terbesar adalah berkategori “sangat tinggi” dengan kisaran antara 91 s.d 100% baik untuk keuangan (Rp) maupun Kinerja (k). Untuk rupiah berada pada angka 88,67 sedangkan kinerja berada pada angka 91,89, Ini menunjukkan bahwa tingkat serapan Program/Kegiatan di OPD Provinsi Lampung telah berjalan dengan baik namun masih perlu perhatian pada saat penetapan anggaran dan penginputan capaian dalam aplikasi.

Selanjutnya jika kita melihat sebaran capaian keuangan (Rp) dan Kinerja (k) pada 51 OPD dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel II-60

Realisasi Keuangan dan Kinerja APBD TA. 2019 Menurut OPD

NO	OPD	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja
1	Badan Kepegawaian Daerah	86,31	95,35
2	Badan Kesbangpol Setda	90,03	95,81
3	Badan Keuangan Daerah	60,05	76,50
4	Badan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	84,70	99,36
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	92,13	92,89
6	Badan Pendapatan Daerah	88,27	97,79
7	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	97,62	97,78
8	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	95,63	97,27
9	Badan Penghubung	98,72	97,87



<b>NO</b>	<b>OPD</b>	<b>Capaian Anggaran</b>	<b>Capaian Kinerja</b>
10	Badan Penyelenggara Korpri	92,88	65,60
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	92,30	94,39
12	Biro Administrasi Pembangunan Setda	77,23	78,49
13	Biro Hukum Setda	98,63	100,00
14	Biro Humas dan Protokol Setda	98,60	100,00
15	Biro Kesejahteraan Sosial Setda	89,53	53,89
16	Biro Organisasi Setda	96,69	94,66
17	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda	97,40	100,00
18	Biro Perekonomian Setda	96,33	94,14
19	Biro Perlengkapan Setda	97,48	100,00
20	Biro Umum Setda	99,16	100,00
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	90,10	100,00
22	Dinas Kehutanan	96,76	88,79
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	98,71	64,66
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	77,26	91,94
25	Dinas Kesehatan	93,09	93,11
26	Dinas Ketahanan Pangan	97,70	100,00
27	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	96,84	98,18
28	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	93,70	79,55
29	Dinas Pariwisata	96,85	89,99
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	66,22	89,82
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	98,21	97,78
32	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	99,36	100,00
33	Dinas Pemuda dan Olahraga	86,93	97,62
34	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	96,63	93,91
35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	96,50	96,18
36	Dinas Perdagangan	94,86	95,83

<b>NO</b>	<b>OPD</b>	<b>Capaian Anggaran</b>	<b>Capaian Kinerja</b>
37	Dinas Perhubungan	55,12	97,28
38	Dinas Perindustrian	96,87	95,10
39	Dinas Perkebunan dan Peternakan	60,58	84,59
40	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	25,32	73,46
41	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	76,54	86,05
42	Dinas Sosial	96,76	94,54
43	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	98,70	92,06
44	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	88,78	92,53
45	Inspektorat	81,13	93,75
46	Rumah Sakit Abdul Moeloek	85,34	78,62
47	Rumah Sakit Jiwa Daerah	85,90	96,35
48	Satpol PP	95,96	100,00
49	Sekretariat DPRD	96,63	100,00
50	Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan SDA	92,49	100,00
51	Dinas Lingkungan Hidup	76,46	92,72

Sumber: Simonev Lampung, 2019 data diolah

Tabel II-61

Tingkat Ketercapaian Rupiah dan Kinerja OPD Tahun 2019

<b>Kriteria</b>	<b>Jumlah OPD</b>		<b>KET</b>
	<b>Rp</b>	<b>K</b>	
Sangat Rendah	1	0	0-50%
Sedang	4	4	51-75%
Baik	13	9	76-90%
Baik Sekali	33	38	>90
<b>Jumlah</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	

Sumber: Simonev Lampung, 2019 data diolah

Berdasarkan data pada tabel diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian kinerja keuangan (Rp) bagi 51 OPD yang tercantum dalam dokumen Renja/RKPD 2019, adalah mencapai 88,67 sesuai dengan data yang sudah terinput dalam aplikasi Simonev dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. Kinerja Keuangan dengan kategori “sangat rendah” (0-50%) sejumlah 1 OPD
  - b. Kinerja Keuangan dengan kategori “sedang” (51-75%) sejumlah 4 OPD
  - c. Kinerja Keuangan dengan kategori “baik” (76-90%) sejumlah 13 OPD
  - d. Kinerja Keuangan dengan kategori “baik sekali” (>90%) sejumlah 33 OPD
2. Rata-rata capaian kinerja fisik (K) bagi 51 OPD yang tercantum dalam dokumen Renja/RKPD 2019, adalah mencapai 91,89 sesuai dengan data yang sudah terinput dalam aplikasi Simonev dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. Kinerja Fisik dengan kategori “sangat rendah” (0-50%) sejumlah 0 OPD
  - b. Kinerja Fisik dengan kategori “sedang” (51-75%) sejumlah 4 OPD
  - c. Kinerja Fisik dengan kategori “baik” (76-90%) sejumlah 9 OPD
  - d. Kinerja Fisik dengan kategori “baik sekali” (>90%) sejumlah 38 OPD

### **2.3.2 EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2019**

Evaluasi hasil Pelaksanaan RPJMD dapat dilihat dari tingkat pencapaian indikator kinerja utama pembangunan daerah yang mengindikasikan ukuran keberhasilan pencapaian RPJMD selama periode 2014-2019, tingkat pencapaian indikator kinerja utama tersebut pertahun adalah sebagai berikut :

Tabel II-62

## CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2019

No.	IKU Provinsi Lampung	Satuan	Kinerja 2018			Kinerja 2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Laju pertumbuhan sektor pertanian, perternakan, kehutanan, dan perikanan	%	4,42	4,01	90,7	4,48	4,07	90,85
2	Laju pertumbuhan sektor Industri Pengolahan	%	7,46	9,08	121,71	7,46	10,1	135,39
3	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	%	-	-	-	4,5		
4	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	4,76	6,87	144,33	5,24	9	171,76
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,45	4,06	109,60	4,17	4,03	103,47
6	Laju pertumbuhan investasi (PMTDB) atas dasar harga konstan	%	13,24	9,04	68,24	14,56	4,62	31,73
7	Rata-rata pengeluaran wisatawan	Juta	1,20	1,22	101,42	1375	1368	99,49
8	Laju pertumbuhan PAD	%	3,26	5,16	158,28	3,28	4,38	133,54
9	Kondisi kemantapan jalan provinsi	%	80,00	77,27	96,59	85	74,41	87,54
10	Tingkat penyediaan infrastruktur irigasi pertanian	%	100	90	90,00	100		
11	Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak	%	90,11	90,11	100	100	71,65	71,65
12	Tingkat kawasan permukiman kumuh	%	0,53	0,47	112,76	0		
13	Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap lingkungan pemukiman yang sehat (sanitasi layak, drainase, persampahan, air limbah)	%	79,82	85	106,49	100		
14	Rasio elektrifikasi rumah tangga	%	81,04	91,47	112,87	83,47		

No.	IKU Provinsi Lampung	Satuan	Kinerja 2018			Kinerja 2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,65	7,79	101,83	7,7	7,82	101,56
16	Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,55	12,46	99,28	12,7		
17	Angka Harapan Hidup	Tahun	71	69,95	98,52	72	70,18	97,47
18	Predikat Anugrah Parahita Kapraya	Predikat	Utama	Utama	100	Utama		
19	Provinsi Layak Anak (Kabupaten)	Kab/ Kot	3	3	100	5	7	140
20	Peringkat Penyelesaian Konflik Sosial Tingkat Nasional	Peringkat	Terbaik Nasional	Pertama	93	Terbaik Nasional		
21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	59,4	56,62	95,32	62	66,07	106,56
22	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kriteria AKIP	BB	B	89,01	BB	B	
23	Opini BPK terhadap Pengelola Keuangan Daerah	Kriteria Opini	WTP	WTP	100	WTP	WTP	

## 2.4 Permasalahan dan Isu-Isu Strategi Daerah

### 2.4.1 Permasalahan Pembangunan

Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup memberi harapan, hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan. Namun demikian, Provinsi Lampung sebagai wilayah transit atau penyangga lintas pulau, sampai saat ini masih terdapat berbagai permasalahan pembangunan yang tetap memerlukan penanganan yang lebih komprehensif, lintas sektor, lintas wilayah, baik dari eksternal maupun internal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Provinsi Lampung meliputi permasalahan dan tantangan yang terkait dengan infrastruktur wilayah, kualitas SDM, pendapatan regional, daya dukung lingkungan, dan sumber daya alam, ketahanan sosial dan budaya, kapasitas dan kualitas pemerintahan, kerjasama regional dan daya saing ekonomi daerah. Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan adanya pandemic virus corona / covid 19 yang bukan hanya berdampak kepada kesehatan masyarakat akan tetapi berdampak kepada perekonomian terangkum dalam uraian sebagai berikut:

#### a. Permasalahan Bidang Ekonomi

- Selama 3 (tiga) tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Lampung belum bergerak pada arah pertumbuhan yang lebih progresif, dalam arti bahwa pertumbuhan ekonomi masih berada pada kisaran 5,1 – 5,5 persen, *Memperhatikan dampak pandemi Covid-19, Target PE Lampung Tahun 2020 yang semula sebesar 5,4-5,7%, dilakukan penyesuaian.* Berdasarkan proyeksi BI dengan asumsi periode pandemic dan asumsi lainnya :
  - a. *Skenario Moderat PE Lampung kurang dari 5 %  
(asumsi periode pandemic 3 bulan)*
  - b. *Skenario Berat PE Lampung 2-3 %  
(asumsi periode pandemic 6 bulan)*

- Dari sisi permintaan, struktur ekonomi Provinsi Lampung masih mengandalkan konsumsi rumah tangga. Oleh karenanya diperlukan upaya-upaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat melalui kebijakan makro dan mikro ekonomi. Dari sisi penawaran (sektoral), data-data statistik beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor-sektor transportasi, komunikasi dan konstruksi yang melibatkan lebih sedikit tenaga kerja tumbuh meningkat dan menjadi *driven* pertumbuhan ekonomi. Sementara, sektor ekonomi yang dominan (pertanian dalam arti luas) yang melibatkan lebih banyak tenaga kerja justru cenderung mengalami penurunan kapasitas dan produktifitas. Dari uraian tersebut dapat menunjukkan bahwa lemahnya produktifitas sektor ekonomi yang dominan (utamanya, pertanian dalam arti luas) dapat berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat secara umum dalam perekonomian.
- Komoditas ekspor Provinsi Lampung masih terbatas pada komoditas berbasis sumber daya alam, sehingga belum mampu memiliki daya saing maupun nilai tambah yang tinggi serta ketergantungan harga komoditas di pasar global. Pada maret 2020 ekspor Lampung mengalami penurunan sebesar 11,01% dibanding february 2020. Sementara import meningkat sebesar 31,14 %
- Untuk meningkatkan kapasitas dan pertumbuhan ekonomi Lampung, diperlukan dukungan sumber-sumber pertumbuhan yang mengarah pada peningkatan investasi yang mampu memberi nilai tambah produk dan menyerap tenaga kerja, melalui dukungan regulasi dan infrastruktur yang memadai hingga pada tingkat pemerintah kabupaten/kota. Hal ini menjadi penting karena mengingat pada pertengahan tahun 2020 sebagai dampak covid sebanyak 3401 orang yang dirumahkan dan sebanyak 74 orang yang terkena PHK.
- Pendapatan perkapita Provinsi Lampung tahun 2019 sebesar Rp. 42,69 Juta , masih jauh dibawah capaian Nasional sebesar Rp. 59,1 juta.
- Inflasi daerah beberapa tahun terakhir menunjukkan tingkat harga yang terjaga dan mendukung perekonomian daerah. Oleh karenanya upaya

pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas inflasi perlu dilakukan secara berkelanjutan, yang akan berdampak positif bagi produsen maupun konsumen;

- Pertumbuhan sektor industri skala besar masih relatif stagnan, sementara industri kecil dan menengah masih memiliki keterbatasan dalam hal daya saing produk dan pemasaran.

b. Permasalahan Infrastruktur Daerah

- Lampung merupakan wilayah perlintasan antarprovinsi dan antarpulau, sehingga beban jalan menjadi lebih tinggi; namun kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang belum mampu memberi dukungan optimal terhadap peningkatan mobilitas barang/jasa dan orang dalam mendukung perekonomian. Kondisi jalan mantap sampai dengan tahun 2019 sudah mencapai 77,41 persen, namun masih perlu terus ditingkatkan;
- Belum optimalnya kondisi jaringan irigasi
- Kualitas infrastruktur dan prasarana terminal, stasiun kereta api, pelabuhan dan bandar udara belum mampu mendukung kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih besar. Tersedianya investasi ataupun dukungan dana pemerintah yang lebih ekspansif masih perlu ditingkatkan dalam rangka pengembangan fasilitas di sektor transportasi darat, laut, maupun udara;
- Ketersediaan listrik yang belum memadai, memerlukan investasi dan pemanfaatan energi alternatif baik dalam skala besar, menengah dan mikro.
- Keterbatasan sarana prasarana untuk pelayanan dasar bagi masyarakat
- Indeks konektivitas provinsi Lampung sebesar 6,01

c. Bidang Sosial Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan

- 1) Persentase penduduk miskin masih pada tahun 2019 masih tinggi yaitu sebesar 12,3 %, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang sebesar 9,22%
- 2) Tingkat IPM masih lebih rendah baik di tingkat regional Sumatera



maupun rata-rata nasional;

- 3) Belum tercapainya program wajar 12 tahun, rata rata lama sekolah penduduk lampung pada tahun 2018 adalah 7,82 tahun.
- 4) kualitas dan kuantitas terhadap akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan.
- 5) Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan
- 6) Tingkat ketimpangan antarkelompok pendapatan (*gini ratio*) masih berada pada level “sedang” perlu diperbaiki menuju level yang lebih “rendah”.
- 7) Rendahnya aksesibilitas pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan belum meratanya ketersediaan tenaga kesehatan
- 8) Angka kematian ibu dan anak serta masalah gizi balita yang masih tinggi

d. Bidang Pertanian dan Kelautan

- 1) Kontribusi sektor pertanian sebagai sektor ekonomi utama yang produktivitasnya dalam perekonomian masih relatif rendah dan cenderung menurun;
- 2) Dalam rangka mendukung revitalisasi pembangunan sektor pertanian, memerlukan dukungan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi dan penataan kawasan/lahan pertanian berkelanjutan sebagai kendali terhadap alih fungsi lahan pertanian.
- 3) Produk pertanian yang sangat bergantung dengan kondisi alam, dan permintaan pasar menyebabkan harga komoditas pertanian sangat fluktuatif.
- 4) Potensi kekayaan laut dan perikanan darat belum dimanfaatkan secara optimal.

e. Bidang Lingkungan Hidup

- 1) Separuh luas kawasan hutan dalam kondisi rusak. Hutan sebagai penyangga sumber daya air dan keragaman hayati memerlukan penanganan secara berkelanjutan guna mendukung kelangsungan hidup manusia sebagai pelaku dan objek pembangunan;
- 2) Pemanfaatan hutan sebagai kawasan konservasi masih perlu

dioptimalkan mengingat hutan dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata maupun tempat pendidikan.

f. Kapasitas Fiskal Daerah

- Pertumbuhan PAD masih dibawah 5%. Pajak daerah merupakan salah satu fungsi *budgeter* penting yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan daerah, diperlukan langkah optimalisasi penerimaan perpajakan yang dilakukan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha. Disamping itu, kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi daerah dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat, serta mendukung daya saing daerah.

g. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- 1) Bidang pariwisata adalah bidang yang terdampak karena wabah Covid 19, menyebabkan penutupan objek-objek wisata. Data BPS menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah tamu hotel di Provinsi Lampung dari bulan februari ke Maret 2020 sebanyak 26.351 orang.
- 2) Belum optimalnya pengembangan Destinasi dan pemasaran pariwisata.
- 3) Pengelolaan objek dan daya Tarik wisata (ODTW) belum didukung sarana dan prasarana yang baik;
- 4) Masih rendahnya SDM yang profesional di bidang pariwisata;
- 5) Ekonomi kreatif belum berkembang.

h. Bidang Koperasi dan UMKM

- 1) Masih minimnya jumlah Koperasi yang aktif melakukan kegiatan ekonomi kerakyatan
- 2) Masih rendahnya SDM yang profesional di bidang Koperasi;
- 3) Keterbatasan permodalan dan terbatasnya pangsa pasar Koperasi dan UMKM
- 4) Belum tersedianya jaringan bisnis yang handal untuk melakukan pemasaran hasil produksi pelaku UMKM.

i. Bidang Penanggulangan Bencana

- 1) Tingginya potensi bencana di Provinsi Lampung

- 2) Kurangnya kesiapsiagaan perugas dalam penanganan bencana
  - 3) Sarana prasarana dalam penanggulangan bencana belum memadai;
  - 4) Belum adanya Keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana;
  - 5) Kualitas dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim belum optimal.
- j. Bidang Hukum, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat
- 1) Masih tingginya gangguan keamanan dan kriminalitas;
  - 2) Potensi konflik tanah antarmasyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan, dan masyarakat dengan pemerintah.
  - 3) Pelaksanaan Pemilu tahun 2021 memerlukan dukungan kamtibmas yang kodusif;
  - 4) Pemahaman yang terbatas terhadap kebhinekaan menimbulkan ancaman disintegritas kebangsaan.
  - 5) Potensi perilaku menyimpang, ajaran sesat, maupun ancaman terorisme dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
- k. Bidang Kebudayaan
- 1) Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal;
  - 2) Kuatnya pengaruh budaya asing kepada generasi muda;
  - 3) Masih rendahnya promosi budaya lokal di dalam dan luar negeri;
  - 4) Pemanfaatan nilai budaya bagi pembangunan masih terbatas.
- l. Bidang Pemuda dan Olahraga menghadapi masalah:
- 1) Melemahnya karakter bangsa pada generasi muda;
  - 2) Merebaknya bahaya narkoba di kalangan generasi muda;
  - 3) Terbatasnya ketersediaan sarana olah raga berskala nasional;
  - 4) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri;
  - 5) Lemahnya pola pembinaan bagi atlet;
  - 6) Kurangnya frekuensi kejuaraan olah raga tingkat provinsi maupun nasional;
- m. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 1) Masih tingginya ketimpangan gender di Provinsi Lampung

- 2) Masih lemahnya perlindungan dari tindak kekerasan bagi perempuan dan anak serta belum terpenuhinya hak anak. Belum optimalnya penanganan masalah *trafficking* terhadap perempuan dan anak.
- n. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 1) Minimnya sarana dan prasarana di pedesaan;
  - 2) Belum optimalnya kelembagaan dan kualitas aparatur desa;
  - 3) Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha;
  - 4) Rendahnya pemanfaatan nilai budaya masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan;
  - 5) Minimnya penggunaan dan pemanfaatan iptek masyarakat pedesaan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
  - 6) Penguatan lembaga ekonomi masyarakat yang masih kurang optimal.
- o. Bidang Sosial
- 1) Jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung yang masih tinggi
  - 2) Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
  - 3) Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin.
  - 4) Pemanfaatan data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) penduduk miskin yang belum optimal.
  - 5) Kesenjangan sosial antara desa dan kota dan antara individu dengan individu lainnya.
- p. Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
- 1) Dampak covid 19 menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran di Provinsi Lampung
  - 2) Masih rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja.
  - 3) Keterbatasan tenaga pengajar/instruktur Balai Latihan Kerja.
  - 4) Sarana dan prasarana peralatan praktek pada Balai Latihan Kerja yang terbatas dan perlu peremajaan.
- q. Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah
- Terbatasnya inovasi daerah.

- r. Bidang Otonomi Daerah, Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
- Perlunya sinkronisasi implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah;
  - Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *good governance*;
  - Masih rendahnya kapasitas dan profesionalitas SDM aparatur;
  - Pendataan aset belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi;
  - Pendapatan daerah dari BUMD masih sangat terbatas;
  - Pelayanan publik masih belum sesuai harapan masyarakat.
- s. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
- 1) Pendidikan politik masyarakat masih rendah;
  - 2) Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman, ketertiban masyarakat, radikalisme karenalatarbelakang sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

## **2.4.2 Isu Strategis**

### **2.4.2.1. Bidang Ekonomi :**

- Pandemi Covid-19 berdampak pada Sektor-sektor Ekonomi, sehingga perlu upaya pemulihan terutama sektor UMKM, IKM, Pedagang Kecil Menengah dan sektor informal lainnya
- Pertumbuhan Ekonomi Lampung selalu diatas 5% dan mengalami tren peningkatan selama 5 tahun terakhir, akan tetapi berpotensi mengalami penurunan pertumbuhan akibat dampak Covid-19 terhadap Sektor-sektor ekonomi strategis.
- Sektor Pertanian berkontribusi terbesar dalam Struktur Ekonomi Lampung (rata-rata  $\pm$  30 %), akan tetapi Tingkat Pertumbuhan relatif lambat dan mengalami tren penurunan dari 3,6 % (2015) menjadi 1,34% (2019)
- Kontribusi Sektor Pariwisata dalam perekonomian Lampung masih relatif kecil dikarenakan belum optimalnya pengembangan potensi

pariwisata Lampung sebagai sumber pertumbuhan baru perekonomian daerah, sehingga perlu dioptimalkan dan dibangkitkan kembali dari dampak covid 19.

- Tingkat Pertumbuhan Investasi cenderung melambat, dari 9,26 % di tahun 2016 menjadi 4,62 di tahun 2019
- Sektor Industri Pengolahan menjadi sumber Pertumbuhan Ekonomi Lampung terbesar tahun 2019 yaitu 1,54 %, untuk mempercepat transformasi ekonomi, mendorong investasi dan peningkatan daya saing daerah, perlu dilakukan percepatan Pembangunan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus
- Inflasi Gabungan Provinsi Lampung 5 tahun terakhir terkendali dalam rentang Target, perlu terus dijaga untuk mendorong daya beli masyarakat dan menekan tingkat kemiskinan
- Antisipasi terhadap Faktor Eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global, kondisi geo-politik, perang dagang, dan wabah penyakit

1. Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia :

- Tingkat Kemiskinan mengalami tren penurunan dari 14,3 % (2015) menjadi 12,3 % (2019). *Akan tetapi*, masih cukup tinggi dibanding rata-rata Nasional dan berpotensi meningkat akibat dampak Covid-19
- Masih tingginya Prevalensi Gizi Buruk / Stunting
- Ketimpangan Antar kelompok Pendapatan/ Indeks Gini lebih baik dari Nasional (Tahun 2019, Lampung 0,331 dan Nasional 0,380). *Akan tetapi* terjadi kenaikan 0,05 poin dari tahun 2018
- IPM meningkat dari 66,95 (2015) menjadi 69,57 (2019). Namun masih cukup rendah di bandingkan Nasional dan wilayah Sumatera
- Pencegahan, Penanganan dan Penanggulangan dampak COVID - 19
- Dari 2.435 Desa di Provinsi Lampung, Terdapat 504 Desa dalam status TERTINGGAL dan 19 Desa SANGAT TERTINGGAL
- Tingkat Pengangguran semakin menurun dari 5,14 % (2015) menjadi 4,03 % (2019). *Akan tetapi*, 68,47% Tenaga Kerja masih

bekerja di sektor Informal. TPT berpotensi meningkat akibat PHK sebagai dampak Covid-19.

- *Reformasi Birokrasi* : Pemanfaatan Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintahan
- Kesetaraan Perempuan dalam Pembangunan yang dilihat dari Indeks Pembangunan Gender, semakin membaik dari 89,89 (2015) meningkat menjadi 90,39 (2019), sedikit lebih rendah dari rata-rata Nasional 91,07 (2019)

2. Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup :

- Kesenjangan pertumbuhan wilayah timur dengan barat (diperlukan infrastruktur penghubung (ruas utara, tengah dan selatan) yang memenuhi persyaratan untuk menghubungkan jalan lintas nasional (barat, tengah dan timur).
- Dengan beroperasinya Jalan Tol Trans Sumatera, diperlukan penanganan exit toll yang terkoneksi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat mengungkit perekonomian wilayah sekitar
- Tingkat kemantapan Jalan Provinsi membaik dari 70,02 % (2016) menjadi 77,41 % (2019) ; masih terkendala dengan terbatas kemampuan pembiayaan penanganan ruas jalan
- Pelayanan Dasar terkait Akses Masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang Layak dan Aman masih memerlukan strategi dan pembiayaan:
  - Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman.
  - Kawasan Kumuh dan/atau serta Permukiman Kumuh.
  - Pembiayaan Perumahan untuk Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan standar rumah MBR;
  - Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- Irigasi sebagai pendukung Sektor Pertanian :
  - Luas baku jaringan irigasi kewenangan provinsi 21.045 Ha mengalami kerusakan mencapai 10%.

- Krisis cadangan air pada 3 bendungan (Batutegi, Way Rarem, dan Way Jepara) karena *catchment area* yang rusak.
- Lampung sebagai daerah rawan bencana memerlukan strategi dan kebijakan pembangunan wilayah yang antisipatif bencana.



## **BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Secara substansial pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan upaya terencana untuk mengelola sumberdaya ekonomi daerah secara berdayaguna dan berhasil guna untuk kemajuan daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan, yang didukung oleh stabilitas ekonomi yang kokoh. Untuk itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi selayaknya diikuti dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah, dengan tetap memperhatikan kelangsungan kualitas lingkungan tempat dimana masyarakat melakukan aktifitas ekonomi.

Perekonomian Provinsi Lampung merupakan bagian dari mata rantai dan pergaulan perekonomian dunia yang terbuka (globalisasi ekonomi), perekonomian daerah tidak dapat terlepas dengan keadaan perekonomian Nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan di tingkat daerah, seperti : kebijakan pemerintah yang menyangkut sektor moneter maupun kebijakan ekonomi sektor fiskal, serta pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, naik turunnya nilai tukar mata uang asing, maupun pengaruh krisis ekonomi dan keuangan global yang akan berdampak pada kelesuan pasar di dalam dan di luar daerah; disamping eksternalitas yang terkait dengan faktor cuaca ataupun bencana alam.

Arah kebijakan perekonomian Provinsi Lampung Tahun 2021 ditetapkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (*pro investment*) di berbagai sektor ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan, juga berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019 – 2024 yaitu membangun kekuatan ekonomi masyarakat yang berbasis pertanian.

Upaya memperkuat perekonomian Lampung dilakukan dengan mengembangkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki dengan orientasi kepada skala ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis pertanian dalam arti luas juga akan terus dimantapkan dan diperkuat yang berkolaborasi dengan program Kartu Petani Berjaya, Nelayan berjaya untuk kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa dengan dukungan penguasaan teknologi dan penguasaan informasi pasar. Selain itu kebijakan ekonomi daerah akan diarahkan pada peningkatan investasi baru baik dalam dan luar negeri yang dipacu untuk memperluas kesempatan kerja, peningkatan produktifitas tenaga kerja, menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga barang konsumsi. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya juga diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung dengan lingkungan yang berkelanjutan.

Beberapa target yang ingin dicapai dalam kebijakan ekonomi makro pemerintah daerah, antara lain:

- 1) Menciptakan kesempatan kerja yang tinggi untuk mengurangi kemiskinan

Kebijakan perekonomian daerah yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang tinggi diarahkan sebagai upaya untuk mengatasi masalah pengangguran, pandemic covid 19 saat ini menambah permasalahan pengangguran di Provinsi Lampung, banyak masyarakat berpotensi kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang berpengaruh kepada kondisi sosial masyarakat, Oleh karena itu, melalui penciptaan kesempatan kerja maka semakin banyak penduduk yang memiliki pekerjaan yang pada akhirnya diharapkan dapat berdampak pada pengurangan jumlah penduduk miskin.

- 2) Meningkatkan kapasitas perekonomian daerah

Upaya meningkatkan fundamental ekonomi Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan yaitu sumber-sumber potensial perekonomian

belum didukung oleh ketersediaan dan pemerataan infrastruktur maupun kualitas SDM. Untuk mencapai kapasitas ekonomi yang optimal, struktur perekonomian perlu didukung dengan peningkatan kualitas dan akses pendidikan dan kesehatan, perluasan kesempatan berusaha dan akses sumber-sumber pendanaan serta infrastruktur kewilayahan yang baik dan penguasaan teknologi.

- 3) Meningkatkan pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat  
Pendapatan perkapita secara umum diartikan sebagai perbandingan antara jumlah pendapatan dengan jumlah penduduk. Meningkatnya pendapatan perkapita akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang berarti meningkatkan sisi konsumsi pada sisi permintaan sekaligus mendorong pergerakan pada sisi penawaran.
- 4) Menciptakan kondisi perekonomian daerah yang stabil  
Kestabilan ekonomi merupakan kondisi dimana nilai fluktuatif variabel ekonomi yang terjadi tidak bersifat *booming* namun bergerak dalam kondisi dan batas yang wajar yang masih mampu ditoleransi oleh sektor ekonomi produktif. Kestabilan tersebut meliputi 3 (tiga) hal yaitu peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja serta ketersediaan barang dengan tingkat harga yang wajar.
- 5) Pemerataan distribusi pendapatan  
Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu ukuran utama makro ekonomi dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dijalankan sepanjang periode waktu tertentu. Namun ukuran kinerja perekonomian daerah tersebut akan semakin lebih baik jika dilengkapi dengan menurunnya disparitas pendapatan (*equality of income*).

### **3.1.1. Kinerja Makro Ekonomi Daerah**

#### **3.1.1.1 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB Provinsi Lampung atas harga berlaku pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 26.982,19 (8,09%) dari tahun 2018 yaitu 333.681,43 milyar menjadi Rp. 360.663,62 milyar pada tahun 2019. Begitu juga dengan PDRB atas dasar Harga Konstan (ADHK), mengalami peningkatan

sebesar 12.222,51 milyar (5,26%) dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 232.214,28 milyar menjadi Rp. 244.436,79 milyar.

Tabel III-1  
PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Berlaku  
dan Harga Konstan Tahun 2015 – 2019 (Miliar Rupiah)

PDRB	2015	2016	2017	2018	2019
ADH BERLAKU (Miliar rupiah)	252.883,10	279.417,62	306.699,74	333.681,43	360.663,62
ADHK TH 2010 (Miliar rupiah)	199.536,92	209.793,73	220.625,57	232.214,28	244.436,79

(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019)

### 3.1.1.2 Struktur PDRB menurut Lapangan Usaha

Struktur perekonomian Lampung pada periode tahun 2015 s.d. 2019 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha, yaitu: kelompok Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (28-32%); kelompok Industri Pengolahan (18-20%); dan kelompok Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (11-12%); yang diikuti dengan peran kelompok Konstruksi (8-9%); kelompok Pertambangan dan Penggalian (5-6%); serta kelompok Transportasi dan Pergudangan (4-5%). Distribusi PDRB Lampung pada tahun 2019 berdasarkan kelompok usaha tersebut, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (28,96 persen); Industri Pengolahan (19,85 persen); serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (11,75 persen). Secara rinci distribusi PDRB Lampung dapat dilihat pada tabel III-2.

Tabel III-2  
Distribusi PDRB Provinsi Lampung Berdasarkan Lapangan Usaha  
Tahun 2015 – 2019

LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31,86	31,45	30,57	30,00	28,96
Pertambangan dan Penggalian	5,67	5,47	5,65	5,78	5,58
Industri Pengolahan	19,31	18,64	19,02	19,44	19,85
Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,11	0,16	0,16	0,16
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,1	0,11	0,10	0,10
Konstruksi	8,49	8,78	9,34	9,44	9,46
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,74	11,18	11,04	11,15	11,75

LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018	2019
Transportasi dan Pergudangan	5,13	5,24	5,28	5,17	5,19
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,51	1,54	1,53	1,58	1,63
Informasi dan Komunikasi	3,55	3,74	3,92	3,92	3,95
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,2	2,21	2,21	2,14	2,07
Real Estate	2,87	2,93	2,91	2,86	2,96
Jasa Perusahaan	0,15	0,16	0,16	0,15	0,15
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,69	3,53	3,51	3,45	3,37
Jasa Pendidikan	2,8	2,86	2,78	2,83	2,94
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,97	0,97	0,95	0,93	0,94
Jasa Lainnya	0,87	0,87	0,9	0,91	0,94
<b>Total PDRB</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019)

Berdasarkan Tabel III-2, distribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dari 31,86 % menjadi 28,96 %. Sebaliknya, beberapa sektor mengalami peningkatan antara lain : sektor industri pengolahan; sektor Pengadaan listik dan gas; sektor Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor transportasi dan pergudangan dan sektor informasi dan komunikasi.

### 3.1.1.3 Struktur PDRB menurut Pengeluaran

Pada tahun 2019 komposisi perekonomian Lampung masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 61,32 persen, diikuti dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (**PMTB**) sebesar 33,33 persen dan konsumsi belanja pemerintah sebesar 8,12 persen. Struktur perekonomian tersebut secara umum tidak banyak mengalami perubahan dari tahun - tahun sebelumnya kecuali PMTB yang cenderung mengalami kenaikan dari 30,35% pada tahun 2015 menjadi 33,33% di tahun 2019.

Tabel III-3  
Distribusi PDRB Provinsi Lampung Berdasarkan Pengeluaran  
tahun 2015 - 2019

KOMPONEN PENGELUARAN	2015	2016	2017	2018	2019
Konsumsi Rumah Tangga	60,59	59,73	59,47	60,30	61,32
Konsumsi LNPRT	1,36	1,39	1,48	1,65	1,71

KOMPONEN PENGELUARAN	2015	2016	2017	2018	2019
Konsumsi Pemerintah	9,48	9,14	8,68	8,36	8,12
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	30,35	30,59	31,46	32,85	33,33
Perubahan Inventori	0,25	0,36	0,42	0,52	0,12
Ekspor	44,43	40,74	38,62	40,99	39,55
Impor	46,47	41,94	40,14	44,66	44,14
<b>Total PDRB</b>	100	100	100,00	100	100

(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019)

### 3.1.1.4 Rasio PMTB dan ICOR

PMTB dalam suatu perekonomian dapat menggambarkan besarnya nilai investasi (baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri) yang terjadi di suatu wilayah. Pada tahun 2019 rasio PMTB terhadap PDRB Lampung sebesar 33,33 persen. Sedangkan nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Provinsi Lampung pada tahun 2019 sebesar 0,39 lebih efisien dibandingkan dengan nilai tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel III-4

Tabel III-4  
Rasio PMTB terhadap PDRB dan ICOR Provinsi Lampung  
Tahun 2015 – 2019

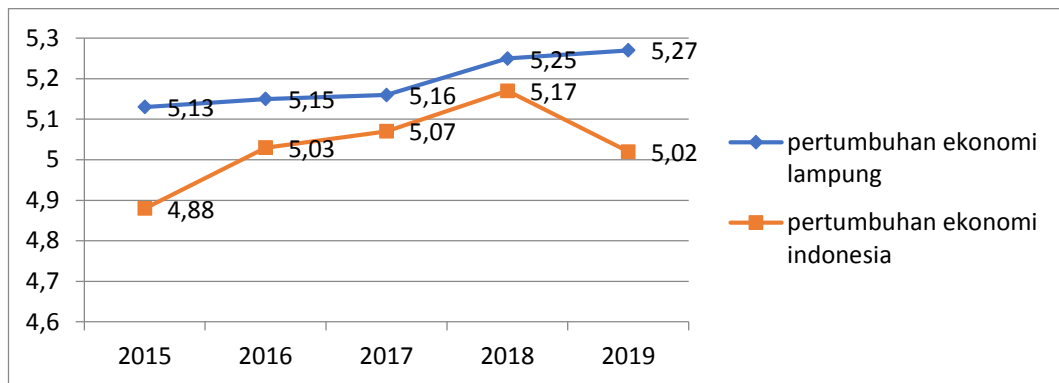
	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio PMTB terhadap PDRB	30,35	30,51	31,56	33,23	33,33
ICOR	0,23	0,31	0,41	0,51	0,39

(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019)

### 3.1.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Selama 5 (lima) tahun terakhir, perekonomian Lampung memperlihatkan *trend* yang terus meningkat dari 5,13% di tahun 2015 menjadi 5,27% pada tahun 2019. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,02%.

**Grafik III-1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Provinsi Lampung**  
**Tahun 2015 – 2019**



(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019)

### 3.1.1.6 Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha

Pertumbuhan ekonomi Lampung menurut lapangan usaha selama kurun waktu tahun 2015 s.d tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan dari 5,13 pada tahun 2015 menjadi 5,27 pada tahun 2019. Faktor penyebab utama meningkatnya pertumbuhan Lampung tahun 2019 adalah meningkatnya aktifitas transportasi yaitu Jaln Tol Trans Sumatera (JTTS) yang berimbas pada peningkatan kegiatan perekonomian pada beberapa sektor baik perdagangan, penyediaan akomodasi makan minum, jasa hiburan maupun transportasi lainnya. Sejalan dengan dibukanya JTTS tersebut, pertumbuhan jasa transportasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 5,96 tahun 2018 menjadi 8,08 tahun 2019. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada kategori pertanian yang hanya mencapai 1,34%. Hal ini disebabkan karena kemarau panjang yang terjadi di wilayah Lampung. Secara rinci pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel III-5.

**Tabel III-5**  
**Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung menurut Lapangan Usaha**  
**(persen, ADHK 2010) Tahun 2015 – 2019**

LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,49	3,11	0,86	1,01	1,34
Pertambangan dan Penggalian	4,2	4,36	6,39	2,04	2,69
Industri Pengolahan	7,56	3,93	6,18	9,08	8,26

LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018	2019
Pengadaan Listrik dan Gas	4,33	22,49	38,43	6,54	9,57
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,47	3,57	7,15	3,59	5,29
Konstruksi	2,64	8,53	10,96	8,35	6,01
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,90	6,54	6,51	6,87	7,23
Transportasi dan Pergudangan	11,83	7,87	6,6	5,96	8,08
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,96	6,84	8,03	10,49	9,10
Informasi dan Komunikasi	10,84	10,63	10,74	8,14	7,96
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,36	8,14	4,5	2,27	2,86
Real Estate	4,49	7,68	5,96	3,5	5,88
Jasa Perusahaan	8,08	4,21	5,87	2,19	3,97
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,79	0,52	4,19	5,86	4,78
Jasa Pendidikan	7,28	7,19	5,05	9,07	8,33
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,87	6,08	4,77	6,27	6,81
Jasa Lainnya	8,51	4,45	8,92	9,32	8,08
<b>Pertumbuhan PDRB</b>	<b>5,13</b>	<b>5,14</b>	<b>5,16</b>	<b>5,25</b>	<b>5,27</b>

(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019)

### 3.1.1.7 Pertumbuhan Ekonomi menurut Pengeluaran

Pertumbuhan ekonomi Lampung menurut pengeluaran selama kurun waktu tahun 2015 s.d tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan dari 5,13 persen tahun 2015 meningkat menjadi 5,27 persen tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi dari komponen konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (**LNPRT**) menjadi pertumbuhan tertinggi sebesar 10,05 persen dan diikuti pertumbuhan pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh rata-rata sebesar 7,09 persen sedangkan komponen Pengeluaran Konsumsi rumah tangga menjadi pertumbuhan tertinggi ketiga dengan rata-rata tumbuh sebesar 5,64 persen. Komponen Konsumsi Pemerintah rata-rata tumbuh sebesar 4,06 persen sedangkan pada komponen ekspor dan impor masing-masing tumbuh dengan rata-rata sebesar 2,76 persen dan 4,55 persen.



Tabel III-6  
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran (Persen, ADHK 2010)  
Tahun 2015 -2019

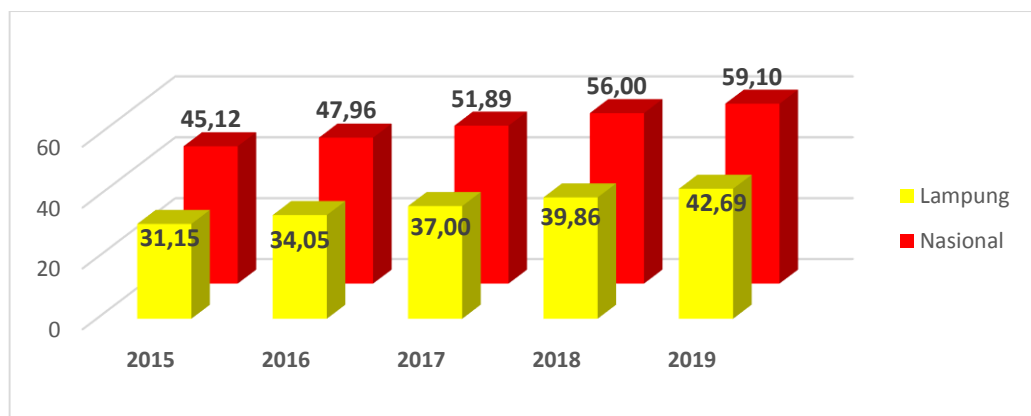
KOMPONEN PENGELUARAN	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Konsumsi Rumah Tangga	5,59	5,72	5,54	5,68	5,65	5,64
Konsumsi LNPRT	7,05	5,56	11,19	16,29	10,15	10,05
Konsumsi Pemerintah	11,78	3,43	1,14	1,70	2,53	4,06
PMTB	5,43	9,26	7,50	8,62	4,62	7,09
Perubahan Inventori	21,01	56,56				
Ekspor	-5,31	-2,58	5,77	11,53	4,40	2,76
Impor	-3,47	1,01	7,67	14,05	3,49	4,55
<b>Pertumbuhan PDRB</b>	<b>5,13</b>	<b>5,14</b>	<b>5,16</b>	<b>5,25</b>	<b>5,27</b>	

(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019)

### 3.1.1.8 Pendapatan per Kapita

PDRB per kapita digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa pada periode tertentu. PDRB Perkapita Provinsi Lampung selama 5 (lima) tahun secara signifikan cenderung mengalami peningkatan dari 31,15 juta tahun 2015 menjadi 42,69 juta pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat Lampung mengalami peningkatan dalam hal untuk mengonsumsi suatu produk dalam periode tertentu. Meskipun PDRB per kapita Lampung meningkat namun angka tersebut masih di bawah rata-rata PDRB per Kapita Nasional yang tercatat sebesar 59,1 Juta Rupiah.

Grafik III-2  
PDRB per Kapita Indonesia dan Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019  
(Atas Dasar Harga Berlaku, Juta Rupiah)



(Sumber : BPS Provinsi Lampung dan Nasional 2019)

Sementara itu PDRB per kapita terbesar kabupaten/kota se-Provinsi Lampung pada tahun 2019 adalah Kota Bandar Lampung yakni sebesar Rp 56,59 juta, disusul kemudian Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp 56,16 juta, dan Kabupaten Mesuji sebesar Rp 52,84 juta. Sedangkan wilayah dengan PDRB perkapita terendah berada di Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp 23,74 juta, dan Kabupaten Tanggamus sebesar Rp 26,15 juta. Namun dari sisi pertumbuhan, kabupaten Lampung Tengah mengalami pertumbuhan lebih besar yaitu 9,24% dibandingkan dengan pertumbuhan kota Bandar Lampung sebesar 8,90% dan Provinsi sebesar 8,20%.

Tabel III-7  
PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung  
Tahun 2015 – 2018 (Juta Rupiah)

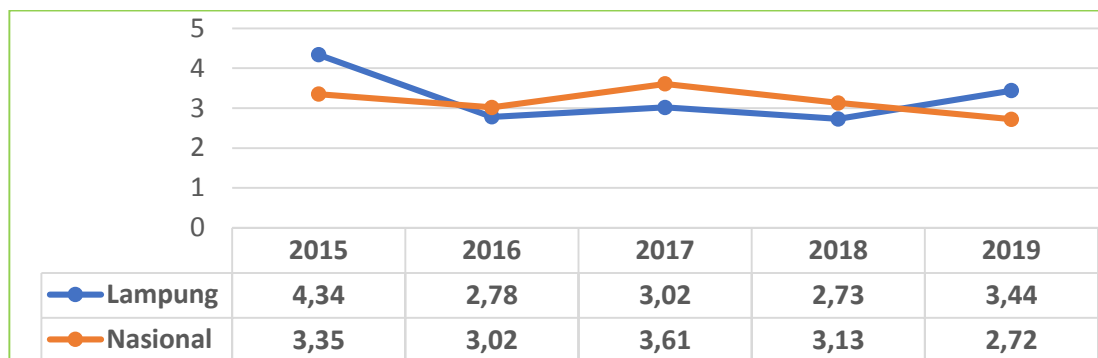
Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	Rata2 Pertumb. (%)
Lampung Barat	17.49	19.00	20.50	22.02	23.74	7,94
Tanggamus	19.39	21.24	22.87	24.54	26.15	7,77
Lampung Selatan	32.30	35.52	38.60	41.63	44.60	8,41
Lampung Timur	30.38	32.49	35.18	38.48	40.74	7,63
Lampung Tengah	39.45	44.12	48.32	52.17	56.16	9,24
Lampung Utara	27.79	30.77	33.55	36.07	39.11	8,93
Way Kanan	23.24	25.28	27.40	29.38	31.38	7,80
Tulang Bawang	37.70	41.35	45.09	48.37	51.65	8,20
Pesawaran	27.48	29.83	32.11	34.43	36.91	7,66
Pringsewu	20.77	22.78	24.59	26.20	28.12	7,88
Mesuji	37.37	41.19	45.09	49.01	52.84	9,05
Tulang Bawang Barat	30.71	33.87	36.61	39.56	42.17	8,26
Pesisir Barat	21.56	23.90	25.88	27.86	30.02	8,64
Bandar Lampung	40.26	44.84	49.30	53.00	56.59	8,90
Metro	28.01	31.09	33.63	35.67	38.02	7,95
<b>Lampung</b>	<b>31.15</b>	<b>34.05</b>	<b>37.00</b>	<b>39.86</b>	<b>42.69</b>	<b>8,20</b>

(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2020)

### 3.1.1.9 Inflasi Daerah

Perkembangan Inflasi Provinsi Lampung berfluktuatif dari tahun 2015 sampai dengan 2019, tercatat bahwa inflasi gabungan Lampung tahun 2015 sebesar 4,34 persen dan tahun 2019 sebesar 3,44 persen. Inflasi Gabungan Provinsi Lampung Tahun lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 2,72 %, namun masih terkendali dan berada dalam rentang target  $3,5 \pm 1$ persen.

Grafik III-3  
Perkembangan Inflasi Gabungan di Provinsi Lampung dan Nasional  
Tahun 2015 – 2019 (Persen)



(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2019)

### 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

#### 3.1.2.1. Reviu Perekonomian Global dan Nasional

Kondisi ekonomi global ke depan diperkirakan masih belum kondusif. Pertumbuhan ekonomi global 2020 dan 2021 diproyeksikan tumbuh terbatas, setelah mengalami perlambatan di 2018 dan 2019. Perekonomian global masih dihadapkan pada berbagai ketidakpastian. Perang dagang Tiongkok-AS yang belum mereda ditahun 2019, ekonomi dunia mengalami guncangan dari adanya wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang merebak pada akhir Januari 2020 di Wuhan, Tiongkok. Sejatinya, kesepakatan perundingan perdagangan AS-Tiongkok pada awal Januari 2020 sempat menurunkan ketidakpastian global dan meningkatkan optimisme pelaku ekonomi terhadap prospek pemulihan ekonomi global Tahun 2020, akan tetapi pandemi Covid-19 yang semakin meluas ke seluruh dunia berdampak

pada meningkatnya resiko resesi perekonomian global pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi negara maju seperti Amerika Serikat dan negara di kawasan eropa lainnya diperkirakan mengalami kontraksi, meskipun berbagai negara telah menempuh berbagai kebijakan ultra akomodatif baik fiskal maupun moneter. Prospek pertumbuhan ekonomi negara berkembang termasuk Indonesia diperkirakan juga menurun, terutama pada triwulan II dan III tahun 2020, dan diperkirakan kembali membaik mulai triwulan IV 2020. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi dunia akan meningkat tinggi ,didorong oleh dampak positif kebijakan yang ditempuh oleh banyak negara.

Selain tantangan dan perlambatan ekonomi global dampak pandemi Covid 19, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi Nasional dibayangi juga oleh tantangan domestik. Unsur-unsur penting penggerak ekonomi, yakni investasi, ekspor, industri manufaktur, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami perlambatan dalam tiga tahun terakhir. Sasaran pertumbuhan ekonomi pada 2021 yang ditargetkan sebesar 5,3–5,7 persen, akan sangat bergantung pada realisasi pertumbuhan pada 2020 yang dalam APBN ditargetkan tumbuh 5,3 persen. Akan tetapi, berdasarkan penilaian awal Kementerian PPN/Bappenas (pada bulan Februari 2020), merebaknya Coronavirus berpotensi mengurangi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3 persen poin. Merujuk pandangan Bank Indonesia tentang perekonomian Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 perlu terus didorong sehingga tetap berdaya tahan di tengah risiko resesi perekonomian yang tengah dihadapi.

Dipicu sentimen Covid-19, nilai tukar rupiah melemah pada awal Februari 2020 dan menyentuh level terendah pada Maret 2020, namun hingga awal Juni 2020 nilai tukar rupiah semakin membaik, bahkan lebih baik dari kondisi sebelum terjadinya wabah covid-19

Secara tahunan, inflasi IHK Februari 2020 tercatat 2,98% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan lalu sebesar 2,68% (yoy). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kelompok inflasi *volatile food* yang meningkat di tengah inflasi *administered prices* yang melambat. Secara bulanan, inflasi IHK pada Februari 2020 tercatat sebesar 0,28% (mtm),

dipengaruhi oleh kelompok inflasi inti yang rendah, kelompok *administered prices* yang kembali mencatat deflasi, serta inflasi *volatile food* yang melambat.

### 3.1.2.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Lampung 2020-2021

Awal pandemi Covid-19, perekonomian Lampung pada triwulan I tahun 2020 hanya tumbuh sebesar 1,73% (YoY) dan sebagai dampak ketidakpastian, pertumbuhan ekonomi Lampung diperkirakan melambat pada triwulan II dan III tahun 2020 dan membaik mulai triwulan IV. Pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2020 diperkirakan dapat menuju 4,4 – 4,8% jauh menurun dari target 2020 sebesar 5,3 – 5,5%. Namun demikian, untuk skenario yang lebih berat dimana perekonomian global diperkirakan mengalami kontraksi (pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama / 6 bulan) dan stimulus penanganan Covid-19 yang semakin terbatas, maka perekonomian Lampung tahun 2020 diperkirakan tumbuh hanya pada kisaran 2,4 – 2,8%. Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian tahun 2020, maka Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2021 sebesar 4,5 – 5,5 %, namun demikian diharapkan pertumbuhan ekonomi akan lebih baik lagi sejalan dengan upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi.

Konsumsi swasta diperkirakan tumbuh lebih rendah. Perlambatan konsumsi RT disebabkan turunnya pendapatan masyarakat ditengah pembatasan sosial yang berdampak pada melambatnya aktivitas ekonomi , termasuk produksi barang dan jasa. Hal tersebut berdampak pada berkurangnya permintaan akan tenaga kerja sehingga menurunkan pendapatan dan menahan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Akan tetapi konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tumbuh pada tahun 2021 yang ditopang oleh peningkatan daya beli masyarakat seiring dengan pulihnya aktivitas ekonomi, perluasan lapangan kerja dan perbaikan *disposable income*. Disamping itu kinerja ekspor diperkirakan meningkat didorong oleh perbaikan harga komoditas utama di pasar internasional. Berdasarkan data

Bank Dunia, harga komoditas utama ekspor Lampung diantaranya kelapa sawit, kopi dan karet diprediksi meningkat pada tahun 2021.

Pada tahun 2020, investasi diperkirakan melambat sejalan dengan melemahnya prospek ekspor barang dan jasa serta menurunnya aktivitas produksi akibat pembatasan sosial. Pada tahun 2021 prospek investasi diharapkan membaik sejalan dengan pemulihan aktivitas usaha serta ditopang oleh upaya Pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi melalui RUU Cipta Karya dan Perpajakan. Perbaikan investasi tersebut didorong oleh berlanjutnya investasi yang sempat tertunda akibat Covid-19. Selain itu, pertumbuhan investasi Lampung dapat kembali meningkat dengan prasyarat masuknya investasi PMA dan PMDN yang bernilai besar, seperti pengembang kawasan terintegrasi pariwisata Bakauheni, pembangunan beberapa kawasan khusus dan kawasan industri lainnya.

Prospek inflasi pada triwulan II tahun 2020 diperkirakan masih tetap terjaga pada kisaran sasaran  $3 \pm 1\%$  (yoy), meskipun berada pada batas atas sasaran. Inflasi yang terkendali ditopang oleh terjangkarnya ekspektasi inflasi di tengah perlambatan daya beli masyarakat. Namun, terdapat resiko level kenaikan harga barang dan jasa ditahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan normal tahunan sebagai akibat persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak pada bulan Desember 2020 dibarengi dengan kebijakan yang dapat mendorong biaya produksi (*cost push inflation*) dan peningkatan biaya distribusi (*distribution cost*).

Sama halnya seperti pada tahun 2020, prospek inflasi pada tahun 2021 diperkirakan juga masih tetap terjaga pada kisaran  $3 \pm 1\%$  (yoy). Terjaganya inflasi diperkirakan seiring adanya konsistensi kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan harga serta pengaruh nilai tukar yang rendah terhadap inflasi. Meski demikian, masih terdapat beberapa hal yang dapat menjadi resiko peningkatan tekanan inflasi, yaitu pada kelompok bahan makanan mengingat sifatnya yang rentan terhadap ketersediaan pasokan, khususnya komoditas hortikultura.

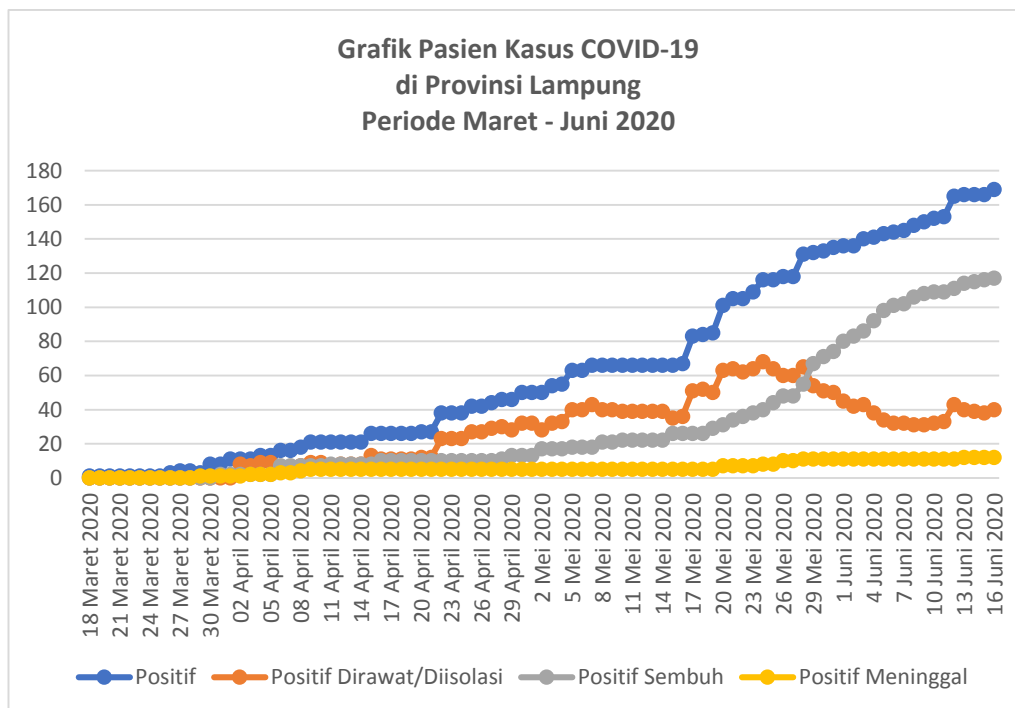
### **3.1.2.3. Kebijakan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) di Daerah**

Sejak ditetapkannya COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia pada tanggal 30 Januari 2020 oleh WHO (*World Health Organization*) yang diikuti dengan munculnya kasus pertama kali di Depok Jawa Barat, maka pada tanggal 2 Maret 2020 Presiden Joko Widodo mengumumkan munculnya kasus COVID-19 yang pertama di Indonesia. Dengan memperhatikan tingkat penyebaran COVID-19 yang sangat cepat, maka pada tanggal 11 Maret 2020 WHO resmi menyatakan COVID-19 sebagai pandemi yang merupakan wabah penyakit global karena telah melewati fase wabah dan epidemi.

Penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung pertama kali dilaporkan pada tanggal 18 Maret 2020 dan dalam rentang waktu beberapa bulan kasus positif meningkat cukup signifikan. Berdasarkan data yang tercatat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung bahwa sampai dengan bulan Juni 2020 terdapat 166 orang yang positif COVID-19 dan 142 orang Pasien Dalam Pengawasan dan dari 166 orang Positiv covid tersebut, sebanyak 12 orang meninggal dunia.

#### Gambar III - 4

Grafik Perkembangan Pasien Kasus COVID-19 di Provinsi Lampung



Dengan meluasnya penyebaran wabah COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia menyebabkan perlu dilakukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka penanggulangan COVID-19 di daerah yang telah diselaraskan dengan kebijakan nasional, diantaranya adalah:

- a. Dibentuknya Tim Gugus Tugas COVID-19 dan Posko COVID-19 berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/196/V.02/HK/2020 tanggal 3 April 2020, guna melakukan pemeriksaan dan pengecekan identitas di simpul-simpul transportasi,;
- b. Dilakukannya realokasi anggaran untuk *refocusing* belanja pencegahan dan penanganan COVID-19;
- c. Menindaklanjuti hasil dari *refocusing* anggaran dan dituangkan ke dalam program/kegiatan prioritas.

Kebijakan penganggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona*



*Virus Disease 2019* (COVID-19), diarahkan untuk percepatan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi (realokasi) anggaran. Tahun 2020, kebutuhan anggaran untuk penanggulangan pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung adalah sebesar Rp. 246.406.769.023,-, yang difokuskan untuk :

1. Penanganan Kesehatan sebesar Rp. 201.802.969.023,-
2. Penanganan Dampak Ekonomi sebesar Rp. 26.901.150.000,-
3. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial sebesar Rp. 17.702.650.000,-

Pandemi COVID-19 ini telah berdampak pada stabilitas berbagai sektor pembangunan maupun perekonomian daerah, selain mempengaruhi kehidupan sosial, juga membuat sektor ekonomi tertekan, nilai tukar rupiah semakin melemah, daya beli masyarakat menurun, sektor pertanian, pariwisata, pendidikan dan industri/UMKM menjadi terganggu. Untuk menanggulangi hal tersebut pemerintah perlu menyiapkan kebijakan dan strategi pemulihan di berbagai sektor melalui tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19.

Kebijakan pembangunan dalam pemulihan dampak COVID-19 pada Tahun 2021 masih difokuskan untuk penanganan 3 (tiga) bidang utama, yaitu:

1. Bidang Kesehatan

Penguatan sistem kesehatan melalui:

- a. Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas *health security* terutama *surveilans*, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi,
- b. Pemenuhan sumber daya kesehatan yang meliputi fasilitas kesehatan, farmasi, alat kesehatan, serta sumber daya manusia kesehatan.

2. Bidang Ekonomi

- a. Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRRT untuk mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat, melalui:
  - 1) Stabilisasi inflasi,
  - 2) Mengurangi berbagai ketimpangan (pendapatan) antarkelompok masyarakat maupun antarwilayah,

- 3) Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
- b. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, melalui:
    - 1) Penyederhanaan dan percepatan pelayanan investasi,
    - 2) Pemberian insentif pajak bagi investor
    - 3) Jaminan kepastian hukum berusaha, kepastian biaya pelayanan.
    - 4) Promosi investasi.
    - 5) Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mendukung usaha, bisnis dan investasi.
  - c. Peningkatan *value for money* agar kualitas belanja pemerintah lebih produktif
  - d. Peningkatan daya saing produk ekspor, yang meliputi:
    - 1) Pengembangan produk ekspor potensial,
    - 2) Mendorong berkembangnya industri berorientasi ekspor,
    - 3) Diversifikasi negara tujuan ekspor,
    - 4) Peningkatan ekspor antar daerah melalui kerjasama perdagangan.
  - e. Pembangunan sektor pertanian, yang mencakup:
    - 1) Peningkatan Indeks Pertanaman sebagai hasil dari pembangunan irigasi lahan-lahan yang kering,
    - 2) Fokus pada subsektor tanaman pangan seperti pisang dan nanas,
    - 3) Peningkatan produksi sapi.
    - 4) Implementasi Kartu Petani Berjaya (KPB) dalam rangka meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan melalui upaya penyelesaian permasalahan secara terstruktur, sistematis dan terintegrasi melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi
  - f. Pemulihan industri dan perdagangan, melalui:
    - 1) Melanjutkan upaya *debottlenecking* regulasi kemudahan berinvestasi, kepastian penyediaan lahan, dan penyediaan energi listrik yang memadai,
    - 2) Perbaiki pasar dan produktivitas tenaga kerja.

- 3) Fasilitasi perdagangan untuk ekspor manufaktur dan fasilitasi impor untuk pemenuhan kebutuhan daerah khususnya bahan baku dan barang modal.
  - g. Pembangunan pariwisata, melalui:
    - 1) Peningkatan kembali frekuensi dan jalur penerbangan,
    - 2) Peningkatan pemasaran pariwisata yang sudah pulih,
    - 3) Peningkatan event olah raga, seni budaya dan MICE,
    - 4) Penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas,
    - 5) Peningkatan infrastruktur, dan standar layanan.
  - h. Pembangunan infrastruktur, melalui investasi infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan pertanian, kawasan industri, dan kawasan pariwisata.
3. Bidang Sosial
- a. Perluasan program bantuan sosial termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal.
  - b. Pembangunan sumber daya manusia yang diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah.

### 3.13. Strategi dan Sasaran Pembangunan Ekonomi

Untuk mewujudkan target pembangunan daerah, terhadap ekonomi diperlukan kerja keras disertai pilihan-pilihan **kebijakan strategis** dalam mengatasi tantangan yang tengah berlangsung, diantaranya :

**Disisi permintaan**, perekonomian daerah masih mengandalkan pada konsumsi masyarakat yang merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi Lampung karena memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian. Konsumsi rumah tangga pada tahun 2021 diharapkan tumbuh dalam rentang 5,65 – 6,4 persen. Dari sisi konsumsi rumah tangga, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat secara umum, melalui upaya dan

strategi dalam menjaga stabilitas inflasi, serta mengatasi berbagai ketimpangan baik dalam konteks pendapatan antar kelompok masyarakat maupun antar wilayah. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang selaras dengan perlindungan sosial.

Pada tahun 2021, konsumsi pemerintah diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi meskipun tantangannya cukup berat mengingat arah kebijakan konsumsi pemerintah diarahkan pada peningkatan *value for money* agar lebih efektif, efisien, dan produktif agar dapat menstimulasi perekonomian dan kesejahteraan.

PMTB diperkirakan mampu tumbuh pada kisaran 9,34 – 10,2 persen. Pertumbuhan investasi tersebut dihadapkan pada sejumlah risiko seperti partisipasi swasta yang masih rendah, dan juga selesainya pembangunan infrastruktur strategis pemerintah. Oleh karena itu langkah yang perlu dilakukan yaitu dengan berupaya menarik sebanyak-banyaknya investasi swasta ke Lampung dengan mewujudkan Lampung Ramah Usaha.

Dari sisi ekspor dan impor, diperkirakan terus membaik. Sebagai langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor, perluasan negara tujuan yang merupakan pasar potensial ekspor terus diupayakan melalui kerjasama perdagangan. Mendorong perbaikan kinerja ekspor dengan memprioritaskan langkah peningkatan efisiensi akses dan konektivitas arus logistik antara Jalan Tol Trans Sumatera dengan Pelabuhan Panjang dan Bandara Radin Inten II.

**Disisi penawaran,** untuk pemulihan ekonomi serta mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2021, Pemerintah Provinsi Lampung akan mendorong sektor basis perekonomian daerah, yaitu Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan disamping sektor-sektor ekonomi lainnya.

Kinerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diharapkan lebih baik pada 2021 dengan kisaran 1,34 – 1,4 persen dan sektor ini diharapkan untuk penguatan sistem ketahanan pangan. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB yang terus menurun menjadi tantangan yang diperkirakan akan dihadapi pada periode mendatang. Terdapat banyak aspek yang akan ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Lampung, baik disisi SDM dan

kelembagaan, pelaku pertanian, infrastruktur pertanian, intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, pemanfaatan teknologi pertanian, pengembangan pasar dan berkembangnya industri pengolah produk pertanian. Lebih lanjut, kepastian dan perlindungan harga jual petani serta stabilisasi harga jual produk pangan. Pengimplementasian KPB (Kartu Petani Berjaya) dan KNB (Kartu Nelayan Berjaya) diharapkan dapat membantu para petani mengatasi permasalahan yang mereka hadapi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

Pertumbuhan sektor Industri menjadi salah satu fokus pembangunan 2021 yang diperkirakan dapat tumbuh pada kisaran 8,26 – 8,7 persen bahkan bisa lebih tinggi. Dengan makin berkembangnya kelas menengah, maka pasar dalam negeri menjadi lebih kokoh. Untuk itu Pemerintah Provinsi Lampung akan memperkuat industri pengolahan yang mampu menciptakan nilai tambah yang efisien, dengan tetap mengembangkan produktivitas dan ketahanan sektor pertanian, khususnya industri berbasis ekonomi lokal. Geliat sector Industri dampak covid-19 diharapkan bangkit untuk memenuhi permintaan yang sempat tertahan.

Sektor perdagangan diharapkan akan tumbuh 5,63 – 5,94 persen dengan upaya peningkatan perdagangan antar daerah (antara lain beroperasinya tol Trans Sumatera). Sementara itu, sektor konstruksi diperkirakan akan tumbuh sebesar 7,23 – 7,4 persen dan untuk kinerja sektor Pertambangan diharapkan tetap tumbuh pada kisaran 2,69 – 2,8 persen. Hal ini didorong oleh penggunaan komoditi barang galian seperti pasir dan batu split dalam proyek-proyek pembangunan di tahun 2021.

Sektor lain yang juga diperkirakan menopang pertumbuhan ekonomi Lampung diantaranya sektor transportasi dan pergudangan. Beroperasinya Jalan Tol Trans Sumatera, Dermaga Eksekutif, Bandara Gatot Subroto yang beralihfungsi menjadi bandara sipil, pengembangan Bandara Radin Inten II dan Bandara Taufik Kiemas, serta meningkatnya volume bongkar barang sebagai akibat sempat melambatnya arus keluar masuk barang karena Covid-19 diindikasikan berdampak positif pada sektor transportasi dan pergudangan sehingga pertumbuhannya sebesar 8,05 – 8,08 persen.

Sedangkan sektor informasi dan komunikasi diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 7,96 – 8,4 persen sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi digital.

Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja akan terus didorong agar tumbuh berkembang. Provinsi Lampung memiliki banyak destinasi wisata di wilayah darat maupun pesisir yang cukup dikenal oleh wisatawan domestik serta mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara pada periode beberapa tahun terakhir juga menunjukkan peningkatan. Akan tetapi pandemi covid-19 menyebabkan pada sector ini kehilangan momentum untuk mengeksplorasi potensi wisata Lampung sehingga, strategi dan fokus pengembangan pariwisata daerah terus dilanjutkan untuk mewujudkan Lampung sebagai salah satu tujuan utama wisata Indonesia. Upaya mempercepat pemulihan pembangunan kepariwisataan dilakukan peningkatan aksesibilitas dengan memperbaiki infrastruktur (sarana dan prasarana) disekitar lokasi objek wisata yang telah ada, sekaligus mendorong tumbuhnya investasi dan mengakselerasi pendapatan masyarakat lokal, yang diikuti dengan pembangunan dan pengembangan kawasan wisata edukatif di kawasan Tahura, termasuk pelaksanaan event-event promosi wisata yang terangkum dalam tajuk Lampung Kaya Festival.

Menghadapi risiko inflasi pada tahun 2021, strategi yang dilakukan dalam rangka menjaga laju inflasi agar berada dalam range  $3,0 \pm 1$  persen yaitu memenuhi 4 K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif), antara lain sebagai berikut:

- Memperkuat ketersediaan database surplus defisit pangan masing-masing kabupaten/kota guna memastikan ketersediaan pasokan dan mengoptimalkan pemanfaatan informasi harga komoditas pangan yang ada di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) sebagai referensi untuk merumuskan kebijakan stabilisasi harga.
- Memperkuat koordinasi antara TPID, BULOG, dan Satgas Pangan dalam memastikan ketersediaan cadangan serta keterjangkauan harga di pasar,

mengawasi kelancaran dan keamanan distribusi komoditas pangan dan BBM.

Kinerja perekonomian Lampung dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perkuatan momentum pertumbuhan dengan stabilitas yang terus terjaga di tengah gejolak ketidakpastian perekonomian global menuju era normalisasi dan perbaikan ekonomi nasional. Walaupun ditahun 2020 ini dihadapkan dengan pandemic Covid-19, namun Pemerintah Provinsi Lampung tetap berupaya dan optimis untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan inklusif agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih adil dan merata.

Selain mengerek pertumbuhan ekonomi, di saat yang sama, Pemerintah Provinsi Lampung juga fokus untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, sehingga bisa menekan angka pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan. Kualitas pembangunan manusia akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan, permasalahan sosial, hingga masalah produktifitas ekonomi daerah.

Dengan memperhatikan berbagai dinamika global dan nasional, , maka beberapa sasaran kinerja ekonomi dan sosial Provinsi Lampung tahun 2021 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel III - 8  
Sasaran Kinerja Ekonomi dan Sosial Provinsi Lampung  
Tahun 2021

URAIAN	TARGET TAHUN 2021
Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)	4,7 – 5,7
Inflasi (%yoy)	3,0 ± 1%
PDRB Perkapita (Rp Juta)	44 – 45 juta
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,3
Tingkat Kemiskinan (%)	11,5 – 12,1
IPM	70,86
Indeks Gini	0,32 – 0,33

### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan dan penganggaran sangat erat kaitannya dan memiliki dasar hukum. Rencana Kerja Pemerintah yang sedang disusun saat ini baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan penjabaran dari RPJMN dan RPJMD, yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program/kegiatan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dipertegas kembali bahwa RKPD yang disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sementara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa penyusunan rancangan keuangan daerah (R-APBD) berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Secara umum, pengelolaan keuangan daerah yang disusun dan mengacu pada ketentuan perundangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri pada setiap tahun anggaran. Untuk itu, pada tahun 2021, sebagai tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, kebijakan keuangan tahun 2021 diarahkan untuk “ ***Meningkatkan Kualitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur dalam rangka Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat***”



***Menuju Lampung Berjaya***” dengan prioritas daerah sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM); 2) Pembangunan infrastruktur ; 3) Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan; 4) Reformasi Birokrasi; 5) Kehidupan yang Religius, Aman, Berbudaya dan Inovatif; 6) Pembangunan Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

### **3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Perkembangan realisasi pendanaan pembangunan Provinsi Lampung selama kurun waktu tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

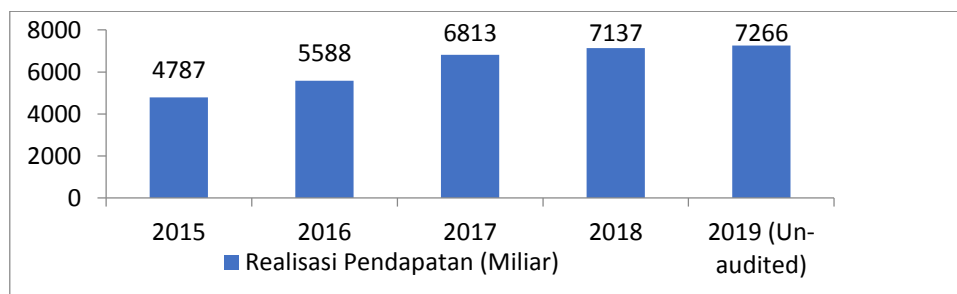
Tabel III - 9  
Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2015 – 2019

NO	URAIAN	REALISASI TA. 2015	REALISASI TA. 2016	REALISASI TA. 2017	REALISASI TA. 2018	REALISASI TA. 2019 (Un-audited)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>4.787.308.489.026,39</b>	<b>5.588.722.511.301,34</b>	<b>6.813.755.009.492,40</b>	<b>7.137.049.975.851,00</b>	<b>7.266.988.971.746,38</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>2.247.342.667.611,39</b>	<b>2.368.796.251.247,34</b>	<b>2.750.596.478.331,40</b>	<b>2.902.313.507.327,46</b>	<b>3.018.062.824.078,38</b>
1.1.1	Pajak Daerah	1.963.322.716.952,00	2.051.836.519.458,22	2.451.408.220.072,00	2.577.739.717.944,23	2.627.888.230.394,00
1.1.2	Retribusi Daerah	10.376.053.695,00	7.184.465.984,00	7.322.619.001,00	7.801.377.392,00	11.069.477.866,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yg Dipisahkan	25.715.957.116,73	26.696.866.021,45	27.522.159.554,80	27.771.046.310,18	51.895.360.346,50
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	247.927.939.847,66	283.078.399.783,67	264.343.479.703,60	289.001.365.681,05	327.209.755.471,88
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.514.291.528.636,00</b>	<b>3.158.712.900.538,00</b>	<b>2.643.744.659.461,00</b>	<b>4.207.157.804.891,00</b>	<b>2.627.195.349.110,00</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	105.182.867.100,00	145.745.610.056,00	144.778.671.118,00	126.119.301.793,00	87.416.096.820,00
1.2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	66.912.822.536,00	39.730.387.355,00	104.561.372.263,00	89.921.761.457,00	51.128.238.596,00
1.2.3	DAU	1.097.129.439.000,00	1.321.679.032.000,00	1.851.595.354.000,00	1.854.701.094.160,00	1.906.780.297.000,00
1.2.4	DAK	245.066.400.000,00	1.651.557.871.127,00	542.809.262.080,00	449.744.110.044,00	581.870.716.694,00
1.2.5	DAK Non Fisik	-	-	-	1.686.671.537.437,00	-
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>1.025.674.292.779,00</b>	<b>61.213.359.516,00</b>	<b>1.419.413.871.700,00</b>	<b>27.578.663.633,00</b>	<b>1.621.730.798.558,00</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	19.264.124.919,00	10.426.215.516,00	10.374.402.200,00	11.858.698.341,00	11.362.590.000,00
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1.006.209.812.500,00	40.671.144.000,00	7.500.000.000,00	-	26.756.363.000,00
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	200.355.360,00	10.116.000.000,00	1.401.539.469.500,00	15.719.965.292,00	

Berdasarkan tabel di atas, Kinerja Pendapatan Daerah periode Tahun Anggaran 2015-2019 secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pendapatan Daerah pada T.A. 2015 tercatat sebesar Rp 4,787 triliun meningkat menjadi Rp 7,266 triliun di T.A. 2019. Pertumbuhan Pendapatan Daerah pada periode tersebut tercatat 5,76 persen (2015); dan sebesar 1,82% pada tahun 2019.

Grafik III - 5

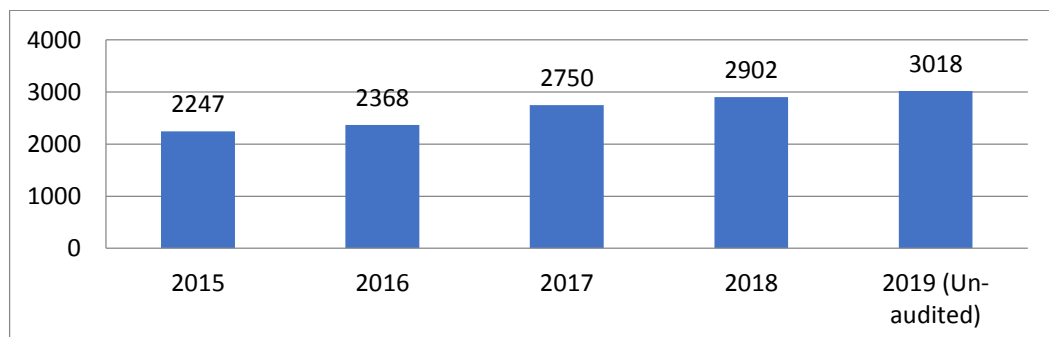
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015 – 2019 (Juta Rupiah)



Kemandirian fiskal daerah yang direpresentasikan dengan kemampuan pemerintah daerah menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum juga mengalami peningkatan. PAD Provinsi Lampung pada tahun 2015 tercatat sebesar 2,247 triliun Rupiah dan meningkat menjadi 3,018 triliun rupiah pada tahun 2019 atau sebesar 770,720 milyar selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Grafik III - 6

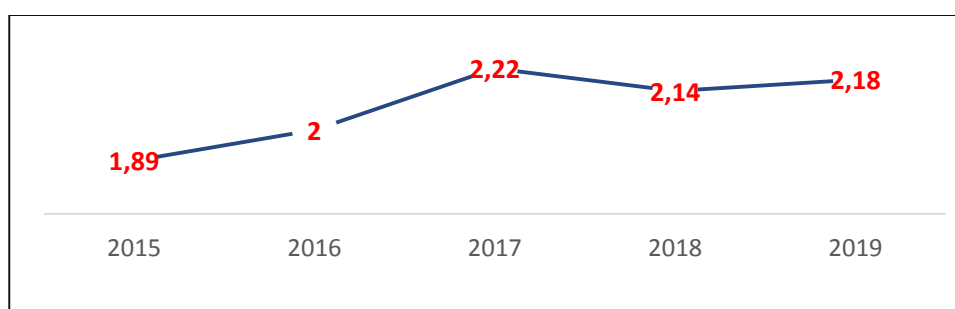
Realisasi dan Target PAD Tahun 2015 – 2019 (Juta Rupiah)



### 3.2.2. Rasio Pendapatan Daerah Terhadap PDRB

Dengan mengetahui perbandingan antara Pendapatan Daerah dengan PDRB Provinsi Lampung, dapat diketahui seberapa besar kontribusi Pendapatan dalam mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Rasio Pajak Provinsi Lampung pada periode tahun 2015-2019 belum banyak berubah, yaitu pada kisaran angka 1,89 hingga 2,18 persen.

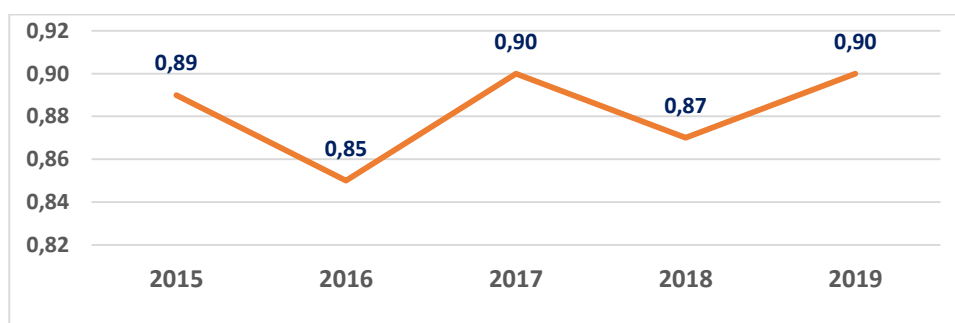
Grafik III - 7  
Rasio Pendapatan terhadap PDRB Provinsi Lampung  
Tahun 2015 – 2019 (persentase)



### 3.2.3. Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap PDRB

Dengan mengetahui perbandingan antara Pajak Daerah dengan PDRB Provinsi Lampung (Rasio Pajak), dapat diketahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dalam mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Rasio Pajak Provinsi Lampung (Tabel III-21) pada periode tahun 2015 - 2019 belum banyak berubah secara signifikan, yaitu pada kisaran angka 0,89 hingga 0,90 persen.

Grafik III - 8  
Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap PDRB Provinsi Lampung  
Tahun 2015 -2019



#### **3.2.4. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021.**

Merujuk pada data histori perkembangan perekonomian daerah dan Pendapatan Daerah pada tahun-tahun sebelumnya, tampak bahwa Perekonomian Daerah dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung menunjukkan tren yang meningkat akan tetapi untuk target pendapatan daerah tahun 2020 berpeluang untuk tidak tercapai mengingat kontraksi perekonomian yang disebabkan pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia. Berbagai langkah kebijakan telah dilakukan Pemerintah guna mengantisipasi penularan wabah covid-19 antara lain dengan melakukan *Refocussing* Anggaran sampai dengan Rasionalisasi penyesuaian anggaran belanja daerah tahun 2020.

Sehubungan dengan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun 2020, maka proyeksi pendapatan tahun 2021 akan sulit dicapai. Sejatinya, proyeksi Dana Perimbangan telah dapat memperhitungkan kisaran tambahan alokasi DAU secara lebih signifikan, namun berdasarkan hasil koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat belum dapat menyimpulkan informasi yang cukup lengkap tentang kebijakan DAU tahun 2021, maka proyeksi pendapatan DAU pada tahun 2021 ini masih menggunakan asumsi penghitungan pendapatan DAU secara normal dengan proyeksi peningkatan untuk penyesuaian gaji pegawai .

Tabel III - 10

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung  
Tahun 2016 – 2021 (Juta Rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI TA. 2016	REALISASI TA. 2017	REALISASI TA. 2018	REALISASI TA. 2019	TARGET TAHUN 2020		PROYEKSI 2021
						Sebelum Refocussing (MURNI 2020)	Setelah Refocussing 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>5,585,023,474,025.01</b>	<b>6,822,818,640,215.00</b>	<b>7,137,049,975,851.46</b>	<b>7,371,432,528,025,69</b>	<b>7,845,822,077,133</b>	<b>6,850,908,790,003</b>	<b>7.059.266.043.329,18</b>
1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	2,365,097,213,971.01	2,759,859,176,654.00	2,902,313,507,327.46	2.987.249.600.061,42	3,298,430,257,568	2,627,132,477,404	2.844.132.780.620,68
1.1.1	Pajak Daerah	2,051,836,519,458.00	2,451,339,713,997.00	2,577,739,717,944.23	2.664.929.542.285,00	2,829,824,716,968	2,208,824,716,968	2.388.324.716.968,00
1.1.2	Retribusi Daerah	7,009,465,984.00	7,322,619,001.00	7,801,377,392.00	13.049.446.772,00	16,400,000,000	11,431,298,440	10,293,292,135.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yg Dipisahkan	26,696,866,021.00	27,522,159,554.80	27,771,046,310.18	31.825.503.773,31	32,200,000,000	30,056,449,342	28,269,681,604.88
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	279,554,362,507.34	273,674,684,101.44	289,001,365,681.05	277.445.107.231,11	420,005,540,600	376,820,012,654	417,245,089,912.80
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>3,158,712,900,538.00</b>	<b>4,028,319,626,961.00</b>	<b>4,207,157,804,891.00</b>	<b>4.324.348.511.447,00</b>	<b>4,495,735,075,000</b>	<b>4,191,460,292,864</b>	<b>4.163.289.985.000,00</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	145,745,610,056.00	148,231,954,099.00	126,119,301,793.00	137.881.121.124,00	112,092,321,000	150,221,861,781	126.055.249.000,00
1.2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	39,730,387,355.00	101,108,089,282.00	89,921,761,457.00	42.364.193.323,00	51,543,790,000	38,931,066,083	34.927.371.000,00
1.2.3	DAU	1,321,679,032,000.00	1,851,595,354,000.00	1,854,701,094,160.00	1,906,780,297,000.00	1,922,699,775,000	1,739,916,377,000	1.739.916.377.000,00
1.2.4	DAK	1,651,557,871,127.00	1,927,384,229,580.00	2,136,415,647,481.00	2.237.322.900.000,00	2,409,399,189,000	2,262,390,988,000	2.262.390.988,00
1.2.5	DAK Non Fisik	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>61,213,359,516</b>	<b>34,639,836,600</b>	<b>27,578,663,633</b>	<b>59.834.416.517,27</b>	<b>51,656,744,565</b>	<b>32,316,019,735</b>	<b>51.843.277.708,50</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	10,426,215,516.00	10,259,402,200.00	11,858,698,341.00	11,362,590,000.00	13,915,344,753	13,915,344,753	14,902,602,708.50
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	40,671,144,000.00	7,500,000,000.00	-	26,756,363,000.00	19,571,922,000	18,400,675,000	18.400.675.000,00
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	10,116,000,000.00	18,000,000,000.00	15,719,965,292.00	17,746,958,783.00	18,169,477,830	(18,169,477,830)	18,540,000,000.00

### 3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Memperhatikan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Sampai saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya dengan kebijakan yang tetap memperhatikan kemampuan masyarakat secara umum, sekaligus menjaga stabilitas dan kesinambungan fiskal daerah.

Secara umum kebijakan pendapatan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung tidak jauh berbeda dengan kebijakan pendapatan tahun 2020 yaitu dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki, antara lain:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi:
  - Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah untuk mendorong tingkat kepatuhan membayar pajak;
  - Sosialisasi dengan memanfaatkan berbagai media sosial dan elektronik dalam rangka membangun tingkat sadar pajak masyarakat;
  - Meningkatkan kepatuhan wajib pajak, melalui kegiatan pendataan potensi pajak kendaraan bermotor (*door to door*);
  - Mengembangkan dan mengoptimalkan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang semakin mudah, cepat dan akuntabel serta memperbanyak tempat pelayanan agar pelayanan semakin dekat dan terjangkau oleh masyarakat
  - Peningkatan pelayanan di sektor pajak daerah dan Retribusi daerah melalui peningkatan sarana, prasarana dan pemeliharaan rutin bagi peningkatan pelayanan.
  - Pengembangan dan peningkatan sistem informasi pembayaran serta pelaporan berbasis on-line di sektor pajak Bahan Bakar Kendaraan

bermotor (PBB-KB), pajak Air Permukaan (PAP), pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

- Meningkatkan sinergisitas antar instansi baik vertikal maupun horisontal terkait pengelolaan pendapatan daerah.
- Koordinasi yang intensif dan sinkronisasi dengan meningkatkan kerjasama dengan seluruh OPD pengelola pendapatan;
- Melakukan memperbaharui regulasi pajak dan Non Pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan ketaatan masyarakat membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peningkatan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengelolaan PAD.
- Sosialisasi produk hukum daerah serta FGD di sektor Non Pajak.

2) Dana Perimbangan yang meliputi :

- Memperbaiki berbagai variabel yang dijadikan sebagai dasar perhitungan besaran Dana Perimbangan oleh Departemen keuangan.
- Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat
- Mengoptimalkan perhitungan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 berkoordinasi dengan Kanwil DJP Wilayah Bengkulu dan Lampung.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang meliputi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya; dikoordinasikan sesuai dengan kewenangan.

### **3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara adalah instrumen untuk mencapai tujuan Nasional. Politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan yang akan dicapai (*policy driven*). Teknis perencanaan dan anggaran adalah memastikan tujuan pembangunan



dapat dicapai dengan mengoptimalikan seluruh sumber daya serta meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keadilan untuk mencapai tujuan pembangunan, dan memperbaiki kualitas belanja.

Anggaran belanja harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional dan Daerah. Kebijakan anggaran belanja diarahkan pada kelanjutan implikasi dari kebijakan *money follow program*. Tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata, namun hanya program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian proritas daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), belanja oprasional daerah serta belanja yang mendukung prioritas Nasional, sehingga kebijakan *money follow program* bisa berjalan dengan baik.

Penggunaan belanja daerah yang meliputi Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung dalam APBD ditujukan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang terdiri dari urusan: konkuren yang merupakan urusan wajib, urusan pilihan .

Dampak Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 menyebabkan terganggunya tidak saja terhadap sektor kesehatan secara langsung akan tetapi juga terhadap kinerja ekonomi yang melambat dan berimbas kepada permasalahan sosial masyarakat . Oleh karena itu tahun 2021 adalah tahun pemulihan dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 sehingga belanja daerah diantaranya selain untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, juga difokuskan kepada penanganan dampak Covid-19, yaitu untuk: i) Penanganan Kesehatan; ii) Penanganan Dampak ekonomi seperti: ketahanan pangan, insentif ekonomi, stimulus UMKM, pelathan kerja dan kewirausahaan; iii) Jaring Pengaman Sosial/perlindungan masyarakat yang terkena dampak seperti bansos kepada masyarakat miskin; dan iv) Pemulihan sektor industri dan pariwisata yang merupakan sektor yang paling terkena dampak. Pada sisi lain kebijakan belanja daerah juga memprioritaskan pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada

tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD. Sementara, belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 struktur belanja dalam APBD terdiri dari kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, maka arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah adalah sebagai berikut :

- 1) **Belanja Tidak Langsung** merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
  - a. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - b. Belanja **bunga** digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD.
  - c. Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal dan instansi pendukung penyelenggaraan pemerintahan (seperti PMI, KONI, Pramuka dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga

tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan pelayanan umum kepada masyarakat.

- d. Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
  - e. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
  - f. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
  - g. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.
- 2) **Belanja Langsung** merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

- b. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- c. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Tabel III - 11

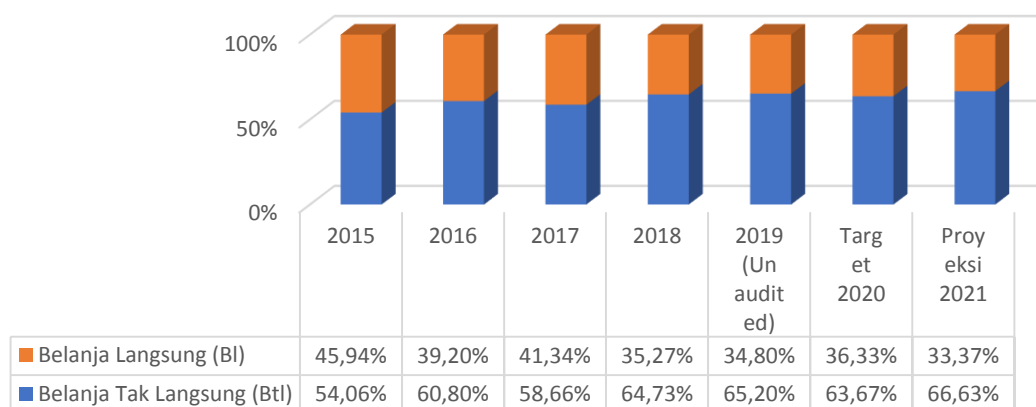
Realisasi Tahun 2015 – 2019, Target 2020 dan Proyeksi Tahun 2021  
Belanja Daerah Provinsi Lampung (Juta Rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI TA. 2015	REALISASI TA. 2016	REALISASI TA. 2017	REALISASI TA. 2018	REALISASI TA. 2019	TARGET TA. 2020	PROYEKSI 2021
2	<b>Belanja Daerah</b>	<b>4.781.202.048.883,15</b>	<b>5.476.921.595.654,51</b>	<b>6.948.838.067.137,69</b>	<b>8.617.384.794.321,94</b>	<b>7.057.572.031.474,41</b>	<b>7.735.642.077.133,00</b>	<b>7.811.774.104.256,00</b>
2.1	<b>Belanja Tak Langsung (Btl)</b>	<b>2.584.515.351.359,29</b>	<b>3.329.844.924.944,00</b>	<b>4.076.112.960.248,19</b>	<b>5.578.272.296.471,44</b>	<b>4.601.404.065.605,73</b>	<b>4.924.942.814.830,00</b>	<b>5.205.320.901.029,00</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	700.857.891.664,00	736.252.705.918,00	1.662.465.213.614,00	1.815.028.256.755,00	1.761.595.128.476,00	1.901.466.672.093,00	2.135.712.934.396,00
2.1.2	Belanja Hibah	1.092.450.978.749,00	1.450.803.387.985,00	1.288.548.794.355,83	1.498.345.481.599,00	1.329.394.600.511,00	1.531.303.164.400,00	1.531.303.164.400,00
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	6.409.900.000,00	2.587.280.000,00	4.509.000.000,00	529.560.000,00	1.030.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kabupaten/Kota Dan Pemdes	762.543.531.454,29	1.089.846.007.459,00	1.018.147.805.682,36	1.128.477.614.768,22	1.459.179.743.870,73	1.439.922.978.337,00	1.485.554.802.233,00
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kabupaten/Kota/ Pemdes Serta Parpol	22.253.049.492,00	46.368.543.582,00	81.576.898.096,00	1.128.477.614.768,22	15.896.272.800,00	4.750.000.000,00	4.750.000.000,00
2.1.6	Belanja Subsidi	-	-	-	1.852.030.960,00	926.015.480,00	-	-
2.1.7	Belanja Bunga	-	-	-	1.784.056.321,00	33.382.304.468,00	32.000.000.000,00	12.500.000.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	3.987.000.000,00	20.865.248.500,00	3.777.681.300,00		15.000.000.000,00	35.000.000.000,00
2.2	<b>Belanja Langsung (Bl)</b>	<b>2.196.686.697.523,86</b>	<b>2.147.076.670.710,51</b>	<b>2.872.725.106.889,50</b>	<b>3.039.112.497.850,50</b>	<b>2.456.167.965.868,68</b>	<b>2.810.699.262.303,00</b>	<b>2.606.453.203.227,00</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	90.380.434.285,00	103.053.242.520,00	54.011.945.529,00		166.083.743.332,00	204.246.059.076,00	-
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	1.237.307.067.778,86	1.038.243.623.007,51	1.367.228.488.664,86	1.309.826.167.166,66	1.276.764.486.086,29	1.628.775.584.449,62	1.628.775.584.449,62
2.2.3	Belanja Modal	868.999.195.460,00	1.005.779.805.183,00	1.451.484.672.695,64	1.729.286.330.683,84	1.013.319.736.450,39	977.677.618.777,38	977.677.618.777,38

Memperhatikan kinerja Belanja Daerah periode Tahun Anggaran 2015-2021, secara nominal Belanja Daerah meningkat dari tahun ke tahun. Belanja Daerah pada T.A. 2015 tercatat sebesar 4,781 triliun Rupiah meningkat menjadi 7,811 triliun Rupiah di T.A. 2021. Peningkatan Belanja Daerah pada periode tersebut tercatat 7,34 persen (2015); 14,55 persen (2016); 26,87 persen (2017); 24,01 persen (2018); (-18,1) persen (2019); 9,61 persen (2020), dan proyeksi tahun 2021 sebesar 0,98 persen.

Grafik III - 12

Komposisi Belanja Tak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) APBD Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2021 (Persen)



Berdasarkan Grafik III-17 di atas, komposisi Belanja Daerah pada periode pengamatan 2015 s.d. 2021; perbandingan komposisi antara Belanja Tak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) masih berada pada kisaran yang cukup proporsional. Disisi keuangan, mengingat bahwa masih adanya kewajiban Pemerintah Provinsi Lampung terhadap Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, maka beban Belanja Tak Langsung pada pada periode dua tahun terakhir cukup meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Komponen Belanja Tak Langsung (BTL) berada pada porsi 54,06 persen di tahun 2015; 60,80 persen di tahun 2016; 58,66 persen ditahun 2017; 64,73 persen target ditahun 2018; 65,20 persen target ditahun 2019; 63,67 persen target ditahun 2020, dan 66,63 persen proyeksi di tahun 2021. Sementara komponen Belanja Langsung (BL) berada pada porsi 45,94 persen

di tahun 2015; 39,20 persen di tahun 2016; 41,34 persen di tahun 2017; 35,27 persen di tahun 2018; 34,80 persen di tahun 2019; 36,33 persen target di tahun 2020 dan 33,37 persen proyeksi di tahun 2021.

#### **3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Kebijakan pembiayaan terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berdampak pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Oleh karenanya, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada dukungan terciptanya anggaran yang berimbang (*zero deficit*). Untuk mencapai itu perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi sehingga defisit anggaran tersebut dapat ditanggulangi antara lain melalui:

##### **3.2.4.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan daerah direncanakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, akan dimanfaatkan secara efisien bagi kegiatan yang lebih bernilai ekonomis.

##### **3.2.4.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan Provinsi Lampung adalah:

- 1) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran penyertaan modal investor daerah;
- 2) Pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan pada pembayaran pokok utang sebagai kewajiban atas pinjaman yang telah dilaksanakan pada tahun 2019.
- 3) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas

yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau **pengeluaran pembiayaan**. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Secara rinci, data historis realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah disajikan dalam Tabel sebagai berikut:



Tabel III - 13  
 Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019,  
 Target Tahun 2020 serta Proyeksi Tahun 2021

NO	URAIAN	REALISASI TA. 2015	REALISASI TA. 2016	REALISASI TA. 2017	REALISASI TA. 2018	REALISASI TA. 2019 (un-audited)	TARGET TA. 2020	PROYEKSI 2021
3	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>96.405.154.713,43</b>	<b>92.511.594.856,67</b>	<b>189.312.510.503,50</b>	<b>533.882.206.308.21</b>	<b>209.416.942.271,97</b>	<b>-110.180.000.000,00</b>	<b>-256.058.576.210,00</b>
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	111.474.702.213,43	102.511.594.856,67	204.312.510.503,50	534.042.206.308.21	213.992.353.291,31	85.000.000.000,00	20.000.000.000,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	15.069.547.500,00	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	160.000.000,00	86.138.166.352,00	195.180.000.000,00	276.058.576.210,00

## **BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Tahun 2021 merupakan tahun ke-2 pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 maupun RPJMN Tahun 2020-2024, dan menjadi moment penting untuk memperkuat sinergi dan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional. Untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan, RKPD Provinsi Lampung Tahun 2021 disusun dengan mencermati capaian pembangunan daerah pada tahun sebelumnya serta mempertimbangkan permasalahan maupun tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun perencanaan, termasuk proyeksi kerangka ekonomi maupun kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Disatu sisi, dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2021 juga diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2021 serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Disisi yang lain, penyusunan RKPD Tahun 2021 juga memperhatikan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perpaduan dari berbagai tinjauan tersebut selanjutnya dituangkan menjadi prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2021.

### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **4.1.1 TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DALAM RPJMN 2020-2024 DAN RKP 2020**

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dijelaskan bahwa Visi Pembangunan Nasional adalah :

***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”***

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditempuh melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:



Selanjutnya, RPJMN 2020-2024 sebagai titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, maka penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian peningkatan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan 9 (sembilan) misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia Maju, yaitu :



## 1 | Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

## 2 | Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

## 3 | Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

## 4 | Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

## 5 | Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk menjabarkan RPJMN 2020-2024 secara tahunan, pemerintah telah mencanangkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 “**Mempercepat Pemulihan ekonomi dan Reformasi Sosial**” dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Arah pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, yaitu :

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Perlindungan Nasional
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Berdasarkan tema dan prioritas pembangunan nasional tersebut, maka sasaran makro pembangunan nasional tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel IV-1  
Sasaran Makro RKP 2021

<b>SASARAN MAKRO RKP 2021</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>Tahun 2021</b>
	- Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5 - 5,5 %
	- Inflasi (%)	3,0 %
	- Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,5 - 8,2 %
	- Tingkat Kemiskinan (%)	9,2 - 9,7 %
	- Indeks Pembangunan Manusia	72,78 - 72,90
	- Indeks Gini	0,377 - 0,379

#### **4.1.2 TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019 - 2024**

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, telah ditetapkan bahwa Visi pembangunan Provinsi Lampung adalah :

***“Rakyat Lampung Berjaya”.***

Dengan visi pembangunan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi *“subyek utama”* dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju

dengan masyarakatnya yang cerdas, berbudaya dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai. Dalam visi "Rakyat Lampung Berjaya" diisyaratkan bahwa kehidupan masyarakat memenuhi kondisi, sebagai berikut:

- Kehidupan masyarakat yang **aman**. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.
- Kehidupan masyarakat yang **berbudaya**. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (*smart*) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.
- Kehidupan masyarakat yang **maju dan berdaya saing**. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
- Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Untuk mencapai visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan daerah tahun 2019 – 2024, sebagai berikut :

1. Misi-1 : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai, melalui Komitmen pelaksanaan pokok-pokok program prioritas :
  - a. Melaksanakan upaya untuk memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan informal, komunikasi publik dan mass media, serta lembaga dan organisasi terkait;
  - b. Memberikan dukungan dalam upaya menumbuhkembangkan, penghayatan, dan pelaksanaan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat;
  - c. Meningkatkan koordinasi dan dukungan kepada instansi vertikal dan Kab/Kota dalam mendorong terciptanya kamtibmas dan penegakan hukum;
  - d. Mendukung dan memperluas sosialisasi penegakan hukum (sadar hukum) sampai ke tingkat perdesaan.
  - e. Meningkatkan peran lembaga adat, lembaga agama, lembaga kemasyarakatan dan forum komunikasi dalam upaya mencegah dan mengatasi terjadinya konflik dalam masyarakat, penyalahgunaan narkoba, radikalisme dan masalah-masalah sosial lainnya.
  - f. Memperkuat komunikasi antarlembaga dan kelompok masyarakat dalam menciptakan kebersamaan dan toleransi, serta meningkatkan kebudayaan daerah dan kerukunan hidup antar umat beragama;
  - g. Meningkatkan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
  - h. Mengembangkan tradisi budaya daerah sebagai kearifan lokal untuk menjadi dasar dan strategi dalam pembangunan daerah;
  
2. Misi-2 : Mewujudkan "*good govemance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik, melalui komitmen pelaksanaan pokok-pokok program prioritas :

- a. Membenahi dan meningkatkan kualitas birokrasi Pemerintah Daerah melalui manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional dalam pembangunan dan pelayanan publik;
- b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dan antar Pemerintah Kabupaten/kota, instansi vertikal di daerah, dan dunia usaha dalam rangka membangun sinergitas pembangunan daerah;
- c. Meningkatkan peranserta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dengan mempergunakan teknologi informasi;
- d. Memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui tatakelola yang profesional dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah untuk pembangunan;
- e. Meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dalam upaya pembangunan daerah Lampung melalui usulan program yang prospektif, inovatif, produktif, dan kolaboratif;
- f. Mengembangkan peran BUMD untuk membantu dan mendukung peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan;
- g. Menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha melalui penyederhanaan perizinan, skema insentif dan dis-insertif, serta kepastian biaya pelayanan.
- h. Mendukung upaya peningkatan kualitas, pemerataan dan akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar (SD, SMP) berkerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan lembaga terkait;
- i. Meningkatkan kualitas, pemerataan dan akses pelayanan pendidikan menengah (SMA) dan kejuruan (SMK) bekerjasama dengan lembaga terkait;
- j. Meningkatkan kualitas, pemerataan, dan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial sampai ke tingkat desa



- bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan lembaga terkait (NGO, lembaga donor, dunia usaha, dll);
- k. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat melalui upaya edukasi dan pemberdayaan bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota.
3. Misi-3 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel, melalui komitmen dalam pelaksanaan pokok-pokok program prioritas :
- a. Mewujudkan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dalam bidang jasmani dan rohani secara baik;
  - b. Melaksanakan upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam rumah tangga, sosial ekonomi, dan kemasyarakatan, serta dalam bidang politik;
  - c. Melaksanakan upaya untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi pekerja dibawah umur (anak), perdagangan perempuan (*women trafficking*), dan menjamin hak-hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan;
  - d. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi bagi kaum difable;
  - e. Mendukung berkembangnya peran lembaga-lembaga yang mengadvokasi perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difable.
4. Misi-4 : Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah, komitmen dalam pelaksanaan melalui pokok-pokok program prioritas :
- a. Memperluas dan mengintegrasikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi untuk memperkuat

- konektivitas internal guna menumbuhkan ekonomi daerah dan pengembangan wilayah secara merata;
- b. Mengembangkan dan memfungsikan jaringan infrastruktur regional (jalan tol Sumatera, jalan nasional, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dermaga, kereta api, dan bandara) untuk meningkatkan konektivitas eksternal dalam upaya memperluas dan meningkatkan daya saing pasar komoditas Provinsi Lampung pada wilayah regional, nasional dan internasional;
  - c. Mendorong investasi pembangkit dan jaringan energi listrik (termasuk energi baru dan terbarukan) dalam upaya meningkatkan kemandirian energi daerah serta pemerataan layanan listrik;
  - d. Mendorong pengembangan sistem penyediaan air minum regional (SPAM Regional);
  - e. Mendorong pengembangan sistem pengolahan sampah regional;
  - f. Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan gas agar bisa melayani rumah tangga secara merata;
  - g. Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan telekomunikasi dan informasi sampai ke wilayah perdesaan.
  - h. Memperluas pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman perdesaan, kampung nelayan dan permukiman (kumuh) perkotaan, serta memfasilitasi
5. Misi-5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan, melalui komitmen dalam pelaksanaan pokok-pokok program prioritas :
- a. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan serta meningkatkan tata kelola air irigasi dalam

- rangka memperluas jangkauan dan meningkatkan index pertanaman serta untuk pengendalian banjir;
- b. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk komoditas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan hutan kemasyarakatan melalui program subsidi, insentif, fasilitasi pemasaran, fasilitasi permodalan, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan saprodi dan alsintan;
  - c. Membangun dan mengembangkan sentra pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan), sentra industri kecil, kawasan industri menengah dan besar, serta sentra pariwisata;
  - d. Membuka peluang investasi seluas-luasnya bagi dunia usaha (bidang produksi, industri pengolahan, perdagangan, jasa, dan pariwisata) dengan prioritas investasi untuk industri hilir yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan ramah lingkungan;
  - e. Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan dan partnership dengan dunia usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah (Kementerian dan Pemerintah Provinsi lainnya) dalam pembangunan daerah dan menciptakan kesempatan kerja;
  - f. Mengembangkan kewirausahaan (koperasi dan UMKM) melalui inovasi dan standarisasi produk (termasuk untuk industri kreatif), akses permodalan, pemasaran, dan program kemitraan dengan pihak lainnya;
  - g. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pendidikan kejuruan, latihan kerja, sertifikasi kompetensi, serta program magang;
  - h. Mendukung perluasan program jaminan sosial dan jaminan kesehatan bekerjasama dengan BPJS, Asosiasi Pengusaha, dan Asosiasi Pekerja.

6. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama, melalui komitmen dalam pelaksanaan pokok-pokok program prioritas :
- a. Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan;
  - b. Mengutamakan pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan dan investasi melalui pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*);
  - c. Mengembangkan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup;
  - d. Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup;
  - e. Mengintensifkan upaya rehabilitasi kawasan hutan, hutan bakau, dan lahan kritis;
  - f. Mengintensifkan program penghijauan di luar kawasan hutan dengan tanaman yang bernilai ekonomi;
  - g. Mengintensifkan upaya perhutanan sosial dalam rangka meningkatkan fungsi lindung kawasan hutan yang terpadu dengan kesejahteraan masyarakat;
  - h. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, pembalakan liar (*illegal logging*), pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan dengan memberdayakan peranserta masyarakat;
  - i. Meningkatkan upaya mitigasi bencana alam berbasis peranserta masyarakat.

Pencapaian Misi dilakukan melalui 33 Janji kerja yang akan dituangkan dalam Program dan kegiatan prioritas. Janji kerja tersebut antara lain :

1. Kartu Petani Berjaya (KPB) Memberikan Jaminan Kepada para Petani untuk mendapat :
  - Kepastian mendapat benih/bibit, pupuk, pestisida dan insektisida secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan petani
  - Kepastian pasar produk pertanian dengan harga yang menguntungkan para petani
  - Bantuan permodalan dalam bentuk kredit usaha tani untuk meningkatkan produktivitas usaha tani
  - Beasiswa bagi anak petani yang berprestasi untuk berbagai jenjang pendidikan, termasuk Perguruan Tinggi
2. Bea-mahasiswa Pertanian yang disediakan khusus bagi mahasiswa yang berprestasi dalam upaya mendorong minat generasi muda pada bidang pertanian.
3. Mencegah dan memberantas peredaran pupuk palsu
4. Revitalisasi Lada (Lampung Black Paper). Meningkatkan produksi, produktivitas serta nilai tambah lada dan memfasilitasi akses pasar sebagai salah satu komoditas unggulan
5. Meningkatkan daya saing kopi, kakao dan komoditas unggulan lainnya (jagung, singkong, udang) melalui penerapan teknologi produksi, pengembangan industri hilir, serta perluasan pasar dalam negeri.
6. Program Nelayan Berjaya : Menyejahterakan nelayan dan keluarga nelayan dengan :
  - Mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan dan memberikan pendamping pemasaran serta penjaminan pasar produksi perikanan
  - Mengintegrasikan nelayan dan keluarga nelayan dalam pengembangan industri pengolahan perikanan.
  - Memberikan asuransi nelayan dan jaminan sosial bagi nelayan lansia

- Memberikan beasiswa bagi anak-anak nelayan berprestasi dalam berbagai tingkatan pendidikan termasuk perguruan tinggi
  - SPBU untuk nelayan. Mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan serta pertambakan
7. Memfungsikan BUMD untuk menangani komoditas strategi bidang pertanian bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Provinsi lain untuk menjamin kepastian pasar
  8. Lampung sebagai Salah Satu Tujuan Utama Wisata Indonesia. Mempercepat pembangunan kepariwisataan dengan :
    - Mengembangkan daerah-daerah tujuan wisata unggulan di Lampung
    - Menjadikan Lampung sebagai salah satu Pusat Agrowisata dan Ekowisata Indonesia
    - Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pariwisata
    - Mempercepat pengembangan Lapangan Terbang Taufik Kiemas Pekon Seray, Pesisir Tengah (Krui)
  9. Lampung Kaya Festival. Menjadikan budaya dan kekayaan alam Lampung sebagai daya tarik festival untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif, merawat kebudayaan lokal dan mengembangkan kesenian serta mendukung meningkatnya kunjungan wisatawan.
  10. Lampung sebagai Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara. Mengembangkan Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara dan menjadikanya sebagai salah satu tujuan agrowisata Nasional
  11. Infrastruktur Lampung Berjaya
    - Membangun infrastruktur untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kawasan-kawasan wisata

unggulan serta meningkatkan konektivitas antara Kabupaten/Kota.

- Merevitalisasi dan membangun irigasi, embung dan infrastruktur pertanian lainnya.
- Merevitalisasi pelabuhan-pelabuhan dan membangun pelabuhan baru untuk mendukung pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
- Mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi

12. Unit Reaksi Cepat Perbaikan Infrastruktur. Menciptakan sistem dan mekanisme perbaikan infrastruktur secara cepat :

- Berbasis peran serta warga dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mempercepat, mempermudah dan mempermudah proses pelaporan, komunikasi dan eksekusi perbaikan infrastruktur.
- Memperkuat sumberdaya manusia dan sumberdaya aparatur dalam penanganan infrastruktur secara cepat, tanggap dan tepat
- Perbaikan dalam pemeliharaan infrastruktur berbasis gotong royong

13. Lampung Terang Berjaya. Memprioritaskan kebijakan pengelolaan energi dengan berfokus kepada :

- Mempercepat pembangunan infrastruktur energi dan swasembada sumber energi listrik
- mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber daya energi baru dan terbarukan berbasis tenaga surya, air dan gas bumi
- kebijakan-kebijakan pengelolaan energi yang ramah lingkungan dan ramah pertanian

14. Mengelola Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Rakyat :

- Mengarusutamakan lingkungan hidup dalam pengelolaan pembangunan
- mengorientasikan pengelolaan Sumber Daya Alam untuk kesejahteraan rakyat

- Mengintegrasikan pengelolaan hutan dengan upaya keterlibatan masyarakat sekitar hutan
15. Lampung merawat Indonesia. Memperkuat kerukunan hidup antara umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan.
  16. Memberikan insentif khusus kepada Guru Honorer, Guru PAUD, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Ustad dan Ustadzah Pondok Pesantren, Penjaga Masjid dan Rumah Ibadah lainnya, Muazin, Khatib, Imam Masjid, pendeta dan para pemimpin berbagai agama, serta P3NTR, bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  17. Lampung mengaji, memfasilitasi pengembangan pemahaman dan penghafal Al Quran dengan memberikan bantuan fasilitasi khusus bagi rumah-rumah tahfidz dan pokok pesantren serta mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran Lampung.
  18. Smart School. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan :
    - Menyediakan fasilitas internet dan komputer di setiap Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
    - Mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler bisnis starup dan bisnis berbasis teknologi bagi siswa SMK dan SMA.
    - Meningkatkan kapasitas para guru di bidang teknologi dengan menyelenggarakan pelatihan dan berbagai bentuk peningkatkan kapasitas lainnya
  19. Revitalisasi SMK. Meningkatkan SMK ke dunia kerja dengan :
    - Memperluas kerja magang sebagai kurikulum pendidikan SMK dengan dukungan dunia usaha
    - Mengembangkan SMK yang berfokus pada bidang teknologi dan industri untuk menyokong pengembangan industri
    - Memfasilitasi kemirtraan strategis dunia pendidikan dengan dunia usaha, industri dan investasi



20. Lampung Menuju Bebas Narkoba
  - Mencegah penggunaan narkoba melalui pembinaan berbasis keluarga dan tokoh-tokoh agama
  - memberantas kejahatan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba melalui sinergi semua pemangku kepentingan
  - Menyelamatkan korban-korban penyalahgunaan narkoba melalui upaya rehabilitasi
21. Perempuan Berjaya :
  - Memandirikan perempuan secara ekonomi berbasis keluarga
  - Pengarusutamaan gender dalam bidang politik, sosial budaya dan ekonomi
  - Memafasilitasi pendampingan hukum bagi perempuan.
22. Mengembangkan industri pengolahan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menyerap banyak tenaga kerja, memperbaiki distribusi pendapatan dan melayani prinsip keadilan.
23. Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, melalui :
  - Mengembangkan sentra-sentra industri kreatif berbasis sumber daya dan keunggulan lokal
  - Mengembangkan UMKM melalui penyediaan pelatihan usaha, bantuan permodalan serta pendampingan usahan dan pemasaran
  - Merevitalisasi fungsi koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan
  - Merevitalisasi pasar tradisional (bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota)
24. Lampung Ramah Usaha. Menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha dengan :
  - Menyederhanakan perizinan
  - Menyusun kebijakan untuk kemudahan berusaha
  - Menjamin kepastian biaya-biaya pelayanan

- Memfasilitasi sinergi diantara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pengembangan usaha, bisnis dan investasi
25. Memfasilitasi terwujudnya Lampung sebagai Pusat Industri Pertahanan Indonesia, bersinergi dengan kementerian Pertahanan dalam merelokasi pusat industri kemaritiman, persenjataan dan kedirgantaraan ke Lampung.
26. Lampung Ramah Perempuan dan Anak. Menjadikan Lampung sebagai Provinsi Ramah Perempuan dan Anak (bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota), dengan :
- Mengembangkan fasilitas dan ruang-ruang publik ramah perempuan dan anak
  - Merevitaliasi layanan-layanan kesehatan khusus untuk perempuan dan anak
  - Menurunkan tingkat kematian ibu dan anak
  - Menyediakan dan memfasilitasi ruang-ruang laktasi (ruang menyusui) di tempat kerja, kantor instansi pemerintah dan swasta dan ruang publik
  - Memfasilitasi pemenuhan gizi yang baik bagi anak
  - memberikan insentif untuk kader-kader Posyandu
27. Anak Muda Berjaya :
- Mendorong berbagai aktivitas kompetisi dan festival seni dan olahraga antara kalangan muda berbasis komunitas
  - Menggalakan " Gerakan Malu Menganggur" di kalangan muda
  - Mencetak wirausahawan muda
  - Mendorong pendirian Gelanggang Remaja (Youth Center) sebagai pusat pengembangan kreativitas anak muda di Kabupaten/Kota
28. Lampung Sehat :
- Mendorong Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui upaya sosialisasi, fasilitasi, dan sinergi program berbasis komunitas

- Memperkuat peranan Puskesmas dan memperbaiki kualitas layanan Puskesmas bersinergi bersinegi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - Mendorong peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit
29. Mengembalikan Kejayaan Lampung dalam dunia olahraga berfokus pada :
- Memperbaiki dan memperbanyak fasilitas-fasilitas olah raga
  - Meningkatkan kualitas pembinaan atlet dan memberikan insentif bagi altet berprestasi
  - Memperbaiki tata kelola organisasi olahraga melalui penempatan personal yang berkompeten
30. Smart Village
- Meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan bagi warga desa
  - memfasilitasi digitaliasi administrasi desa
  - e-participation : melibatkan masyarakat hingga ke pelosok pedesaan dalam bentuk penyampaian aspirasi dan pemberian evaluasi warga berbasis interaksi online dan atau aplikasi
31. Pendampingan program pembangunan desa
- Memberikan fasiltasi pendampingan kepada aparat desa dalam mengelola pembangunan desa
  - Memberikan pendampingan hukum untuk para Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa
32. Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dengan :
- Menciptakan sistem kerja berbasis kinerja dan kompetensi
  - Menciptakan sistem penjenjangan karir melalui fit dan proper test berbasis kompetensi
  - Pembinaan penempatan aparatur birokrasi berbasis kebutuhan daerah (Kabupaten/kota) dan asas keadilan

- Meningkatkan kedisiplinan dan kualitas kerja aparatur. Meningkatkan kesejahteraan aparatur birokrasi, antara lain dengan meningkatkan tunjangan kinerja
- Memperbaiki dan menyetatkan pengelolaan aset -aset Pemerintah Provinsi
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Meningkatkan koordinasi Pemerintah Provinsi dengan instansi vertikal di daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota serta dunia usaha
- Membangun pemerintah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

33. APBD Rakyat Berjaya :

- Meningkatkan PAD untuk memperluas cakupan pembangunan dan pelayanan publik
- Mendayagunakan APBD untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat

#### 4.2 TEMA, SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan sejalan dengan RKP Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2021 yang bertajuk : **“MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT MENUJU LAMPUNG BERJAYA”**.

Tema tersebut dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan tahunan Provinsi Lampung tahun 2021, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;

2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya;
6. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan memperhatikan bauran hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, situasi dan tantangan perekonomian daerah, kerangka pendanaan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta sinergi pembangunan antara daerah dan nasional; sasaran makro pembangunan daerah Provinsi Lampung tahun 2021 di arahkan pada:

Tabel IV-2  
Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Lampung Tahun 2021

<b>SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 2021</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TAHUN 2021</b>
<b>SASARAN MAKRO</b>	- Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,7 – 5,7
	- Inflasi (%)	3,0 ± 1
	- PDRB per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	44 – 45
	- Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,3
	- Tingkat Kemiskinan (%)	11 – 12,1
	- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,86
	- Indeks Gini	0,32 – 0,33

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mengacu pada sasaran pokok sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 serta dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional; Prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2021 diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian

sasaran pembangunan dalam RKP Tahun 2021 maupun program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Gambar IV-1  
Sasaran dan Target Prioritas Pembangunan Tahun 2021

**PRIORITAS KE-1 RKPD 2021**



**PRIORITAS KE-2 RKPD 2021**



PRIORITAS KE-3 RKPD 2021



PRIORITAS KE-4 RKPD 2021



## PRIORITAS KE-5 RKPD 2021



## PRIORITAS KE-6 RKPD 2021



Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah, yang dilakukan melalui pendekatan perencanaan secara *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran



dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional tahun 2021; Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD 2021 terhadap RKP 2021 disajikan pada tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel IV – 3  
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 terhadap RKP 2021

No.	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah		Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	
1.	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	1.1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat (Lampung Sehat)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1.1	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
					1.2	Pengentasan kemiskinan
					1.3	Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
					1.4	Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
					1.5	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
					1.6	Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
					1.7	Peningkatan produktivitas dan daya saing.
2.	Pembangunan Infrastruktur	2.1	Peningkatan kapasitas Jaringan Sumberdaya Air	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	2.1	Penyusunan Prioritas pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan dan keunggulan wilayah
		2.2	Infrastruktur Transportasi yang Handal		2.2	Peningkatan pengaturan, pembinaan dan

No.	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah		Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional		
				Pelayanan Dasar		pengawasan dalam pembangunan	
					2.3	Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK	
					2.4	Rehabilitasi sarana dan prasarana	
					2.5	Penyerderhanaan perijinan pembangunan infrastruktur.	
		2.5	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2.6	Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah
						2.7	Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang
						2.8	Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah
						2.9	Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata
						2.10	Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
						3.1	Peningkatan pertumbuhan Sektor Pertanian
3.	Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	3.2	pertumbuhan sektor industri dan perdagangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.1	Pengelolaan sumberdaya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumberdaya air, sumber daya energi, serta kehutanan	
		3.3	Menjaga stabilitas harga				
		3.4	Menurunnya Kemiskinan		3.2	Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan,	

No.	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah		Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	
		3.5	Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah			kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
		3.6	Peningkatan penyerapan tenaga kerja			
4.	Reformasi Birokrasi	4.1	Kualitas Implementasi reformasi birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4.1	Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas
					4.2	Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan
		4.2	Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja		4.3	Perbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber
					4.4	Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi
		4.3	Kualitas layanan kepada masyarakat		4.5	Peningkatan pelayanan perlindungan WNI di Luar negeri
					4.6	Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.
5.	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	5.1	Peningkatan pelayanan publik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.1	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
					5.2	Moderasi beragama
		5.2	Budaya lokal dan wisata di Provinsi Lampung		5.3	Pemajuan dan pelestarian kebudayaan
					5.4	Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
6.	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	6.1	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan	6.1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
					6.2	Pembangunan Rendah Karbon

No.	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah		Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	
		6.3	Ketangguhan terhadap bencana	Bencana dan Perubahan Iklim	6.3	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Selanjutnya, penyelarasan prioritas pembangunan RKPD 2021 terhadap Visi dan Misi RPJMD tahun 2019-2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel IV-4  
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 terhadap Misi RPJMD tahun 2019-2024

No.	Misi Gubernur Lampung Tahun 2019-2024	Prioritas RKPD 2021	Sasaran RKPD 2021	
1.	Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.	Kehidupan yang Religius, Aman, Berbudaya dan Inovatif	a.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, dan keamanan daerah
			b.	Meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat
			c.	Meningkatnya pelestarian budaya
2.	Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik	Reformasi Birokrasi	a.	Meningkatnya kualitas Implementasi reformasi birokrasi
			b.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja
			c.	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat
3	Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	a.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Lampung Sehat)
			b.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah
			c.	Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kemandirian penyandang disabilitas
			d.	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi di bidang olahraga nasional (Pemuda & Olahraga Berjaya)
			e.	Penyerapan Tenaga Kerja

No.	Misi Gubernur Lampung Tahun 2019-2024	Prioritas RKPD 2021	Sasaran RKPD 2021	
4.	Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.	Pembangunan Infrastruktur	a.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah
			b.	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi menuju Lampung Terang
			c.	Meningkatnya Kapasitas Jaringan Sumber Daya Air
			d.	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang Layak, Sehat dan Aman
5	Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.	Peningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	a.	Meningkatnya pertumbuhan Sektor Pertanian
			b.	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan
			c.	Menjaga stabilitas harga
			d.	Menurunnya Kemiskinan
			e.	Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah
			f.	Menurunnya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat
6	Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	a.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
			b.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana

Selain itu, untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah serta mendukung pencapaian prioritas nasional; penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2021 memadukan arah kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional, antara lain :

## A. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

### 1. Bidang Pendidikan

SPM bidang pendidikan meliputi SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan pada Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan Menengah; setiap Warga Negara Indonesia usia 16 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- 2) Pendidikan Khusus; setiap Warga Negara Indonesia usia 4 s.d. 18 tahun yang berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan khusus sesuai dengan standar nasional pendidikan

Tabel IV – 5

Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Pendidikan

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN
PENDIDIKAN	1. Pendidikan Khusus 2. Pendidikan Menengah	1. Standar jumlah dan kualitas barang/jasa 2. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan 3. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	1. usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah; 2. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;

### 2. Bidang Kesehatan

Jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah provinsi terdiri atas:

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan

- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Tabel IV – 6  
Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Kesehatan

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN
KESEHATAN	1. pelkes bagi penddk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana ns; dan 2. pelkes bagi penddk pd kondisi KLB	1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; 2. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan 3. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	1. penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; 2. penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi

### 3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum dan penataan ruang pada Pemerintah Provinsi :

- 1) Pemenuhan kebutuhan air minum curah untuk sistem penyediaan air minum regional lintas kabupaten/kota; dan
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) regional lintas kabupaten/kota.

Tabel IV – 7  
Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Pekerjaan Umum dan Penata Ruang

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN
PEKERJAAN UMUM	<ol style="list-style-type: none"><li>1. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kab/kota; dan</li><li>2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kab/kota</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan</li><li>2. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar</li></ol>	Setiap Warga Negara yang berdomisili pada kabupaten/kota kekurangan air curah dan akan dilayani oleh penyelenggaraan SPAM setempat melalui sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan

Selain itu, perumusan kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, antara lain: Percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Revisi dokumen RTRW Provinsi Lampung dan Percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah, termasuk pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.



4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman meliputi Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Selain itu, perumusan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman memperhatikan:

- 1) Peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi, melalui:
  - a. Penyusunan/pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/ Kota (SSK);
  - b. Penyusunan/pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM);
  - c. Penyusunan/pemutakhiran Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL); dan
  - d. Pelaksanaan Studi Primer, terutama *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA).
- 2) Penyediaan hunian layak serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;
- 3) Penyusunan dan pengembangan data rumah tidak layak huni sebagai dasar targeting program/kegiatan penyediaan hunian layak di provinsi dan kabupaten/kota;
- 4) Fasilitasi penyediaan dan pencadangan lahan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah;
- 5) Kepastian perizinan dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah;

- 6) Mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 7) Pengentasan permukiman kumuh;
- 8) Mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah dan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, air limbah, persampahan) dalam rangka penanganan permukiman kumuh;

Tabel IV – 8  
Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN
PERUMAHAN RAKYAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan</li> <li>2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan</li> <li>2. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;</li> <li>2. masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi</li> </ol>

Selain itu, perumusan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman memperhatikan:

- 9) Peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi, melalui:
  - e. Penyusunan/pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/ Kota (SSK);
  - f. Penyusunan/pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM);
  - g. Penyusunan/pemutakhiran Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL); dan
  - h. Pelaksanaan Studi Primer, terutama *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA).
- 10) Penyediaan hunian layak serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;
- 11) Penyusunan dan pengembangan data rumah tidak layak huni sebagai dasar targeting program/kegiatan penyediaan hunian layak di provinsi dan kabupaten/kota;
- 12) Fasilitasi penyediaan dan pencadangan lahan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah;
- 13) Kepastian perizinan dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
- 14) Mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 15) Pengentasan permukiman kumuh;
- 16) Mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah dan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, air limbah, persampahan) dalam rangka penanganan permukiman kumuh;

## 5. Bidang Sosial

Jenis Pelayanan Dasar SPM sosial pada Pemerintah Provinsi terdiri atas:

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Selain itu, perumusan kegiatan bidang sosial yang diperhatikan, antara lain:

- 1) Percepatan penanggulangan kemiskinan;
- 2) Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, anak, lanjut usia dalam panti;
- 3) Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, anak, lanjut usia di luar panti;
- 4) Subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
- 5) Program Keluarga Harapan (PKH);
- 6) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
- 7) Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB);
- 8) Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT);
- 9) Asistensi Sosial Anak Terlantar;
- 10) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN);
- 11) Cakupan rumah tangga miskin dengan program-program sosial yang berbeda;
- 12) Basis data terpadu akan meningkatkan efektivitas penargetan; dan

13) Pencegahan pemasangan bagi penyandang disabilitas mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Tabel IV – 9  
Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Sosial

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN
SOSIAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. rehabsosdas penyandang disabilitas telantar</li> <li>2. rehabsosdas anak telantar;</li> <li>3. rehabsosdas lansia telantar</li> <li>4. Rehabsosdas tuna sos khususnya gepeng; dan</li> <li>5. perlinjamsos pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;</li> <li>2. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan</li> <li>3. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;</li> <li>2. anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;</li> <li>3. lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;</li> <li>4. gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam;</li> </ol>

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN
			5. korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi

6. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Pemerintah Provinsi adalah yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum lingkup kewenangan pemerintah provinsi. Selain itu, perumusan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang perlu diperhatikan adalah penanganan konflik sosial, antara lain:

- 1) Penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- 2) Pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- 3) Pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan; dan
- 4) Penegakan Peraturan Daerah.

Tabel IV – 10  
Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN
TRANTIBUM LINMAS	pelayanan ketenteraman	1. standar jumlah dan kualitas	warganegara yang terkena dampak

PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN
	dan ketertiban umum provinsi	barang dan/atau jasa; 2. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan 3. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi

#### 4.3 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PROVINSI LAMPUNG

Selain pendekatan yang bersifat sektoral, rencana pembangunan tahun 2021 juga menggunakan pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan tersebut dilakukan guna mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, dengan penanganan secara lintas sektoral pada setiap wilayahnya.

Dalam Penataan Ruang dikenal kawasan strategis, yaitu suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting bagi perkembangan wilayah dalam aspek ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan, teknologi dan kelestarian lingkungan hidup. Arah kebijakan Pembangunan Kewilayahan Provinsi Lampung tahun 2021, selain mengacu pada RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019 – 2024, juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 - 2029.

Sesuai dengan RTRW Provinsi Lampung, pengembangan tata ruang wilayah Provinsi Lampung disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi penataan ruang sebagai berikut :

- A. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah provinsi, melalui:
  - 1. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah provinsi;
  - 2. pengembangan pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik;
  - 3. penyediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang dapat meliputi sektor-sektor kesehatan, pendidikan, air bersih, olahraga, pemerintahan, dan sektor-sektor lain sesuai kebutuhan masyarakat;
  - 4. percepatan peningkatan infrastruktur dengan membuka keterisoliran wilayah yang memiliki potensi unggulan;
  - 5. peningkatan aksesibilitas antara pusat pertumbuhan dengan wilayah perkotaan untuk meningkatkan kapasitas pemasaran produksi hasil pertanian;
  - 6. menjaga dan mewujudkan keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah sekitarnya;
  - 7. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; dan
  - 8. mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggulan sebagai kawasan industri, wisata, dan maritim secara berkelanjutan.
- B. Memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam, melalui:
  - 1. penetapan luasan kawasan peruntukan lindung di provinsi paling sedikit 30%;



2. pengembalian dan peningkatan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya;
  3. pencegahan kerusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis;
  4. pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana;
  5. pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, melakukan reboisasi, mengkonservasi tanah dan lahan kritis lainnya, guna memelihara daya dukung sumber daya alam dan menjaga kelestarian hutan; dan
  6. pengkonservasian dan proteksi kawasan hutan lindung, dan hutan mangrove di sekitar pantai sebagai fungsi lindung dan pertahanan terhadap bencana tsunami.
- C. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui:
1. pembatasan konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya;
  2. pengoptimalan pemanfaatan lahan tidur untuk kegiatan produktif;
  3. pengembangan kawasan budi daya pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya;
  4. pengoptimalan pemanfaatan kawasan budi daya pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat; dan
  5. pengembangan keterkaitan kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan melalui pengembangan pusat pertumbuhan dan pengembangan agropolitan yang akan berfungsi sebagai pusat pemasaran produk pertanian, pusat pengembangan teknologi dan informasi di bidang pertanian.
- D. Meningkatkan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan, melalui:
1. perluasan jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis;

2. diversifikasi komoditi pertanian untuk mendukung pengembangan sektor sekunder;
  3. peningkatan produktivitas subsektor peternakan;
  4. peningkatan produktivitas subsektor perikanan;
  5. pengembangan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
  6. pengembangan kegiatan pertanian, yang meliputi upaya ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi horisontal dan vertikal serta menerapkan teknologi tepat guna yang akan berujung pada peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan; dan
  7. penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- E. Membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah, melalui:
1. peningkatan akses masyarakat ke sumber pembiayaan; dan
  2. pengembangan kawasan-kawasan.
- F. Mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan, melalui pengintegrasian kawasan fungsi khusus pertahanan dan keamanan dengan kawasan sekitarnya.

Provinsi Lampung mempunyai posisi yang strategis di ujung selatan Pulau Sumatera, sehingga menjadi gerbang Pulau Sumatera dari arah Pulau Jawa. Agar posisi yang strategis tersebut dapat berdampak optimal bagi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan proses revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029. Berdasarkan substansi revisi tersebut maka Pola ruang Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Andalan, yaitu adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya. Beberapa kawasan andalan telah ditetapkan dalam PP No 13 Tahun 2017 tentang RTRWN dan revisi RTRW Provinsi Lampung, yaitu

Mesuji, Bandar Lampung dan Metro, Kotabumi, Liwa-Krui dan Laut Krakatau;

2. Pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung pada garis besarnya akan mencakup 5 (lima) fungsi perlindungan sebagai berikut:
  - a. Kawasan Hutan Lindung yang tersebar di Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus, dan Way Kanan.
  - b. Kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan keunikan alam. Termasuk dalam kawasan ini adalah cagar alam Kepulauan Krakatau, kawasan Bukit Barisan yang membentang dari Utara ke Selatan termasuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Way Kambas, Taman Hutan Rakyat di sekitar Gunung Betung, Gunung Rajabasa dan kawasan perlindungan satwa Rawa Pacing dan Rawa Pakis, serta ekosistem mangrove dan rawa di pantai Timur dan Selatan.
  - c. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, terutama berkaitan dengan fungsi hidrologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan ketersediaan air. Kawasan ini berada pada ketinggian diatas 1.000 mdpl dengan kemiringan lebih dari 40%, bercurah hujan tinggi, atau mampu meresapkan air kedalam tanah. Termasuk dalam kawasan ini adalah sebagian besar kawasan Bukit Barisan bagian timur dan barat yang membentang dari utara ke selatan, Pematang Sulah, Kubu Cukuh, dan kawasan hutan lainnya.
  - d. Kawasan rawan bencana yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, banjir, tsunami dan sebagainya. Termasuk dalam kawasan ini adalah bencana tanah longsor (Kabupaten Lampung Utara, Tanggamus, Lampung Barat, Pesawaran, dan Lampung Selatan), kebakaran hutan (Kabupaten Mesuji, Way Kanan, Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, dan Lampung Timur), tsunami dan gelombang pasang (sepanjang pesisir pantai wilayah Provinsi Lampung), dan banjir (tersebar di, Kabupaten

Pesawaran, Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Timur, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung dan Metro).

- e. Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi melindungi komponen lingkungan tertentu dan kegiatan budidaya. Fungsi ini berlaku secara setempat di sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar mata air, dan sekitar waduk/danau untuk melindungi kerusakan fisik setempat, seperti Bendungan Batu Tegi, Bendungan Way Rarem, Bendungan Way Umpu, Bendungan Way Jepara dan Bendungan Way Bumi Agung.
  - f. Kawasan Perlindungan Laut/Zona inti di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PPK) adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan PPK secara berkelanjutan. Konservasi pesisir dan laut sangat terkait dengan ekosistem pesisir dan laut, yaitu ekosistem terumbu karang dan ekosistem mangrove.
3. Rencana Pengembangan Kawasan Lindung, antara lain memantapkan ekosistem Mangrove dan Rawa, pengendalian perambahan hutan, serta alih fungsi hutan yang meliputi wilayah- wilayah sebagai berikut:
- a. Kecamatan Cukuh Balak, Wonosobo, dan Pulau Panggung di Kabupaten Tanggamus.
  - b. Kecamatan Padang Cermin di Kabupaten Pesawaran.
  - c. Kecamatan Padang Ratu di Kabupaten Lampung Tengah.
  - d. Kecamatan Sribawono dan Labuhan Ratu di Kabupaten Lampung Timur.
  - e. Kecamatan Kasui dan Banjit di Kabupaten Way Kanan.
  - f. Kecamatan Bukit Kemuning dan Tanjung Raja di Lampung Utara.
  - g. Kecamatan Balik Bukit, Sumberjaya, dan Belalau di Lampung Barat.
4. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya yaitu arahan pemanfaatan kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, serta kawasan non-pertanian yang didasarkan pada:

- a. Arahan Rencana Kawasan Hutan Produksi  
Kawasan budidaya kehutanan meliputi kawasan hutan produktif terbatas (HPT) dan hutan produksi tetap (HP). Hutan Produksi Terbatas terletak di Kabupaten Pesisir Barat, sedangkan hutan produksi tetap tersebar di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Arahan rencana tanaman pangan lahan kering.  
Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman pangan lahan kering meliputi hampir seluruh wilayah tengah dan timur Provinsi Lampung, kecuali disekitar Way Tulang Bawang, daerah pesisir dan bagian selatan Kabupaten Lampung Timur, serta bagian barat Kabupaten Way Kanan dan Lampung Utara.
- c. Arahan rencana untuk tanaman pangan lahan basah.  
Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman pangan lahan basah meliputi wilayah Tengah dan Timur Provinsi Lampung.
- d. Arahan rencana untuk tanaman tahunan (perkebunan).  
Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman tahunan meliputi wilayah Tengah dan Timur Provinsi Lampung.
- e. Arahan rencana kawasan pertambangan  
Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan didasarkan pada potensi bahan tambang dan lokasi usaha tambang yang ada di Provinsi Lampung. Sebaran potensi pertambangan di Provinsi Lampung meliputi: Wilayah Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur.
- f. Arahan Rencana Kawasan Industri  
Pengelolaan kawasan industri kecil, terutama industri pengolahan hasil pertanian diarahkan untuk dikembangkan diseluruh kabupaten,

yaitu pada lokasi-lokasi di dekat sentra-sentra penghasil sumberdaya. Pola yang akan dikembangkan diarahkan pada bagian tengah provinsi ke arah timur provinsi. Industri besar terutama industri berteknologi tinggi diarahkan untuk dikembangkan di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Pesawaran.

g. Arahan rencana Kawasan Pariwisata

Pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung lebih menekankan pada pengembangan pariwisata di kawasan budidaya. Potensi pariwisata di kawasan Lindung, seperti Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBSS), Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dan lain-lain dibahas secara terpisah dalam bahasan Rencana Pengelolaan kawasan Lindung.

h. Arahan rencana Kawasan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Provinsi Lampung akan dikembangkan pada kawasan-kawasan yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, kawasan hutan dan kawasan rawan bencana serta memiliki daya dukung yang kuat untuk kegiatan permukiman.

Kawasan permukiman diarahkan memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan serta memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung. Rencana pengembangan permukiman dari tingkat kepadatannya akan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kawasan permukiman berkepadatan tinggi akan diarahkan di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Pringsewu.
2. Kawasan permukiman berkepadatan sedang akan diarahkan di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tulang Bawang.

3. Kawasan permukiman berkepadatan rendah akan diarahkan di Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat.

Adapun, Kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Lampung sebagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 - 2024, bertujuan mewujudkan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berbasis pengembangan industri, ketahanan pangan dan pariwisata menuju Provinsi Lampung berjaya.

Untuk mencapai tujuan pembangunan kewilayahan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung, menempuh kebijakan dan strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah Provinsi;
- b. Memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d. Meningkatkan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan;
- e. Membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah;
- f. Mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan, melalui pengintegrasian kawasan fungsi khusus pertahanan dan keamanan dengan kawasan sekitarnya.

Provinsi Lampung memiliki 2 kawasan strategis dilihat dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu : Metropolitan Bandar Lampung dan Kawasan Pariwisata terintegrasi wilayah barat dengan pengembangan sub kawasan pendukung antara lain :

1. Kawasan Pelabuhan Terpadu Panjang di Kota Bandar Lampung;
2. Kawasan pusat pemerintahan kota baru di Kabupaten Lampung Selatan;

3. Kawasan *Aeropolitan* Natar di Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kawasan Teluk Lampung di Kabupaten Lampung Selatan,
5. Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran;
6. Kawasan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Teluk Ratai di Kabupaten Pesawaran;
7. Kawasan pendidikan Universitas Lampung – ITERA– UIN Raden Intan di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan; dan
8. Kawasan pendidikan terpadu di Kota Metro.

Dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ada 2 kawasan strategis, yaitu : Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman di Kota Bandar Lampung dan Pesawaran; dan Kawasan Resapan Air Bendungan Batutege di Tanggamus.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan dan untuk menjawab berbagai isu pembangunan yang berkembang di Provinsi Lampung, maka diformulasikan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Lampung adalah Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan Berbasis Pengembangan Industri, Ketahanan Pangan dan Pariwisata menuju Provinsi Lampung Berjaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dirumuskan 6 (enam) kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah provinsi, melalui :
  - pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah provinsi;
  - pengembangan pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik;
  - penyediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang dapat meliputi sektor-sektor kesehatan, pendidikan, air bersih, olahraga, pemerintahan, dan sektor-sektor lain sesuai kebutuhan masyarakat;



- percepatan peningkatan infrastruktur dengan membuka keterisolan wilayah yang memiliki potensi unggulan;
  - peningkatan aksesibilitas antara pusat pertumbuhan dengan wilayah perkotaan untuk meningkatkan kapasitas pemasaran produksi hasil pertanian;
  - menjaga dan mewujudkan keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah sekitarnya;
  - mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; dan
  - mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggulan sebagai kawasan industri, wisata, dan maritim secara berkelanjutan.
2. Memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam, melalui :
- penetapan luasan kawasan peruntukan lindung di provinsi paling sedikit 30%;
  - pengembalian dan peningkatan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya;
  - pencegahan kerusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis;
  - pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana;
  - pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, melakukan reboisasi, mengkonservasi tanah dan lahan kritis lainnya, guna memelihara daya dukung sumber daya alam dan menjaga kelestarian hutan; dan
  - pengkonservasian dan proteksi kawasan hutan lindung, dan hutan mangrove di sekitar pantai sebagai fungsi lindung dan pertahanan terhadap bencana tsunami.

3. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui :
  - pembatasan konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya;
  - pengoptimalan pemanfaatan lahan tidur untuk kegiatan produktif;
  - pengembangan kawasan budi daya pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya;
  - pengoptimalan pemanfaatan kawasan budi daya pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat; dan
  - pengembangan keterkaitan kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan melalui pengembangan pusat pertumbuhan dan pengembangan agropolitan yang akan berfungsi sebagai pusat pemasaran produk pertanian, pusat pengembangan teknologi dan informasi di bidang pertanian.
4. Meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan, melalui :
  - perluasan jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis;
  - diversifikasi komoditi pertanian untuk mendukung pengembangan sektor sekunder;
  - peningkatan produktivitas subsektor peternakan;
  - peningkatan produktivitas subsektor perikanan;
  - pengembangan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
  - pengembangan kegiatan pertanian, yang meliputi upaya ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi horisontal dan vertikal serta menerapkan teknologi tepat guna yang akan berujung pada peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan; dan
  - penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
5. Membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah, melalui :

- Peningkatan akses masyarakat ke sumber pembiayaan;
  - Pengembangan kawasan-kawasan sebagai berikut;
  - Kawasan Industri Lampung (KAIL) di Kabupaten Lampung Selatan, Kawasan Industri Maritim (KIM) di Kabupaten Tanggamus, dan Kawasan Industri Way Pisang di Kabupaten Lampung Selatan;
  - Kawasan pendidikan Universitas Lampung – Institut Teknologi Sumatera – Universitas Islam Negeri Raden Intan di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan;
  - Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Way Kanan di Kabupaten Way Kanan dan Kawasan Terpadu Mandiri di Kabupaten Mesuji; dan
  - Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Pesawaran.
6. Mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan, melalui pengintegrasian kawasan fungsi khusus pertahanan dan keamanan dengan kawasan sekitarnya, yaitu di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus dan Kota Bandar Lampung.

## **Rencana Kawasan Strategis**

### **a. Kawasan Strategis Nasional**

Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), di Provinsi Lampung terdapat dua Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ditetapkan, yaitu:

- Kawasan Selat Sunda, dengan fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas kawasan secara ekonomi. Dasar pertimbangan penetapan kawasan tersebut adalah kawasan tersebut merupakan kawasan yang

memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh dan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tersambungny Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang perlu menjadi keterpaduan antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Banten seperti adanya rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda yang akan menghubungkan antarPulau Jawa dan Pulau Sumatera, rencana pembangunan kabel bawah laut di Selat Sunda, dan perairan Selat Sunda yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI-II) yang merupakan jalur pelayaran nasional dan internasional. Di samping itu pada kawasan tersebut sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata terutama pada kawasan Krakatau yang merupakan *world heritage*.

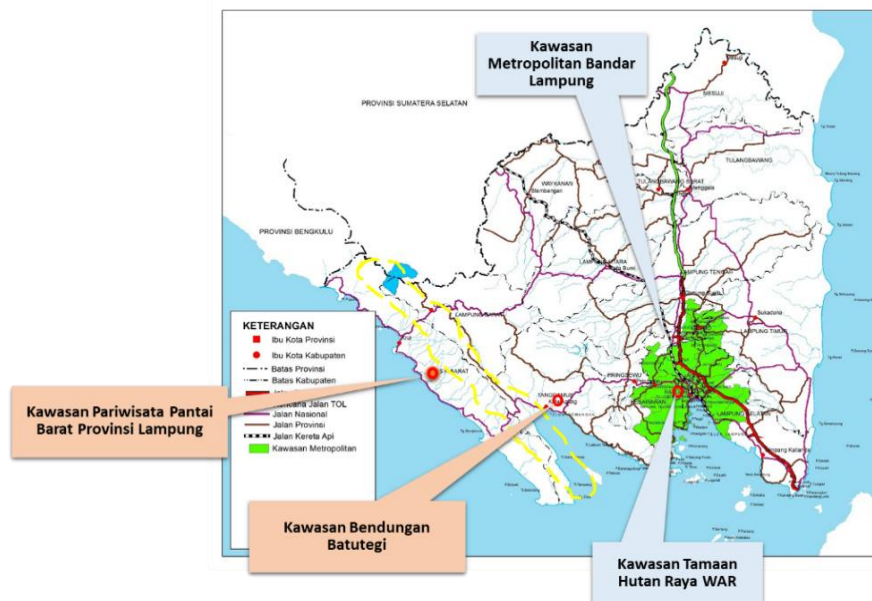
- Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang merupakan yang merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan aset nasional (kawasan lindung nasional) yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, dan fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan dilestarikan. Koridor Penyelamatan Ekosistem Sumatera Bagian Selatan, berdasarkan Kesepakatan Bersama Para Gubernur Sumatera (*Save Sumatera Roadmaps 2020*) dan Perpres No 13 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Sumatera pasal 12 ayat 3. Adapun koridor penyelamatan ini meliputi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) – Suaka Margasatwa Gunung Mas.
- Kawasan Perbatasan Negara Pesisir Barat berhadapan dengan laut lepas/Samudera Hindia dengan fungsi strategis untuk kepentingan Pertahanan dan Keamanan.

#### **b. Kawasan Strategis Provinsi**

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Dalam upaya mengurangi disparitas pembangunan antara kawasan pusat pertumbuhan (Kota Bandar Lampung)

dengan kawasan-kawasan di sekitarnya dan upaya optimalisasi potensi kawasan, maka diperlukan strategi pengembangan wilayah pada kawasan-kawasan yang memiliki peran strategis sebagai motor penggerak bagi pembangunan kawasan-kawasan di sekitarnya, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan SDA dan teknologi tinggi.

**GAMBAR IV - 2**  
**Kawasan Strategis Provinsi Lampung**

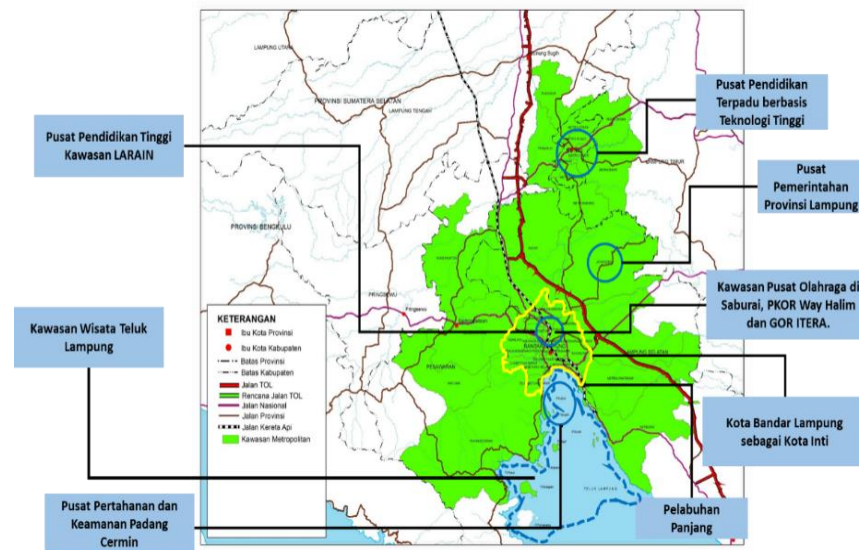


Beberapa kawasan yang direncanakan sebagai kawasan strategis provinsi adalah sebagai berikut di bawah ini.

- Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan **Pertumbuhan Ekonomi** adalah kawasan yang mempunyai potensi ekonomi, sumber daya alam dan sektor-sektor unggulan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan menjadi kawasan pusat-pusat pertumbuhan sudah mampu mendorong perkembangan daerah sekitar. Kawasan Strategis untuk kepentingan ekonomi ini mencakup:
  - **Kawasan Metropolitan Bandar Lampung**, yang dilandaskan upaya untuk menciptakan sebuah kota yang kompak, efisien serta menjaga supaya tidak terjadi penumpukan aktivitas di satu kawasan saja.

Lingkup dari Kawasan Metropolitan Bandar Lampung ini adalah Kota Bandar Lampung dan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran yang berbatasan dengan Kota Bandar Lampung. Rencana deliniasi Kawasan Metropolitan Bandar Lampung meliputi seluruh kecamatan di Kota Bandar Lampung, Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Utara, Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Selatan, Kecamatan Metro Barat, Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Tri Murjo, Kecamatan Punggur, Kecamatan Metro Kibang, Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Batanghari, Kecamatan Merbau Mataram, Kecamatan Natar, Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Katibung. Arah pengembangan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung ini sebagai pusat kegiatan yang mempunyai fasilitas yang memadai untuk aktivitas sosial dan ekonomi, mengurangi berbagai persoalan pembangunan melalui penyediaan infrastruktur secara lebih terpadu dan pengelolaan lingkungan yang lebih berwawasan lingkungan melalui pengembangan ruang-ruang terbuka hijau, menyediakan peluang investasi dan lapangan pekerjaan, ketersediaan fasilitas pelayanan dan jasa yang efisien, seperti sistem informasi, perbankan, jaringan pemasaran dan prasarana ekonomi. Untuk mendukung arah pengembangan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung perlu dikembangkan sarana transportasi umum massal yang akan melayani pergerakan masyarakat yang berada di Kawasan Metropolitan Bandar Lampung. Selain itu perlu disiapkan infrastruktur wilayah untuk mendukung kawasan khusus Natar – Jati Agung – Tanjung Bintang yang sudah bersifat kekotaan (*urbanized*).

**GAMBAR IV -3**  
**Kawasan Metropolitan Bandar Lampung**



Pengembangan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung juga didukung oleh pengembangan beberapa fungsi utama dari sub kawasan di dalamnya, yaitu:

***Kawasan Pelabuhan Terpadu Panjang*** di Kota Bandar Lampung. Kawasan pelabuhan terpadu terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran, kegiatan penunjang pelabuhan, dan antar moda transportasi. Untuk meningkatkan peran pelabuhan tersebut, di kawasan pelabuhan terpadu Panjang juga dikembangkan sebagai kawasan industri.

***Kawasan Pemerintahan Kota Baru*** di Kabupaten Lampung Selatan. Untuk mengurangi beban spasial Kota Bandar Lampung yang sudah sangat padat dengan berbagai permasalahan kota, Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung yang ada sekarang akan dipindahkan ke Jati Agung (Kabupaten Lampung Selatan). Dalam rangka upaya mempertahankan/ pelestarian budaya Lampung, maka

pembangunan kawasan ini akan dirancang berdasarkan arsitektur Lampung.

**Kawasan Aeropolitan Natar** di Kabupaten Lampung Selatan. Sehubungan dengan rencana pengembangan Kawasan Bandara Raden Inten II sebagai *Aero City* di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu diantisipasi adanya rencana pengembangan kawasan **Aeropolitan Natar** yang mengintegrasikan antara Kota Bandar Lampung dengan *Aero City* Raden Inten II, sehingga ke depan dapat menjadi kawasan *aeropolitan*.

**Kawasan Teluk Lampung**, akan dikembangkan menjadi kawasan wisata terintegrasi. Kawasan Teluk Lampung sebagai kawasan wisata pantai, wisata budaya dan Taman Hutan Raya WAR, kawasan Teluk Lampung ini memiliki potensi alam yang beragam dan memiliki daya tarik bagi para wisatawan.

**Kawasan Pusat Pertahanan dan Keamanan** dikembangkan di Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran yang telah memiliki Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Teluk Ratai dan Brigade Infantri (Brigif) 9 Marinir.

**Kawasan Pendidikan Terpadu UNILA - ITERA - UIN Raden Intan II (LARAIN)**. Kawasan ini terdapat di wilayah Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Kawasan pendidikan LARAIN ini nantinya diproyeksikan akan menampung *student body* sekitar 120.000 orang. Untuk mendukung fungsi kawasan pendidikan di Provinsi Lampung, selain dikembangkan kawasan pendidikan LARAIN, juga akan dikembangkan **Pusat Pendidikan Terpadu Berbasis Potensi Lokal** di Kota Metro dan di Kabupaten Lampung Tengah. Dengan adanya pusat pendidikan terpadu tersebut diharapkan akan dihasilkan sumberdaya manusia Provinsi Lampung terampil yang mampu menghasilkan berbagai inovasi untuk mengolah sumberdaya alam Provinsi Lampung yang potensial.

- **Kawasan Pariwisata Pantai Barat.** Kawasan ini meliputi Pantai sepanjang 210 Km di Kabupaten Pesisir Barat yang terintegrasi dengan



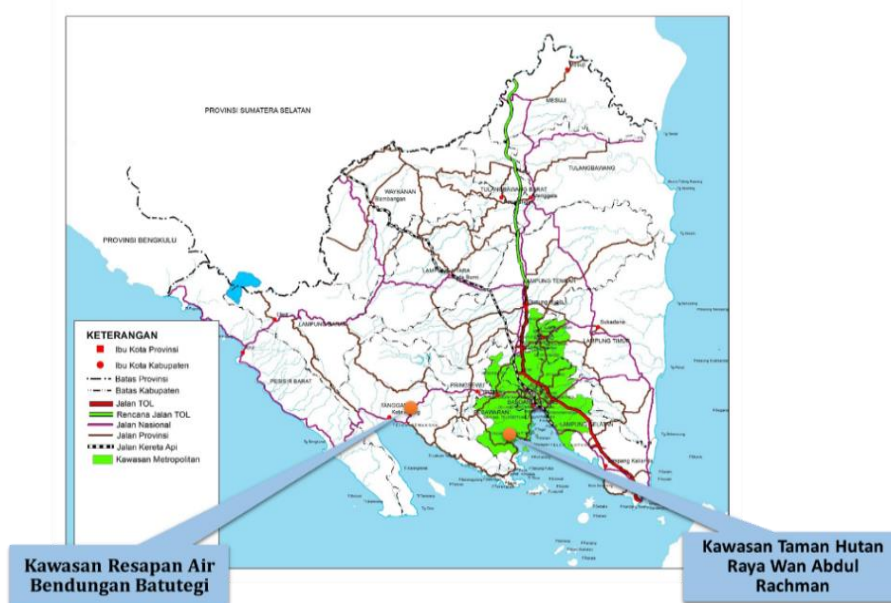
pariwisata Danau Ranau dan Agro Wisata Kopi di Kabupaten Lampung Barat.

➤ Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan **Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup** adalah kawasan yang memiliki potensi perlindungan bagi flora, fauna, keanekaragaman hayati dan non hayati, keseimbangan ekosistem, dan memiliki tingkat kerawanan bencana. Kawasan strategis aspek lingkungan hidup ini, mencakup:

- **Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman** meliputi Kecamatan Gedong Tataan, Way Lima, Kedondong dan Padang Cermin. Tahura ini adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan bukan asli. Pada kawasan ini akan dikembangkan pusat penelitian *observatorium* yaitu Lampung Astronomical Observatory (LAO).
- **Kawasan Batutegi** di Kabupaten Tanggamus. Terkait dengan penetapan kawasan strategis ini, maka kewenangan dari Pemerintah Provinsi adalah dimulai dari penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis, penyusunan masterplan prasarana kawasan, serta pengelolaannya.

#### GAMBAR IV - 4

#### Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup



## **BAB. V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA**

### **5.1 Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota**

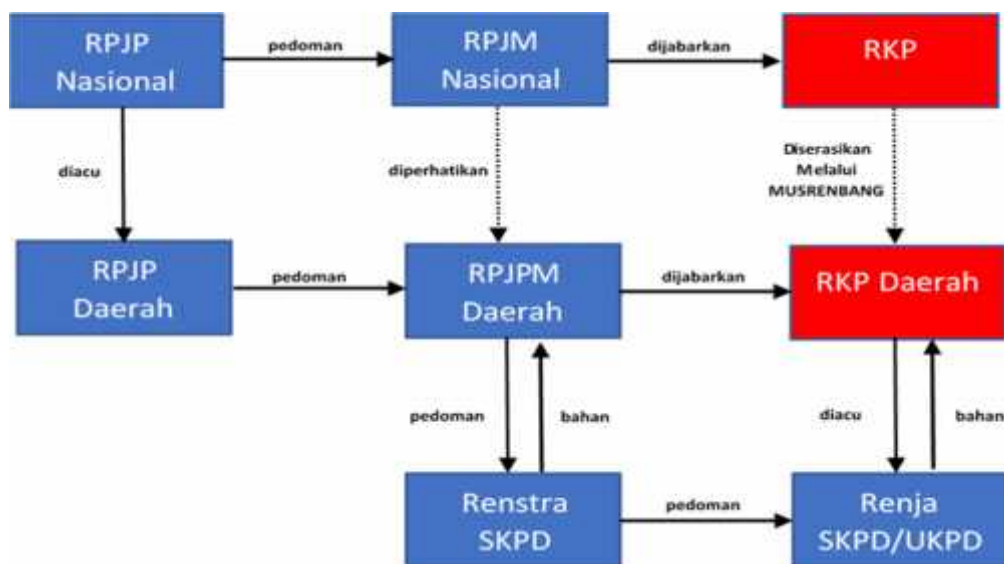
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah, sesuai dengan kewenangannya; dimana SPPN bertujuan untuk: (i) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; (ii) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (iii) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (iv) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (v) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan pula bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Wujud dari seluruh rangkaian proses - tahapan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing hirarki penyelenggara negara menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden, dan dilaksanakan secara tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Demikian pula halnya ditingkat pemerintah daerah, menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah, dan

dilaksanakan secara tahunan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Secara operasional, regulasi yang mengatur tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yaitu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Di dalam permendagri tersebut, selain mengatur tentang tata cara penyusunan perencanaan juga memberikan penjelasan keterkaitan antar dokumen perencanaan, sebagai berikut:

Gambar V-1  
Hubungan Antardokumen Perencanaan



Lebih lanjut, Pasal 75 Ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa : “Rancangan Awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD”.

Dalam rangka sinergitas pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota, maka kebijakan dan prioritas pembangunan kabupaten/kota se Provinsi Lampung pada tahun 2021 diarahkan untuk sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Tabel V-1  
**Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung  
Tahun 2021**

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Kehidupan masyarakat yang Religius, Aman, Berbudaya dan Inovatif
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana

Adapun prioritas pembangunan kabupaten/kota tahun 2021, sebagai berikut :

1. KABUPATEN LAMPUNG BARAT
  - a) Memantapkan kualitas Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan
  - b) Meningkatkan kualitas pelayanan dasar guna peningkatan SDM
  - c) Meningkatkan nilai tambah produk unggulan yang inovatif dan sektor pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
  - d) meningkatkan kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas
  
2. KABUPATEN LAMPUNG UTARA
  - a) Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat

- b) Penanggulangan Kemiskinan
- c) Pembukaan Kesempatan Kerja
- d) Peningkatan Perekonomian
- e) Masyarakat Perdesaan

### 3. KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- a) Peningkatan kualitas SDM melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan budaya serta pemberdayaan perempuan;
- b) Pemantapan infrastruktur untuk mendukung pariwisata, sentra produksi dan industri serta pembangunan agrowisata
- c) Peningkatan perekonomian daerah melalui pengolahan produk unggulan daerah, pemanfaatan teknologi, inovasi, penguatan kelembagaan dan permodalan serta perluasan lapangan kerja
- d) Peningkatan investasi daerah dan pelayanan publik melalui penyederhanaan birokrasi dan regulasi;
- e) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta kesiapsiagaan bencana;
- f) Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa, serta ketentraman dan ketertiban umum.

### 4. KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- a) Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan pengendalian Stunting
- b) Peningkatan Kualitas Infrastruktur dengan Semangat Gotong Royong
- c) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan peningkatan Ketahanan Pangan
- d) Peningkatan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- e) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan
- f) Peningkatan Keamanan, ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

## 5. KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- a) Pemantapan pembangunan infrastruktur dan kawasan strategis secara merata dan berkelanjutan untuk peningkatan daya saing, perekonomian dan pelayanan dasar.
- b) Pemantapan layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan mandiri.
- c) Peningkatan produksi, nilai tambah, dan daya saing produk daerah untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- d) Peningkatan investasi dan pariwisata untuk mendorong pengembangan UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif berbasis potensi dan kearifan lokal.
- e) Pemantapan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk meningkatkan kemandirian, kesejahteraan, dan ketentraman wilayah.
- f) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pro rakyat berlandaskan peraturan perundang-undangan.

## 6. KABUPATEN TANGGAMUS

- a) Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur Dan Konektivitas
- b) Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
- c) Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Dan Kesempatan Kerja
- d) Memperkuat Ketahanan Pangan, Air, Dan Energi
- e) Mengelola Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana
- f) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dan Stabilitas Kamtibmas

## 7. KABUPATEN WAY KANAN

- a) Meningkatkan Kualitas SDM (pemberdayaan Masyarakat) JPS (miskin)
- b) Mengembangkan Komoditas Unggulan Berdasarkan Potensi Wilayah Hulu hilir

- c) Mengurangi Disparitas Wilayah dengan memantapkan Infrastrktur
- d) Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan
- e) Keamanan dan Ketertiban yang Kondusif

#### 8. KABUPATEN TULANG BAWANG

- a) Pembangunan bidang Infrastruktur
- b) Penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat tidak mampu (bedah rumah)
- c) Fasilitasi pembangunan GSG untuk Balai Pertunjukan
- d) Revitalisasi infrastruktur kawasan kota terpadu mandiri di rawa pitu dan kawasan strategis lainnya (kawasan wisata Cakat)
- e) Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana perhubungan (terminal, rambu ,dll)
- f) Fasilitasi pengembangan sarana telekomunikasi

#### 9. KABUPATEN PESAWARAN

- a) Peningkatan Kualitas Sdm Yang Sehat Jasmani Dan Rohani, Cerdas, Unggul Dan Berdaya Saing
- b) Pemerataan Infrastruktur Wilayah Secara Berkelanjutan Dan Berkualitas
- c) Peningkatan Iklim Investasi Dan Berusaha Yang Kondusif
- d) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Layanan Publik Yang Berkualitas Dan Berkinerja Tinggi
- e) Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan Dan Potensi Lokal

#### 10. KABUPATEN PRINGSEWU

- a) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan wilayah strategis
- b) Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter
- c) Pengembangan potensi unggulan daerah yang berdaya saing
- d) Pemantapan harmonisasi masyarakat dan lingkungan hidup

- e) Pemantapan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi

#### 11. KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

- a) Pembangunan infrastruktur yang berkualitas
- b) Pembangunan SDM yang berkarakter melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar
- c) Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi rakyat
- d) Pengembangan ekowisata dan pelestarian budaya
- e) Reformasi Birokrasi

#### 12. KABUPATEN MESUJI

- a) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal urusan wajib pelayanan dasar
- b) Pembangunan SDM untuk penguatan pendidikan berbasis keterampilan dan vokasi
- c) Pembangunan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada peningkatan produksi pertanian, kewirausahaan serta nilai tambah dalam rangka pengentasan kemiskinan
- d) Peningkatan Infrastruktur daerah yang berkelanjutan
- e) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

#### 13. KABUPATEN PESISIR BARAT

- a) Pembangunan Infrastruktur Pelayanan dasar dan konektivitas wilayah
- b) Pembangunan SDM
- c) Pembangunan ekonomi masyarakat dan potensi unggulan daerah
- d) Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- e) Pengelolaan SDA dengan prinsip pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana



#### 14. KOTA BANDAR LAMPUNG

- a) Memantapkan infrastruktur dan pelayanan kesehatan Masyarakat
- b) Memantapkan kualitas infrastruktur, pelayanan pendidikan dan SDM
- c) Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan
- d) Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui perdagangan dan jasa.
- e) Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal
- f) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif

#### 15. KOTA METRO

- a) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- b) Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- c) Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
- d) Melaksanakan Transformasi Pelayanan Birokrasi dan Pelayanan Publik
- e) Pembangunan Lingkungan Hidup untuk Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

### **5.2 Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten/Kota**

Salah satu indikator keberhasilan kinerja pembangunan daerah dilihat dari pencapaian terhadap sasaran dan target makro pembangunan baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sasaran dan target makro pembangunan provinsi, kabupaten/kota dan sandingan target Nasional tahun 2021 sebagaimana pada tabel V-2 sbb :

Tabel V-2  
**Target dan Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten/Kota  
 se-Provinsi Lampung Tahun 2021**

No.	Kab/Kota	SASARAN MAKRO PEMBANGUNAN TAHUN 2021			
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	IPM	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
1.	Tanggamus	5.2 – 5.5	67,75	10,39	0,45
2.	Lampung Selatan	5.4 – 5.7	69,63	12,59	3,32
3.	Lampung Timur	4.0 – 4.3	71,54	13,98	2,95
4.	Lampung Tengah	5.6 – 5.9	71,75	11,07	2,49
5.	Lampung Utara	5.5 – 5.8	69,25	17,42	4,35
6.	Way Kanan	5.4 – 5.7	69,43	11,72	3,40
7.	Lampung Barat	5.3 – 5.6	68,64	11,97	2,33
8.	Tulang Bawang	5.7 – 6.0	69,11	8,10	3,07
9.	Pesawaran	5.2 – 5.5	67,13	13,37	1,72
10.	Pringsewu	5.2 – 5.5	71,46	8,91	3,87
11.	Mesuji	5.5 – 5.8	63,70	5,90	1,56
12.	Tulang Bawang Barat	5.6 – 5.9	67,27	6,24	1,28
13.	Pesisir Barat	5.5 – 5.8	65,55	13,48	0,48
14.	Bandar Lampung	6.5 – 6.8	78,92	7,09	6,52
15.	Metro	5.9 – 6.2	79,27	7,07	4,62
	<b>Provinsi</b>	<b>4,7 – 5,7</b>	<b>70,86</b>	<b>11,5-12,1</b>	<b>6,3</b>
	<b>Nasional</b>	<b>4,5 – 5,5</b>	<b>72,7 – 72,9</b>	<b>9,2 - 9,7</b>	<b>7,5 – 8.2</b>

## **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Sebagaimana diketahui, RKPD Provinsi Lampung Tahun 2020 yang lalu merupakan tahun ke-2 (tahun kedua) pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024. Disatu sisi, periode RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 telah berlalu, sementara RPJMD 2020-2024 belum ditetapkan. Karenanya, pada saat ini penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2021 antardokumen rencana pembangunan jangka menengah, yang menjadi acuan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan.

Untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan, peraturan perundangan telah mengantisipasi keadaan tersebut. Secara lugas dinyatakan bahwa dalam rangka penyusunan RKPD bagi daerah yang belum memiliki RPJMD, telah diatur dalam Pasal 147 Ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyebutkan : “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program m dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional”. Selanjutnya, dengan berpedoman pada Pasal 9 Permendagri 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021. Dengan demikian, penyusunan RKPD 2021 oleh pemerintah daerah secara jelas telah memiliki landasan hukum.

Lebih lanjut, penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang akan dilaksanakan pada pada tahun 2021 pada dasarnya merupakan program prioritas yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya Visi, Misi, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Elemen-elemen utama Program Prioritas memuat Kegiatan yang akan dilaksanakan, yang memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur

tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Disatu sisi, bahwa proses penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2021 mencakup pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*) ; oleh karenanya pada bagian pembahasan ini akan dipaparkan pula sinkronisasi program-program prioritas daerah berdasarkan aspek pendekatan perencanaan yang telah dilaksanakan tersebut. Disisi yang lain, Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang disampaikan pada Forum Musrenbang Nasional, strategi penyusunan program/kegiatan pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan tematik- holistik, integratif, dan spasial, dimana:

- Tematik- holistik yaitu pendekatan pembangunan yang memandang pentingnya mempertimbangkan sumber daya pembangunan sebagai satu kesatuan faktor (hulu – hilir) yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- Integratif yaitu pendekatan pembangunan yang menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
- Spasial yaitu pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan dimensi pemanfaatan ruang dan indikasi lokasi sesuai dengan kewenangan masing-masing hierarki pemerintahan, dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Berlakunya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa beberapa perubahan mendasar terkait dengan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk implikasinya terhadap penyusunan program dan kegiatan dalam dokumen RKPD Tahun 2021. Secara garis besar, kewenangan urusan pemerintahan pada tingkat pemerintah provinsi mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, yaitu: 1) Urusan Pemerintahan Wajib, meliputi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan

Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; serta 2) Urusan Pemerintahan Pilihan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah Provinsi Lampung; dan berkenaan dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung; serta Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung; maka penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2021 juga menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

Uraian pokok pada bab ini terdiri dari ; (1) Program Prioritas Berdasarkan Urusan Pemerintahan sebagaimana Undang-Undang 23 Tahun 2014; (2) Sinkronisasi Program Prioritas Berdasarkan Prioritas Daerah; (3) Program Prioritas Daerah Berdasarkan Perangkat Daerah; (4) Sinkronisasi Program Prioritas Daerah Provinsi Lampung dengan Prioritas Pembangunan Nasional, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

### **6.1 Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

Sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berikut ditampilkan tabel mengenai pagu indikatif berdasarkan urusan pemerintahan

Tabel VI-1  
Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan

No.	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
1	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>	
	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	
	<b><i>Pendidikan</i></b>	<b>733.135.198.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.290.367.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.552.340.000
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	824.000.000
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	4.635.000.000
	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas	346.500.000.000
	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	93.450.000.000
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus	10.300.000.000
	Program Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	22.000.000.000
	Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah I	1.250.000.000
	Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah II	1.100.000.000
	Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah III	650.000.000
	Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah IV	1.100.000.000
	Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah V	1.120.000.000
	Program Pemanfaatan TIK untuk pendidikan	6.500.000.000
	Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah VI	1.160.000.000
	Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah VII	500.000.000
	Program Penguatan Fungsi Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi	14.000.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	217.203.491.000
2	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>	
	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	
	<b><i>Kebudayaan</i></b>	<b>20.532.500.000</b>
	Program Pengembangan Nilai Budaya	5.200.000.000
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	6.177.000.000
	Program Pelestarian, Pembinaan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Museum	8.405.500.000
	Program Pengembangan Museum Transmigrasi menjadi Pusat layanan Informasi, Edukasi dan Sejarah Ketransmigrasian	750.000.000
3	<b>Dinas Kesehatan</b>	
	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	
	<b><i>Kesehatan</i></b>	<b>160.795.053.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15.269.415.000

No.	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.028.895.000
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	460.000.000
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	850.000.000
	Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan	2.208.878.000
	Program Kesehatan Masyarakat	16.740.780.000
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2.858.000.000
	Program Pelayanan Kesehatan	82.438.000.000
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	9.000.000.000
	Program Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan	3.180.000.000
	Program Pelayanan RSBNH	12.500.000.000
	Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan	6.085.085.000
	Program Pelayanan Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Alkes	1.176.000.000
4	<b>Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek</b>	
	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	
	<b>Kesehatan</b>	<b>354.694.971.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.053.787.800
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	420.282.000
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	92.420.749.200
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1.800.152.000
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	250.000.000.000
5	<b>Rumah Sakit Jiwa</b>	
	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	
	<b>Kesehatan</b>	<b>33.104.864.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.268.263.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.020.664.000
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	1.020.263.000
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	282.686.000
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.507.704.100
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	14.000.000.000
	Program Mutu Layanan Keperawatan	307.470.700
	Program Mutu Layanan Penunjang Medis	6.697.813.200
6	<b>Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi</b>	
	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	

No.	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	<b>Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>	<b>862.335.830.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14.245.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.931.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	845.000.000
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	616.000.000
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	54.645.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	7.050.000.000
	Program Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Melalui UPTD Wilayah	62.810.000.000
	Program Optimalisasi dan Peranan UPTD Pengujian / Laboratorium	2.090.000.000
	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	3.751.000.000
	Program Penyusunan Penganggaran, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	2.139.000.000
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Non Status Provinsi	73.850.000.000
	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan/Jembatan	633.746.330.000
	Program Survey dan Data Base Jalan/Jembatan	2.617.500.000
7	<b>Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air</b>	
	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	
	<b>Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>	<b>162.917.481.250</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14.363.040.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.587.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	172.500.000
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	115.000.000
	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air	110.756.960.000
	Program Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	16.100.000.000
	Program Penatagunaan Sumber Daya Air	2.817.500.000
	Program Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air	10.887.481.250
	Program Pengembangan Sumber Daya Air	6.118.000.000
8	<b>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya</b>	
	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	
	<b>Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>	<b>4.500.000.000</b>
	Penyelenggaraan Penataan Ruang	4.500.000.000



No.	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
9	<b>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya</b>	
	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	
	<b><i>Perumahan Dan Kawasan Permukiman</i></b>	<b>230.980.900.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.039.800.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	890.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	570.000.000
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	655.000.000
	Pengembangan Perumahan	51.143.000.000
	Pengembangan Kawasan Permukiman	121.808.500.000
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah	50.874.600.000
10	<b>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya</b>	
	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	
	<b><i>Pertanahan</i></b>	<b>5.300.000.000</b>
	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pertanahan	5.300.000.000
11	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	
	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	
	<b><i>Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</i></b>	<b>29.557.914.000</b>
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>20.929.003.500</i>
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	806.708.500
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	100.802.000
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	427.000.000
	Program penegakan Peraturan Perundang undangan	1.000.000.000
	Peningkatan Perlindungan Masyarakat (Linmas)	325.000.000
	Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibmas)	5.151.400.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (POL PP)	818.000.000
12	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	
	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	
	<b><i>Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</i></b>	<b>5.911.583.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.380.276.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	291.468.000
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	148.490.600

No.	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	339.643.700
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1.341.775.000
	Program Kedaruratan dan Logistik	1.205.950.700
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1.203.979.000
13	<b>Dinas Sosial</b>	
	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	
	<b>Sosial</b>	<b>17.734.749.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.559.879.500
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	365.501.830
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	10.000.000
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	690.048.564
	Program Penanganan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.740.703.185
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	9.762.276.000
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.517.124.914
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.089.215.007
14	<b>Dinas Tenaga Kerja</b>	
	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	
	<b>Tenaga Kerja</b>	<b>12.795.300.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.490.300.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.480.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	150.000.000
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	1.250.000.000
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.850.000.000
	Program Pembinaan Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.100.000.000
	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	575.000.000
	Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	900.000.000
15	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	
	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	
	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>11.823.622.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.831.000.000

No.	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	699.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	189.000.000
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	466.622.000
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi dan Kesejahteraan Keluarga	3.230.000.000
	Program Perlindungan dan Pencegahan kekerasan terhadap Anak	1.760.000.000
	Program Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Trafficking, Kekerasan, Pelecehan Seksual serta pada Situasi Khusus dan Darurat	1.410.000.000
	Program Operasional Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	1.058.000.000
	Program Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak serta Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.180.000.000
16	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	
	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	
	<b><i>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</i></b>	<b>437.000.000</b>
	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	437.000.000
	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	
	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	
	<b><i>Lingkungan Hidup</i></b>	<b>7.093.899.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.129.383.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	245.751.000
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	105.000.000
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	291.270.000
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	567.500.000
	Program Tata Lingkungan dan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim	842.476.000
	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1.200.000.000
	Program Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	662.519.000
	Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan	1.050.000.000
17	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	
	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	

No.	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>6.065.284.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.830.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	880.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	205.284.000
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	570.000.000
	Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.950.000.000
	Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk	315.000.000
	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	315.000.000
18	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>	
	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	
	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>9.702.956.500</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.910.393.900
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	571.758.700
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	308.600.000
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	591.648.000
	Program Pembinaan, Pengembangan Peningkatan Administrasi Aparatur dan Fasilitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1.198.725.700
	Program Pengembangan Keberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Kawasan Pedesaan	625.318.000
	Program Pembinaan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	1.966.258.600
	Program Pembinaan, Penerapan dan Pengembangan TTG dan SDA	530.253.600
19	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>	
	<b>Urusan Pilihan</b>	
	<b>Transmigrasi</b>	<b>405.850.500</b>
	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	405.850.500
20	<b>Dinas Perhubungan</b>	
	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	
	<b>Perhubungan</b>	<b>14.187.799.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.792.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	825.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	310.000.000
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	1.650.000.000

No.	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	Program rehabilitas dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	550.000.000
	Program peningkatan pelayanan angkutan	795.000.000
	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	2.250.000.000
	Program Pengembangan Jaringan, Pelayanan dan Sistem Informasi Perhubungan	1.580.000.000
	Pengendalian, Pengamanan dan Operasional Transportasi	1.555.799.000
	Peningkatan Keselamatan Transportasi	880.000.000
21	<b>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</b>	
	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	
	<b><i>Komunikasi dan Informatika</i></b>	<b>13.661.982.500</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.476.451.700
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.042.348.800
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	306.563.000
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	184.271.600
	Program Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.824.521.400
	Program Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	5.827.826.000
22	<b>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</b>	
	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	
	<b><i>Statistik</i></b>	<b>249.650.000</b>
	Program Penyelenggaraan statistik sektoral	249.650.000
23	<b>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</b>	
	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	
	<b><i>Persandian</i></b>	<b>276.166.500</b>
	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	276.166.500
24	<b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	
	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	
	<b><i>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</i></b>	<b>9.458.533.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.533.533.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	350.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	240.000.000
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	610.000.000
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	525.000.000
	Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Koperasi	275.000.000

No.	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	250.000.000
	Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM	3.475.000.000
	Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	870.000.000
	Program Peningkatan Pembiayaan Usaha bagi Koperasi dan UMKM	930.000.000
	Program Layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	400.000.000
25	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	
	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	
	<b><i>Penanaman Modal</i></b>	<b>8.276.216.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.538.216.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	760.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	175.000.000
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	500.000.000
	Program Peningkatan Kualitas Informasi Potensi dan Peluang Penanaman Modal Daerah	700.000.000
	Program Promosi Penanaman Modal	1.150.000.000
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	660.000.000
	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	450.000.000
	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	843.000.000
	Program Peningkatan Kualitas Daya Dukung Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	500.000.000
26	<b>Dinas Pemuda dan Olahraga</b>	
	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	
	<b><i>Kepemudaan dan Olahraga</i></b>	<b>14.397.699.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.870.885.900
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	353.453.000
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	40.000.000
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	408.360.100
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.750.000.000
	Program Olahraga Prestasi	2.150.000.000
	Program Pembudayaan Olahraga	1.300.000.000
	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Kemitraan	3.100.000.000
	Program Fasilitasi Manajemen Teknis dan Pelayanan Gedung Olahraga	425.000.000

No.	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
27	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>	
	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	
	<b>Perpustakaan</b>	<b>15.096.698.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.460.858.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.130.114.000
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	100.000.000
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	1.000.000.000
	Program Layanan, Teknologi Informasi dan komunikasi, pelestarian dan kerjasama perpustakaan	1.305.726.000
	Program Deposit, Akuisisi dan Pengelolaan bahan Pustaka	1.050.000.000
	Program Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan	1.050.000.000
28	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>	
	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	
	<b>Kearsipan</b>	<b>2.185.000.000</b>
	Program Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	1.090.000.000
	Program Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip	1.095.000.000
29	<b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b>	
	<b>Urusan Pilihan</b>	
	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	<b>30.740.231.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.112.800.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	630.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	275.000.000
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	800.000.000
	Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	2.500.000.000
	Program pengembangan budidaya perikanan	4.970.000.000
	Program pengembangan perikanan tangkap	10.990.700.000
	Program Peningkatan Daya Saing dan Konsumsi Ikan	1.911.731.000
	Program Penerapan Mutu Hasil Perikanan	1.950.000.000
	Program Pengelolaan Ruang Laut	3.600.000.000
30	<b>Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</b>	
	<b>Urusan Pilihan</b>	
	<b>Pariwisata</b>	<b>17.734.749.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.188.467.067
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	356.763.855

No.	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	224.689.839
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	531.923.628
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4.612.054.581
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4.859.213.403
	Program Pengembangan Kemitraan	1.300.835.907
	Program Pengembangan Daya Tarik Wisata Menara Siger	443.466.787
	Program pengembangan ekonomi kreatif dan kebudayaan lokal	2.217.333.933
31	<b>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan</b>	
	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	
	<b><i>Pangan</i></b>	<b>3.535.004.000</b>
	Program Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan	1.525.004.000
	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	2.010.000.000
	<b>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan</b>	
	<b>Urusan Pilihan</b>	
	<b><i>Pertanian</i></b>	<b>46.713.450.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.652.600.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.130.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	847.500.000
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	895.000.000
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan.	3.705.000.000
	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura.	2.895.000.000
	Program Penyediaan dan Pengawasan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Bermutu dan Bersertifikat.	850.000.000
	Program Perlindungan dan Pengamanan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.	1.720.000.000
	Program Peningkatan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.	1.500.000.000
	Program Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Agribisnis Pertanian.	2.250.000.000
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura.	16.243.350.000
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura.	3.100.000.000



No.	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	Program Pengembangan, Peningkatan Kualitas SDM Pertanian, dan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan.	2.925.000.000
32	<b>Dinas Perkebunan</b>	
	<b>Urusan Pilihan</b>	
	<b>Pertanian</b>	<b>8.486.520.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.749.020.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	500.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	137.500.000
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	625.000.000
	Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	1.750.000.000
	Program Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan	450.000.000
	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tanaman Tembakau (DBH-CHT)	2.350.000.000
	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkebunan	500.000.000
	Program Peningkatan Kelembagaan Perkebunan	425.000.000
33	<b>Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan</b>	
	<b>Urusan Pilihan</b>	
	<b>Pertanian</b>	<b>12.463.516.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.233.111.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	400.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	96.555.000
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	429.290.000
	Program peningkatan produksi hasil peternakan	4.074.123.000
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	655.986.000
	Program Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan ynag Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	739.727.000
	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan	2.822.606.000
	Program Peningkatan Kelembagaan Peternakan	1.012.118.000
34	<b>Dinas Kehutanan</b>	
	<b>Urusan Pilihan</b>	
	<b>Kehutanan</b>	<b>30.740.231.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.193.711.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.447.300.000

No.	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	1.000.000.000
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	905.000.000
	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan	4.440.620.000
	Program Pengelolaan DAS dan RHL	4.200.000.000
	Program Perlindungan dan Konservasi Hutan	1.200.000.000
	Program Penatagunaan dan Pemanfaatan Hutan	500.000.000
	Program Peningkatan Fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Unit KPH/Tahun)	14.853.600.000
35	<b>Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral</b>	
	<b>Urusan Pilihan</b>	
	<b><i>Energi dan Sumber Daya Mineral</i></b>	<b>8.276.216.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.229.216.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	295.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	150.000.000
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	722.000.000
	Program Dukungan Program/Kebijakan Nasional di Bidang ESDM	150.000.000
	Program Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan Energi	1.180.000.000
	Program Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Geologi	590.000.000
	Program Optimalisasi Inventarisasi dan Evaluasi Data, Pembinaan serta Pengawasan Pengelolaan Mineral dan Batubara	865.000.000
	Program Dukungan Teknis dan Operasional Cabang Dinas ESDM	2.065.000.000
	Pengembangan, pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan.	1.030.000.000
36	<b>Dinas Perindustrian Dan Perdagangan</b>	
	<b>Urusan Pilihan</b>	
	<b><i>Perdagangan</i></b>	<b>13.969.130.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.917.130.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.110.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	100.000.000
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	747.000.000
	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	3.005.000.000
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan atau/jasa	1.265.000.000

No.	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	Program Pengujian Mutu Barang	2.075.000.000
	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Di daerah	2.750.000.000
37	<b>Dinas Perindustrian Dan Perdagangan</b>	
	<b>Urusan Pilihan</b>	
	<b><i>Perindustrian</i></b>	<b>9.865.000.000</b>
	Program Pengembangan Sumber Daya Industri	1.190.000.000
	Program Peningkatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri	1.630.000.000
	Program Pemberdayaan Industri	2.730.000.000
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri	2.765.000.000
	Program Peningkatan Layanan Rumah Kemasan dan Workshop Industri	1.550.000.000
38	<b>Inspektorat</b>	
	<b>Urusan Pendukung</b>	
	<b><i>Inspektorat</i></b>	<b>12.414.324.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.816.324.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	464.500.000
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	40.000.000
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	6.687.000.000
	Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan	2.162.000.000
	Program Peningkatan Sistem Pembinaan dan Prosedur Pengawasan Pada Obyek Pengawasan	644.500.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	600.000.000
39	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	
	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>	
	<b><i>Perencanaan</i></b>	<b>21.216.250.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.852.520.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.816.980.000
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	786.500.000
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	1.196.250.000
	Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi	2.970.000.000
	Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3.575.000.000

No.	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	3.520.000.000
	Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Kabupaten/Kota	1.430.000.000
	Program Pengolahan dan Analisis data Perencanaan	1.155.000.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.914.000.000
40	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	
	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>	
	<b><i>Keuangan</i></b>	<b>29.557.914.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13.043.334.800
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.808.398.400
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	879.345.000
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	332.555.000
	Program Peningkatan Pelayanan Pajak	1.114.838.500
	Program Peningkatan Pelayanan Pendapatan Non Pajak	321.036.300
	Program Peningkatan Pelayanan Teknologi Informasi Pendapatan	7.220.091.500
	Program Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Pendapatan Daerah	648.614.500
	Program Pengembangan Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah	1.189.700.000
41	<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>	
	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>	
	<b><i>Kepegawaian</i></b>	<b>10.345.270.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.058.454.100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	972.228.800
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	61.480.000
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	180.752.610
	Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur	2.419.921.560
	Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur	669.730.005
	Program Pengadaan dan Mutasi Pegawai	1.650.966.825
	Manajemen Pelayanan dan Sistem Informasi Kepegawaian	331.736.100
42	<b>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah</b>	
	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>	
	<b><i>Pendidikan dan Pelatihan</i></b>	<b>17.399.619.400</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.093.608.597

No.	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.607.784.582
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	675.126.236
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	756.324.406
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Manajerial	6.408.788.057
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Inti	1.631.957.775
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Umum dan Fungsional	2.625.327.377
	Program Pembinaan, pengembangan dan Pengelolaan Kelembagaan	600.702.370
43	<b>Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	
	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>	
	<b><i>Penelitian dan Pengembangan</i></b>	<b>7.218.900.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.482.162.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	447.197.000
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	80.541.000
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	354.000.000
	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1.130.000.000
	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.700.000.000
	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	800.000.000
	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Penguatan Inovasi Daerah	1.225.000.000
44	<b>Badan Penghubung</b>	
	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>	
	<b><i>Penghubung Pusat dan Daerah</i></b>	<b>10.640.850.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.132.863.767
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.599.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	185.000.000
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	528.300.000
	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Lampung di Luar Daerah	3.195.686.233
45	<b>Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	
	<b>Urusan Pendukung</b>	
	<b><i>Sekretariat Daerah</i></b>	<b>3.874.514.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	300.000.000

No.	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	Program Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	3.080.562.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Otonomi Daerah	493.952.000
46	<b>Biro Kesejahteraan Rakyat</b>	
	<b>Urusan Pendukung</b>	
	<b><i>Sekretariat Daerah</i></b>	<b>41.381.080.000</b>
	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial & keagamaan	40.792.000.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Kesejahteraan Rakyat	589.080.000
47	<b>Biro Hukum</b>	
	<b>Urusan Pendukung</b>	
	<b><i>Sekretariat Daerah</i></b>	<b>3.310.486.000</b>
	Program Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Advokasi Hukum	2.960.324.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Hukum	350.162.000
48	<b>Biro Perekonomian</b>	
	<b>Urusan Pendukung</b>	
	<b><i>Sekretariat Daerah</i></b>	<b>5.912.890.000</b>
	Program Koordinasi Peningkatan Perekonomian Daerah	4.662.890.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Perekonomian	1.250.000.000
49	<b>Biro Pengadaan Barang dan Jasa</b>	
	<b>Urusan Pendukung</b>	
	<b><i>Sekretariat Daerah</i></b>	<b>7.093.899.000</b>
	Program Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	6.572.073.400
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Pengadaan Barang dan Jasa	521.825.600
50	<b>Biro Organisasi</b>	
	<b>Urusan Pendukung</b>	
	<b><i>Sekretariat Daerah</i></b>	<b>3.310.486.000</b>
	Program Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Daerah	2.635.000.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Organisasi	675.486.000
51	<b>Biro Umum</b>	
	<b>Urusan Pendukung</b>	
	<b><i>Sekretariat Daerah</i></b>	<b>38.614.957.000</b>
	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	30.312.157.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Umum	8.302.800.000
52	<b>Biro Administrasi Pimpinan</b>	

No.	OPD/URUSAN/BIDANG/PROGRAM	PAGU
	<b>Urusan Pendukung</b>	
	<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>7.093.900.000</b>
	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	1.273.395.800
	Program Pelayanan Keprotokolan KDH/WKDH	2.204.519.200
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Administrasi Pimpinan	3.615.985.000
53	<b>Sekretariat DPRD</b>	
	<b>Urusan Pendukung</b>	
	<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>94.585.326.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.430.125.686
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.406.406.129
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	3.815.140.542
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	2.698.053.378
	Program peningkatan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah	5.859.134.874
	Program pembahasan, sosialisasi, dokumentasi, peraturan perundang-undangan dan produk hukum	14.792.188.801
	Program Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	32.765.186.482
	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	21.819.090.108
54	<b>Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah</b>	
	<b>Urusan Pemerintah Lainnya (yang diatur Perundang undangan)</b>	
	<b>Kesbangpol</b>	<b>7.093.900.000</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.835.950.900
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	272.629.800
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	88.066.000
	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	547.781.400
	Program Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1.146.599.150
	Program Kewaspadaan Nasional	1.109.443.800
	Program Ketahanan sosial dan kemasyarakatan	1.077.466.750
	Program Politik Dalam Negeri	1.015.962.200

## 6,2 Sinkronisasi Program Prioritas Menurut Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel VI-2  
Program Prioritas Berdasarkan Prioritas Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PAGU	OPD
1	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas	6.500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	49.950.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	4.950.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.120.119.400	Rumah Sakit Jiwa
5	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	14.000.000.000	Rumah Sakit Jiwa
6	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Program Mutu Layanan Keperawatan	307.470.700	Rumah Sakit Jiwa
7	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Program Mutu Layanan Penunjang Medis	6.697.813.200	Rumah Sakit Jiwa
8	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14.363.040.000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
9	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	172.500.000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
10	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah	2.730.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
11	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	760.000.000	Dinas Tenaga Kerja
12	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.000.000.000	Dinas Tenaga Kerja
13	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.450.000.000	Dinas Tenaga Kerja



No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PAGU	OPD
14	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Program Pembinaan Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.100.000.000	Dinas Tenaga Kerja
15	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Hubungan Industrial	575.000.000	Dinas Tenaga Kerja
16	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	800.000.000	Dinas Tenaga Kerja
17	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Program Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan	160.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
18	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
19	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Program Pembinaan, Pengembangan Peningkatan Administrasi Aparatur dan Fasilitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan	582.273.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
20	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Program Pengembangan Keberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Kawasan Pedesaan	175.318.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
21	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Program Pembinaan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	350.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
22	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Program Pengembangan Kemitraan	1.300.835.907	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
23	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.642.600.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
24	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.730.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
25	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	847.500.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PAGU	OPD
				Dan Ketahanan Pangan
26	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	895.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
27	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura.	325.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
28	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Program Penyediaan dan Pengawasan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Bermutu dan Bersertifikat.	200.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
29	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Program Perlindungan dan Pengamanan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.	1.050.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
30	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Program Peningkatan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.	100.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
31	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Program Peningkatan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.	300.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
32	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Program Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Agribisnis Pertanian.	850.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
33	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura.	1.000.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
34	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	Program Pengembangan, Peningkatan Kualitas SDM Pertanian, dan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan	366.947.500	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
35	2 Pembangunan Infrastruktur	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air	95.461.960.000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
36	2 Pembangunan Infrastruktur	Program Penatagunaan Sumber Daya Air	805.000.000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PAGU	OPD
37	2 Pembangunan Infrastruktur	Program Penatagunaan Sumber Daya Air	2.012.500.000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
38	2 Pembangunan Infrastruktur	Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.400.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
39	2 Pembangunan Infrastruktur	Pengembangan Perumahan	500.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
40	2 Pembangunan Infrastruktur	Pengembangan Kawasan Permukiman	97.133.500.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
41	2 Pembangunan Infrastruktur	Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah	48.144.600.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
42	2 Pembangunan Infrastruktur	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pertanahan	5.300.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
43	2 Pembangunan Infrastruktur	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	700.000.000	Dinas Perhubungan
44	2 Pembangunan Infrastruktur	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
45	2 Pembangunan Infrastruktur	Program Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Agribisnis Pertanian.	0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
46	2 Pembangunan Infrastruktur	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura.	100.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
47	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Program Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan	345.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PAGU	OPD
48	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Program Pembinaan, Pengembangan Peningkatan Administrasi Aparatur dan Fasilitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan	75.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
49	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Program Pengembangan Keberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Kawasan Pedesaan	325.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
50	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Program Pembinaan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	316.258.600	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
51	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Program pengembangan ekonomi kreatif dan kebudayaan lokal	593.449.193	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
52	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Program pengembangan ekonomi kreatif dan kebudayaan lokal	1.623.884.740	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
53	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan	440.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
54	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura.	770.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
55	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Program Penyediaan dan Pengawasan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Bermutu dan Bersertifikat.	50.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
56	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Program Perlindungan dan Pengamanan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.	120.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
57	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Program Peningkatan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.	300.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
58	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Program Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Agribisnis Pertanian.	100.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PAGU	OPD
59	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Program Pengembangan, Peningkatan Kualitas SDM Pertanian, dan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan.	500.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
60	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Program peningkatan produksi hasil peternakan	4.074.123.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
61	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	655.986.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
62	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Program Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	559.727.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
63	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan	2.822.606.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
64	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Program Peningkatan Kelembagaan Peternakan	1.012.118.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
65	4 Reformasi Birokrasi	Program Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan	430.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
66	4 Reformasi Birokrasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.527.800.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
67	4 Reformasi Birokrasi	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Pengadaan kendaraan dinas/operasional	250.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
68	4 Reformasi Birokrasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	25.000.000	Dinas Perkebunan
69	4 Reformasi Birokrasi	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	250.000.000	Dinas Perkebunan
70	4 Reformasi Birokrasi	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	54.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
71	4 Reformasi Birokrasi	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang	980.000.000	Badan Penelitian dan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PAGU	OPD
		Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		Pengembangan Daerah
72	4 Reformasi Birokrasi	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.700.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
73	4 Reformasi Birokrasi	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Penguatan Inovasi Daerah	1.225.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
74	4 Reformasi Birokrasi	Program Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	3.080.562.000	Sekretariat Daerah
75	4 Reformasi Birokrasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Otonomi Daerah	50.000.000	Sekretariat Daerah
76	4 Reformasi Birokrasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Kesejahteraan Rakyat	589.080.000	Sekretariat Daerah
77	4 Reformasi Birokrasi	Program Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Daerah	1.015.000.000	Sekretariat Daerah
78	4 Reformasi Birokrasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Organisasi	675.486.000	Sekretariat Daerah
79	4 Reformasi Birokrasi	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	10.160.000.000	Sekretariat Daerah
80	5 Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Kebudayaan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	387.584.700	Rumah Sakit Jiwa
81	5 Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Kebudayaan	Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan	550.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
82	5 Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.700.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
83	5 Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	6.177.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
84	5 Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Kebudayaan	Program Pelestarian, Pembinaan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Museum	4.080.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PAGU	OPD
85	5 Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Kebudayaan	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan.	390.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
86	5 Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Kebudayaan	Program Pengembangan, Peningkatan Kualitas SDM Pertanian, dan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan.	150.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan
87	5 Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Kebudayaan	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial & keagamaan	3.642.000.000	Sekretariat Daerah
88	5 Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Kebudayaan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
89	6 Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
90	6 Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	567.500.000	Dinas Lingkungan Hidup
91	6 Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Program Tata Lingkungan dan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim	842.476.000	Dinas Lingkungan Hidup
92	6 Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1.200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
93	6 Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Program Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	662.519.000	Dinas Lingkungan Hidup
94	6 Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan	300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
95	6 Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	286.107.800	Dinas Kehutanan

No.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PAGU	OPD
96	6 Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	500.000.000	Dinas Kehutanan
97	6 Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	Program Penatagunaan dan Pemanfaatan Hutan	300.000.000	Dinas Kehutanan

### 6.3 Program Prioritas Berdasarkan Prioritas Daerah dan Nasional

Tabel VI-3

#### Program Prioritas berdasarkan Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional

No.	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya	5 Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya	4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	5 Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya	4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	5 Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya	4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan



No.	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	5 Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Kebudayaan	4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	5 Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Kebudayaan	4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pelestarian, Pembinaan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Museum	5 Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Kebudayaan	4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pelestarian, Pembinaan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Museum	5 Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Kebudayaan	4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
12	Rumah Sakit Jiwa	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	5 Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Kebudayaan	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
13	Rumah Sakit Jiwa	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
14	Rumah Sakit Jiwa	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
15	Rumah Sakit Jiwa	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
16	Rumah Sakit Jiwa	Program Mutu Layanan Keperawatan	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
17	Rumah Sakit Jiwa	Program Mutu Layanan Keperawatan	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
18	Rumah Sakit Jiwa	Program Mutu Layanan Penunjang Medis	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
19	Rumah Sakit Jiwa	Program Mutu Layanan Penunjang Medis	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
20	Rumah Sakit Jiwa	Program Mutu Layanan Penunjang Medis	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
21	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
22	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

No.	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
23	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
24	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
25	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
26	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
27	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
28	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
29	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
30	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
31	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
32	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air	2 Pembangunan Infrastruktur	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
33	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air	2 Pembangunan Infrastruktur	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
34	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air	2 Pembangunan Infrastruktur	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
35	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air	2 Pembangunan Infrastruktur	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
36	Dinas Pengelolaan	Program Pembangunan dan	2 Pembangunan Infrastruktur	5 Infrastruktur untuk Ekonomi

No.	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
	Sumber Daya Air	Rehabilitasi Sumber Daya Air		dan Pelayanan Dasar
37	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	2 Pembangunan Infrastruktur	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
38	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	2 Pembangunan Infrastruktur	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
39	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	2 Pembangunan Infrastruktur	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
40	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	2 Pembangunan Infrastruktur	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
41	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	2 Pembangunan Infrastruktur	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
42	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	2 Pembangunan Infrastruktur	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
43	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Penatagunaan Sumber Daya Air	2 Pembangunan Infrastruktur	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
44	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Penatagunaan Sumber Daya Air	2 Pembangunan Infrastruktur	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
45	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Penatagunaan Sumber Daya Air	2 Pembangunan Infrastruktur	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
46	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Penatagunaan Sumber Daya Air	2 Pembangunan Infrastruktur	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
47	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Penatagunaan Sumber Daya Air	2 Pembangunan Infrastruktur	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
48	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Penatagunaan Sumber Daya Air	2 Pembangunan Infrastruktur	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar

No.	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
49	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Penyelenggaraan Penataan Ruang	2 Pembangunan Infrastruktur	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
50	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Pengembangan Perumahan	2 Pembangunan Infrastruktur	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
51	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Pengembangan Kawasan Permukiman	2 Pembangunan Infrastruktur	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
52	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Pengembangan Kawasan Permukiman	2 Pembangunan Infrastruktur	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
53	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Pengembangan Kawasan Permukiman	2 Pembangunan Infrastruktur	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
54	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Pengembangan Kawasan Permukiman	2 Pembangunan Infrastruktur	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
55	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Pengembangan Kawasan Permukiman	2 Pembangunan Infrastruktur	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
56	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Pengembangan Kawasan Permukiman	2 Pembangunan Infrastruktur	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
57	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah	2 Pembangunan Infrastruktur	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
58	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah	2 Pembangunan Infrastruktur	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar

No.	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
59	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah	2 Pembangunan Infrastruktur	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
60	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah	2 Pembangunan Infrastruktur	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
61	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
62	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah	2 Pembangunan Infrastruktur	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
63	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pertanahan	2 Pembangunan Infrastruktur	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
64	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pertanahan	2 Pembangunan Infrastruktur	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
65	Dinas Tenaga Kerja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
66	Dinas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
67	Dinas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
68	Dinas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
69	Dinas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

No.	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
70	Dinas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
71	Dinas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
72	Dinas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
73	Dinas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
74	Dinas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
75	Dinas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
76	Dinas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
77	Dinas Tenaga Kerja	Program Pembinaan Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
78	Dinas Tenaga Kerja	Program Pembinaan Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
79	Dinas Tenaga Kerja	Program Pembinaan Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
80	Dinas Tenaga Kerja	Program Pengembangan Hubungan Industrial	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan

No.	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
		dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		Berkualitas dan Berkeadilan
81	Dinas Tenaga Kerja	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
82	Dinas Tenaga Kerja	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
83	Dinas Tenaga Kerja	Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
84	Dinas Tenaga Kerja	Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
85	Dinas Tenaga Kerja	Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
86	Dinas Tenaga Kerja	Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
87	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6 Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
88	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6 Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
89	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6 Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
90	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6 Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

No.	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
91	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6 Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
92	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6 Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
93	Dinas Lingkungan Hidup	Program Tata Lingkungan dan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim	6 Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
94	Dinas Lingkungan Hidup	Program Tata Lingkungan dan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim	6 Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
95	Dinas Lingkungan Hidup	Program Tata Lingkungan dan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim	6 Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
96	Dinas Lingkungan Hidup	Program Tata Lingkungan dan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim	6 Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
97	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	6 Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
98	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	6 Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
99	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	6 Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
100	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	6 Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
101	Dinas Lingkungan Hidup	Program Penegakan Hukum dan Peningkatan	6 Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan	6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim



No.	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
		Kapasitas Lingkungan Hidup	dan Mitigasi bencana	
102	Dinas Lingkungan Hidup	Program Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	6 Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
103	Dinas Lingkungan Hidup	Program Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	6 Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
104	Dinas Lingkungan Hidup	Program Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	6 Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
105	Dinas Lingkungan Hidup	Program Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	6 Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
106	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan	5 Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Kebudayaan	6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
107	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan	6 Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
108	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Pembinaan, Pengembangan Peningkatan Administrasi Aparatur dan Fasilitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
109	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Pembinaan, Pengembangan Peningkatan Administrasi Aparatur dan Fasilitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
110	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Pengembangan Keberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Kawasan Pedesaan	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	2 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

No.	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
111	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Pengembangan Keberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Kawasan Pedesaan	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
112	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Pembinaan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
113	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Pembinaan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	2 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
114	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	2 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
115	Dinas Perhubungan	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	2 Pembangunan Infrastruktur	2 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
116	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4 Reformasi Birokrasi	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
117	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4 Reformasi Birokrasi	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
118	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4 Reformasi Birokrasi	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
119	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4 Reformasi Birokrasi	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
120	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4 Reformasi Birokrasi	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
121	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4 Reformasi Birokrasi	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
122	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4 Reformasi Birokrasi	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
123	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4 Reformasi Birokrasi	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

No.	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
124	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4 Reformasi Birokrasi	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
125	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4 Reformasi Birokrasi	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
126	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4 Reformasi Birokrasi	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
127	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Kemitraan	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
128	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Kemitraan	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
129	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Kemitraan	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
130	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Kemitraan	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
131	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Kemitraan	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
132	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program pengembangan ekonomi kreatif dan kebudayaan lokal	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
133	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program pengembangan ekonomi kreatif dan kebudayaan lokal	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
134	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program pengembangan ekonomi kreatif dan kebudayaan lokal	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
135	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program pengembangan ekonomi kreatif dan kebudayaan lokal	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

No.	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
136	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program pengembangan ekonomi kreatif dan kebudayaan lokal	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
137	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program pengembangan ekonomi kreatif dan kebudayaan lokal	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
138	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	2 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
139	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	2 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
140	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
141	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan	4 Reformasi Birokrasi	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
142	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
143	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	2 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
144	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
145	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2 Pembangunan Infrastruktur	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

No.	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
146	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
147	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
148	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
149	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
150	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
151	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
152	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
153	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
154	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
155	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

No.	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
156	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
157	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
158	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
159	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
160	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
161	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
162	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
163	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
164	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
165	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

No.	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
166	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	2 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
167	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	2 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
168	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
169	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan.	5 Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
170	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan.	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
171	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan.	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
172	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan.	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
173	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura.	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
174	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura.	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
175	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura.	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

No.	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
176	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura.	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
177	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura.	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
178	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura.	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
179	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura.	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
180	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan dan Pengawasan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Bermutu dan Bersertifikat.	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	2 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
181	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan dan Pengawasan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Bermutu dan Bersertifikat.	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
182	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan dan Pengawasan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Bermutu dan Bersertifikat.	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
183	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Perlindungan dan Pengamanan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
184	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Perlindungan dan Pengamanan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
185	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Perlindungan dan Pengamanan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan



No.	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
186	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Perlindungan dan Pengamanan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
187	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	2 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
188	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
189	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
190	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
191	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
192	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Agribisnis Pertanian.	2 Pembangunan Infrastruktur	2 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
193	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Agribisnis Pertanian.	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
194	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Agribisnis Pertanian.	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

No.	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
195	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Agribisnis Pertanian.	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
196	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Agribisnis Pertanian.	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
197	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura.	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
198	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura.	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
199	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura.	2 Pembangunan Infrastruktur	2 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
200	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Pengembangan, Peningkatan Kualitas SDM Pertanian, dan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan.	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
201	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Pengembangan, Peningkatan Kualitas SDM Pertanian, dan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan.	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
202	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Pengembangan, Peningkatan Kualitas SDM Pertanian, dan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan.	5 Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya	6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
203	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	Program Pengembangan, Peningkatan Kualitas SDM Pertanian, dan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan.	1 Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia	3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

No.	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
204	Dinas Perkebunan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4 Reformasi Birokrasi	7 Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
205	Dinas Perkebunan	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	4 Reformasi Birokrasi	7 Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
206	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program peningkatan produksi hasil peternakan	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
207	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program peningkatan produksi hasil peternakan	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
208	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program peningkatan produksi hasil peternakan	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
209	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program peningkatan produksi hasil peternakan	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
210	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program peningkatan produksi hasil peternakan	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
211	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program peningkatan produksi hasil peternakan	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
212	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program peningkatan produksi hasil peternakan	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
213	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
214	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

No.	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
215	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
216	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
217	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
218	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
219	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
220	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
221	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
222	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

No.	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
223	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
224	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
225	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
226	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
227	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
228	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
229	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
230	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
231	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

No.	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
232	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
233	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
234	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
235	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
236	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Kelembagaan Peternakan	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
237	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Kelembagaan Peternakan	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
238	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Kelembagaan Peternakan	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
239	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Kelembagaan Peternakan	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
240	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Kelembagaan Peternakan	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
241	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Kelembagaan Peternakan	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
242	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Kelembagaan Peternakan	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan

No.	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
				Berkualitas dan Berkeadilan
243	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Kelembagaan Peternakan	3 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
244	Dinas Kehutanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6 Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
245	Dinas Kehutanan	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	6 Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
246	Dinas Kehutanan	Program Penatagunaan dan Pemanfaatan Hutan	6 Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi bencana	6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
247	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	4 Reformasi Birokrasi	-
248	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	4 Reformasi Birokrasi	-
249	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	4 Reformasi Birokrasi	-
250	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	4 Reformasi Birokrasi	-
251	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	4 Reformasi Birokrasi	-
252	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	4 Reformasi Birokrasi	-

No.	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
253	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	4 Reformasi Birokrasi	-
254	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Penguatan Inovasi Daerah	4 Reformasi Birokrasi	-
255	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Penguatan Inovasi Daerah	4 Reformasi Birokrasi	-
256	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Penguatan Inovasi Daerah	4 Reformasi Birokrasi	-
257	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Penguatan Inovasi Daerah	4 Reformasi Birokrasi	-
258	Sekretariat Daerah	Program Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	4 Reformasi Birokrasi	-
259	Sekretariat Daerah	Program Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	4 Reformasi Birokrasi	-
260	Sekretariat Daerah	Program Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	4 Reformasi Birokrasi	-
261	Sekretariat Daerah	Program Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	4 Reformasi Birokrasi	-
262	Sekretariat Daerah	Program Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	4 Reformasi Birokrasi	-
263	Sekretariat Daerah	Program Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	4 Reformasi Birokrasi	-
264	Sekretariat Daerah	Program Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	4 Reformasi Birokrasi	-
265	Sekretariat Daerah	Program Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	4 Reformasi Birokrasi	-
266	Sekretariat Daerah	Program Penyelenggaraan Tata	4 Reformasi Birokrasi	-



No.	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
		Kelola Pemerintahan Daerah		
267	Sekretariat Daerah	Program Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	4 Reformasi Birokrasi	-
268	Sekretariat Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Otonomi Daerah	4 Reformasi Birokrasi	-
269	Sekretariat Daerah	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial & keagamaan	5 Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Kebudayaan	-
270	Sekretariat Daerah	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial & keagamaan	5 Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Kebudayaan	-
271	Sekretariat Daerah	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial & keagamaan	5 Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Kebudayaan	-
272	Sekretariat Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Kesejahteraan Rakyat	4 Reformasi Birokrasi	-
273	Sekretariat Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Kesejahteraan Rakyat	4 Reformasi Birokrasi	-
274	Sekretariat Daerah	Program Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Daerah	4 Reformasi Birokrasi	-
275	Sekretariat Daerah	Program Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Daerah	4 Reformasi Birokrasi	-
276	Sekretariat Daerah	Program Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Daerah	4 Reformasi Birokrasi	-
277	Sekretariat Daerah	Program Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Daerah	4 Reformasi Birokrasi	-
278	Sekretariat Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Organisasi	4 Reformasi Birokrasi	-

No.	OPD	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL
279	Sekretariat Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Organisasi	4 Reformasi Birokrasi	-
280	Sekretariat Daerah	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4 Reformasi Birokrasi	7 Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
281	Sekretariat Daerah	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4 Reformasi Birokrasi	7 Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
282	Sekretariat Daerah	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4 Reformasi Birokrasi	7 Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
283	Sekretariat Daerah	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4 Reformasi Birokrasi	7 Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
284	Sekretariat Daerah	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4 Reformasi Birokrasi	7 Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
285	Sekretariat Daerah	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4 Reformasi Birokrasi	7 Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
286	Sekretariat Daerah	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4 Reformasi Birokrasi	7 Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
287	Sekretariat Daerah	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4 Reformasi Birokrasi	7 Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
288	Sekretariat Daerah	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4 Reformasi Birokrasi	7 Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
289	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5 Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya	7 Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

#### 6.4. Program Prioritas Berdasarkan SPM

Tabel VI-4  
Program dan Kegiatan yang Mendukung SPM

SPM	OPD	Program	Kegiatan	Pagu Kegiatan
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengembangan dan Evaluasi Kurikulum serta Beasiswa Pendidikan	2.500.000.000
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Peningkatan Wawasan dan Pengembangan Karakter Peserta Didik SMA	4.000.000.000
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan	45.000.000.000
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengelolaan Karakter Siswa SMK	4.950.000.000
Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rumah Sakit Jiwa	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Upaya Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Napza Rawat Inap dan Rawat Jalan	387.584.700
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Pengembangan Kawasan Permukiman	Pembinaan, penerapan dan pelaporan SPM SPAM, TPA dan IPAL Regional	1.500.000.000
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Pengembangan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan pengembangan sistem sanitasi masyarakat	20.340.000.000

<b>SPM</b>	<b>OPD</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pagu Kegiatan</b>
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Pengembangan Perumahan	Pembinaan, penerapan dan pelaporan SPM perumahan kewenangan provinsi	500.000.000
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Dinas Tenaga Kerja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	760.000.000
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Sekretariat Daerah	Program Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Daerah	Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	300.000.000
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Sekretariat Daerah	Program Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Daerah	Pendampingan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Provinsi Lampung	460.000.000
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Sekretariat Daerah	Program Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Daerah	Pelaksanaan Budaya Kerja Aparatur	190.000.000
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Sekretariat Daerah	Program Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Daerah	Pembinaan Ketatalaksanaan Pemerintah	275.000.000
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Sekretariat Daerah	Program Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Daerah	Pembinaan Implementasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	250.000.000
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Sekretariat Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Organisasi	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Biro Organisasi	75.000.000
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000

## 6.5. Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021

Pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2021, jumlah program yang akan dilaksanakan sebanyak 609 program yang terdiri dari 3.381 kegiatan yang dilaksanakan oleh 48 Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Secara rinci program dan kegiatan tahun 2021 terdapat pada buku II RKPD Provinsi Lampung tahun 2021.

Tabel VI-5  
Program dan Kegiatan berdasarkan OPD Tahun 2021

No.	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24	100	753,667,698,000
2	Dinas Kesehatan	13	58	160,795,053,000
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek	5	10	354,694,971,000
4	Rumah Sakit Jiwa	8	29	33,104,864,000
5	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	13	123	862,335,830,000
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	9	52	162,917,481,250
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	9	54	240,780,900,000
8	Satuan Polisi Pamong Praja	8	41	29,557,914,000
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	25	5,911,583,000
10	Dinas Sosial	8	44	17,734,749,000
11	Dinas Tenaga Kerja	8	45	12,795,300,000
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	39	12,260,622,000
13	Dinas Lingkungan Hidup	9	51	7,093,899,000
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	34	6,065,284,000
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	9	45	10,108,807,000
16	Dinas Perhubungan	10	70	14,187,799,000
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	8	39	14,187,799,000
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11	65	9,458,533,000
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10	93	8,276,216,000
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	9	35	14,197,699,000

No.	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9	57	17,281,698,000
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	10	66	30,740,231,000
23	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	9	51	17,734,749,000
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	15	159	50,248,454,000
25	Dinas Perkebunan	9	62	8,324,220,000
26	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	9	69	12,463,516,000
27	Dinas Kehutanan	9	58	30,740,231,000
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	10	76	8,276,216,000
29	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	13	87	23,834,130,000
30	Inspektorat	7	33	12,414,324,000
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10	62	21,216,250,000
32	Badan Pendapatan Daerah	9	98	29,557,914,000
33	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	10	55	-
34	Badan Kepegawaian Daerah	9	33	10,345,270,000
35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	8	34	17,734,749,000
36	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	13	91	7,218,900,000
37	Badan Penghubung	5	33	10,640,850,000
38	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	29	125	3,874,514,000
39	Biro Kesejahteraan Rakyat	2	125	41,381,080,000
40	Biro Hukum	29	125	3,310,486,000
41	Biro Perekonomian	29	125	5,911,890,000
42	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	29	125	7,093,899,000
43	Biro Organisasi	29	125	3,310,486,000
44	Biro Umum	29	125	38,714,957,000
45	Biro Administrasi Pembangunan	29	125	-
46	Biro Administrasi Pimpinan	29	125	7,093,900,000
47	Sekretariat DPRD	8	51	94,585,326,000
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	8	29	7,093,900,000

## **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Penetapan Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang berorientasi pada hasil dan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah, yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Lampung disajikan pada tabel VII-1 dan Indikator kinerja daerah per urusan penyelenggaraan pemerintah daerah disajikan pada table VII-2.

**TABEL VII- 1. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	REALISASI	TARGET CAPAIAN	
			2019	2020	2021
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	73,1	69	70
2	Tingkat Kasus Kriminalitas Terselesaikan	Persen	71,9	78,85	82,18
3	Indeks Demokrasi Indonesia (TPB)	Indeks	68,67 (2018)	72	73
4	Jumlah warisan budaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian	Jumlah	49	60	70
5	Nilai Reformasi Birokrasi	Angka	B (60,05)	B	B
6	Opini BPK (TPB)	Opini	WTP (2018)	WTP	WTP
7	Nilai SAKIP (TPB)	Nilai	B (63,80)	BB	BB
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	B (108,14)	B	B

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	REALISASI	TARGET CAPAIAN	
			2019	2020	2021
9	Angka Harapan Hidup	Tahun	70.51	72,1	72,19
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.63	12,64	12,71
11	Rata-rata Lama Sekolah (TPB)	Tahun	7.92	7,8	7,9
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,39	91,03	91,26
13	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	63,82	64,24	64,45
14	Jumlah Kab/Kota Layak Anak	Kab/Kota	7 (Lamtim, Balam, Lamsel, Pringsewu, Metro, Way Kanan, Lamteng)	6	9
15	Peringkat pada Event Olahraga Pelajar, Regional (POPWIL) dan Nasional (POPNAS)	Peringkat	11 (POPNAS)	4 (POPWIL)	6 (POPNAS)
16	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPB)	Persen	4,03	3,85	3,76
17	Indeks Konektivitas	Nilai	6,01	6,2	6,33
18	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga (TPB)	Persen	95,57	94	95
19	Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi dengan IP > 2	Persen	30	37	40
20	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses Air Minum layak dan aman (TPB)	Persen	71,65	72,90	74,63
21	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi (TPB)	Persen	67,34	69,31	71,37
22	Persentase penurunan Luasan Kawasan Kumuh (TPB)	Persen	0,53	0,49	0,46
23	Persentase Rumah tidak Layak huni (TPB)	Persen	4,67	3,98	3,25
24	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Persen	1,4	1,63	2,3



NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	REALISASI	TARGET CAPAIAN	
			2019	2020	2021
25	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (TPB)	Nilai	8,3	6,23	6,26
26	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	7,1	7,26	8,2
27	Laju Inflasi	Persen	3,44	3.0 - 3.5	3.0 - 3.5
28	Angka Kemiskinan (TPB)	Persen	12,30	11,1	10,62
29	Indeks Williamson	Indeks	0,24	0,21	0,20
30	PDRB Perkapita (Juta)	Rupiah	42,69	45,54	48,2
31	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	56,62	59,63	61,15
32	Indeks Resiko Bencana (TPB)	Indeks	144,9	144,7	144,3

**TABEL 7- 2 Indikator Kinerja Daerah Per Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI	TARGET	
			2019	2020	2021
<b>A</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>				
1	Pertumbuhan PDRB/LPE (TPB)	Persen	5,27	5.4 -5.7	5.5 - 5.8
2	Indeks Wiliamsom	Indeks	0,24	0,21	0,20
3	Persentase Penduduk Miskin (TPB)	Persen	12,30	11,1	10,62
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,57	70,23	70,86
5	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,57	91,03	91,26
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,03	3,85	3,76
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (TPB)	Indeks	56,62	59,63	61,15
8	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	B (60,05)	B	B
9	Indeks kerukunan umat beragama	Indeks	73,1	69	70

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI	TARGET	
			2019	2020	2021
<b>B</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>				
	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>				
1.1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,63	12,64	12,71
1.2	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	7,92	7,8	7,9
1.3	Angka Partisipasi Sekolah	Persen	71,60	73,43	74,23
1.4	Persentase Peserta Didik Disabilitas yang Bersekolah	Persen	16	20	25
1.5	Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi	Persen	75	80	85
1.6	Persentase Lulusan SMK yang Bekerja	%	47	47,4	49,4
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>				
2.1	Prevalensi Stunting (TPB)	Persen	26,3	25,18	23,08
2.2	Jumlah Kasus Kematian Ibu (TPB)	Kasus	110	130	125
2.3	Jumlah Kasus Kematian Bayi (TPB)	Kasus	506	600	580
2.4	Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru (Success Rate)	Persen	97	90	90
2.5	Prevalensi Wasting	Persen	10,64	9,27	7,99
2.6	% Puskesmas memiliki 5 jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif	Persen	Tidak ada indikator	30	35
2.7	Bapelkes terakreditasi	Persen	100	100	100
2.8	% FKTP Terakreditasi	Persen	99,7	50	55
2.9	RSBNH Terakreditasi	Persen	---	100	100
2.10	Labkesda Terakreditasi	Persen	100	100	100
2.11	Persen Anggaran Kesehatan terhadap APBD	Persen	15,34	10	10
2.12	Penemuan kasus (CDR) TBC	Persen	43%	58	65
2.13	Pelayanan IFKA sesuai standar	Persen	0	100	100
2.14	Persentase Jumlah Pelayanan yang memenuhi standar akreditasi	Persen	27	27	80
2.15	Persentase layanan yang minimal memenuhi 80% dari indikator SPM masing-masing layanan	Persen	77	71	91

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI	TARGET	
			2019	2020	2021
2.16	Klasifikasi Rumah Sakit pada Rumah Sakit Jiwa Daerah	Nilai	80	80	80
2.17	Akreditasi Rumah Rakit SNARS di RSUAM	Nilai	Paripurna SNARS dengan nilai rata pokja 82%	Paripurna SNARS	Paripurna SNARS
2.18	Pelayanan sup spesialis di RSUAM	Jumlah	20	11	14
2.20	Pencapaian SPM di RSUAM	Nilai rata-rata capaian	81	80	82
2.21	Survey kepuasan pasien/penerima layanan di RSUAM	Hasil Survey	82	83	84
<b>3</b>	<b><i>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i></b>				
3.1	Tingkat kemantapan jalan provinsi	Persen	74,41	79	80
3.2	Jumlah Unit Untuk mendukung Terkonektivitasnya Jembatan Non Status di Provinsi Lampung	Unit	5	4	4
3.3	Persentase Penanganan Gangguan Infrastruktur Jalan/Jembatan Akibat Bencana Alam yang Cepat dan Tanggap	Persen	100	100	100
<b>4</b>	<b><i>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</i></b>				
4.1	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak (Persen) (TPB)	Persen	71,65	72,90	74,63
4.2	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak (Persen) (TPB)	Persen	67,34	69,29	72,55
4.3	Jumlah Kawasan Kumuh Provinsi (persen)	Persen	0,53	0,53	0,42
4.4	Rumah Tidak Layak Huni (persen) (TPB)	Persen	4,67	3,9	2,92
<b>5</b>	<b><i>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</i></b>				

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI	TARGET	
			2019	2020	2021
5.1	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	Persen	100	100	100
5.2	Persentase Pelanggaran Trantibum Linmas yang Terselesaikan	Persen	60	100	100
<b>6</b>	<b>Sosial</b>				
6.1	Persentase penurunan PMKS	Persen	5.7	0.25	0.3
6.2	Persentase penyandang disabilitas yang mandiri	Persen	3.16	2.18	2.6
6.3	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar anak	Persen	4.27	20	23
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				
<b>1</b>	<b>Tenaga Kerja</b>				
1.1	Persentase Pencanri Kerja yang Ditempatkan	Persen	65,67	60	65
1.2	Persentase Tenaga Kerja di Perusahaan yang Mendapat Perlindungan Ketenagakerjaan	Persen	65,48	80	82
<b>2</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				
2.1	Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	Kab/Kota	7	6	9
<b>3</b>	<b>Pangan</b>				
3.1	Capaian Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	76,98	76	77
3.2	Stabilisasi harga pangan	Koefisien	4 %	cv ≤ 10%	cv ≤ 10%
<b>4</b>	<b>Pertanahan</b>				
4.1	Penanganan konflik pertanahan	Persen		40	50
<b>5</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>				
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (TPB)	Indeks	59,28	59,63	61,15
5.2	Indeks Kualitas Air	Indeks	72,86	62.53	64.41
5.3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	82,98	86.24	87.11
5.4	Persentase Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	Persen	15	20	40
<b>6</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				
6.1	Persentase penduduk ber KTP	Persen	92.58	100	100

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI	TARGET	
			2019	2020	2021
<b>7</b>	<b><i>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</i></b>				
7.1	Persentase Peningkatan jumlah Desa menggunakan sistem aplikasi pemerintahan desa sebanyak 250 Desa/ Tahun	Desa/ Tahun		2,05	2,05
7.2	Menurunkan jumlah Desa Tertinggal dan meningkatkan status desa mandiri (TPB)	Desa		2,67	2,67
7.3	Pengembangan Ekonomi Desa	Persen		1,88	1,88
<b>8</b>	<b><i>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</i></b>				
8.1	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	0,92	0,87	1,33
8.2	Cakupan KB Aktif (TPB)	Persen	73,44	15,9	18,8
<b>9</b>	<b><i>Perhubungan</i></b>				
9.1	Persentase konektivitas angkutan penumpang dan barang (yang menjadi kewenangan provinsi)	Persen	25	25	25
9.2	Indeks Kepuasan masyarakat pengguna jasa transportasi darat	Indeks	60	70	75
<b>10</b>	<b><i>Komunikasi dan Informatika</i></b>				
10.1	Persentase Integrasi Sistem Informasi antar OPD	Persen	18	19	39
10.2	Persentase peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persen	6,25	10	20
<b>11</b>	<b><i>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</i></b>				
11.1	Persentase Koperasi yang memiliki Kategori Sehat (Koperasi Primer Provinsi)	Persen	17,30	21,76	25
11.2	Persentase SDM Koperasi yang bersertifikat Kompetensi (%)	Persen	9,33	5,03	5,64
11.3	Jumlah Wirausaha Pemula (orang)	Orang	128	150	300
11.4	Jumlah UMKM yang meningkat akses permodalan, pemasaran produk dan kualitas SDM nya (UMKM)	UMKM	735	680	1.365
<b>12</b>	<b><i>Penanaman Modal</i></b>				
12.1	Nilai Investasi	Triliun	4,796	15,691	17,61

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI	TARGET	
			2019	2020	2021
13	Kepemudaan dan Olahraga				
13.1	Persentase pemuda yang berprestasi tingkat Nasional	Persen	125	40	60
13.2	Jumlah atlet pelajar berprestasi	Orang	125	116	150
<b>14</b>	<b>Statistik</b>				
14.1	Persentase pengelolaan statistik sektoral	Persen	65	68	70
<b>15</b>	<b>Persandian</b>				
15.1	Persentase informasi yang diamankan	Persen	18	20	40
<b>16</b>	<b>Kebudayaan</b>				
16.1	Persentase Warisan Seni dan Budaya yang Memenuhi Standar untuk Ditetapkan oleh Kementerian	Persen	49	60	75
<b>17</b>	<b>Perpustakaan</b>				
17.1	Persentase Penduduk gemar membaca	Persen	27	30	35
17.2	Jumlah pengelola Perpustakaan Desa dan Sekolah	Orang	120	160	320
<b>18</b>	<b>Kearsipan</b>				
18.1	Jumlah OPD tertib Arsip Provinsi Lampung	OPD	5	20	20
18.2	Jumlah Dokumen Arsip yang diakuisisi	Dokumen	0	100	200
	<b>Layanan Urusan Pilihan</b>				
<b>1</b>	<b>Pariwisata</b>				
1.1	Jumlah kunjungan Wisatawan	Orang	10.743.918	10.000.000	11.000.000
1.22	Rata-rata jumlah pengeluaran wisatawan (spending of Money)	Rupiah	1.368.250	700.000	750.000
1.3	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	3,61	1,875	2,125
<b>2</b>	<b>Pertanian (Tanaman pangan, Perkebunan dan Peternakan)</b>				
2.1	Jumlah produksi Padi	Ton	2.164.089	4.384.652	4.426.130
2.2	Jumlah Produksi Jagung	Ton	2.374.384	2.473.506	2.498.241
2.3	Jumlah Produksi Kedelai	Ton	12.318	105.844	106.902
2.4	Jumlah Produksi Daging Sapi	Ton	13.679	13.484	13.631

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI	TARGET	
			2019	2020	2021
<b>3</b>	<b><i>Kehutanan</i></b>				
3.1	Persentase penurunan kerusakan hutan	Persen	63,27	63,84	65,11
3.2	Produksi hasil hutan kayu	M3	709,51	726,342	740,869
3.3	Produksi hasil hutan non kayu	Ton	507,32	520,74	531,157
3.4	Peningkatan pengelolaan Hutan tingkat tapak (Unit KPH/Tahun)	Unit	15	17	17
<b>4</b>	<b><i>Energi dan Sumber Daya Mineral</i></b>				
4.1	Pemutakhiran data dan pengembangan potensi PLTMH/PLTS/PLTB/PLTBG/PLTBM dan pemasangan sambungan listrik	Lokasi	1	1	3
4.2	Jumlah LTSHE, PLTS, PJUTS dan pembangkit listrik berbasis EBT yang terawasi	Unit	1000	1500	1000
<b>5</b>	<b><i>Perdagangan</i></b>				
5.1	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	11,7	11,2	11,25
5.2	Nilai Ekspor Non Migas	Milliar US\$	2,929	3,5	3,55
5.3	Andil Inflasi Bahan Makanan	Persen	5,75	0,10 – 0,50	0,10 – 0,51
<b>6</b>	<b><i>Perindustrian</i></b>				
6.1	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (TPB)	Persen	19,85	20,15	20,50
<b>7</b>	<b><i>Transmigrasi</i></b>				
7.1	Jumlah penempatan calon transmigran ke luar Lampung	Orang		25	30
<b>8</b>	<b><i>Kelautan dan Perikanan</i></b>				
8.1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ribu Ton	179,21	188,79	193,51
8.2	Jumlah Produksi Perikanan budidaya	Ribu Ton	173,03	171,746	182,05
8.3	Jumlah benih bermutu	(juta ekor)	15,050.84	10,634.44	11,485.19
8.4	Konsumsi Ikan penduduk	(Kg/Kap/Thn)	32,31	34,54	36,09
8.5	Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	Persen	NA	80	85

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI	TARGET	
			2019	2020	2021
8.6	Jumlah kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau kecil	Ribu Ha	172,14	223,68	341,36
	<b>Penunjang Urusan</b>				
<b>1</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>				
1.1	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Persen	100	100	100
1.2	Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD	Persen	0	75	80
1.3	Persentase keselarasan indikator sasaran Renstra OPD dengan indikator sasaran RPJMD	Persen	100	100	100
1.4	Persentase keselarasan indikator sasaran Renja OPD dengan indikator sasaran RKPD	Persen	100	100	100
1.5	Persentase konsistensi Kegiatan KUA PPAS dengan Kegiatan RKPD	Persen	100	100	100
1.6	Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai	Persen	80	80	85
<b>2</b>	<b>Keuangan</b>				
2.1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP
2.2	Persentase peningkatan PAD	Persen	4,38	2,79	3,95
2.3	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	Persen	98,61	85	86
2.4	Persentase realisasi penerimaan pendapatan non pajak	Persen	84,84	95	96
<b>3</b>	<b>Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>				
3.1	Persentase Penerapan Manajemen ASN Berdasarkan Sistem Merit melalui 2 indikator: - Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan Sesuai Kompetensi; - Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Berbasis Elektronik	Persen	57,5 37,5	60 40	65 45



NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI	TARGET	
			2019	2020	2021
3.2	Jumlah aplikasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Berbasis Elektronik	Aplikasi	5	4	5
3.3	Persentase Aparatur dan Non Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat Managerial	Persen	1,80	3.24	6.24
3.4	Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat Teknis Inti	Persen	0.92	2.88	5.76
3.5	Persentase Aparatur dan Non Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat Teknis Umum dan Fungsional	Persen	2.26	2.88	5.76
<b>4</b>	<b><i>Penelitian dan Pengembangan</i></b>				
4.1	Persentase Rumusan Kebijakan (Policy Paper) yang dimanfaatkan	Persen	75	80	80
<b>5</b>	<b><i>Pengawasan</i></b>				
5.1	Indeks SPIP	Indeks	2,67	3.02	3.04
5.2	Persentase temuan selesai ditindak lanjuti	Persen	80,03	80	82
5.3	Persentase Pengaduan Masyarakat Selesai	Persen	100	80	85
<b>C</b>	<b>ASPEK DAYA SAING</b>				
<b>1</b>	<b><i>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</i></b>				
1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Rp)	Rp	972.040	1.302.458	1.369.671
1.2	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per kapita	Persen	46,56	51,26	51,09
1.3	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	101,97	106,98	107,48
1.4	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	119,21	117,69	118,27
<b>2</b>	<b><i>Fokus Iklim Berinvestasi</i></b>				
2.1	Tingkat Kasus Kriminalitas terselesaikan	Persen	71,9	78,85	82,18
2.2	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perijinan	Persen	B	B	B
<b>3.</b>	<b><i>Fokus Sumber daya Manusia</i></b>				
3.1	Rasio Ketergantungan	Persen		48,6	48,3

## **BAB VIII. PENUTUP**

Salah satu aspek keberhasilan suatu pembangunan ditentukan oleh keberhasilan dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kinerja jajaran pemerintah, dukungan dan peran aktif masyarakat maupun swasta serta aparat Pemerintah Kabupaten/Kota,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2021, adalah Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. RKPD Tahun 2021 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan menjadi landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2021.

Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam merealisasikan program kegiatan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.